

# LAPORAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL EKONOMI KORBAN GEMPA BUMI 2 SEPTEMBER 2009 DI PROVINSI JAWA BARAT



PUSAT STUDI BENCANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

# **LAPORAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL EKONOMI KORBAN GEMPA BUMI 2 SEPTEMBER 2009 DI PROVINSI JAWA BARAT**

Editor:  
Euis Sunarti



**PUSAT STUDI BENCANA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT**

## PRAKATA

Puji syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan serta menyusun laporan kegiatan "Pendampingan Ekonomi Korban Bencana Gempa Bumi 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat". Laporan ini menyajikan hasil kegiatan pendampingan ekonomi yang telah dilakukan di empat kabupaten terpilih. Kegiatan yang telah dilakukan berupa pendampingan ekonomi bagi keluarga korban bencana serta fasilitasi dana stimulan kerja bersama "*Cash For Works*" bagi masyarakat di lingkungan tempat pendampingan. Substansi laporan ini mencakup *existing condition* serta pembangkitan informasi melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan disertai analisis temuannya. Dengan demikian rekomendasi dari temuan dan pembelajaran (*lesson learned*) dari kegiatan ini diharapkan menjadi bahan bagi pengembangan kebijakan dan penguatan program rehabilitasi dan rekonstruksi aspek psikososial ekonomi pasca bencana di Indonesia.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih membutuhkan pengayaan mengingat luasnya dimensi dan ruang lingkup aspek ekonomi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk itu saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak dalam penyempurnaan laporan ini sangat Kami harapkan. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan serta laporan hasilnya dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan kebijakan dan program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, dan umumnya bagi pembangunan sistem nasional penanggulangan bencana di Indonesia.

Bogor, Maret 2011  
Kepala Pusat Studi Bencana  
IPB

Dr. Ir. Euis Sunarti, MSi

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan pendampingan ekonomi korban bencana sebagai bagian program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat ini dapat terselenggara atas kepercayaan, dukungan, partisipasi berbagai pihak. Oleh karenanya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak berikut ini :

- 1 Drs. Udjwalaprana Sigit, MM, M.Si, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat; serta Dra Erna Ermilia, Kasubag Perencanaan Program, BPBD Provinsi Jawa Barat;
- 2 Ir. Bambang Sulistianto, MM. Plt Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional; serta Ir. Siswanto Budi Prasodjo, M.M. sebagai Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan drg Maria Sidang Doki, M. Kes sebagai Direktur Penilaian Kerusakan Kerugian Akibat Bencana;

yang telah memberi kepercayaan, saran dan masukan, juga ikut serta menjaga kualitas kegiatan pendampingan psikososial ekonomi korban pasca bencana. Demikian juga kami mengucapkan termakasih kepada berbagai pihak berikut ini :

1. Para Tenaga Ahli yaitu Ir. H. Agus Siswanto, AAALJ, ME.I, Ir. Dadang Rahmat Nugraha, Ir. Said Fakhruddin, Irni Rahmayani Johan, SP. MM, Yuliansyah, SE yang telah melaksanakan pendampingan dan menyediakan catatan lapang sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan, serta Ir. Nursyamsu Mahyuddin, MS dan Yeka Hendra Fatika, SP sebagai narasumber;
2. Para Tenaga Lapang yang melaksanakan kegiatan keseharian di lapang yaitu: Fitriani, S.IKk, Khoerini Rifki Saputri, S.KPm, Rani Maulanasari, S.Ikk, Rahayu Lestari, S.Si, Aliyatur Ropiah, S.KPm, Siti Sartika Hardiyanti, STP, Gina Ginanjarsari, S.Si, Masikah Maylan Dewi, S.Pi, Asep Saepulmilah, S.KPm, Dedi Mulyana, S.KPm, Galuh Adriani, dan Adi Gunawan, A.Md, dan Junita Sari Syahrini, S.Si; Koordinator lapang, tenaga kesekretariatan, dan tenaga pendukung lainnya yang telah membantu kelancaran kegiatan keseluruhan;
3. Pemerintah Daerah yang telah mendukung dan merespon dengan baik kegiatan pendampingan rehabilitasi rekonstruksi korban bencana aspek psikososial ekonomi, yaitu Pemerintah Daerah Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya; Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Ciamis; Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung; Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, dan BPBD.

Semoga kegiatan pendampingan psikososial ekonomi pasca bencana yang telah dilakukan serta laporan hasil pelaksanaannya dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan sistem nasional bencana di Indonesia.

Bogor, Maret 2010  
Kepala Pusat Studi Bencana IPB

Dr. Ir. Euis Sunarti, MSi

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Gempa bumi pada 2 September 2009 yang mengguncang Provinsi Jawa Barat menyebabkan kerusakan dan kerugian senilai 7.9 triliun, menyebabkan 50,964 keluarga atau sejumlah 196,107 jiwa mengungsi, 264.000 rumah rusak (berat, sedang, dan ringan). Rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana bertujuan untuk mengembalikan kehidupan korban serta lingkungan infrastruktur fisik dan non fisik kembali normal, bahkan membangun kehidupan kembali yang lebih baik (*build back better*). Undang Undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB), PP no 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan PB, dan Peraturan Kepala BNPB No 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengamanatkan pentingnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berdasarkan amanat tersebut, maka pendampingan psikososial ekonomi sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi penting dilakukan.

Kegiatan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi aspek ekonomi korban gempa bumi di Provinsi Jawa Barat meliputi: (1) pendampingan ekonomi bagi keluarga korban bencana, dan (2) fasilitasi dana stimulan kerja bersama "*cash for works*". Kegiatan tersebut dilaksanakan di empat kabupaten (diantaranya tiga kabupaten terparah), dimana dari masing masing kabupaten tersebut dipilih kecamatan terparah sehingga lokasi kegiatan terpilih adalah Kecamatan Banjaran (Kabupaten Bandung), Kecamatan Cisayong (Kabupaten Tasikmalaya), Kecamatan Sindangbarang (Kabupaten Cianjur), dan Kecamatan Banjarsari (Kabupaten Ciamis).

Sasaran program pendampingan psikososial ekonomi adalah keluarga korban gempa bumi yang memiliki industri rumah tangga (IRT). Sebagian besar sasaran program (92.5 %) adalah keluarga yang rumahnya rusak dan atau mengalami kerugian usaha karena gempa bumi. Peserta pendampingan sebanyak 148 IRT dari empat lokasi yaitu 34 IRT (di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis), 35 IRT (Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur), 43 IRT (Di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya), dan 37 IRT (Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung). S sebanyak 102 (70%) merupakan IRT pangan dan 46 unit (30%) merupakan industri non pangan. IRT Keragaan IRT peserta pendampingan adalah: (1) enam dari sepuluh pemilik IRT berpendidikan rendah (lama pendidikan kurang dari 9 tahun), (2) berada dalam rentang usia yang lebar (23-80 tahun, dengan rata-rata 47 tahun); (3) rentang lama menikah yang lebar (0.5 hingga 57 tahun); (4) lebih dari setengahnya memiliki keluarga kecil (57.8%); dan (5) lebih dari setengah pemilik IRT peserta pendampingan adalah laki-laki, demikian juga gambaran di tiga lokasi pendampingan, kecuali di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

Gambaran keadaan ekonomi keluarga pemilik industri rumah tangga binaan menunjukkan beberapa indikator yaitu: (1) hampir setengah (41.5%) keluarga IRT binaan memiliki pendapatan keluarga antara satu sampai dua setengah juta

rupiah; (2) hasil analisis menunjukkan terjadi penurunan rata-rata pendapatan keluarga setelah gempa bumi pada sepertiga (31.5%) IRT binaan karena aktivitas produksi usaha sempat terhenti; (3) terdapat perubahan nilai rumah sasaran pasca gempa bumi; dan (4) data menunjukkan terdapat peningkatan pinjaman sasaran pasca gempa bumi karena kebutuhan industri rumah tangga terhadap modal untuk kembali memulai aktivitas kehidupan termasuk usaha.

Pendampingan dilakukan menggunakan teknik individu, kelompok kecil, dan kelompok besar, dan metode pendampingan mengacu Prahalad (2005) yaitu *known problems known solutions, known problems known unique solutions*. Kegiatan pendampingan meliputi pelatihan industri rumah tangga, klinik bisnis, pendampingan lapang, dan pendampingan khusus. Ruang lingkup pendampingan ekonomi meliputi kewirausahaan, permodalan usaha dan pembukuan sederhana, manajemen usaha, teknik produksi yaitu cara produksi makanan yang baik (CPPB), proposal usaha, pemasaran, kepuasan pelanggan, dan manajemen keuangan keluarga. Klinik usaha dilakukan secara individual atau kelompok kecil sebagai upaya lebih lanjut untuk mengelaborasi masalah individual atau kelompok serta solusinya. Hasil elaborasi permasalahan IRT menjadi salah satu dasar pengalokasian dana pendampingan.

IRT peserta pendampingan termasuk usaha berskala mikro, yang sebagian besar masih dihadapkan pada berbagai kendala usaha dan memerlukan bantuan pihak lain dalam pengembangan usahanya. Masalah usaha yang dirasakan oleh IRT pangan untuk menjalankan usaha dengan skalanya adalah modal dan sanitasi (masing-masing oleh 54 dan 57%), alat kerja, izin, dan teknik produksi (masing-masing oleh seperempat IRT), manajemen (38%), pemasaran (28%), sedangkan masalah harga hanya dirasakan oleh sedikit IRT (6%). Sedangkan masalah yang dihadapi IRT non pangan sedikit berbeda yaitu pemasaran, teknik produksi, dan sanitasi (masing-masing oleh seperlima IRT), alat kerja (53%) dan modal (63%), izin (33%) dan manajemen (37%). Enam dari sepuluh IRT pemasarannya melalui tengkopak, di sekitar desa dan kecamatan, dan delapan dari sepuluh IRT memiliki pemasaran sampai tingkat kabupaten. Terdapat 54 IRT pangan dan 67 persen IRT non pangan yang menyatakan bahwa modal merupakan masalah yang dihadapi untuk menjalankan usaha dengan kapasitas saat ini, namun persen yang lebih besar (83% IRT pangan dan non pangan) yang menyatakan bahwa modal merupakan kendala untuk mengembangkan usaha.

Lembaga pembinaan usaha yang ada di lokasi pendampingan adalah PNPM Perdesaan, KUBe, LPDB KUMKM. Hanya 9 IRT (6%) yang mengaku memperoleh pembinaan incidental dari lembaga pembinaan usaha yang ada di lokasi pendampingan. Terdapat 15 jenis lembaga permodalan di empat lokasi pendampingan, dan hanya 44 dari 148 IRT (30%) yang pernah memperoleh modal usaha dengan rata-rata pinjaman sebesar 3.7 juta rupiah untuk IRT pangan dan sebesar 1.2 juta rupiah untuk IRT non pangan. Sebagian besar IRT peserta pendampingan tidak mengetahui KUR (kredit usaha rakyat).

Aspek pembinaan CPPB meliputi (1) lingkungan dan lokasi usaha (2) bangunan dan fasilitas unit usaha, (3) fasilitas dan kegiatan sanitasi (4) sistem pengendalian hama (5) hygiene karyawan, (6) pengendalian proses, meliputi bahan baku, bahan tambahan pangan (btp), diagram alir proses, kemasan, label, dan penyimpanan (7) manajemen pengawasan, dan (8) pencatatan dan dokumentasi. Pendampingan CPPB mendapat sambutan positif dan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya serta pemahaman akan manfaat penerapan CPPB. Penerapan CPPB oleh IRT merupakan prasyarat jaminan keamanan pangan yang dapat membantu meyakinkan konsumen sehingga memperluas pasar. Keberhasilan pembinaan CPPB ditunjukkan oleh adanya perubahan positif yaitu peningkatan jumlah IRT yang; (1) memiliki tempat usaha terkategori baik (dari 30 menjadi 37%), menjaga kebersihan tempat usaha (dari 45% menjadi 77%), menata tempat usaha yang baik ( dari 68% jadi 87%), menerapkan sanitasi ruangan yang baik (62% menjadi 83%), perbaikan kemasan dan pencantuman label (dari 12,7% jadi 43,7%). Pembinaan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik perlu dilakukan secara persuasif terhadap IRT, khususnya bila menyangkut hal yang berkaitan langsung dengan biaya produksi, misalnya terhadap penggunaan sisa minyak goreng yang secara berulang terus menerus kerap dilakukan dengan alasan penghematan, meskipun dapat mengurangi mutu produk pangan yang baik.

Penetapan besaran dana bantuan setiap IRT didasarkan atas berbagai pertimbangan, dan dimanfaatkan secara efektif untuk berbagai keperluan sesuai kebutuhan dan permasalahan usaha yang dihadapi, disertai pemantauan penggunaannya. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku (oleh 78%), pembelian alat produksi (oleh 55%), pembelian bahan penolong (oleh 30%), perbaikan tempat usaha (oleh 28%), pembelian bahan kemasan (9%), dan alat kemasan (5%). Pemanfaatan bantuan dana dan pendampingan yang diterima oleh IRT memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas produksi. Sebagian besar IRT (134 orang atau 91% IRT) merasakan adanya peningkatan kapasitas produksi, dengan besaran peningkatan produktivitas yang bervariasi mulai dari 20 persen sampai lebih dari 100 persen.

Pendekatan, teknik, dan metode pendampingan yang dirancang dan diimplementasikan sesuai kondisi dan kebutuhan, menyebabkan pendampingan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat dapat mendorong perubahan dan perbaikan di berbagai aspek usaha. Terjadi peningkatan produktivitas usaha rata-rata sebesar 52 persen. Setelah pendampingan, seluruh IRT peserta memiliki company profile, sebagian besar memiliki struktur organisasi dan prosedur kerja. Terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 10 persen (49 orang, dari 488 orang menjadi 537 orang). Terdapat perluasan pemasaran baik karena terjadi pertukaran informasi, perluasan jejaring, dan perluasan pemasaran melalui website yang dirancang khusus untuk mempromosikan produk IRT peserta pendampingan pada setiap lokasi. Terkait perizinan, terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya izin usaha, namun masih belum menjadi prioritas. Pendampingan berhasil memfasilitasi kepemilikan HO/SITU (10 IRT),

SIUP (8 IRT), TDP (10 IRT), TDI (1 IRT), NPWP (8 IRT), dan PIRT (8 IRT). Penambahan perizinan berasal dari tiga lokasi pendampingan kecuali Kabupaten Cianjur.

Kegiatan pendampingan berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha (khususnya CPPB), meningkatkan semangat usaha, mendorong terciptanya pertukaran informasi, semangat dan jalinan kerjasama usaha dari IRT peserta pendampingan. Pembinaan pasca bencana terhadap industri rumah tangga sebagai salah satu pelaku ekonomi dapat memberikan *multiplier effect* terhadap kegiatan ekonomi lainnya di lingkungan IRT berada. Walau dalam skala terbatas, melalui pemulihan dan peningkatan kegiatan produksi IRT mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong tumbuhnya perdagangan dari aktivitas pengadaan bahan baku dan penjualan hasil produksi, serta peningkatan pendapatan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di wilayah IRT peserta pendampingan berada. Program pendampingan memberi manfaat lain yaitu peningkatan kesadaran kepada para pejabat kecamatan untuk lebih mengenal masyarakat dan kegiatan ekonominya, mendalami kedudukan pelaku usaha, struktur ekonomi masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat lainnya adalah terbangunnya komunikasi dan hubungan kerja antara pelaku usaha di tingkat kecamatan. Sementara itu program ini member manfaat berupa peningkatan pengetahuan kepada BPBD Kabupaten mengenai keluasan dan kedalaman program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, bukan hanya aspek fisik tapi meliputi aspek psikososial ekonomi.

Program pemberian dana stimulan kerja bersama bagi korban bencana bertujuan untuk menyediakan kesempatan perolehan pendapatan melalui kerja bersama sekaligus memperbaiki sanitasi lingkungan serta sarana umum dan social yang sangat dibutuhkan masyarakat luas, sekaligus memelihara dan meningkatkan nilai kebersamaan dan kegotong royongan diantara para korban bencana. Penetapan kegiatan dilakukan secara partisipatif bersama dengan wakil masyarakat dan pemerintah desa/kecamatan dengan menggunakan berbagai pertimbangan yang disepakati bersama. Kegiatan ini berhasil memperbaiki 15 sarana umum dan perbaikan sanitasi lingkungan di empat lokasi kegiatan pendampingan, melibatkan banyak warga masyarakat serta membangkitkan kontribusi secara sukarela dari masyarakat yang nilainya berkisar antara 10 sampai 51 persen dari dana stimulan. Sosialisasi tujuan dan manfaat kegiatan, kejelasan dan ketegasan tujuan serta batasan kegiatan yang dapat difasilitasi, namun disertai fleksibilitas dalam implementasinya merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Selain itu pelibatan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, aparat desa, dan masyarakat serta turut serta meningkatkan efektivitas kegiatan. Kegiatan ini diakui masyarakat sangat bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada masyarakat luas bahwa perbaikan sanitasi lingkungan dan perbaikan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat, dapat dilakukan dengan gotong royong dan tidak membutuhkan dana besar. Pembelajaran dari kegiatan ini adalah bahwa dalam situasi tertentu masyarakat

perlu distimulasi untuk bangkit dan melakukan kerja bersama memperbaiki lingkungannya. Kegiatan stimulasi kerja bersama mampu menjadi media perekat dan pembangkitan kembali nilai gotong royong di tengah masyarakat, jika dilakukan dengan metode yang tepat.

Agar hasil pendampingan dapat berkelanjutan, dilakukan beberapa upaya terminasi program pendampingan yang dimungkinkan yaitu melalui cara: (1) pelibatan pemuda sebagai peserta pendampingan, (2) wahana pemasaran melalui web site serta pihak yang mengelola selama tiga tahun setelah kegiatan pendampingan, (3) pengembangan jejaring usaha, (4) penyerahan informasi company profile IRT peserta pendampingan kepada lembaga keuangan di lokasi pendampingan agar bisa ditindaklanjuti, (5) penyerahan laporan kegiatan khususnya company profile IRT peserta pendampingan kepada pejabat dan BPBD setempat untuk dapat digunakan dalam perencanaan program pembangunan regular.

Kegiatan ini merekomendasikan beberapa hal penting yaitu: (1) pengayaan model pendampingan ekonomi menurut potensi sumberdaya sesuai keragaman wilayah (oleh pelaksanaan kegiatan pendampingan), (2) pendampingan pemulihan ekonomi sebagai paket program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, (3) penguatan system penanggulangan bencana baik pada tingkat nasional (oleh BNPB), provinsi (BPBD Provinsi), dan kabupaten (BPBD Kabupaten/Kota), (4) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM BPBD kabupaten, (5) perluasan keterlibatan stakeholder PB lainnya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, (6) pembinaan dan pendampingan lanjutan kepada IRT peserta pendampingan di empat lokasi kegiatan (oleh BPBD Kabupaten, Pihak Kecamatan, dan Instansi lainnya yang terkait).

## DAFTAR ISI

	Hal
PRAKATA.....	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR KOTAK.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Keluaran.....	3
1.4. Lokasi Kegiatan.....	3
1.5. Pelaksanaan Kegiatan.....	4
II. KERANGKA FIKIR.....	13
2.1. Landasan Regulasi.....	13
2.2. Hasil Analisis Kerusakan dan Kerugian.....	16
2.3. Landasan Teoritis dan Strategis.....	20
2.4. Landasan Historis.....	22
2.5. Dasar Pemikiran Penetapan Program.....	29
III. Keragaan Wilayah dan Sasaran.....	31
3.1. Keragaan Wilayah.....	31
3.2. Keragaan Sosial Ekonomi IRT Peserta Pendampingan.....	35
3.3. IRT peserta pendampingan yang Menderita Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana.....	46
IV. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN.....	49
4.1. Pendekatan, Teknik, dan Metode Pendampingan.....	49
4.2. Program Pendampingan Umum.....	50
4.3. Program Pendampingan Khusus.....	53
V. ASPEK KELEMBAGAAN PEMBINAAN USAHA DAN PERMODALAN.....	61
5.1. Kelembagaan Pembinaan Usaha.....	61
5.2. Gambaran Kelembagaan Pembinaan Usaha Industri Rumah Tangga Binaan (IRT peserta pendampingan).....	68
5.3. Mekanisme Permodalan Usaha.....	70
VI. CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA.....	75
6.1. Jumlah dan Keragaman Industri Rumah Tangga Binaan.....	61
6.2. Penerapan CPPB bagi Industri Rumah Tangga Pangan.....	77
6.3. Kondisi Penerapan CPPB pada IRT peserta pendampingan.....	79
VII. MANAGEMEN USAHA.....	133
7.1. Definisi Industri, Pelaku Usaha, dan Manajemen Usaha.....	133
7.2. Masalah Usaha yang Dihadapi IRT Binaan.....	134
7.3. Hasil Pendampingan Aspek-aspek Industri Rumah Tangga (IRT)	135
7.4. Pemasaran.....	143

VIII. STIMULAN KERJA BERSAMA.....	151
8.1. Stimulan Kerja Bersama.....	151
IX. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	161
9.1. Kesimpulan.....	161
9.2. Rekomendasi.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	169
LAMPIRAN.....	171

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1	Indikator capaian rehabilitasi aspek sosial dan ekonomi.....	16
2	Pangsa Jawa Barat dalam perekonomian nasional.....	16
3	Sebaran persentase tenaga kerja menurut lapangan usaha di Daerah Bencana Gempa 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat.....	18
4	Sebaran Pemilik IRT (%) menurut jenis kelamin dan usia.....	35
5	Sebaran pemilik IRT (%) menurut jenjang pendidikan terakhir.....	36
6	Sebaran IRT (%) menurut usia suami dan istri.....	36
7	Sebaran IRT (%) menurut lama menikah dan besar keluarga.....	37
8	Sebaran IRT (%) menurut perubahan pekerjaan dan penurunan pendapatan.....	37
9	Sebaran IRT (%) menurut pola nafkah ganda anggota keluarga.....	38
10	Sebaran IRT (%) menurut pendapatan total keluarga.....	39
11	Sebaran IRT (%) menurut perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan, dan penggunaan kelebihan pendapatan.....	39
12	Sebaran IRT (%) menurut rata-rata kelebihan pendapatan dan nilai tertinggi kelebihan pendapatan.....	40
13	Sebaran IRT (%) menurut kepemilikan anak usia sekolah.....	41
14	Sebaran IRT (%) menurut pemenuhan luas rumah per kapita.....	41
15	Sebaran IRT (%) menurut masalah kebutuhan pokok yang dihadapi.....	42
16	Sebaran IRT (%) menurut masalah kebutuhan pokok yang dihadapi.....	43
17	Sebaran IRT (%) menurut perilaku coping dalam pemenuhan pangan.....	44
18	Sebaran IRT (%) menurut praktek pengelolaan keuangan keluarga.....	45
19	Sebaran IRT (%) menurut status rusak/tidak rusak rumah setelah gempa nilai rumah sebelum.....	46
20	Sebaran IRT (%) menurut nilai nominal kerusakan setelah bencana.....	47
21	Sebaran IRT (%) menurut nilai nominal kerugian setelah bencana.....	48
22	Sebaran IRT (%) menurut jenis kerusakan yang dialami.....	48
23	Sebaran IRT (%) menurut Status Rusak dan Rugi Setelah Bencana (n=148).....	48
24	Materi pelatihan budidaya dan pemasaran gurame.....	57
25	Lembaga pembinaan usaha yang ada di lokasi pendampingan.....	68
26	Sebaran kelembagaan permodalan yang terdapat di lokasi IRT peserta pendampingan.....	71
27	Sebaran IRT pangan (%) menurut nilai pinjaman di empat lokasi kegiatan.....	73
28	Sebaran IRT Non Pangan (%) menurut nilai pinjaman di empat lokasi kegiatan.....	73
29	Pengetahuan IRT peserta pendampingan (%) terkait program Kredit Usaha Rakyat.....	73
30	Sebaran IRT peserta pendampingan di lokasi pendampingan.....	75

31	Sebaran IRT pangan peserta pendampingan menurut jenis industri di lokasi pendampingan.....	76
32	Sebaran IRT non pangan peserta pendampingan menurut jenis industri di lokasi pendampingan.....	77
33	Sebaran IRT (%) menurut kondisi bangunan dan fasilitas tempat usaha IRT peserta pendampingan sebelum dan setelah pembinaan.....	82
34	Sebaran IRT (%) menurut keberadaan dan kondisi fasilitas sanitasi sebelum dan setelah pembinaan.....	93
35	Sebaran IRT (%) menurut kondisi dan kegiatan sanitasi sebelum dan setelah pembinaan.....	94
36	Daftar standar mutu produk (SNI) yang dapat digunakan sebagai patokan dalam kegiatan produksi IRT secara nasional.....	100
37	Syarat mutu Kerupuk Kulit menurut SNI 01-4308-1996.....	100
38	Syarat mutu Kerupuk Beras menurut SNI 01-4307-1996.....	101
39	Syarat mutu Keripik pisang SNI 01-4315-1996.....	102
40	Syarat mutu Keripik singkong SNI 01-4305-1996.....	102
41	Syarat mutu Tahu Menurut SNI 01-3142-1998.....	103
42	Syarat mutu Tempe Kedelai Menurut SNI 01-3144-20009.....	103
43	Syarat mutu Telur Asin Menurut SNI 01-4277-1996.....	104
44	Syarat mutu Sale Pisang SNI 01-4319-1996.....	104
45	Syarat mutu Dodol Sirsak (SNI 01-4297-1996).....	105
46	Syarat mutu Wajik (SNI 01-4272-1996).....	106
47	Syarat mutu Yoghurt (SNI 2981-2009).....	107
48	Syarat mutu Gula Kelapa (SNI.013743.1995).....	108
49	Syarat mutu Keripik Jamur Kancing (SNI 01-4303-1996 ).....	108
50	Ciri Khas Kultivar Jamur Merang Segar.....	109
51	Klasifikasi jamur merang berdasarkan ukuran bobot.....	109
52	Persyaratan mutu Jamur Merang Segar (SNI 01-6945-2003).....	109
53	Spesifikasi persyaratan mutu Beras (SNI NO 6128 2008).....	110
54	Spesifikasi dan syarat mutu Kopra (SNI 01-3946-1995).....	111
55	Pengendalian bahan baku yang dilakukan IRT peserta pendampingan produk pangan.....	112
56	Pengendalian bahan baku yang dilakukan IRT peserta pendampingan produk non pangan.....	113
57	Bahan pengawet yang diizinkan penggunaannya pada makanan.....	117
58	Daftar zat pewarna alami yang diizinkan di Indonesia.....	118
59	Daftar zat pewarna sintesis yang diizinkan di Indonesia.....	118
60	Bahan tambahan makanan ( <i>flour treatment agent</i> ) yang diijinkan.....	120
61	Bahan pengemulsi, pemantap, pengental yang diizinkan penggunaannya pada bahan pangan.....	120
62	Bahan peneras yang diizinkan penggunaannya pada bahan pangan.....	121
63	Beberapa bahan antioksidan sebagai tambahan makanan yang diizinkan.....	121
64	Pengatur keasamaan yang diizinkan penggunaannya pada bahan pangan.....	122
65	Bahan anti kempal yang diizinkan penggunaannya pada bahan	

	pangan.....	122
66	Beberapa penggunaan bahan tambahan pangan oleh IRT di empat lokasi.....	125
67	Sebaran IRT menurut penggunaan kemasan primer dan sekunder.....	126
68	Sebaran IRT menurut penggunaan label pada produk sebelum dan setelah pembinaan.....	127
69	Karakteristik limbah cair industri tempe.....	129
70	Kandungan pencemar limbah tahu.....	129
71	Aspek-aspek perusahaan dalam industri rumah tangga.....	133
72	Sebaran IRT produk pangan(%) menurut masalah yang dihadapi empat lokasi (n=102).....	134
73	Sebaran IRT non pangan (%) menurut masalah yang dihadapi di empat lokasi (n=46).....	135
74	Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.....	136
75	Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.....	137
76	Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.....	138
77	Sebaran IRT peserta pendampingan menurut aspek organisasi dan manajemen sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.....	139
78	Sebaran IRT peserta pendampingan menurut aspek organisasi dan manajemen sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.....	140
79	Sebaran IRT peserta pendampingan menurut aspek organisasi dan manajemen sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.....	140
80	Sebaran IRT menurut aspek organisasi dan manajemen IRT peserta pendampingan Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.....	141
81	Sebaran IRT menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.....	142
82	Sebaran IRT menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.....	142
83	Sebaran IRT menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.....	143
84	Sebaran IRT menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.....	143
85	Sebaran IRT (%) menurut wilayah pemasaran.....	144
86	Sebaran IRT (%) menurut promosi yang dilakukan sebelum pendampingan.....	145
87	Sebaran IRT berdasarkan pemanfaatan internet untuk kegiatan pemasaran (sebelum dan setelah pembinaan).....	146

88	Sebaran IRT menurut HPP (harga pokok produksi, ribu rupiah) produk pangan.....	147
89	Sebaran IRT menurut HPP (harga pokok produksi dalam ribu rupiah) produk non pangan.....	147
90	Sebaran IRT pangan (%) menurut keuntungan (dalam ribu rupiah).....	148
91	Sebaran IRT non pangan (%) menurut keuntungan (dalam ribu rupiah).....	148
92	Sebaran IRT (%) menurut peningkatan produktivitas (N=134).....	149
93	Sebaran IRT (%) menurut kendala yang dihadapi.....	149
94	Perhitungan kebutuhan Hari Orang Kerja (HOK) dalam CFW.....	156
95	Besarnya sumbangan dana stimulan dan masyarakat dalam Kegiatan CFW di lokasi kegiatan.....	158

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
1	Pelaksanaan kegiatan.....	4
2	Jumlah pelaku sektor informal (orang) terkena dampak Bencana Gempa 2 September 2009.....	19
3	Upaya Pemulihan Mata Pencaharian dan Berkelanjutan (Benson & Twigg, 2007).....	21
4	Kajian “Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Strategi Pengurangan Kemiskinan” (Benson & Twigg, 2007).....	21
5	Rangkuman masalah psikososial ekonomi dampak pasca bencana.....	28
6	Kerangka fikir <i>livelihood recovery</i> Korban Bencana Tasikmalaya (Sunarti, 2010).....	29
7	Kerangka berfikir penetapan Program Pemulihan Mata Pencaharian Korban Gempa Bumi di Provinsi Jawa Barat.....	30
8	Jumlah IRT pangan dan non pangan peserta pendampingan.....	75
9	Jumlah IRT peserta pendampingan pangan dan non pangan menurut lokasi.....	78
10	Kondisi lokasi dan bangunan tempat pengolahan pada IRT.....	80
11	Kondisi bangunan dan fasilitas pengolahan pada IRT (sebelum pembinaan).....	83
12	Kondisi bangunan dan fasilitas pengolahan pada IRT (setelah pembinaan).....	83
13	Penataan ruang produksi, pembersihan ruangan dan perbaikan pencahayaan pada IRT peserta pendampingan (Ibu Neneng, Produksi Kue), Desa Kiang Roke Kec. Banjaran, Kab. Bandung.....	85
14	Penataan dan perbaikan lantai dan bangunan ruang produksi, penutupan/pemindahan saluran limbah pada IRT peserta pendampingan (Wawan Riswandi, Produksi Keripik), Desa Banjaranwetan Kec. Banjaran, Kab. Bandung.....	86
15	Perbaikan lantai (semen/keramik) dan bangunan ruang produksi, penataan layout tempat peralatan (IRT Bapak Lili Ruhli, Produksi Gula Aren, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya).....	87
16	Perbaikan lantai dan atap ruang produksi, pemberian sekat pemisah dan pemindahan kandang ternak (usaha Bapak Nandang, Produksi Opak kelontong, Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya).....	88
17	Perbaikan lantai (semen/keramik) dan bangunan ruang produksi, Penataan layout tempat peralatan (Bapak Ade Wawan, Produksi Gulakelapa, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis.....	89
18	Perbaikan kebersihan dan pembuatan penampungan limbah cair sebelum dialirkan ke badan air (Bapak Ujang Rusli, Tahu Tempe, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis).....	90
19	Perbaikan lantai (semen/keramik) dan bangunan ruang produksi, penataan	

	layout tempat peralatan (Bapak Enggan, Produksi Gula Aren, Desa. Ciakar, Kec. Sindangbarang, Kab. Cianjur).....	91
20	Perbaiki lantai dan penataan ruang produksi (IRT Bapak Kosim, Produksi Keripik, Kec. Sindangbarang, Kab. Cianjur).....	92
21	Perubahan tempat produksi pembuatan gula (Pak Lili Ruhli) sebelum dan setelah pembinaan.....	94
22	Contoh perubahan bangunan tempat usaha sebelum dan setelah pembinaan.....	95
23	Merapikan dan membersihkan tempat usaha pembuatan Keripik Pisang di Kec. Sindang Barang Cianjur, Jawa Barat (sebelum dan setelah pembinaan).....	95
24	Merapikan dan membersihkan tempat usaha pembuatan Gula Merah (sanitasi dan pencahayaan) di Kec. Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (sebelum dan setelah pembinaan).....	96
25	Diperlukan peningkatan kesadaran kebersihan dan menerapkan pola kerja yang baik bagi pekerja pada IRT pangan.....	97
26	Pengenalan pakaian dan perlengkapan kerja bagi pekerja pada IRT pangan.....	98
27	Bagian Beras.....	110
28	Penggantian alat produksi IRT yang rusak atau sudah usang.....	114
29	Pengadaan alat kemasan (hand sealer) bagi IRT pangan.....	114
30	Hindari penggunaan minyak tengik dan perlu pembiasaan memperbaharui minyak penggorengan pada IRT pangan.....	115
31	Penggunaan alat spiner salah satu cara mengurangi minyak dalam produk.....	115
32	Perbaiki tempat penjemuran dengan menggunakan rak penjemuran.....	116
33	Penggunaan pewarna makanan pada IRT pangan.....	118
34	Contoh penggunaan bahan pengawet pada industri rumah tangga.....	124
35	Contoh kemasan dan label pada IRT.....	127
36	Contoh kondisi penyimpanan bahan baku pada IRT.....	128

## DAFTAR KOTAK

No	Uraian	Hal
1	Moto dan Misi IRT peserta pendampingan (Bapak Asep, Kue Errysa).....	139
2	Motto dan Misi IRT peserta pendampingan (Tiram Ruswandi, Keripik Jamur).....	140
3	Visi, Misi dan Motto IRT peserta pendampingan (Ali Sadikin, Lantak).....	141

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
1 Daftar Industri Rumah Tangga dan Peta Sebaran Kerja.....	171
1.1 Daftar IRT peserta pendampingan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.....	171
1.2 Peta Sebaran IRT peserta pendampingan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.....	172
1.3 Daftar IRT peserta pendampingan Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.....	173
1.4 Peta Sebaran IRT Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.....	174
1.5 Daftar IRT peserta pendampingan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.....	175
1.6 Peta Sebaran IRT peserta pendampingan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.....	176
1.7 Daftar IRT peserta pendampingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.....	177
1.8 Peta Sebaran IRT peserta pendampingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.....	178
2 Sebaran IRT peserta pendampingan produk pangan dan non pangan menurut jenis industri di empat kecamatan/kabupaten.....	179
2.1 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut jenis industri di empat kecamatan/kabupaten.....	179
2.2 Sebaran IRT peserta pendampingan produk non pangan menurut jenis industri di empat kecamatan/kabupaten.....	180
3 Neraca bahan IRT peserta pendampingan produk pangan dan non pangan menurut jenis industri di empat kecamatan/kabupaten.....	181
3.1 Neraca Bahan Produksi Beras.....	182
3.2 Neraca Bahan Produksi Gurame.....	183
3.3 Neraca Bahan Produksi Chrispy Jamur.....	184
3.4 Neraca Bahan Produksi Cincau.....	185
3.5 Neraca Bahan Produksi Coklat Kue.....	186
3.6 Neraca Bahan Produksi Cucur.....	187
3.7 Neraca Bahan Produksi Dodol.....	188
3.8 Neraca Bahan Produksi Aneka Kue/Donat.....	189
3.9 Neraca Bahan Produksi Gula Aren.....	190
3.10 Neraca Bahan Produksi Jamur Tiram.....	191
3.11 Neraca Bahan Produksi Kolontong.....	192
3.12 Neraca Bahan Produksi Keripik Singkong/Pisang.....	193
3.13 Neraca Bahan Produksi Kerupuk.....	194
3.14 Neraca Bahan Produksi Kerupuk Kulit.....	195
3.15 Neraca Bahan Produksi Kerupuk Mie.....	196
3.16 Neraca Bahan Produksi Kerupuk Rangginang.....	197
3.17 Neraca Bahan Produksi Kopro.....	198

3.18 Neraca Bahan Produksi Keremes Ubi.....	199
3.19 Neraca Bahan Produksi Kue Kering.....	200
3.20 Neraca Bahan Produksi Kutu Mayang.....	201
3.21 Neraca Bahan Produksi Minyak Kelapa.....	202
3.22 Neraca Bahan Produksi Molen Sale Pisang.....	203
3.23 Neraca Bahan Produksi Jarangking/Impun.....	204
3.24 Neraca Bahan Produksi Opak.....	205
3.25 Neraca Bahan Produksi Sale Pisang.....	206
3.26 Neraca Bahan Produksi Rempyek.....	207
3.27 Neraca Bahan Produksi Roti Rancis.....	208
3.28 Neraca Bahan Produksi Sirkam.....	209
3.29 Neraca Bahan Produksi Sistik.....	210
3.30 Neraca Bahan Produksi Tahu.....	211
3.31 Neraca Bahan Produksi Tape Singkong.....	212
3.32 Neraca Bahan Produksi Telur Asin.....	213
3.33 Neraca Bahan Produksi Tempe.....	214
3.34 Neraca Bahan Produksi Teng-teng.....	215
3.35 Neraca Bahan Produksi Wajit Ketan.....	216
3.36 Neraca Bahan Produksi Yoghurt.....	217
3.37 Neraca Bahan Produksi Anyaman Bambu.....	218
3.38 Neraca Bahan Produksi Arang.....	219
3.39 Neraca Bahan Produksi Aseupan.....	220
3.40 Neraca Bahan Produksi Batu Bata Merah.....	221
3.41 Neraca Bahan Produksi Besek.....	222
3.42 Neraca Bahan Produksi Bilik.....	223
3.43 Neraca Bahan Produksi Boboko Besar dan Kecil.....	224
3.44 Neraca Bahan Produksi Boneka.....	225
3.45 Neraca Bahan Produksi Bongsang Ayam.....	226
3.46 Neraca Bahan Produksi Gypsum.....	227
3.47 Neraca Bahan Produksi Gitar.....	228
3.48 Neraca Bahan Produksi Jaket.....	229
3.49 Neraca Bahan Produksi Kancing dari Batok Kelapa.....	230
3.50 Neraca Bahan Produksi Kerajinan Lidi.....	231
3.51 Neraca Bahan Produksi Keramba Ayam.....	232
3.52 Neraca Bahan Produksi Kertas Daur Ulang.....	233
3.53 Neraca Bahan Produksi Meubel.....	234
3.54 Neraca Bahan Produksi Lukisan.....	235
3.55 Neraca Bahan Produksi Lukisan Kaca.....	236
3.56 Neraca Bahan Produksi Piring, Boboko.....	237
3.57 Neraca Bahan Produksi Sangkar Burung.....	238
3.58 Neraca Bahan Produksi Tampah.....	239
3.59 Neraca Bahan Produksi Tanaman Hias.....	240
3.60 Neraca Bahan Produksi Tas.....	241
3.61 Neraca Bahan Produksi Topi.....	242

4	Pelatihan dan pendampingan di empat kabupaten.....	243
4.1	Pelatihan dan pendampingan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.....	243
4.2	Pelatihan dan pendampingan di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur.....	244
4.3	Pelatihan dan pendampingan di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.....	245
4.4	Pelatihan dan pendampingan di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.....	246
4.5	Uji preferensi konsumen di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.....	247
4.6	Uji preferensi konsumen di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.....	247
5	Modul pendampingan tenaga lapang.....	249
6	Kegiatan pendampingan di empat kabupaten.....	263
6.1	Kegiatan pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.....	263
6.2	Kegiatan pendampingan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.....	263
6.3	Kegiatan pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.....	264
6.4	Kegiatan pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.....	264
7	Pelatihan pembibitan jamur.....	265
8	Hasil studi banding pelatihan pembibitan gurami.....	267
9	Web di empat kabupaten.....	269
9.1	Web IRT peserta pendampingan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.....	269
9.2	Web IRT peserta pendampingan di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur.....	270
9.3	Web IRT peserta pendampingan di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.....	271
9.4	Web IRT peserta pendampingan di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.....	272
10	CFW (Cash for Work) di empat Kabupaten.....	273
10.1	CFW (Cash for Work) di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.....	273
10.2	CFW (Cash for Work) di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur.....	279
10.3	CFW (Cash for Work) di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.....	281
10.4	CFW (Cash for Work) di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.....	286

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Gempa bumi 7.3 SR di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 September 2009 mendatangkan kerusakan dan kerugian yang diperkirakan minimal mencapai 7,899 triliun rupiah. Dari total nilai perkiraan kerusakan dan kerugian tersebut 806.7 milyar rupiah (10,21%) adalah perkiraan kerusakan dan kerugian aset pemerintah dan 7,092 triliun rupiah (89,79%) adalah perkiraan kerusakan dan kerugian aset masyarakat dan non-pemerintah. Dampak sektoral gempa bumi dirasakan pada -sektor: perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor. Dari sebaran komponen kerusakan dan kerugian, nilai perkiraan kerusakan dan kerugian terbesar adalah pada sektor perumahan, yaitu 6,969 triliun rupiah (88,22%), disusul oleh sektor sosial sebesar 755 miliar rupiah (9,56%), dan sektor pemerintahan 156.21 miliar rupiah (1,98%)<sup>1</sup>. Besarnya nilai kerusakan rumah (88.22%) berkaitan dengan besarnya jumlah rumah rusak karena bencana yaitu sebanyak 264.030 unit. Hal tersebut menunjukkan banyaknya jumlah keluarga yang terganggu ekonominya karena membutuhkan perbaikan rumah.

Bencana selain menyebabkan kerusakan fisik seperti rumah, bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya, juga menyebabkan kerugian ekonomi dan gangguan psikososial. Kehilangan dan perubahan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat merupakan sumber tekanan yang dapat menyebabkan stress dan depresi. Sementara itu dukungan sosial sebagai salah satu coping strategy yang tersedia pada kondisi normal, berubah seiring bencana. Oleh karenanya selain rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang bersifat fisik, dipandang penting melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi aspek sosial ekonomi pasca bencana. Kegiatan rehabilitasi rekonstruksi aspek sosial ekonomi diperlukan oleh korban bencana yang mengalami perubahan kehidupan terutama penurunan dukungan sosial. Hal tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan para korban bencana.

Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan untuk membantu memulihkan bahkan meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat korban bencana. Pemberdayaan ekonomi korban bencana yaitu pemulihan mata pencaharian (*livelihood recovery*) pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki usaha, terutama usaha yang memiliki banyak pekerja atau buruh, sehingga gangguan terhadap usahanya menyebabkan gangguan terhadap mata pencaharian para pekerja atau buruh. Sebagaimana menurut Sunarti (2010) bahwa bencana yang menyebabkan terganggunya mata pencaharian para buruh lepas (buruh tani atau buruh pabrik harian) berdampak terhadap ekonomi keluarga, mengingat kelompok tersebut pada umumnya bercirikan strategi ekonomi keluarga hanya sebatas bertahan hidup "*survival economic strategy*", bahkan terkadang bersifat "tutup lubang gali lubang" (Sunarti, 2009).

Pendampingan atau pemberdayaan ekonomi terutama ditujukan kepada korban yang memiliki usaha dengan skala mikro dan kecil. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ditujukan pula kepada pemilik usaha menengah dengan jenis bantuan dan pendampingan yang berbeda, contohnya adalah bantuan pendampingan untuk memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan atau perbankan. Pola gangguan bencana terhadap pelaku sektor informal bervariasi terkait jenis usaha. Gangguan bersumber dari terputusnya kegiatan usaha baik karena menjadi korban bencana maupun karena penurunan kegiatan usaha. Hal tersebut menyebabkan penurunan atau kehilangan modal usaha karena digunakan biaya hidup sehari-hari, atau biaya pengobatan karena gangguan kesehatan.

Pemberdayaan ekonomi korban bencana dari status sosial ekonomi rendah sangat diperlukan mengingat kelompok tersebut tergolong kelompok yang memiliki kerentanan sosial ekonomi yang tinggi. Keragaan sosial ekonomi korban bencana penerima program pendampingan psikososial yang telah dilakukan di empat kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya) menunjukkan: (1) hampir setengah contoh berpendapatan keluarga yang rendah yaitu antara 200.000 sampai 500.000 rupiah per bulan. Hasil analisis menunjukkan terjadi penurunan rata-rata pendapatan keluarga setelah gempa bumi; (2) terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran keluarga setelah bencana yang disebabkan peningkatan pengeluaran untuk mengganti perabotan dan perbaikan rumah yang rusak; (3) terdapat penurunan rata-rata aset yang dimiliki keluarga setelah bencana; dan (4) data sekilas menunjukkan terdapat penurunan jumlah contoh yang memiliki hutang antara sebelum dan sesudah bencana, namun sebetulnya dari 100 persen contoh yang berhutang sebelum bencana, sekitar 10-16 persen memang menjadi tidak berhutang, namun sekitar empat kali lipatnya (36%-46%) justru memiliki hutang dengan jumlah yang meningkat dan menjual aset keluarga.

Hasil pendampingan psikososial korban bencana yang dilakukan di empat kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 menunjukkan pentingnya dan mendesaknya pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut diantaranya ditunjukkan oleh strategi koping yang dilakukan oleh korban bencana berupa penurunan kualitas pangan ketika menghadapi gangguan ekonomi keluarga akibat bencana. Besarnya gangguan ekonomi keluarga akibat bencana menyebabkan keluarga menurunkan konsumsi pangan baik menurunkan kualitas (dilakukan oleh 50% sasaran program) maupun kuantitas pangan (mengurangi porsi makan dilakukan oleh 18% sasaran program).

Sesuai dengan struktur aktivitas ekonomi masyarakat korban bencana, subsektor yang diduga memiliki nilai kerugian relatif besar dibandingkan dengan subsektor lainnya adalah subsektor jasa, industri rumah tangga (IRT) pangan, IRT non pangan, aneka kerajinan dan perdagangan pangan. Di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat, potensi kerugian akibat bencana mempengaruhi subsektor

jasa, industri non pangan, aneka kerajinan dan industri rumah tangga (IRT) pangan. Contoh berbagai industri pangan dan non pangan skala rumah tangga dan mikro yang menyebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat diantaranya adalah : minyak atsiri, dan batu bata (Sub sektor industri non pangan), dodol, wajit, kerupuk, tahu, tempe, berbagai macam keripik, rangginang, opak, dll (IRT pangan) dan berbagai macam aneka kerajinan. Kelompok usaha lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah sektor informal.

Hasil analisis sintesis kebutuhan pengembangan program dan aksi prioritas bagi pemulihan dan atau perbaikan mata pencaharian korban bencana dari kegiatan pendampingan psikososial yang telah dilakukan pada Tahun 2010 di empat kabupaten di Provinsi Jawa Barat menunjukkan pentingnya dilakukan pemulihan mata pencaharian penduduk korban bencana yang bertumpu kepada tiga sector utama yaitu pertanian, industry perdesaan, dan jasa serta perdagangan. Prasyarat pendukung untuk keberhasilan program dan aksi prioritas tersebut berua keberadaan dan kinerja lembaga dan jasa keuangan, infrastruktur perdesaan dan industry UKM, dan kelembagaan masyarakat. Namun demikian untuk berhasilnya semua program dan aksi prioritas juga efektivitas prasyarat pendukung, akan sangat tergantung kepada pemenuhan prasyarat dasarnya yaitu kualitas sumberdaya manusia meliputi paketpengetahuan, keterampilan, juga adanya transfer inovasi dan teknologi. Beberapa program pemulihan ekonomi di bidang pertanian adalah diferensiasi produk primer pertanian dan penetapan komoditas unggulan berbasis ekonomi wilayah. Sementara di bidang jasa dan perdagangan berupa pengembangan jasa umum yang berfungsi meningkatkan fasilitas kehidupan masyarakat serta Membangun pasar dan memperluas jasa perdagangan produk industri hasil pertanian, terutama yang menjadi komoditas unggulan wilayah. Sementara itu beberapa program pemulihan ekonomi di bidang industri perdesaan adalah pemberian nilai tambah pada produk pertanian serta memilih komoditas yang mudah diolah, memilih teknologi yang mudah diadopsi dan memilih lokasi *pilot project*. Mengingat terbatasnya lingkup kegiatan, maka pendampingan ekonomi korban gempa bumi di provinsi Jawa Barat difokuskan pada sektor industri, yaitu industry rumah tangga, baik industry pangan maupun non pangan.

## 1.2 Tujuan

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bantuan stimulasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada korban bencana gempa bumi di bidang ekonomi, adapun tujuan khususnya adalah:

1. Memfasilitasi pendampingan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat untuk memulihkan, menguatkan, dan memperluas pola nafkah sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
2. Memfasilitasi dana stimulant kerja bersama “*cash for works*” untuk perbaikan sanitasi lingkungan dan perbaikan sarana ekonomi, social, dan sarana umum.

### **1.3 Keluaran**

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan rehabilitasi rekonstruksi aspek psikososial ekonomi adalah:

1. Rumusan rekomendasi dari hasil pendampingan ekonomi keluarga dan masyarakat korban bencana
2. Perbaikan sanitasi lingkungan dan sarana kegiatan social, ekonomi, dan sarana umum masyarakat
3. Tersusunnya laporan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi aspek psikososial ekonomi korban bencana gempa di Provinsi Jabar.

### **1.4 Lokasi Kegiatan**

Kegiatan rehabilitasi rekonstruksi aspek psikososial ekonomi dilaksanakan di empat wilayah terkena gempa bumi yaitu di :

1. Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
2. Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur
3. Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
4. Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

### **1.5 Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan meliputi rangkaian kegiatan persiapan, pelaksanaan pendampingan di lapang, diseminasi hasil dan pelaporan seperti disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Pelaksanaan kegiatan

### **1.5.1 Persiapan**

1. Penyusunan Instrumen, Protokol Lapangan, dan Indikator Keberhasilan  
Instrumen pendampingan disusun sesuai data dan informasi yang harus dikumpulkan terkait persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Instrumen persiapan terkait penentuan lokasi dan calon peserta pendampingan. Instrumen pelaksanaan pelaksanaan diawali oleh informasi mengenai potensi wilayah, kelembagaan dasar, untuk mengumpulkan seluruh informasi IRT yang dibutuhkan untuk mengetahui dan menimbang pendampingan apa atau fasilitasi apa yang paling dibutuhkan IRT. Rencana kerja dan sistematika kerja di

lapangan disusun sedemikian rupa berbentuk protokol lapang sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Rencana kerja disusun mulai dari saat perencanaan kegiatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan program pendampingan dibuat untuk dapat mengukur manfaat dan keberhasilan program pendampingan, dengan melihat kondisi IRT sebelum pendampingan, proses pendampingan dan post pendampingan.

## 2. Penjajakan dan Penetapan Lokasi

Penjajakan calon lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan kriteria yaitu 1) wilayah yang memiliki jumlah rumah rusak berat dan sedang yang tinggi 2) belum memperoleh kegiatan sejenis, 3) penerima program adalah korban bencana baik korban langsung yang rumahnya rusak yang terdaftar dalam daftar penerima dana bantuan perbaikan rumah, maupun korban tidak langsung yang usahanya terganggu karena kejadian bencana, atau industry rumah tangga yang produknnya memiliki ciri khas dan prospek pengembangan yang baik, 4) mata pencaharian korban bencana yang memungkinkan dilakukan pendampingan (wilayah yang sebagian besar korban bencananya bukan buruh tani atau buruh pabrik), 5) terdapat prasyarat pendukung yang dapat melanjutkan program pendampingan pemulihan mata pencaharian korban bencana, 6) terdapat kebutuhan perbaikan sanitasi lingkungan dan perbaikan sarana ekonomi, social, dan sarana umum yang dapat dilakukan melalui kegiatan kerja bersama.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 12 calon lokasi pelaksanaan pendampingan ekonomi yaitu tiga kecamatan di masing-masing kabupaten. Setelah dilakukan penjajakan dan penilaian daya dukung lokasi terkait kegiatan pendampingan ekonomi keluarga korban bencana, maka ditetapkan empat kecamatan di empat kabupaten sebagai lokasi kegiatan yaitu :

- Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
- Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
- Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
- Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Berikut ini gambaran kerusakan rumah akibat gempa 2 September 2009 di lokasi kegiatan:

- Di Kecamatan Banjaran terdapat 3.236 Rumah rusak berat dan ringan (1.164 Rusak berat) dan 2.072 (rumah rusak ringan)
- Di Kecamatan Banjarsari terdapat 4.435 rumah rusak terdiri atas 1.315 rumah rusak berat, 1.870 rumah rusak sedang, dan 1.250 rumah rusak ringan
- Di Kecamatan Cisayong terdapat 3.690 rumah rusak terdiri atas 1.015 rusak berat dan 2.675 rusak ringan
- Di Kecamatan Sindangbarang terdapat 4.340 rumah rusak terdiri atas 1.736 rusak berat, 1.560 rusak sedang, dan 1.044 rusak ringan

Lembaga keuangan yang terdapat di empat lokasi kegiatan adalah BRI, BPRS Amanah Robaniyah, BMT (di Kecamatan Banjaran), BMT Khonsa (di Kecamatan

Banjarsari), Kopontren Fatiyah (di Kecamatan Cisayong), dan BRI, BPRS, dan BMT (di Kecamatan Sindangbarang).

### 3. Rekrutmen dan Pelatihan Tenaga madya Pendampingan

Perekrutan tenaga madya dilakukan untuk memperoleh sumberdaya yang berkompeten sesuai yang prasyarat untuk suksesnya tugas tenaga lapang. Prasyarat tenaga madya sebagai pendamping lapang adalah sarjana yang telah lulus mata kuliah pengantar kewirausahaan, kewirausahaan, dan manajemen. Hasil seleksi menetapkan 12 tenaga madya yang di tempatkan di empat lokasi (3 orang tenaga madya per lokasi).

Pelatihan Tenaga Madya pendamping kegiatan lapang dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai filosofi dasar, tujuan, ruang lingkup, output dan target yang diinginkan dicapai dari kegiatan pendampingan ekonomi bagi korban bencana. Untuk mendukung keberhasilan tugasnya, dilakukan pelatihan bagi tenaga lapang dengan materi :

- Kewirausahaan yang meliputi: 1) prospek dan tantangan kewirausahaan, 2) rahasia pengusaha sukses, dan 3) karakteristik pengusaha
- Profil Industri yang meliputi: 1) sejarah industri, 2) pengertian dan jenis industry (berdasarkan tempat bahan baku, dan berdasarkan pemilihan lokasi), 3) pengertian dan lingkup usaha mikro, kecil dan menengah, 4) bentuk usaha, 5) klasifikasi industri menurut ISIC, 6) aspek legal usaha, organisasi dan manajemen, pemasaran, produksi, keuangan 7) identifikasi industri.
- Manajemen bisnis untuk pemberdayaan masyarakat yang meliputi: 1) prinsip dalam pembuatan produk, 2) kualitas produk, 3) dimensi kualitas, 4) harga , 5) kemasan, 6) pengembangan produk, 7) memahami kebutuhan, konsumsi, dan perilaku konsumen di Indonesia, 8) trend pasar, 9) model pasar, 10) proses pemberdayaan
- Manajemen produksi yang meliputi: 1) pengertian manajemen, 2) manajemen produksi, 3) fungsi-fungsi manajemen, 4) faktor produksi, 5) pengertian manajemen operasi, 6) fungsi perencanaan: keputusan penting dalam manajemen produksi, langkah perancangan sistem produksi, penentuan kapasitas, pemilihan lokasi, 7) fungsi pengorganisasian: manajemen SDM, pengoperasian sistem produksi, siklus penjadwalan, 8) fungsi pengawasan dan pengendalian: pengendalian mutu produksi
- Kelembagaan dan permodalan bisnis yang meliputi: 1) tujuan rehabilitasi ekonomi, 2) pemberdayaan ekonomi desa, 3) fakta dan hasil yang ingin dicapai, 4) peran pendamping bisnis, 5) kelembagaan bisnis di desa, 6) proses pengesahan hukum koperasi, 7) aspek penting dalam penyusunan akta perkoperasian, 8) ketentuan KUR, 9) BUMDES, 10) contoh-contoh materi pelatihan
- Pemasaran dalam praktek yang meliputi: 1) fungsi, inventarisasi, dan riset pasar, 2) strategi pemasaran, 3) bauran pemasaran, 4) segmentasi pasar, 5)

evolusi manajemen pemasaran, 6) siklus pasar, 7) produk, 8) persaingan, 9) promosi online.

- Panduan praktis menyusun proposal bisnis yang meliputi: 1) tujuan pembuatan proposal bisnis, 2) prinsip, 3) isi proposal bisnis.

Untuk menguatkan keterampilan dan memantapkan penguasaan materi yang disampaikan pada pelatihan, dilakukan coaching tambahan bagi tenaga lapang untuk membahas indikator pencapaian keberhasilan pendampingan, mekanisme dan teknis pengumpulan data dan informasi di lapang, serta keterampilan sosial berhubungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

#### 4. Konsolidasi dan Koordinasi antar Tenaga Ahli

Konsolidasi dan koordinasi antar tenaga ahli dilakukan untuk menyamakan filosofi, tujuan, target dan hasil yang diharapkan dari kegiatan. Demikian pula dilakukan pembagian lingkup substansi yang menjadi tugas dari masing-masing tim ahli, pembagian tugas penyusunan bahan-bahan pelatihan tenaga lapang, materi coaching tenaga lapang, materi pelatihan bagi industri rumah tangga, jadwal kunjungan lapang, dan sistem evaluasi.

#### 5. Sosialisasi, Konsolidasi, dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Sosialisasi, konsolidasi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan sejak melakukan peninjauan sampai kemudian mengkomunikasikan keputusan penetapan lokasi kegiatan, dan seterusnya dalam setiap kegiatan, terutama berhubungan dengan penetapan IRT calon binaan dan dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan. Koordinasi terutama dilakukan dengan pihak kecamatan tempat kegiatan dilaksanakan. Sementara itu komunikasi dengan BPBD tingkat kabupaten atau perwakilannya di lapang, dilakukan sambil berjalannya persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

#### 6. Penelusuran Data dan Informasi Keragaan Calon IRT peserta pendampingan

Data utama yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan ekonomi korban bencana adalah data korban bencana yang memiliki usaha dengan skala mikro dan kecil. Ketika peninjauan dilakukan, informasi mengenai jumlah dan keragaman jenis usaha yang dimiliki korban bencana (langsung maupun tidak langsung) didapatkan dari pihak kecamatan. Namun demikian, ketika data tersebut mulai dielaborasi untuk proses verifikasi dalam rangka penetapan IRT yang akan dibina, maka masalah yang dihadapi adalah menyangkut validitas data dan informasi mengenai industri rumah tangga atau industri skala mikro dan kecil yang diperlukan sebagai rujukan awal dalam pemilihan IRT calon binaan. Data yang tersedia dalam monografi kecamatan sudah kurang akurat karena masih menggunakan data tiga atau empat tahun sebelumnya yang sudah pasti mengalami perubahan. Selain itu terdapat kecamatan yang tidak memiliki data mengenai hal tersebut karena berbagai alasan, contohnya monografi dan

data korban bencana di kecamatan Sindangbarang yang tidak tersedia di kantor kecamatan.

Hasil penelusuran data dan informasi industri rumah tangga sasaran kegiatan, diperoleh jumlah dan keragaman jenis industri rumah tangga peserta pendampingan ekonomi pasca gempa 2 September 2009 di lokasi kegiatan yaitu (data IRT di empat lokasi terlampir pada Lampiran 1 dan Lampiran 3):

- Di Kabupaten Ciamis Kecamatan Banjarsari: Peserta Pendampingan berjumlah 34 industri rumah tangga berasal dari 9 Desa yaitu Desa Sukasari, Desa Sindangkasih, Desa Cikaso, Desa Ratawangi, Desa Ciherang, Desa Cibadak, Desa Kawasen, Desa Sindangrasa, dan Desa Sindangsari;
- Di Kabupaten Cianjur Kecamatan Sindangbarang: Peserta pendampingan berjumlah 35 industri rumah tangga, berasal dari 6 Desa yaitu Desa Saganten, Desa Girimukti, Desa Muaracikadu, Desa Sirnagalih, Desa Telagasari, dan Desa Jayagiri;
- Di Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Cisayong: Peserta pendampingan berjumlah 43 industri rumah tangga, berasal dari 10 desa yaitu Desa Sukaraharja, Desa Nusawangi, Desa Jatihurip, Desa Mekarwangi, Desa Cisayong, Desa Sukasetia, Desa Sukamukti, Desa Sukasukur, Desa Sukajadi, dan Desa Cikadu;
- Di Kabupaten Bandung Kecamatan Banjaran; Peserta pendampingan berjumlah 37 industri rumah tangga dari 6 desa yaitu Desa Banjaranwetan, Desa Kiangroke, Desa Neglasari, Desa Tarajusari, Desa Ciapus, dan Desa Margahurip.

### **1.5.2 Tahapan Kegiatan dalam Pendampingan**

1. Elaborasi Gambaran Umum Wilayah Lokasi Kegiatan. Pada tahap ini dikumpulkan informasi mengenai keragaan wilayah kecamatan yang menjadi lokasi pendampingan. Namun demikian terdapat beberapa informasi penting yang diharapkan dapat diperoleh di kantor kecamatan, namun tidak tersedia karena berbagai hal. Ringkasan keragaan wilayah yang menjadi lokasi kegiatan diuraikan pada Bab Keragaan Wilayah.
2. Pengumpulan data dasar industri Rumah Tangga Binaan. Data dasar industri rumah tangga calon binaan dikumpulkan untuk memperoleh gambaran atau keragaan IRT sebagai dasar pendampingan yang akan dilaksanakan.
3. Penyusunan *Company Profile* dan Neraca Bahan produksi. Berdasarkan data dasar yang telah dikumpulkan, kemudian disusun company profile singkat IRT serta neraca bahan produksi menurut jenis usahanya. Neraca bahan IRT peserta pendampingan di empat lokasi kegiatan terlampir pada lampiran 3.

Neraca bahan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan pengalokasian dana pendampingan ekonomi pasca bencana.

4. **Penilaian Kebutuhan Pendampingan.** Walaupun sudah bisa diduga sebelumnya permasalahan umum yang dihadapi industry rumah tangga serta ruang lingkup pendampingan atau pembinaan yang diduga dibutuhkan, namun penilaian kebutuhan pendampingan dapat ditemukan setelah memperoleh data dasar (termasuk masalah yang dihadapi) dan neraca bahan produksi. Kondisi tersebut diperbandingkan dengan kondisi/situasi yang sebaiknya dimiliki oleh industry rumah tangga agar usahanya bisa survive bahkan berkembang di era persaingan usaha sekarang ini.
5. **Penilaian Kebutuhan Dana Pendampingan.** Penilaian kebutuhan dana pendampingan didasarkan pada neraca bahan produksi, kondisi fasilitas dan alat usaha, serta upaya pengembangan yang dapat terjangkau dari batasan dana yang tersedia dari kegiatan pendampingan.
6. **Pelatihan Industri Rumah Tangga.** Pertemuan IRT peserta binaan sekaligus pelatihan kepada pemilik industri rumah tangga dilaksanakan di empat lokasi kegiatan. Pertemuan di empat lokasi kegiatan dilaksanakan di aula kecamatan dan diikuti oleh IRT calon binaan dengan antusias. Selain pelatihan yang bersifat massal kepada seluruh peserta, dilakukan juga klinik usaha yang mengelaborasi lebih lanjut manajemen usaha, teknik produksi, dan permasalahan-permasalahan spesifik yang dihadapi masing-masing IRT.

Topik pelatihan umum diberikan kepada semua IRT, sedangkan topik khusus diberikan kepada IRT yang relevan. Topik pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, manajemen produksi secara umum diberikan kepada seluruh peserta IRT. Topik GMP (Good manufacturing practices) hanya diberikan kepada IRT Pangan. Sementara itu topik proposal bisnis hanya diberikan kepada IRT yang sedang membutuhkan atau dipandang akan membutuhkannya. Demikian halnya dengan topik pembukuan usaha.

7. **Klinik Usaha.** Klinik usaha dilakukan secara individual atau kelompok kecil yang memiliki jenis usaha yang sama juga kesamaan keragaan usahanya. Klinik usaha merupakan upaya lebih lanjut untuk mengelaborasi masalah individual atau kelompok serta solusinya.
8. **Pengalokasian Dana Pendampingan.** Salah satu bentuk pendampingan adalah berupa fasilitasi bantuan modal usaha. Kebutuhan bantuan modal usaha dan besaran dana yang dibutuhkan diperoleh dari hasil analisis usaha baik sesuai skala usaha yang dilakukan IRT saat pendampingan maupun untuk pengembangan usaha sesuai prospek pemasarannya. Bantuan modal usaha dapat dilakukan baik dalam satu tahap maupun dilakukan dalam beberapa tahap sesuai perkembangan hasil pendampingan. Dana pendampingan ekonomi pada dasarnya diperuntukkan : 1) penambahan modal usaha, 2) perbaikan alat produksi, 3) perbaikan sanitasi produksi dan

hygiene pekerja, 4) pengembangan lainnya seperti studi banding, pelatihan spesifik, dan atau dalam rangka membangun networking usaha.

Pengalokasian dana pendampingan dilakukan sebelum pertemuan atau pelatihan pertama, namun diklarifikasi dan verifikasi ulang saat pendistribusian dana tersebut saat klinik usaha. Dana pendampingan yang diberikan tidak sama jumlahnya tergantung jenis usaha, masalah yang dihadapi serta solusi yang dibutuhkan, serta kebutuhan untuk pengembangan produk yang memiliki prospek pemasaran yang lebih luas.

9. Identifikasi dan Perbaiki Kondisi Sanitasi Produksi dan Hygiene Pekerja. Hasil identifikasi kondisi sanitasi produksi dan hygiene karyawan menunjukkan masih kurangnya dan masih buruknya sanitasi produksi dan hygiene pekerja. Beberapa contoh sanitasi yang tidak memadai diantaranya adalah pembuangan limbah pengolahan yang tidak memadai, tempat produksi yang kotor, tempat produksi pangan berdekatan dengan kandang ternak, peralatan yang korot, penggunaan lap yang kotor, tempat usaha yang gelap dan pengap, dll. Sementara itu para pekerja (termasuk pemiliknya) bekerja tanpa memenuhi hygiene yang baik contohnya adalah tidak menutup kepala, tidak menggunakan pakaian saat bekerja, belum diterapkannya praktek cuci tangan saat produksi makanan. Identifikasi kondisi sanitasi dilanjutkan dengan perbaikan sanitasi produksi dan praktek hygiene usaha sebagai tindak lanjut penggunaan dana pendampingan dan pembinaan lanjutan. Pendampingan dilakukan dengan mengacu kepada rencana kerja perbaikan tempat dan sarana usaha yang dilakukan oleh setiap IRT yang dibuat saat klinik bisnis.
10. Identifikasi Kebutuhan Izin dan Penelusuran Persyaratannya. Hasil pendataan menunjukkan hanya sedikit IRT yang memiliki perizinan usaha (SITU, HO, SIUPP). Terlebih lagi izin kesehatan PIRT. Hal tersebut dikarenakan mikronya skala usaha dan terbatasnya atau masih lokalnya pemasaran hasil usaha. Dari hasil penelusuran pengurusan izin diperoleh informasi besaran dana yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha rata-rata sebesar 1.3 juta rupiah, sedangkan pengurusan izin PIRT sebesar 500.000 rupiah. Proses dalam pengurusan izin PIRT yang cukup menyita waktu selain jadwal pemeriksaan juga adalah keharusan mengikuti dua kali pelatihan (seminar) dimana para IRT harus meninggalkan usahanya, di lain pihak pelaksanaan pengurusan menunggu sampai jumlah tertentu yang menyebabkan jadwal pelatihan belum dapat dipastikan, sehingga membutuhkan sikap pro aktif IRT untuk mengikuti proses tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan beberapa IRT yang menginginkan PIRT mengalami kesulitan.
11. Pendampingan di Tempat Usaha. Pendampingan dan pembinaan langsung di tempat usaha para IRT dilakukan dengan kunjungan harian secara bergiliran oleh para tenaga lapang. Dilakukan pembagian tugas serta pembagian IRT

peserta pendampingan agar para tenaga lapang dapat mendalami kinerja para IRT, permasalahan dan kebutuhan, serta proses pendampingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yakni dilakukan modifikasi metode pendampingan sesuai dengan karakteristik peserta di masing-masing lokasi. Topik pendampingan adalah topik/materi yang telah direncanakan, mengelaborasi mengapa penting memperhatikan topik tersebut, apa saja ruang lingkup yang perlu diperhatikan, apa konsekuensi jika pengusaha rumah tangga tidak memperhatikan hal tersebut, serta apa manfaat yang akan diperoleh jika pengusaha rumah tangga memperhatikan atau mengimplementasikan hal tersebut. Pendampingan manajemen usaha yang dilakukan adalah pendampingan pembuatan pembukuan, membanu pengurusan perizinan usaha (bagi yang memerlukan), dan membantu pembuatan proposal usaha (bagi yang membutuhkan).

12. Pendampingan teknik produksi. Pendampingan teknik produksi dilakukan sesuai permasalahan dan kebutuhan yang teridentifikasi dari setiap jenis usaha. Pendampingan teknis produksi dikelompokkan untuk dua jenis usaha yaitu usaha pangan dan non pangan. Pendampingan teknis produksi pangan menitikberatkan kepada CPMB (Cara Produksi Makanan yang Baik), sedangkan pendampingan teknis produksi usaha non pangan lebih menitikberatkan kepada efisiensi kerja dan sentuhan disain produk (jika dibutuhkan pasar).
13. Pelatihan Spesifik. Pelatihan spesifik dilakukan sesuai kebutuhan pengembangan serta fasilitasi yang dimungkinkan, diantaranya adalah pelatihan pembibitan jamur dan pelatihan pengelolaan usaha gurame. Pelatihan pembibitan jamur bekerjasama dengan PT Dafa yang memiliki usaha kultur jaringan, dilaksanakan di PT Dafa (Bogor), kepada IRT jamur tiram dan merang, serta mengikutsertakan pemuda yang diharapkan dapat mengembangkan usaha tersebut di kemudian hari. Sedangkan studi banding dan pelatihan budidaya gurame diberikan kepada IRT di tasikmalaya yang mengalami masalah usaha gurame. Studi banding dan pelatihan pembibitan dan pembesaran gurami bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang berlokasi di Desa Cibeuteng Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
14. Fasilitasi pembuatan alat promosi usaha bersama. Selain bantuan modal usaha, kegiatan pendampingan ekonomi korban bencana adalah dengan memfasilitasi pembuatan *website* sebagai alat promosi bersama bagi IRT yang berada dalam satu kecamatan. Walaupun tidak semua usaha di lokasi kegiatan membutuhkan alat bantu promosi bersama, tapi biasanya ada sebagian dari jenis usaha yang dapat didorong untuk memperoleh pasar yang lebih luas, yang dapat dipermudah promosinya melalui jaringan internet yang dapat melintas batas administrasi wilayah dan geografis.

15. Fasilitasi Dana Stimulasi Kerja Bersama (Cash For Works). Kegiatan CFW didesain sebagai stimulus bagi korban gempa dalam perbaikan fasilitas umum. Kegiatan CFW dilakukan di empat kabupaten yakni Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.5.3 Pembuatan Laporan dan Pelaksanaan Seminar**

Tahap akhir dalam rangkaian kegiatan adalah penyusunan laporan dan diseminasi hasil kegiatan melalui seminar hasil. Diseminasi hasil kegiatan selain dilakukan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan, juga untuk memperoleh saran dan masukan dalam memaknai hasil dan temuan, sekaligus membangkitkan, melengkapi, dan atau menguatkan rekomendasi hasil temuan.

## II KERANGKA FIKIR

Bab ini menguraikan kerangka fikir rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana khususnya program pendampingan psikososial ekonomi korban gempa bumi 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat. Bab ini meliputi landasan regulasi, hasil penilaian kerusakan kerugian bencana gempa 2 September 2009 di Jawa Barat, landasan teoritis dan strategis, landasan historis, dan dasar pemikiran penetapan program.

### 2.1. Landasan Regulasi

Landasan regulasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana program pendampingan psikososial ekonomi korban gempa bumi 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat, meliputi UU No 24 Tahun 2007, PP No 21 Tahun 2008, dan Perka BNPB No 11 Tahun 2007. Landasan regulasi membahas tentang definisi bencana, pengertian korban bencana, tanggung jawab pemerintah terkait penanggulangan bencana.

#### 2.1.1 UU No 24 Tahun 2007

UU No 24 Tahun 2007 pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Bab 1 Ketentuan Umum memuat pemaparan terkait tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pasal 6 yang meliputi: (a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana

secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; (d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; (e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; (f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan (g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi: (a) sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; (b) kelestarian lingkungan hidup; (c) kemanfaatan dan efektivitas; dan (d) lingkup luas wilayah (Bab VII Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 31). Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi: (a) rehabilitasi; dan (b) rekonstruksi (Pasal 57). Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: (a) perbaikan lingkungan daerah bencana; (b) perbaikan prasarana dan sarana umum; (c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (d) pemulihan sosial psikologis; (e) pelayanan kesehatan; (f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (g) pemulihan sosial ekonomi budaya; (i) pemulihan keamanan dan ketertiban; (j) pemulihan fungsi pemerintahan; dan (k) pemulihan fungsi pelayanan publik (Pasal 58). Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: (a) pembangunan kembali prasarana dan sarana; (b) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; (c) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; (d) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; (e) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; (f) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; (g) peningkatan fungsi pelayanan publik; dan (h) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat (Pasal 59).

### **2.1.2. PP No 21 Tahun 2008**

PP No 21 Tahun 2008 memuat ketentuan umum penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana (Pasal 1 bagian 11). Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: (a) perbaikan lingkungan daerah bencana; (b) perbaikan prasarana dan sarana umum; (c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (d) pemulihan sosial psikologis; (e) pelayanan kesehatan; (f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (g) pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; (h) pemulihan keamanan dan ketertiban; (i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan (j) pemulihan fungsi pelayanan publik (Pasal 56 ayat 1).

Perbaikan lingkungan dan prasarana dan sarana umum daerah bencana juga merupakan salah satu hal yang diatur ketentuannya dalam PP. Pasal 61 Ayat 1 memaparkan perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Pasal 64 Ayat 1 memaparkan perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dengan memperhatikan dokumen rencana teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan (Pasal 65 Ayat 2).

Perbaikan pasca bencana juga mencakup aspek pemulihan sosial ekonomi budaya seperti dipaparkan pada Pasal 71, yaitu pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui: (a) layanan advokasi dan konseling; (b) bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan (c) pelatihan. Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Selain pada UU No 24 Tahun 2008 Pasal 59, ketentuan cakupan kegiatan rekonstruksi juga dipaparkan pada PP Pasal 75 ayat 1, yaitu rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: (a) pembangunan kembali prasarana dan sarana; (b) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; (c) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; (d) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; (e) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; (f) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; (g) peningkatan fungsi pelayanan publik; atau (h) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 1 huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 80 Ayat 1). Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 1 huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui upaya: (a) pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana; (b) pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan (c) mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD (Pasal 88 Ayat 1-3).

### 2.1.3. Perka BNPB No 11 Thn 2008

Peraturan kepala BNPB No 11 Tahun 2008 memaparkan tentang aspek-aspek rehabilitasi pasca bencana yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya beserta indikator capaiannya. Program pendampingan ekonomi korban gempa bumi 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat mengacu pada capaian indikator aspek sosial, ekonomi dan budaya. Melalui program pendampingan ekonomi diharapkan mampu mencapai indikator aspek sosial, ekonomi, maupun budaya (Tabel 1).

Tabel 1 Indikator capaian rehabilitasi aspek sosial dan ekonomi

Aspek	Indikator Capaian
Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.</li><li>2. Berfungsi lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan.</li><li>3. Meningkatnya jumlah peserta kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.</li></ol>
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggaranya kegiatan produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga.</li><li>2. Terselenggaranya transaksi ekonomi baik di pasar maupun di luar pasar baik perorangan maupun lembaga.</li><li>3. Meningkatnya jumlah produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga.</li><li>4. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan atau lembaga ekonomi yang terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi barang-barang ekonomi.</li></ol>

## 2.2. Hasil Analisis Kerusakan dan Kerugian

Landasan besarnya kebutuhan dan pentingnya program pemulihan ekonomi korban bencana adalah hasil penilaian kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi di Provinsi Jawa Barat sebagaimana uraian dalam sub bab ini yang diambil dari laporan penilaian kerusakan dan kerugian serta penilaian kebutuhan akibat gempa bumi di Provinsi Jawa Barat (Sunarti dkk 2010).

Dampak ekonomi regional bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Barat dianalisis dari nilai kerusakan dan kerugian menurut sektor dan dikaitkan dengan pangsa Jawa Barat dalam perekonomian nasional, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa diantara sembilan sektor ekonomi, pangsa terbesar adalah sektor manufaktur yaitu mencapai 44 persen dengan nilai 237 milyar. Urutan kedua adalah pariwisata dengan sumbangan sebesar 19 persen senilai 100 milyar rupiah, dan urutan ketiga adalah sektor pertanian dengan sumbangan 12 persen senilai 63 milyar rupiah. Nilai kerusakan kerugian sektor produktif senilai 2,072,913,000 rupiah atau sebesar 3 persen.

Tabel 2 Pangsa Jawa Barat dalam perekonomian nasional

Sektor Perekonomian	Rp milyar <sup>1)</sup>	Pangsa(%) <sup>1)</sup>	Pangsa dari produksi nasional (%) <sup>2)</sup>	Pangsa sektor dalam perekonomian nasional (%) <sup>2)</sup>
Pertanian	62,895	11,95	0,90	13,72
Pertambangan dan penggalan	12,621	2,40	0,16	11,15
Manufaktur	236,628	44,97	3,11	27,05
Pasokan listrik, gas, air	15,414	2,93	0,15	0,88
Konstruksi	15,907	3,02	0,23	7,72
Pariwisata	100,691	19,13	1,39	14,99
Transportasi dan komunikasi	30,787	5,85	0,31	6,69
Jasa-jasa keuangan	15,249	2,90	0,22	7,73
Jasa-jasa	36.027	6,85	0,47	10,08
<b>Jumlah PDB</b>	<b>526,219</b>	<b>100,00</b>	<b>6,94</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Data tahun 2007 dalam Jawa Barat dalam Angka 2008

<sup>2)</sup> Data tahun 2007, kompilasi data BPS

Sumbangan perekonomian regional Jawa Barat terhadap PDB Nasional sebesar 6,94 persen. Diantara sembilan sektor perekonomian PDRB Jawa Barat, sektor manufacture memberikan sumbangan PDB yang terbesar. Dengan menggunakan indikator sunbangan sektor perekonomian Jawa Barat terhadap produksi nasional, dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap ekonomi regional dari bencana gempa bumi Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan kecil.

Indikator lainnya dari sumbangan bencana di suatu wilayah terhadap ekonomi regional adalah potensi peningkatan prosentase dan tingkat kemiskinan. Dari 264,030 rumah rusak akibat gempa bumi, terdapat 54 persen diantaranya (141,667 unit rumah) terkategori rumah rusak berat dan rusak sedang yang membutuhkan perbaikan dengan nilai yang cukup berarti bagi pengeluaran keluarga. Jika 25 persen diantaranya berpotensi meningkatkan kemiskinan, maka akan terdapat penambahan dan peningkatan tingkat kemiskinan sebanyak 35,417 keluarga. Dengan asumsi rata-rata besar keluarga adalah 4 orang, maka akan terdapat penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 141 ribu orang, dimana kemiskinannya bersifat temporer maupun sistemik. Lamanya kemiskinan temporer karena bencana berkaitan dengan lamanya masa rehabilitasi yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk memperbaiki kembali kerusakan dan kerugian akibat bencana. Namun demikian, bagi korban bencana yang sebelumnya sudah terkategori miskin, maka bencana akan semakin memperparah tingkat kemiskinannya. Untuk kelompok ini, maka perlu ditetapkan dan dilaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat sesuai amanat peraturan penanggulangan bencana.

**Dampak terhadap Mata pencaharian dan Pekerjaan.** Secara mikro dampak gempa bumi terhadap mata pencaharian dan pekerjaan ditunjukkan oleh gangguan bekerja dan berusaha baik bersifat sementara maupun untuk waktu

yang lebih lama, terkait dengan jenis pekerjaan dan kerusakan tempat usaha. Bentuk gangguan bisa bersifat sementara pada saat awal bencana maupun bersifat jangka panjang, tergantung sektor produktif yang terkena bencana. Bencana nampaknya hanya menimbulkan gangguan pekerjaan yang bersifat sementara bagi para pegawai negeri atau pegawai perusahaan yang perusahaannya tidak mengalami kerusakan. Kerusakan rumah usaha yang berat disertai kerusakan alat produksi menimbulkan gangguan usaha yang cukup lama. Kerusakan jaringan listrik dan sistem distribusi air bersih juga mengganggu mata pencaharian dan pekerjaan, walau bersifat sementara. Gangguan lainnya adalah terganggunya untuk sementara transportasi antar daerah yang mengakibatkan peningkatan biaya transportasi.

Secara umum, gempa bumi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah hanya berdampak sementara terhadap mata pencaharian dan pekerjaan. Keragaan prosentase tenaga kerja menurut sektor di wilayah bencana disajikan pada Tabel 3 Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa prosentase terbesar tenaga kerja berada di sektor pertanian dan perdagangan. sementara itu hasil penilaian kerusakan dan kerugian menunjukkan relatif kecilnya nilai kerusakan di sektor pertanian dan perdagangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk data kewilayahan, gempa bumi pada tanggal 2 September tidak menimbulkan gangguan yang berarti terhadap pekerjaan dan mata pencaharian. Namun demikian, harus diperhatikan dampak bencana terhadap kelompok pekerja marjinal yang sangat rentan dan sensitif dengan gangguan yang sifatnya jangka pendek seperti para buruh tani.

Tabel 3 Sebaran persentase tenaga kerja menurut lapangan usaha di Daerah Bencana Gempa 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Lapangan Usaha					Angkutan dan Komunikasi	Jasa-jasa
		Pertanian	Manufaktur	Konstruksi	Perdagangan			
1	Kab. Bogor	20,21	19,79	4,68	22,12	6,86	19,87	
2	Kab. Bandung	19,65	26,53	4,72	22,19	7,3	16,38	
3	Kab. Bdg Barat	31,81	17,21	6	21,03	4,97	15,37	
4	Kab. Ciamis	43,16	15,86	3,86	18,97	5,87	10,42	
5	Kab. Cianjur	51,83	4,58	4,38	21,31	5,06	9,91	
6	Kab. Garut	39,62	9,67	5,33	23,39	4,81	14,34	
7	Kab. Kuningan	41,69	6,57	5,74	28,48	3,94	12,15	
8	Kab. Majalengka	40,49	16,46	5,24	18,81	3,5	13,05	
9	Kab. Purwakarta	28,18	17,66	6,14	24,62	6,22	14,27	
10	Kab. Subang	48,34	5,79	5,02	25,02	5,1	9,73	
11	Kab. Sukabumi	40,36	13,05	5,83	18,73	6,4	12,43	
12	Kab. Tasikmalaya	46,8	17,91	2,67	19,05	4,09	8,35	
13	Kota Banjar	23,57	14,29	6,7	21,54	8,1	17,87	
14	Kota Sukabumi	7,28	11,17	6,93	36,31	9,87	24,34	
15	Kota Tasikmalaya	7,32	29,36	6,03	26,05	6,74	19,13	
	Jawa Barat	27,2	15,74	4,67	24,59	6,66	16,72	

Sumber: Jawa Barat dalam Angka 2008

*Keterangan : Lapangan usaha yang prosentasenya kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian (0,21-1,72); sektor listrik, gas, dan air minum (0-0,73); sektor keuangan (0-2,34); dan sektor lainnya (0,23-3,85).*

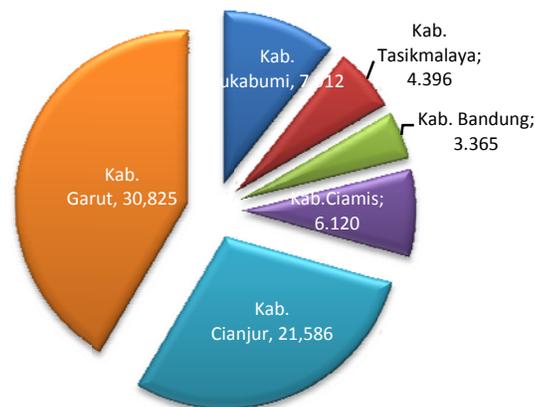
Bencana yang menyebabkan terganggunya mata pencaharian para buruh lepas (buruh tani atau buruh pabrik harian) berdampak terhadap ekonomi keluarga, mengingat kelompok tersebut pada umumnya bercirikan strategi ekonomi keluarga hanya sebatas bertahan hidup "*survival economic strategy*", bahkan terkadang bersifat "tutup lubang gali lubang" (Sunarti, 2009).

Pola gangguan bencana terhadap pelaku sektor informal bervariasi terkait jenis usaha. Gangguan bersumber dari terputusnya kegiatan usaha baik karena menjadi korban bencana maupun karena penurunan kegiatan usaha. Hal tersebut menyebabkan penurunan atau kehilangan modal usaha karena digunakan biaya hidup sehari-hari, atau biaya pengobatan karena gangguan kesehatan.

Kerusakan rumah menyebabkan kebutuhan terhadap tukang dan buruh bangunan melonjak tajam. Pasca bencana terjadi pelonjakan upah buruh bangunan yang cukup tinggi sampai mencapai 50 persen. Permintaan yang tinggi padahal ketersediaan tukang bangunan yang terbatas di suatu wilayah menyebabkan *bargaining position* buruh bangunan sangat tinggi dan terjadi peningkatan upah, padahal setelah itu akan sulit untuk menurunkan upah tukang/buruh bangunan ke posisi semula.

**Dampak Bencana Terhadap Sektor Informal.** Sektor informal merupakan sektor usaha dengan skala kecil, modal kecil, proses pendirian tidak memerlukan perijinan khusus, dan mudah pendiriannya. Walaupun kecil akan tetapi pelaku usaha didalamnya sangat banyak, sehingga peranan dalam penurunan pengangguran sangat besar. Di dalam kesehariannya sektor informal dapat dilihat sebagai pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang keliling, ojeg, dan lainnya. Sebagian besar usaha sektor informal terkait dengan penjualan produk pangan seperti aneka masakan, bakso, gorengan, sate, minuman, dan lain sebagainya. Tidak semua wilayah yang terkena bencana berpengaruh terhadap sektor informal. Berdasarkan pengamatan di lokasi, dampak bencana mempengaruhi sektor informal untuk wilayah Kabupaten Garut, Cianjur, Bandung, Ciamis, Sukabumi dan Tasikmalaya.

Jumlah total pelaku usaha yang terkena dampak adalah 74.205 orang. Kerugian di sektor usaha informal secara umum disebabkan ; (1) karena penurunan daya beli, dan (2) juga disebabkan sebagian dari rumah tangga yang terkena bencana berprofesi sebagai pelaku usaha di sektor informal. Berdasarkan data jumlah pelaku usaha sektor informal yang terbanyak terkena dampak berada di Kabupaten Garut yaitu sebanyak 30,825 orang, berikutnya Kabupaten Cianjur sebanyak 21,586 orang, dan Kabupaten Sukabumi sebanyak 7,912 orang.



Gambar 2 Jumlah pelaku sektor informal (orang) terkena dampak Bencana Gempa 2 September 2009

### **Dampak Bencana Terhadap Sektor Pertanian, Perkebunan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan.**

Sektor pertanian umum merupakan sektor kontributor perekonomian dominan terbesar ketiga di Jawa Barat setelah industri dan perdagangan dengan masing-masing kontribusi 2008 sebesar Rp. 62,8 triliun, Rp. 236 triliun dan Rp. 100,7 triliun. Namun bila ditinjau dari jumlah keterlibatan masyarakat, maka sektor pertanian tetaplah merupakan sektor dominan dengan jumlah petani dan keluarganya sebesar 24 persen dari penduduk Jawa Barat. Total area pertanian, perkebunan dan hortikultura provinsi Jawa Barat seluas 0,9 juta ha sawah, 2,6 juta ha lahan kering serta 0,56 juta ha tegal/kebun. Dari jumlah total lapangan kerja sebanyak 17,2 juta, 4,7 juta bekerja di sektor pertanian dan 4,3 juta di sektor perdagangan serta pada sektor manufaktur sebanyak 2,7 juta (BPS, 2008).

Bentuk-bentuk kerugian langsung yang ditimbulkan oleh akibat gempa selain kerusakan dan penurunan produksi, diantaranya adanya areal yang tertutup longsor dalam skala yang sangat terbatas (Kabupaten Cianjur), keretakan sawah (di Kabupaten Bandung), kerusakan saluran irigasi tersier dalam skala terbatas (Kabupaten Bandung dan Tasikmalaya). Adanya kerugian tidak langsung di sektor pertanian diantaranya diakibatkan oleh:

- Naiknya biaya produksi karena gangguan dari sektor lainnya seperti transportasi
- Produk yang lebih sulit dipasarkan akibat gempa, apalagi target pasar sendiri yang menderita kerugian dan kerusakan akibat gempa.
- Peralatan dan sarana proses produksi yang mengalami kerusakan, misal alat *processing* teh rakyat, gula aren yang tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa.
- Pencarian tenaga kerja yang sulit pada saat panen sehingga produksi harian menurun, misal tenaga pemanenan teh.

Untuk sub sektor perikanan, kerusakan yang terjadi akibat gempa meliputi kerusakan pada sarana dan prasarana TPI/PPI dan peralatan tangkap. Walaupun

tidak berdampak signifikan, namun seiring dengan terjadinya penurunan aktivitas akibat kerusakan peralatan turut mempengaruhi volume ikan hasil tangkapan yang berimplikasi pada kehilangan pendapatan nelayan mengalami stagnasi atau berkurang.

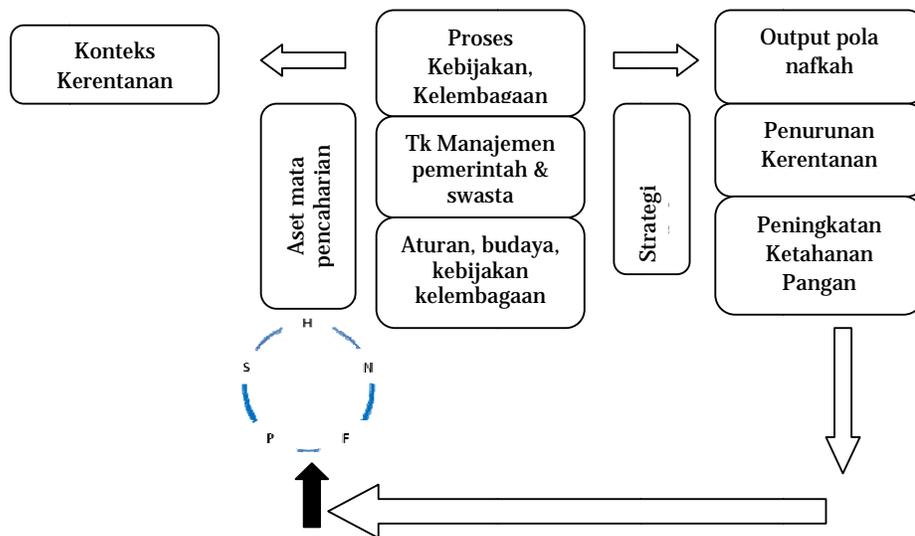
Untuk sektor peternakan, dampak terjadi pada komoditas usaha sapi perah di Kabupaten Bandung, yaitu menurunnya tingkat produktivitas akibat terjadinya kerusakan sarana dan prasarana produksi seperti kandang, saluran air bersih yang disalurkan ke kandang serta tempat penyimpanan susu akibat pemadaman listrik; dan kecenderungan terjadinya penurunan populasi sapi perah karena dijualnya sapi perah untuk perbaikan rumah peternak yang mengalami kerusakan. Bentuk-bentuk kerugian langsung ditimbulkan oleh akibat gempa diantaranya adanya turunnya produksi susu sapi dan telur ayam harian. Sedangkan adanya kerugian tidak langsung di sector pertanian diantaranya diakibatkan oleh:

- 1) Naiknya biaya produksi karena gangguan dari sector lainnya seperti transportasi
- 2) Produk yang lebih sulit dipasarkan akibat gempa, apalagi target pasar sendiri yang menderita kerugian dan kerusakan akibat gempa.
- 3) Peralatan dan sarana proses produksi yang mengalami kerusakan, misal kerusakan peralatan dan kandang sapi/ayam akibat gempa.

### **2.3. Landasan Teoritis dan Strategis**

Landasan teoritis dan strategis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana program pendampingan psikososial ekonomi korban bencana gempa 2 September 2009 mengacu pada Benson & Twigg (2007) yang menekankan pentingnya pemulihan mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengintegrasian sistem pengurangan resiko bencana ke dalam program strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Kebijakan, manajemen, dan aturan pemerintah dan swasta dalam menetapkan program harus memperhatikan konteks kerentanan masyarakat terkait dengan mata pencaharian. Dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia, alam, fisik, psikologis, dan sosial yang ada di masyarakat serta analisis kerentanan terkait mata pencaharian akan menghasilkan kebijakan, manajemen dan aturan pemerintah yang mampu mendorong strategi nafkah yang baik. Output yang dihasilkan berupa pola nafkah yang baik sekaligus penurunan kerentanan dan mampu meningkatkan ketahanan pangan. Melalui pemulihan mata pencaharian yang berkelanjutan korban bencana gempa akan mampu bangkit dari keterpurukan (Gambar 3).



Gambar 3 Upaya pemulihan mata pencaharian dan berkelanjutan (Benson & Twigg, 2007)

Pembangunan atau pemulihan mata pencaharian korban bencana hendaknya berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan regular yaitu pengentasan kemiskinan dan dalam program pengurangan risiko bencana (Gambar 4).

Gambar 4 Kajian “Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Strategi Pengurangan Kemiskinan” (Benson & Twigg, 2007)

## **2.4. Landasan Historis**

Program rehabilitasi pasca bencana pendampingan psikososial ekonomi mengambil pembelajaran dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah serta program rehabilitasi pasca bencana di dalam dan luar negeri.

### **2.4. 1 Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia**

1. Program Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU) pada hakekatnya, merupakan upaya terobosan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi. Melalui program-program ini, keluarga-keluarga yang bergabung dalam kelompok Prokesra (Program Kesejahteraan Keluarga) dan telah memulai kegiatan usaha produktif dengan memanfaatkan program Kukesra/Takesra diharapkan bisa mengatasi permasalahan permodalan untuk melakukan pengembangan usahanya. Program pengembangan kemitraan usaha ini menyediakan kredit dengan bunga terjangkau bagi kelompok Prokesra dan pengusaha kecil, menengah, atau koperasi yang melakukan kemitraan. Pengembangan kemitraan usaha antara kelompok Prokesra dan pengusaha mitra diharapkan pula akan menumbuhkan mekanisme pembangunan oleh masyarakat secara mandiri, sehingga akan memberikan jaminan bagi kelangsungan usaha dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan. Pada gilirannya, dengan melakukan kemitraan, akan berdampak positif bagi upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, terutama pada keluarga yang relatif tertinggal (Sunarti 2010).

KPKU bertujuan khusus yaitu : 1) mantapnya kegiatan kemitraan antara kelompok Prokesra dan pengusaha kecil, menengah, atau koperasi, 2) meningkatnya kegiatan pemberdayaan keluarga terutama Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di bidang ekonomi, 3) menumbuhkan, meningkatkan, dan membina produksi dan produktifitas kelompok Prokesra, 4) menumbuhkan dan meningkatkan jaringan ekonomi antar kelompok Prokesra dan pengusaha kecil, menengah, atau koperasi, 5) meningkatnya dukungan upaya penanggulangan kemiskinan, 6) menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kepedulian pengusaha kecil dan koperasi terhadap kelompok Prokesra, dan 7) meningkatkan ketahanan ekonomi Nasional (Sunarti 2010).

Sasaran dari program KPU adalah (1) kelompok Prokesra-UPPKS atau kelompok Prokesra lainnya yang melakukan kemitraan dengan pengusaha kecil, menengah, atau koperasi dan (2) pengusaha kecil, menengah, atau koperasi yang bermitra dengan kelompok Prokesra. Untuk mencapai tujuan kemitraan antara pengusaha kecil, menengah, atau koperasi dengan kelompok Prokesra mencakup banyak aspek, di antaranya peningkatan

kualitas sumberdaya manusia, pengelolaan permodalan, proses produksi dan pengemasan, dan pemasaran (Sunarti 2010).

2. Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra)- Kelompok Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra)

dicanangkan Presiden Soeharto pada 21 Desember 1995 di Banda Aceh, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi 11,5 juta kepala keluarga (KK) pra sejahtera (pra-KS) dan KS tahap I. Takesra merupakan wujud pelaksanaan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera (GEKS) yakni meningkatkan pendapatan bagi Pra-KS dan KS I melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Pemerintah bekerjasama dengan para pengusaha besar menyediakan dana untuk disalurkan melalui Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) guna membantu meningkatkan pendapatan keluarga Pra-KS dan KS I. Melalui pinjaman itu, para keluarga diharapkan dapat membangun ekonomi keluarganya dengan mengembangkan sistem Pelaju/ petik, olah, jual dan Pemaju/ proses, kemas, jual (Sunarti 2010).

3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program penanggulangan kemiskinan bagi PMKS yang dikategorikan sebagai fakir miskin baik yang termasuk kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) maupun kemiskinan sementara (*transient poverty*) akibat bencana alam, bencana sosial atau situasi sulit lainnya, yang jika tidak ditangani secara serius dapat mengalami masalah kemiskinan kronis. Program KUBE bertujuan untuk " *meningkatkan motivasi agar lebih maju, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasardan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.*" Kegiatan usaha yang dikembangkan adalah Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikembangkan meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, industri rumah tangga, jasa dan kegiatan ekonomi lainnya (Sunarti 2010).

Undang-undang (UU) No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial secara umum mengatur ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dalam menentukan garis kebijakan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial; memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat; dan melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial baik bagi perseorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana; memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial; melakukan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial termasuk penyalurannya ke dalam masyarakat bagi warga negara yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, terlantar atau

tersesat; dan melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan (Sunarti 2010).

5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI) merupakan program yang berangkat dari keberhasilan pelaksanaan PPK, dari PPK I hingga PPK III, yang telah berlangsung sejak 1998-2006, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di tanah air dengan menggunakan mekanisme dan skema PPK. Agenda besar ini akan dilaksanakan dalam skala lebih besar (baik cakupan lokasi, waktu pelaksanaan maupun alokasi dananya), yang kemudian dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM pertama kali diperkenalkan Pemerintah Indonesia di Jakarta, pada 1 September 2006. Menurut Menko Kesra Aburizal Bakrie, PNPM merupakan perluasan dan penyempurnaan dari program pemberdayaan masyarakat yang telah teruji, seperti PPK. Untuk itu, pemerintah memutuskan PNPM salah satunya akan dijalankan melalui PPK (PNPM-PPK). Seluruh kecamatan di Indonesia akan memperoleh program PNPM secara bertahap, mulai tahun 2007 (Sunarti 2010).

Tujuan PNPM seperti tersebut di atas, akan ditempuh dengan cara: (a) Mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi, serta lapangan kerja, (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian kegiatan pembangunan, dan (c) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (Sunarti 2010).

Dalam pelaksanaannya, PNPM-PPK mengalokasikan BLM melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya *cost sharing* disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/ 2006 per 30 Agustus 2006. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan keseriusan Pemda dan aparat di daerah dalam menjalankannya (Sunarti 2010).

6. Program keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan, berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. PKH adalah asistensi sosial kepada rumah tangga miskin yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan tertentu yang dapat merubah perilaku. Kualifikasi peserta adalah rumah tangga miskin kronis, rentan terhadap goncangan, *transitory poverty*. PKH adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya

peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, maka penerima bantuan harus menyekolahkan, memeriksakan kesehatan ke puskesmas dan / atau memperhatikan kecukupan gizi anak, dll. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank (Sunarti 2010).

PKH sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin (Sunarti 2010).

7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan program dengan sasaran masyarakat pesisir. Selama beberapa dekade pembangunan, gambaran nelayan pada umumnya adalah kelompok masyarakat miskin, dengan rumah kumuh, hidup jauh dari berkecukupan, dan fakta-fakta lain yang tepat menggambarkan kemiskinan struktural. Jumlah penduduk miskin saat ini mencapai 24 % atau 47 juta jiwa, dan 60 % di antaranya merupakan masyarakat pesisir. Pada akhir RPJM (Tahun 2009) diharapkan jumlah penduduk miskin menjadi hanya 7,5 %. Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat muti dimensi dan ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir. Berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun umumnya masih bersifat parsial dan tidak terpadu. Departemen Kelautan dan perikanan menjabarkan Rencana Aksi Nasional penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya diimplementasikan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Sunarti 2010).
8. Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan untuk membantu permodalan usaha yang sering menjadi kendala dalam pengembangan atau penciptaan

kegiatan usaha rakyat. Selain itu program KUR diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran. Sejak November 2007, program KUR menjadi program andalan pemerintah untuk membangun UKM (usaha kecil mikro). Pemerintah menyediakan jaminan senilai 10% total pinjaman agar debitur terbebas agunan. Jumlah jaminan yang dikucurkan pemerintah awalnya senilai 1.45 triliun dan kredit yang dikucurkan diharapkan Rp 14.5 triliun. Hingga 14 Juni 2008, KUR yang disalurkan telah mencapai 7.12 triliun. Pemerintahpun menambah dana penjaminan sebesar Rp 1 triliun sehingga total mencapai Rp 2.45 triliun sehingga total kredit yang disediakan hingga 2009 sebesar Rp 24.5 triliun (Sunarti 2010).

Bank pelaksana KUR adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank BNI. Sampai Juni 2008, sebanyak 700.000 nasabah meminjam dana KUR dari Bank BRI. Kenmennekgop dan UKM yang menjadi coordinator program KUR akan menghitung dampak KUR terhadap penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama dengan BPS. Jumlah penyerapan tenaga kerja akibat KUR baru akan diketahui November 2008 (Sunarti 2010).

#### **2.4.2. Program Livelihood Recovery Pasca bencana**

Pembelajaran yang diambil dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di berbagai Negara dan di Indonesia secara eksplisit menunjukkan berbagai hasil yang baik. Oleh karena itu, beberapa program tersebut ditiru, diadopsi, dan dimodifikasi menjadi program pendampingan psikososial ekonomi korban bencana gempa bumi 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi harus terintegrasi dengan proses pengurangan dampak kemiskinan. Laporan global UNDP Biro Pencegahan Krisis dan Pemulihan (BCPR) dalam (*international recovery platform 2010*) mengatakan intervensi yang dapat mengurangi dampak kemiskinan dan bencana pada saat yang sama, diantaranya:

- 1) Penguatan dan diversifikasi mata pencaharian
- 2) Mendorong investasi asing dan penciptaan lapangan pekerjaan
- 3) Sebuah pendekatan yang fleksibel dan partisipatif untuk perencanaan kota
- 4) Membangun kemandirian sosial termasuk akses terhadap kesehatan dan pendidikan
- 5) Mekanisme penyediaan pelayanan penjaminan kerusakan/kehilangan bagi mereka yang tidak mengikuti asuransi

Kelima intervensi tersebut berkaitan erat dengan konsep *livelihood recovery*. Ruang lingkup *livelihood* meliputi kemampuan, aset (termasuk sumber daya materi dan sosial) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana hidup. *Livelihood* dikatakan berkelanjutan jika dapat mengatasi lalu kembali pulih dari stres maupun guncangan dan memelihara aset atau meningkatkan akses ke aset baik

sekarang maupun di masa depan, tetapi tidak merusak sumber daya alam (Chambers & Conway 1991 dalam *international recovery platform* 2010). Pendekatan *livelihood recovery* yang berkelanjutan dicapai melalui akses ke sumberdaya kehidupan, meliputi modal alam, manusia, ekonomi, dan sosial yang digabungkan dalam berbagai strategi penghidupan yang berbeda-beda. Hal yang penting dari kerangka kerjanya adalah analisis bagaimana organisasi formal dan non formal serta faktor institusi mampu mempengaruhi *livelihood recovery* yang berkelanjutan. Hal yang mendasar dalam keberlanjutan *livelihood recovery* dalam kondisi resisitensi terhadap bencana adalah meletakkan pembangunan dasar yang penting untuk setiap komunitas, ini termasuk sumberdaya ekonomi, infrastruktur kehidupan, jejaring sosial, sumberdaya alam (tanah, air, hutan), tata kelola struktur agar mampu membawa masyarakat keluar dari kemiskinan dan resiko bencana. Dalam setiap tahapan, kebencanaan diutamakan, atau kelompok bawah dan termarjinalkan yang mengalami berbagai konflik sosial (Duryog Nivaran and Practical Action 2005).

Program *livelihood recovery* pernah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian terhadap program *livelihood recovery* yang dilakukan di Kabupaten Bantul kepada sekitar 500 usaha kecil dan mikro menghasilkan temuan bahwa (1) perusahaan yang lebih kecil akan lebih tahan sehingga mampu bangkit kembali lebih cepat, (2) system pengelompok industri yang sama memberikan dukungan kepada perusahaan untuk dapat dengan cepat kembali pulih, (3) kualitas infrastruktur desa menjadi salah satu hal penting dalam proses pemulihan pasca gempa, (4) penting bagi “donator” untuk tidak memberikan janji-janji terlalu banyak dalam hal dukungan keuangan untuk usaha, melainkan sesegar mungkin mendistribusikannya ketika benar-benar tersedia. Semakin cepat didistribusikan, semakin baik dampaknya terhadap perusahaan yang terkena dampak gempa bumi, dan (4) meskipun dalam jangka waktu yang lama, efektivitas bantuan mungkin akan berkurang, akan tetapi bantuan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup (Resosudarmo 2008).

Menurut dokumentasi World Bank (2009) program *livelihood recovery* setelah gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah dilakukan pula oleh agensi Jerman. Program tersebut berupa rehabilitasi usaha mikro yang dilakukan dengan peningkatan akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terhadap modal kerja, yakni mengembangkan perspektif untuk menghasilkan peluang terhadap pendapatan yang berkesinambungan bagi UMKM yang layak; membantu UKM layak untuk memperoleh kredit wanprestasi dan kreditur UKM dapat mencapai keuntungan mutual melalui strategi percobaan untuk adanya kredit yang bermasalah; memberikan bantuan untuk usaha menengah untuk membangun kembali tempat dan mengganti peralatan dan meningkatkan daya saing; dan memperkuat lembaga keuangan di daerah yang terkena dampak gempa bumi sebagai dasar untuk kelanjutan pembangunan ekonomi.

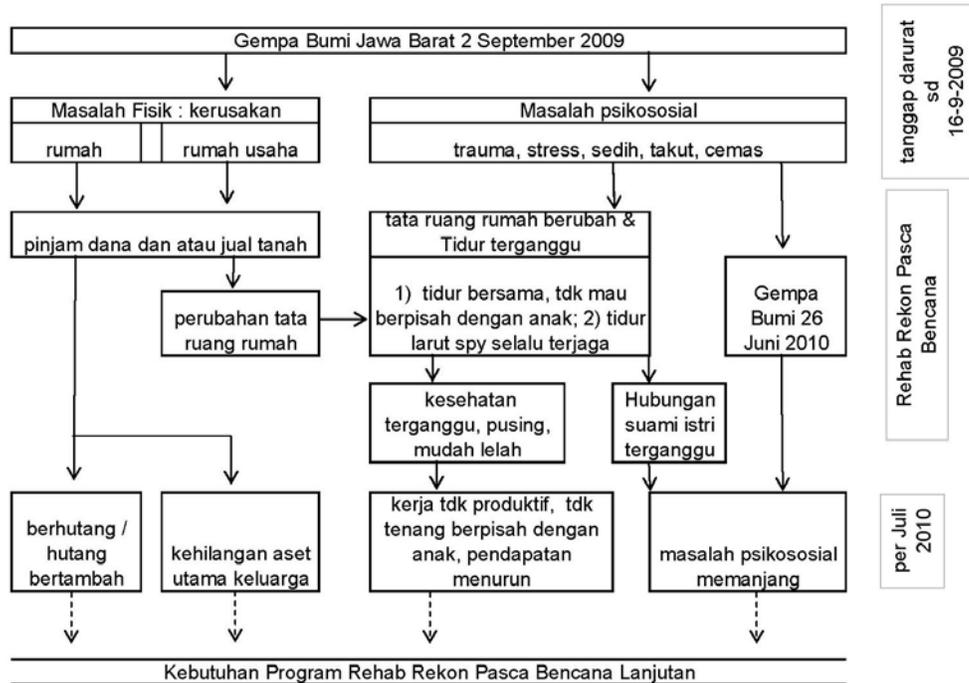
Program *livelihood recovery* di Nias Sumatera Utara meliputi program pendistribusian mesin-mesin pertanian, pemberian fasilitas sanitasi dan air, memberi modal kepada kelompok wanita, membentuk kelembagaan simpan pinjam laki-laki dan perempuan, memberikan kursus tambahan dan konsultasi untuk keberlanjutan pertanian dan perikanan, memberikan kursus kejuruan bagi wanita, perbaikan jalan dan terowongan air, pelatihan pengorganisasian masyarakat untuk grup campuran, meningkatkan akses pasar (Holiana 2008). Semua program *livelihood recovery* tersebut bekerja sama dengan mitra internasional dan dinilai berhasil mengembalikan kondisi kehidupan ekonomi dan social korban bencana gempa bumi.

Selain mengambil pembelajaran dari berbagai program baik pengentasan kemiskinan maupun rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, program pendampingan ekonomi korban bencana gempa 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat memandang penting meningkatkan jiwa kewirausahaan korban bencana agar mampu keluar dari keterpurukan ekonomi. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Wirausaha merupakan bagian vital ekonomi. Alasan terpenting mengapa wiausahawan menjadi bagian vital bagi ekonomi adalah kewirausahaan menciptakan lapangan kerja baru. Sebagian besar wiausahawan merupakan individu-individu yang meninggalkan pekerjaan terdahulunya dan atau individu yang tidak dapat menemukan pekerjaan. Jalan berwirausaha memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dengan pembukaan lapangan kerja baru dan penurunan pengangguran. Selain itu, wirausaha berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan inovasi dan penelitian. Investasi baru dapat meningkatkan ekonomi karena investasi ini menyediakan cara yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan membawa bisnis baru yang berkontribusi kepada ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas kewirausahaan berupa investasi memiliki dampak yang besar dan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Wirausaha juga berkontribusi bagi ekonomi dengan penciptaan kesejahteraan banyak individu/ keluarga yang mencari keuntungan dalam berbisnis. Meskipun hal ini bukanlah alasan pertama individu menjadi seorang wirausahawan, namun hal ini memerankan aspek penting bagi pertumbuhan ekonomi. Bisnis baru (lapangan kerja baru) dan kesejahteraan wirausahawan dapat membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan produk baru sama besar/ banyak dengan usaha yang dilakukan wirausaha (Barker).

#### **2.4.4. Hasil Pendampingan Psikososial RR Jabar 2010**

Hasil pendampingan psikososial korban gempa bumi di Provinsi Jawa Barat menunjukkan pentingnya pendampingan ekonomi mengingat besar dan lamanya gangguan ekonomi keluarga akibat bencana (Sunarti dkk 2010). Gempa Bumi Jawa Barat 2 September 2009 menimbulkan berbagai masalah fisik dan nonfisik. Permasalahan fisik terjadi saat rumah tempat tinggal maupun rumah usaha masyarakat menjadi rusak akibat gempa bumi. Permasalahan nonfisik, meliputi masalah psikologis, sosial dan ekonomi merupakan masalah yang akan

membawa dampak berkepanjangan. Perasaan trauma, stres, sedih, takut, dan cemas akan mengganggu berbagai aktivitas produktif masyarakat sehingga pendapatan menurun. Permasalahan yang begitu besar dan terus memanjang harus segera ditangani melalui berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pendampingan psikososial rehabilitasi dan rekonstruksi Jabar 2010 yang bertujuan untuk mengurangi dampak psikososial harus disertai dengan pendampingan ekonomi sehingga permasalahan yang kompleks bisa diselesaikan secara komprehensif.



Gambar 5 Rangkuman masalah psikososial ekonomi dampak pasca bencana

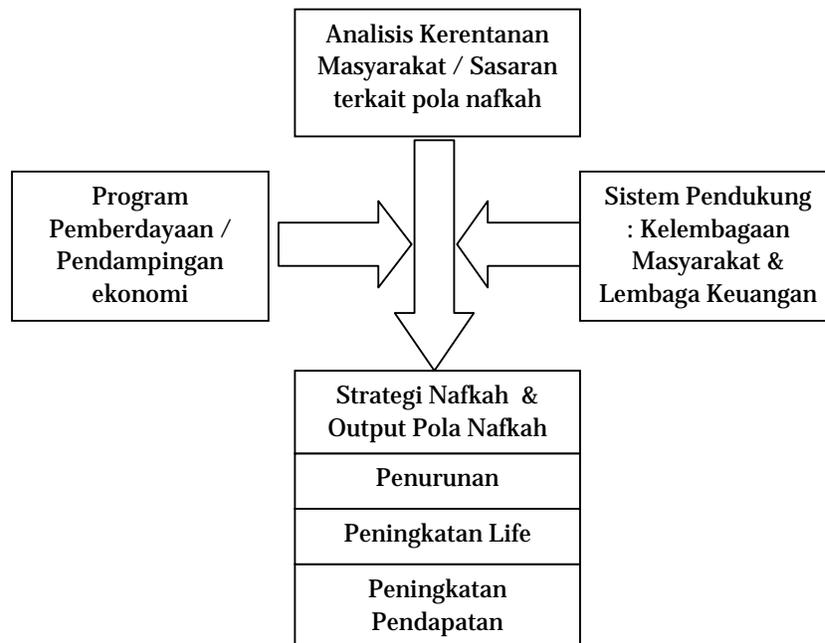
Berikut adalah hasil analisis dan sintesis pengembangan program dan aksi prioritas bagi pemulihan mata pencaharian korban bencana di empat lokasi pendampingan psikososial rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Jawa Barat tahun 2010. Program dan aksi prioritas bertumpu pada tiga sektor utama, yaitu pertanian, industry perdesaan, dan jasa serta perdagangan. Keberhasilan program ditentukan oleh prasyarat pendukung yang ada di daerah setempat, seperti lembaga dan jasa keuangan, infrastuktur perdesaan dan industry UKM, serta kelembagaan masyarakat. Namun, tanpa prasyarat dasar sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, transfer inovasi, dan teknologi program pemulihan mata pencaharian tidak akan berjalan dengan mudah. Oleh karena itu program pendampingan ekonomi korban gempa 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat mengacu pada kerangka fikir upaya pemulihan *livelihood recovery* rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Jawa Barat 2009.



Gambar 6 Kerangka fikir *livelihood recovery* Korban Bencana Tasikmlaya (Sunarti, 2010)

## 2.5. Dasar Pemikiran Penetapan Program

Berdasarkan landasan regulasi, hasil penilaian kerusakan kerugaaian, landasan teoritis dan strategis, serta landasan historis dapat dirumuskan kerangka berpikir pelaksanaan program pendampingan ekonomi pasca bencana gempa 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat berikut ini. Dasar pemikiran penetapan program bahwa sasaran memiliki kerentanan terkait dengan pola nafkah. Kemudian melalui analisis keberfungsian sistem pendukung, yaitu kelembagaan masyarakat dan lembaga keuangan serta intervensi program pemberdayaan/pendampingan ekonomi akan menghasilkan strategi nafkah dan output pola nafkah. Selanjutnya, melalui pola nafkah yang baik akan terjadi penurunan kerentanan korban bencana, disertai dengan peningkatan life skills dan peningkatan pendapatan sasaran.



Gambar 7 Kerangka berfikir penetapan Program Pemulihan Mata Pencaharian Korban Gempa Bumi di Provinsi Jawa Barat

### **III. KERAGAAN WILAYAH DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan keragaan wilayah dan keragaan umum IRT peserta pendampingan psikososial ekonomi pasca bencana. Keragaan wilayah mengacu data monografi yang diperoleh dari keempat kecamatan serta data BPS Kabupaten Dalam Angka. Sedangkan keragaan umum IRT diperoleh dari data primer melalui wawancara.

#### **3.1 Keragaan Wilayah**

##### **3.1.1 Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung**

Kecamatan Banjaran merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung dimana wilayahnya datar sampai berombak (55%), berombak sampai berbukit (35%), dan berbukit sampai bergunung (10%). Ketinggian wilayah Banjaran berada 700 m diatas permukaan laut, dengan berkisar antara 27°C s/d 35°C, dan curah hujan rata-rata sebesar 2.500 mm/tahun.

Kecamatan Banjaran terdiri atas 11 (sebelas) desa, 40 (empat puluh) dusun, dan 168 (seratus enam puluh delapan) Rukun Warga (RW), dan 646 (enam ratus empat puluh enam) Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Banjaran terdiri dari 1 (satu) instansi vertikal yakni KUA, 7 (tujuh) instansi otonom, dan 4 instansi BUMN/BUMD. Kecamatan Banjarsari memiliki 2 (dua) Puskesmas Kecamatan dan 3 Puskesmas Pembantu, yang terdiri dari 4 (empat) dokter, 8 (delapan) perawat, dan 11 bidan. Terdapat 4 apotik/depot obat. Jumlah Pos/Klinik KB 11 (sebelas), jumlah PUS 19.516 pasang, jumlah posyandu 126 (lima ratus lima belas), jumlah akseptor KB 9.395 orang.

Kecamatan Banjaran terdiri atas 51.018 Kepala Keluarga, dimana penduduknya terdiri atas 56.049 orang laki-laki dan 54.240 orang perempuan. Mata pencaharian penduduk adalah petani (5.699 orang petani pemilik tanah, 2.097 petani penggarap tanah, 5.312 orang petani penggarap/penyekap, 9.548 orang buruh tani), pengusaha sedang/besar (7 orang), pengrajin/industri kecil (456 orang), buruh industri (2.458 orang), buruh bangunan (324), pedagang (1.154), pengangkutan (2.451 orang), PNS (1.232 orang), ABRI (167 orang), pensiunan ABRI-PNS (325 orang), peternak (13 orang peternak kerbau, 340 orang peternak domba, 70 orang peternak kuda, 255 orang peternak ayam, 35 orang peternak itik, dan 20 orang peternak lain-lain).

Prasarana/sarana pengangkutan dan komunikasi di kecamatan Banjaran seluruhnya melalui lalu lintas darat, yakni terdapat 552 km jalan aspal beton, 49 km jalan perkakas, dan 5 km jalan tanah. Jalan utama yang dapat dilalui kendaraan roda 4 adalah sepanjang 491 km. Sarana umum yang dapat digunakan oleh penduduk kecamatan antara lain sepeda, ojek dan delman.

Sarana perekonomian yang terdapat di kecamatan Banjaran meliputi koperasi (22 koperasi simpan pinjam, 1 koperasi unit desa, dan 1 badan kredit), pasar selapan/umum (1 pasar umum dan 1 pasar hewan), 1 pasar tanpa bangunan semi permanen, 7 bank, 11 lumbung padi, 1 stasiun oplet/bemo/taksi/terminal, dan 246 telepon umum.

Kecamatan Banjaran memiliki luas tanah sawah 3.754.729 Ha yang terdiri dari tanah irigasi teknis seluas 201.491 Ha, irigasi setengah teknis seluas 651.174 Ha, irigasi sederhana 35.00 Ha, dan sawah rendengan/tadah hujan seluas 1.023.358 Ha. Tanah kering di Kecamatan Banjaran seluas 752.207 Ha terdiri dari 308.46 Ha pekarangan/bangunan/emplasemen, 202.210 Ha tegal/kebun, 172.721 Ha ladang/tanah huma, dan 68.816 Ha ladang penggembalaan/pengangonan. Tanah basah seluas 168.162 Ha. Tanah hutan seluas 6 Ha yang terdiri atas 4 Ha hutan lebat dan 2 Ha hutan belukar. Tanah keperluan fasilitas umum seluas 194.188 Ha terdiri dari 4.68 Ha lapangan olah raga, 0.500 Ha taman rekreasi, 92.00 Ha jalur hijau, dan 508 Ha kuburan.

Potensi ekonomi dari sektor pariwisata di wilayah Banjaran yaitu dari wana wisata gunung Puntang. Wisata tersebut berupa pemandangan hutan alam dan hutan tanaman pinus, kegiatan wisata yang dapat dilakukan yaitu lintas alam, berkemah, dan mendaki gunung. Tumbuhan yang terdapat di wana wisata berupa rumput jampang, alang-alang, kaso, kingkilaban, pakis, saliera, kirinyuh, kaliandra, puspa, saninten, jamuju, kihujan, flamboyan, bungur, sengan laut, kidamar. Satwa yang terdapat di wana wisata ini yaitu sanca, sanca hijau, ular cibuk, ular cai, ular lingas, ular belang, elang, ketilang, tekukur, manintin, surili, menjangan, sero, macan tutul, serigala, dan babi hutan.

Perusahaan/usaha yang terdapat di kecamatan Banjaran meliputi industri (13 industri besar dan sedang dengan 1.232 orang tenaga kerja, 52 industri kecil dengan 158 orang tenaga kerja, 269 industri rumah tangga dengan 263 orang tenaga kerja), 1 perhotelan/losmen/penginapan dengan 7 orang tenaga kerja, 56 rumah makan/warung makan dengan 72 orang tenaga kerja, 104 perdagangan dengan 126 orang tenaga kerja, 10 angkutan dan rental mobil dengan 32 orang tenaga kerja, dan lain-lain/informal dengan 86 orang tenaga kerja.

### **3.1.2 Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur**

Kecamatan Sindangbarang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cianjur, dengan ketinggian wilayah berada kurang dari 500 m di atas permukaan laut. Kecamatan Sindangbarang memiliki letak yang strategis dengan dilintasi jalan negara antara Jakarta-Bandung. Kecamatan ini terdiri atas 9 (sembilan) desa/kelurahan, 40 (empat puluh) dusun dan 63 (enam puluh tiga) Rukun Warga (RW), 220 (dua ratus dua puluh) Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Sindangbarang memiliki 1 (satu) Puskesmas Kecamatan, 6 (enam) puskesmas pembantu, 2 (dua) prakter dokter, 18 (delapan belas) prakter mantra/bidan, 63 (enam puluh tiga) posyandu. Tenaga kesehatan yang terdapat di kecamatan

Sindangbarang meliputi 2 (dua) dokter, 10 (sepuluh) mantri kesehatan/perawat, 8 (delapan) bidan, 58 (lima puluh delapan) dukun bersalin, 49 (empat puluh sembilan) dukun bayi yang terlatih dari 58 (lima puluh delapan) dukun bayi yang ada. Jumlah PUS di kecamatan Sindangbarang sebanyak 12.020 pasang.

Kecamatan Sindangbarang memiliki lahan sawah 2.445,925 Ha dan lahan bukan sawah 16.116,552 Ha. Luas tanah sawah irigasi sederhana yaitu 322 Ha dan rendengan/tadah hujan seluas 2.124 Ha. Tanah kering di Kecamatan Banjarsari seluas 752.207 Ha terdiri dari 308.46 Ha pekarangan/bangunan/ emplasemen, 202.210 Ha tegal/kebun, 172.721 Ha ladang/tanah huma, dan 68.816 Ha ladang penggembalaan/pengangonan. Tanah basah seluas 168.162 Ha. Tanah hutan seluas 6 Ha yang terdiri atas 4 Ha hutan lebat dan 2 Ha hutan belukar. Tanah keperluan fasilitas umum seluas 194.188 Ha terdiri dari 4.68 Ha lapangan olah raga, 0.500 Ha taman rekreasi, 92.00 Ha jalur hijau, dan 508 Ha kuburan. Potensi unggulan di kecamatan Sindangbarang adalah pasir besi dan pariwisata.

Kecamatan Sindangbarang terdiri atas 14.609 Kepala Keluarga, 25.415 orang laki-laki dan 25.297 orang perempuan. Mata pencaharian penduduk adalah petani pengusaha skala mikro dan skala kecil, pengrajin/industri kecil, buruh industri, buruh bangunan, buruh perkebunan, pedagang, pengangkutan, dan jasa perseorangan. Sarana perekonomian yang terdapat di kecamatan Sindangbarang meliputi pasar selapan/umum (4 pasar umum), 2 bank, dan 80 gilingan padi.

### **3.1.3 Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis**

Kecamatan Banjarsari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis dimana wilayahnya datar sampai berombak (40%), berombak sampai berbukit (25%), dan berbukit sampai bergunung (35%). Ketinggian wilayah Banjarsari berada 21 m diatas permukaan laut, suhu maksimum 29°C, suhu minimum 25°C, dan banyaknya curah hujan adalah sebesar 838,85 mm/tahun. Kecamatan Banjarsari khususnya ibukota kecamatan Banjarsari dilewati oleh jalan kabupaten yang strategis, yaitu tepat berada di tengah-tengah pusat wilayah kabupaten Ciamis dan relatif dekat dengan objek wisata pantai Pangandaran.

Kecamatan Banjarsari terdiri atas 21 (dua puluh satu) desa, 77 (tujuh puluh tujuh) dusun, dan 149 (seratus empat puluh sembilan) Rukun Warga (RW), dan 710 (tujuh ratus sepuluh) Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Banjarsari terdiri dari 10 (sepuluh) instansi otonom, 21 (dua puluh satu) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan 21 (dua puluh satu) Badan Perwakilan Desa (BPD). Kecamatan Banjarsari memiliki 3 (tiga) Puskesmas Kecamatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) dokter, 28 (dua puluh delapan) perawat, dan 46 bidan. Jumlah Pos/Klinik KB 21 (dua puluh satu), jumlah PUS 19.977 pasang, jumlah posyandu 515 (lima ratus lima belas), jumlah akseptor KB 15.536 orang.

Kecamatan Banjarsari memiliki luas tanah sawah yang terdiri dari tanah irigasi teknis seluas 1.160 Ha, irigasi sederhana 885 Ha, sawah rendengan/tadah hujan

seluas 1.090 Ha, dan sawah pasang surut 5 Ha. Tanah kering di Kecamatan Banjarsari terdiri dari 5.705 Ha pekarangan/bangunan/emplasemen, 2.397 Ha tegal/kebun, 5.549 Ha ladang/tanah huma. Tanah basah seluas 106 Ha yang terdiri dari 4 Ha rawa/pasang surut dan 102 Ha balong/empang/kolam. Tanah hutan berupa hutan sejenis seluas 1.709 Ha dan tanah perkebunan berupa perkebunan swasta seluas 635 Ha. Tanah keperluan fasilitas umum terdiri dari 310 m<sup>2</sup>/Ha mesjid/musholla/langgar dan 80 m<sup>2</sup>/Ha gereja. Luas tanah lainnya seperti tanah tandus dan tanah pasir yaitu 790 m<sup>2</sup>/Ha. Potensi kecamatan Banjarsari berada pada sektor perkebunan, peternakan dan perikanan.

Kecamatan Banjarsari terdiri atas 30.856 Kepala Keluarga, 47.417 orang laki-laki dan 48.663 orang perempuan. Mata pencaharian penduduk adalah petani (3.288 orang petani pemilik tanah, 2.068 petani penggarap tanah, 1.084 orang petani penggarap/penyekap, 9.397 orang buruh tani), pengusaha sedang/besar (59 orang), pengrajin/industri kecil (175 orang), buruh industri (4.360 orang), buruh bangunan (2.657), buruh perkebunan (679 orang), pedagang (8.180), pengangkutan (150 orang), PNS (1.962 orang), ABRI (145 orang), pensiunan ABRI-PNS (2.125 orang), peternak (10 orang peternak sapi biasa, 284 orang peternak kerbau, 918 orang peternak kambing, 891 orang peternak domba, 13 orang peternak ayam, dan 5 orang peternak itik).

Prasarana/sarana pengangkutan dan komunikasi di kecamatan Banjarsari 100% menggunakan lalu lintas darat, yakni terdapat jalan aspal beton (85 km kondisi baik, 72 km kondisi sedang, dan 140 km kondisi rusak), 140 km jalan perkakas dengan kondisi rusak, 72 km jalan tanah dengan kondisi rusak. Jalan utama yang dapat dilalui kendaraan roda 4 adalah sepanjang 225 km. Sarana umum yang dapat digunakan oleh penduduk kecamatan antara lain mobil, motor, sepeda, dan ojek.

Sarana perekonomian yang terdapat di kecamatan Banjarsari meliputi koperasi (3 koperasi simpan pinjam, 4 koperasi unit desa, dan 4 badan-badan kredit), pasar selapan/umum (3 pasar umum, 1 pasar ikan, dan 1 pasar hewan), 1 pasar bangunan permanen/semi permanen, 2 pasar tanpa bangunan semi permanen, 4 bank, 15 lumbung desa, 1 stasiun bus, dan 21 telepon umum.

Perusahaan/usaha yang terdapat di kecamatan Banjarsari meliputi industri (3 industri besar dan sedang dengan 100 orang tenaga kerja, 20 industri kecil dengan 102 orang tenaga kerja, 200 industri rumah tangga dengan 200 orang tenaga kerja), 1 perhotelan/losmen/penginapan dengan 5 orang tenaga kerja, 15 rumah makan/warung makan dengan 100 orang tenaga kerja, 200 perdagangan dengan 210 orang tenaga kerja, dan 160 angkutan dengan 160 orang tenaga kerja.

### **3.1.4 Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya**

Kecamatan Cisayong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dimana ketinggian wilayah Banjarsari berada 700.38 m diatas

permukaan laut, dengan banyaknya curah hujan sebesar 17.781 mm/tahun. Kecamatan Cisayong memiliki letak yang sangat strategis karena berbatasan secara langsung dengan kota Tasikmalaya. Jarak kantor Kecamatan dengan ibu kota Kabupaten adalah 11 km. Kecamatan Cisayong terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) Badan Perwakilan Desa (BPD), 31 (tiga puluh satu) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan 5 (lima) lainnya. Kecamatan Cisayong memiliki 1 dokter, 15 bidan, 19 dukun, 13 paramedis, dan 10 pustu. Jumlah posyandu yang terdapat di kecamatan Cisayong yaitu sebanyak 64 (enam puluh empat).

Kecamatan Cisayong terdiri atas 1.438 Kepala Keluarga, 2.457 orang laki-laki dan 2.429 orang perempuan. Mata pencaharian penduduk terdiri dari petani (11.304 orang) dan lainnya (13.680 orang).

Kecamatan Cisayong memiliki luas tanah sawah yang terdiri dari 75 Ha tanah sawah teknis, 4296 Ha tanah sawah setengah teknis seluas 4.296 Ha, dan tanah hujan seluas 83.279 Ha. Tanah kering di Kecamatan Cisayong terdiri dari 592.196 Ha tegal dan 74.926 Ha mukim. Tanah basah berupa rawa seluas 11.219 Ha. Tanah kebun terdiri atas tanah kebun rakyat seluas 77.615 Ha dan swasta seluas 843.606 Ha. Tanah keperluan fasilitas umum terdiri dari 661 Ha lapangan, 15.009 Ha kantor, dan 36.671 Ha lainnya. Tanah hutan terdiri atas 505 Ha hutan lindung dan 328 Ha hutan produksi. Potensi unggulan kecamatan Cisayong yaitu: (a) lahan pertanian padi, tanaman pangan/ hortikultura, (b) peternakan domba dan ternak kecil, (c) lahan perikanan dan tempat penjualan/ pemasaran, (d) pusat perdagangan di desa Cisayong, (e) pariwisata alam antara lain curug Badak, air terjun, batu Blek, dan (f) kelompok pengrajin pembuat makanan ringan seperti kelontong, opak, ranginang, wajit, gula aren. Sarana perekonomian yang terdapat di kecamatan Cisayong meliputi 9 (sembilan) koperasi, 446 (empat ratus empat puluh enam) industri, 132 (seratus tiga puluh dua) warung, dan 251 (dua ratus lima puluh satu) lainnya.

### **3.2 Keragaan Sosial Ekonomi IRT Peserta Pendampingan**

Karakteristik umum keluarga korban gempa bumi pengelola industri rumah tangga (IRT) yang menjadi sasaran di empat lokasi kegiatan pendampingan ekonomi pasca bencana disajikan pada Tabel 4 sampai Tabel 14 Data dari empat lokasi menunjukkan dua pertiga pemilik IRT yang menjadi IRT peserta pendampingan adalah laki-laki. Di Bandung, hampir semua pemilik IRT adalah laki-laki, namun di Tasikmalaya, prosentasi pemilik IRT hampir setara bahkan lebih banyak perempuan (Tabel 4).

Rentang usia pemilik IRT di empat lokasi berkisar antara 23 hingga 80 tahun. Sebaran persentase pemilik IRT terbesar menurut usia adalah pada tahapan usia dewasa akhir (32%). Kemudian diikuti tahapan usia dewasa akhir dan dewasa madya (27.9% dan 23.1%). Terdapat persentase kecil (6.8%) pemilik IRT yang

berusia dewasa awal, namun hal tersebut menunjukkan bahwa para pemuda sudah mulai memiliki usaha sendiri (Tabel 4).

Tabel 4 Sebaran pemilik IRT (%) menurut jenis kelamin dan usia

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<b>Jenis Kelamin Pemilik Industri Rumah Tangga (n=147)</b>					
Laki-laki	91.4	60	85.3	44.2	68.7
Perempuan	8.6	40	14.7	55.8	31.3
Total	100	100	100	100	100
<b>Sebaran Usia Pemilik Industri Rumah Tangga (n=147)</b>					
Dewasa Awal (20-30)	2.9	2.9	14.7	7	6.8
Dewasa Madya (31-40)	37.1	20	8.8	25.6	23.1
Dewasa Akhir (41-50)	34.3	22.9	41.2	32.6	32.7
Lansia Awal (51-60)	20	34.3	32.4	25.6	27.9
Lansia Akhir (>60)	5.7	20	2.9	9.3	9.5
Total	100	100	100	100	100
Minimal-Maksimal	24-73	30-80	25-72	23-65	23-80
Rataan	45.33	52.11	45.67	45.302	47.3

Hampir setengah (47.3%) pemilik IRT berpendidikan Sekolah Dasar, dan seperlimanya (21 %) berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan sisanya menyebar pada jenjang pendidikan SMA, D2, D3, dan S1. Data menunjukkan cukup besar (13.5%) pemilik IRT yang tidak menduduki bangku sekolah (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah memiliki IRT memiliki jenjang pendidikan yang rendah.

Tabel 5 Sebaran pemilik IRT (%) menurut jenjang pendidikan terakhir

Jenjang Pendidikan	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
SD	25	71.4	70.6	27.9	47.3
SMP	44.4	5.7	8.8	25.6	21.6
SMA	16.7	8.6	8.8	4.7	9.5
D2	.0	2.9	0	0	0.7
D3	2.8	2.9	2.9	2.3	2.7
S1	8.3	2.9	8.8	0	4.7
Tidak Sekolah	2.8	5.7	0	39.5	13.5
Total	100	100	100	100	100

Rentang usia pasangan pemilik IRT yang sudah menikah adalah 25-84 tahun untuk suami, dan 24 hingga 75 untuk istri. Persentase terbesar usia suami berada pada tahapan usia lansia awal (29.9%) diikuti tahapan usia dewasa akhir (21.1%). Persentase terkecil usia suami berada pada tahapan usia dewasa awal (4.8 %). Sedangkan diantara 19 persen pemilik IRT berjenis kelamin perempuan lainnya terdapat yang belum menikah dan atau berstatus janda. Persentase terbesar usia istri berada pada tahapan usia lansia awal (31.3%) diikuti tahapan usia dewasa akhir (29.9%). Persentase terkecil usia istri berada pada tahapan usia dewasa awal (4.8 %). Kemudian diantara 6.1 persen pemilik IRT berjenis kelamin laki-laki, terdapat pemilik IRT yang belum menikah dan atau duda (Tabel 6).

Tabel 6 Sebaran IRT (%) menurut usia suami dan istri

Sebaran Usia Suami	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
Dewasa Awal (20-30 tahun)	0	0	5.9	11.6	4.8
Dewasa Madya (31-40 tahun)	0	2.9	14.7	4.7	5.4
Dewasa Akhir (41-50 tahun)	37.1	22.9	8.8	16.3	21.1
Lansia Awal (51-60 tahun)	34.3	17.1	35.3	32.6	29.9
Lansia Akhir (> 60 tahun)	20	22.9	17.6	18.6	19.7
Belum Menikah/ Janda	8.6	34.3	17.6	16.3	19
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Minimal-Maksimal	32-69	29-84	25-73	30-70	0-84
Rataan	45.8	54.657	44.38	43.139	46.8
<b>Sebaran Usia Istri</b>					
Dewasa Awal (20-30 tahun)	2.9	5.7	2.9	7	4.8
Dewasa Madya (31-40 tahun)	8.6	8.6	17.6	9.3	10.9
Dewasa Akhir (41-50 tahun)	45.7	22.9	20.6	30.2	29.9
Lansia Awal (51-60 tahun)	25.7	31.4	35.3	32.6	31.3
Lansia Akhir (> 60 tahun)	14.3	22.9	14.7	16.3	17
Belum Menikah/ Duda	2.9	8.6	8.8	4.7	6.1
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Minimal-Maksimal	25-67	27-75	24-62	27-65	0-75
Rataan	40.428	43.114	41.93	40.139	41.29

Pemilik IRT yang sudah menikah memiliki rentang lama pernikahan 0.5 hingga 57 tahun dengan persentase terbesar telah menikah lebih dari 50 tahun (39.5%). Lama pernikahan tertinggi berikutnya adalah 26 hingga 50 tahun (17%), 16 hingga 20 tahun (14.3%), dan 21-25 tahun (13.6%). Kemudian terdapat lama pernikahan 0.5 hingga 5 tahun sebesar 5.4 persen (Tabel 6).

Tabel 7 Sebaran IRT (%) menurut lama menikah dan besar keluarga

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<b>Lama Menikah</b>					
0.5-5 tahun	0	5.7	8.8	7	5.4
6-10 tahun	2.9	0	2.9	4.7	2.7
11-15 tahun	5.7	8.6	8.8	4.7	6.8
16-20 tahun	22.9	8.6	2.9	20.9	14.3
21-25 tahun	20	17.1	2.9	14	13.6
26-50 tahun	22.9	5.7	17.6	20.9	17
>50 tahun	25.7	54.3	55.9	25.6	39.5
Belum Menikah	0	0	0	2.3	0.7
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Minimal-Maksimal	4-45	7-46	2-45	0.5-57	0-57
Rataan	21.38	25.7	25.5	21.127	23.13
<b>Besar Keluarga Berdasarkan BKKBN 1998</b>					
Keluarga Kecil	31.4	88.6	55.9	55.8	57.8
Keluarga Sedang	51.4	8.6	26.5	32.6	29.9
Keluarga Besar	17.1	2.9	17.6	11.6	12.2
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Minimal-Maksimal	1-18	1-9	2-11	2-11	1-18
Rataan	5.628	3.428	4.5	4.465	1.5442

Lebih dari setengah keluarga pemilik IRT memiliki besar keluarga pada kategori kecil (57.8%), yaitu memiliki jumlah anggota keluarga kurang dari sama dengan 4 orang. Persentase terbesar kedua adalah pemilik IRT memiliki besar keluarga

pada kategori sedang dengan jumlah anggota keluarga 5 hingga 8 orang (29.9%). Kemudian terdapat 12.2 persen keluarga IRT dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 8 orang yang berarti masuk kepada kategori keluarga besar (Tabel 7).

Bencana gempa bumi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga dan masyarakat korban bencana, salah satunya adalah perubahan pekerjaan dan penurunan pendapatan. Tabel 8 menunjukkan keragaan perubahan pekerjaan dan penurunan pendapatan keluarga IRT peserta pendampingan di empat lokasi kegiatan pendampingan ekonomi.

Tabel 8 Sebaran IRT (%) menurut perubahan pekerjaan dan penurunan pendapatan

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<b>Berubah Pekerjaan (n=147)</b>					
Tidak Berubah	88.6	100	100	97.7	96.6
Berubah	11.4	0	0	2.3	3.4
Total	100	100	100	100	100
<b>Pendapatan Mengalami Penurunan (n=147)</b>					
Tidak Mengalami Penurunan	54.3	79.4	79.4	62.8	68.5
Mengalami Penurunan	45.7	20.6	20.6	37.2	31.5
Total	100	100	100	100	100

Sebagian besar (96.6%) kepala keluarga pada keluarga IRT peserta pendampingan tidak mengalami perubahan pekerjaan setelah bencana gempa bumi terjadi. Presentasi terbesar yang mengalami perubahan pekerjaan adalah keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Bandung (11.4%). Selain perubahan pekerjaan bencana gempa bumi menurunkan pendapatan keluarga IRT peserta pendampingan. Sepertiga peserta pendampingan (31.5%) mengalami penurunan pendapatan setelah bencana gempa bumi, yang terbesar dialami keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Bandung (45.7%). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang terkena dampak ekonomi paling besar dibanding 3 kabupaten sasaran lainnya.

Bencana selalu membawa dampak ekonomi yang besar. Keluarga akan mampu bertahan dalam hal ekonomi (fisik), apabila terdapat minimal satu anggota keluarga yang bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Namun demikian akan lebih baik jika memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan (Sunarti, 2001). Keragaan anggota keluarga yang bekerja dengan lebih dari satu jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Sebaran IRT (%) menurut pola nafkah ganda anggota keluarga

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<b>Nafkah Ganda Suami (n=147)</b>					
1 pekerjaan	74.3	40	47.1	67.4	57.8
2 pekerjaan	25.7	60	52.9	32.6	42.2
Total	100	100	100	100	100
<b>Nafkah Ganda Istri (n=147)</b>					
Tidak Bekerja	45.7	22.9	47.1	33.3	37
1 pekerjaan	42.9	45.7	47.1	47.6	45.9
2 pekerjaan	11.4	31.4	5.9	19	17.1
Total	100	100	100	100	100
<b>Nafkah Ganda Anak (n=147)</b>					
Tidak Bekerja	80	79.4	97.1	83.7	84.9
1 pekerjaan	20	20.6	2.9	16.3	15.1
Total	100	100	100	100	100
<b>Nafkah Ganda Anggota Keluarga Lain (n=147)</b>					
Tidak Bekerja	94.3	100	97.1	100	98
1 pekerjaan	5.7	0	2.9	0	2
Total	100	100	100	100	100

Dari keseluruhan keluarga IRT peserta pendampingan, sebanyak 57.8 persen suami memiliki nafkah ganda dan 45.9 persen istri memiliki satu pekerjaan. Kontribusi pendapatan keluarga IRT peserta pendampingan dari anak masih relatif rendah di semua lokasi, karena hanya 15.1 persen anak yang bekerja, demikian juga dengan kontribusi anggota keluarga lain hanya 2 persen yang memiliki pekerjaan.

Pendapatan total keluarga IRT peserta pendampingan adalah pendapatan yang berasal dari seluruh anggota keluarga (suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya) yang dihitung berdasarkan pendapatan per bulan. Sebaran IRT menurut pendapatan total dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Sebaran IRT (%) menurut pendapatan total keluarga

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<b>Pendapatan Total (Rp 000) n=147</b>					
< Rp 1.000	2.9	42.8	35.3	30.2	27.9
Rp 1.000-2.500	45.4	31.4	38.2	48.8	41.5
Rp 2.500-4.000	3.7	3.7	8.8	16.3	10.9
Rp 4.000-4.500	5.7	5.7	5.9	2.3	4.8
Rp 4.500-7.000	31.5	0	2.9	2.3	8.8
Rp 7.000-27.000	2.9	11.5	8.8	0	6.1
Total	100	100	100	100	100
Minimal-	700-	250-	300-	50-6.750	50-
Maksimal	27.000	12.400	16.000		27.000
Rataan	4.339	2.539	2.602	1.827	2.774

Prosentase terbesar (41.5%) IRT peserta pendampingan berpendapatan antara satu sampai dua setengah juta rupiah per bulan, dan masih cukup besar (27.9%) yang berpendapatan keluarga dibawah satu juta per bulan. Persentasi terbesar (42.8) keluarga IRT peserta pendampingan yang memiliki penghasilan di bawah Rp 1,000,000.00 adalah keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Cianjur. Rataan pendapatan keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Bandung merupakan yang terbesar dibandingkan dengan 3 lokasi lainnya.

Pendapatan keluarga yang tinggi tidak akan berarti, bila diikuti oleh pengeluaran keluarga yang tinggi pula, bahkan tidak jarang pengeluaran keluarga lebih besar dari pendapatan keluarga. Tabel 11 menunjukkan sebaran keluarga IRT peserta pendampingan berdasarkan perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan serta penggunaan kelebihan pendapatan oleh keluarga IRT peserta pendampingan.

Tabel 11 Sebaran IRT (%) menurut perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan, dan Penggunaan kelebihan pendapatan

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
Perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan (n=147)					
Pengeluaran = Pendapatan	25.7	20	35.3	23.3	25.9
Pengeluaran > Pendapatan	31.4	71.4	47.1	46.5	49
Pengeluaran < Pendapatan	42.9	8.6	17.6	30.2	25.2
Total	100	100	100	100	100
Penggunaan kelebihan pendapatan (n=37)					
Menabung	46.7	0	33.3	38.5	37.8
Membeli	0	33.3	0	0	2.7
Stok	33.3	0	33.3	15.4	24.3
Lainnya	20	66.7	33.3	38.5	32.4
Menabung dan membeli	0	0	0	7.7	2.7
Total	100	100	100	100	100

Hampir setengah (49%) dari keluarga IRT peserta pendampingan memiliki pengeluaran yang lebih dari pendapatan. Persentase terbesar (71.4%) untuk pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan ada di Kabupaten Cianjur. Sebanyak 35.3 persen keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Cianjur memiliki pendapatan yang sama dengan pengeluaran dan merupakan persentase terbesar dibandingkan dengan 3 lokasi lainnya. Persentase terbesar (42.9%) untuk pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran, yaitu keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Bandung. Sebanyak 37.8 persen keluarga IRT peserta pendampingan dari 4 kabupaten yang memiliki pendapatan lebih besar dari pengeluaran menggunakan uangnya untuk menabung. Namun, tidak ada (0%) keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Cianjur yang menggunakan kelebihan pendapatan untuk menabung. Sebanyak 33.3 persen keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Cianjur menggunakan kelebihan pendapatannya untuk membeli sesuatu.

Pengeluaran keluarga meliputi pengeluaran untuk pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dll. Rata-rata per bulan pengeluaran pangan keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi, yaitu Rp 1,003,503. Rata-rata pengeluaran kesehatan keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi, yaitu Rp 343,600. Akan tetapi, ada beberapa keluarga IRT peserta pendampingan yang tidak memiliki pengeluaran untuk kesehatan karena hanya sebagian kecil yang memiliki penyakit serius. Rata-rata pengeluaran pendidikan keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi, yaitu Rp 362,409. Pengeluaran untuk papan atau perbaikan rumah relatif lebih sedikit, yaitu Rp 96,836 di 4 lokasi.

Keluarga IRT peserta pendampingan yang memiliki kelebihan pendapatan di 4 lokasi sebanyak 37 keluarga IRT peserta pendampingan. Rata-rata kelebihan pendapatan keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi sebanyak Rp 868,135. Keragaan kelebihan pendapatan dan nilai tertinggi kelebihan di 4 lokasi disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12 Sebaran IRT (%) menurut rata-rata kelebihan pendapatan dan nilai tertinggi kelebihan pendapatan

Pendapatan (Rp000)	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<500	33.3	33.3	50	84.6	54.1
500-1.000	46.7	66.7	0	7.7	27
1.000-2.000	20	0	0	7.7	10.8
2.000-3.000	0	0	16.7	0	2.7
>3.000	0	0	33.3	0	5.4
Total	100	100	100	100	100
Min-Maks	150-2.000	150-800	600-5.000	6-1.500	6-5.000
Rataan	970	516	1.893	358	868
Nilai tertinggi kelebihan pendapatan (Rp.000) n=37					
<500	20	33.3	33.3	53.8	35.1
500-1.000	26.7	33.3	16.7	23.1	24.3
1.000-3.000	33.3	33.3	0	7.7	18.9
>3.000	20	0	50	15.4	21.6
Total	100	100	100	100	100
Min-Maks	200-6.000	300-1.200	5-6.000	10-4.000	5-6.000
Rataan	1746667	700000	2284167	943846.2	1466892

Rata-rata kelebihan pendapatan keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Bandung lebih tinggi dari rata-rata pendapatan keluarga IRT peserta pendampingan keseluruhan, yaitu Rp 970,000. Persentase terbesar (54.1%) rata-rata kelebihan pendapatan keluarga IRT peserta pendampingan berada pada kisaran kurang dari Rp 500,000.00. Lebih dari tiga perempat (84.6%) keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki kelebihan pendapatan kurang dari Rp 500,000.00. Sebanyak 46.7 persen di Kabupaten Bandung dan 66,7 persen di Kabupaten Cianjur kelebihan pendapatan keluarga IRT peserta pendampingan berada pada kisaran Rp 500,000.00-1,000,000.00.

Tabel 13 menyajikan sebaran keluarga IRT peserta pendampingan yang memiliki anak usia sekolah serta jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Anak usia sekolah berkisar antara usia 6 tahun sampai 12 tahun atau yang bersekolah di sekolah dasar (SD).

Tabel 13 Sebaran IRT (%) menurut kepemilikan anak usia sekolah

Kepemilikan Anak Usia Sekolah	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
Tidak memiliki anak usia sekolah	5.7	20	38.2	32.6	24.5
Memiliki anak usia sekolah	94.3	80	61.8	67.4	75.5
Total	100	100	100	100	100
Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (n=111)					
Tidak Ada	63.6	11.4	33.3	72.4	46.8
1 Anak	21.2	82.1	33.3	17.2	37.8
2 Anak	6.1	3.6	33.3	6.9	10.8
3 Anak	9.1	3.6	0	3.4	4.5
Total	100	100	100	100	100
Minimal-Maksimal	0-4	0-8	0-2	0-3	0-4
Rataan	0.73	1.46	1	0.413	0.88

Jumlah keluarga IRT peserta pendampingan di empat lokasi yang memiliki anak usia sekolah sebanyak 75.5 persen (24.5 % keluarga IRT peserta pendampingan sudah tidak memiliki anak usia sekolah). Dari 75.5 persen keluarga IRT peserta pendampingan atau 111 keluarga IRT peserta pendampingan yang memiliki anak usia sekolah, sebanyak 46,8 persen bersekolah. Persentase terbesar (72.4%) keluarga IRT peserta pendampingan yang memiliki anak usia sekolah yang bersekolah adalah keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten tasikmalaya. Keluarga IRT peserta pendampingan yang memiliki satu orang anak, sebanyak 37.8 persen tidak bersekolah dan pesentase terbesar (82.1%) keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Cianjur.

Luas rumah per kapita yang ideal adalah lebih dari atau sama dengan 8 m<sup>2</sup>/kapita. Ideal maksudnya, memiliki *spacing* yang baik sehingga memungkinkan anggota keluarga memiliki ruang pribadi. Tabel 14 menyajikan sebaran IRT menurut pemenuhan luas rumah per kapita.

Tabel 14 Sebaran IRT (%) menurut pemenuhan luas rumah per kapita

Luas memenuhi syarat	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmaaya	Total
Tidak Memenuhi	13.3	33.3	33.3	23.1	21.6
Memenuhi	86.7	66.7	66.7	76.9	78.4
Total	100	100	100	100	100

Luas rumah keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi berkisar antara 10 m<sup>2</sup>-450 m<sup>2</sup>. Lebih dari tiga perempat (78.4%) keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi memiliki luas rumah per kapita yang ideal atau leboh dari 8 m<sup>2</sup>. Persentase terbesar (86.7%) keluarga IRT peserta pendampingan yang luas rumahnya memenuhi luas rumah perkapita yang ideal berada di Kabupaten Bandung.

Tabel 15 sampai Tabel 18 menyajikan sebaran IRT menurut masalah kebutuhan pokok yang dihadapi. Kebutuhan pokok meliputi, kebutuhan pangan, papan, kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, dan BBM. Data menunjukkan prosentase IRT yang mengalami masalah kebutuhan pokok tersebut berkisar antara 1.4 persen (BBM) sampai 26 persen (kesehatan). Masih terdapat 14 % IRT yang mengakui memiliki masalah pemenuhan kebutuhan pangan.

Tabel 15 Sebaran IRT (%) menurut masalah kebutuhan pokok yang dihadapi

Memiliki Masalah	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasik	Total
Pangan	8.6	11.4	14.7	20.9	14.3
Papan	26.5	14.3	35.3	20.9	24
Kesehatan	5.7	42.9	32.4	23.3	25.9
Pendidikan	8.6	17.1	5.9	14	11.6
Air	2.9	17.1	2.9	4.7	6.8
Listrik	0	74.3	2.9	4.7	19.7
BBM	0	2.9	2.9	0	1.4

Sebanyak 21 keluarga IRT peserta pendampingan dari 4 lokasi mengalami masalah pangan, yaitu pangan kurang bergizi (14.3%) dan keuangan untuk membeli pangan yang kurang baik (85.7%). Dari ke 4 lokasi Kabupaten Bandung dengan persentase 66.7 persen masalah pangan yang dihadapi keluarga IRT peserta pendampingan adalah masalah pangan yang kurang bergizi. Sebanyak 34 keluarga IRT peserta pendampingan dari 4 lokasi yang mengalami masalah papan. Sebanyak 79.4 persen keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi yang mengalami masalah papan, yaitu rumah rusak perlu diperbaiki (Tabel 16).

Sebanyak 37 keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi mengalami masalah kesehatan. Sebanyak 37.8 persen anggota keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi mengalami penyakit serius dan 35 persen sering mengalami gangguan kesehatan. Sebanyak 13.5 persen keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi mengeluhkan kesulitan biaya perawatan kesehatan, persentase terbesar di Kabupaten Bandung sebanyak 50 persen mengatakan bahwa masalah kesehatan tidak bisa diatasi karena masalah biaya perawatan kesehatan. Sebanyak 17 keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi mengatakan bahwa masalah pendidikan disebabkan karena biaya pendidikan mahal. Semua (100%) keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi yang mengalami masalah pendidikan akibat biaya pendidikan.

Tabel 16 Sebaran IRT (%) menurut masalah kebutuhan pokok yang dihadapi

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalay	Total
a					
<b>Masalah Pangan (n=21)</b>					
Kurang bergizi	66.7	25	0	0	14.3
Uang	33.3	75	100	100	85.7
Total	100	100	100	100	100
<b>Masalah Papan (n=34)</b>					
Jumlah anggota keluarga yang besar	0	0	0	11.1	2.9
Ingin mencari rumah yang strategis	0	20	0	0	2.9
Rumah masih berlantai tanah	0	0	8.3	0	2.9
Rumah masih sewa	12.5	20	0	22.2	11.8
Rumah perlu diperbaiki	87.5	60	91.7	66.7	79.4
Total	100	100	100	100	100
<b>Masalah Kesehatan (n=37)</b>					
Belum ada fasilitas MCK di rumah	0	0	9.1	0	2.7
Biaya kesehatan	50	0	9.1	33.3	13.5
Jarak ke dokter jauh	0	6.7	0	0	2.7
Keracunan makanan	0	6.7	0	0	2.7
Penyakit serius	50	80	9.1	0	37.8
Sakit biasa (demam, flu)	0	6.7	9.1	0	5.4
Sering sakit	0	0	63.6	66.7	35.1
Total	100	100	100	100	100
<b>Masalah Pendidikan (n=17)</b>					
Biaya pendidikan mahal	100	100	100	100	100
Total	100	100	100	100	100
<b>Masalah Air (n=9)</b>					
Air keruh jika musim hujan	0	50	0	0	33.3
Air sumur asin karena ada Pabrik pengemasan garam didekat rumah	0	0	0	50	11.1
Air untuk minum harus beli	0	0	0	50	11.1
Belum ada fasilitas MCK	0	0	100	0	11.1
Kalau banjir sumur terendam	0	16.7	0	0	11.1
Masih menumpang	0	33.3	0	0	22.2
Total	0	100	100	100	100
<b>Masalah Listrik (n=30)</b>					
Ada kerusakan	0	0	100	0	3.3
Biaya mahal	0	3.7	0	50	6.7
Menumpang	0	7.4	0	50	10
Sering mati	0	88.9	0	0	80
Total	0	100	100	100	100
<b>Masalah BBM (n=2)</b>					
Bensin susah dicari	0	100	0	0	50
Gas boros	0	0	100	0	50
Total	0	100	100	0	100

Masalah air dirasakan sebagian kecil keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi, yaitu sebanyak 9 orang. Masalah air yang dirasakan keluarga IRT peserta pendampingan beragam, air keruh saat musim hujan (33.3%), belum ada fasilitas MCK (11.1%), masih menumpang (22.2%), dll. Sebanyak 80 persen keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi yang mengalami masalah listrik mengatakan bawa listrik sering mati. Dari 37 orang yang mengalami masalah listrik hanya 6.7 persen yang mengatakan biaya mahal. Jadi, masalah utama listrik di 4 lokasi adalah listrik sering mati. Masalah BBM dialami oleh 2 orang dari 4 lokasi IRT

peserta pendampingan. Masing-masing mengatakan bahwa masalah BBM adalah bensin susah dicari dan gas sangat boros.

Tabel 17 menyajikan sebaran keluarga IRT peserta pendampingan menurut perilaku coping dalam pemenuhan pangan. Kondisi keuangan yang tidak stabil menuntuk keluarga untuk memiliki strategi agar pemenuhan pangan keluarga dapat terpenuhi. Strategi yang dilakukan, diantaranya mengurangi kualitas dan kuantitas pangan, membeli makanan yang lebih murah, mengurangi porsi makan, mengurangi jumlah pangan yang dikonsumsi, Membeli pangan dengan berhutang, dan merubah distribusi makanan. Sebanyak 60.5 persen keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi tidak melakukan strategi coping terkait kualitas dan kuantitas pangan, sebanyak 79.6 persen tidak mengurangi porsi makan, sebanyak 66 persen tidak mengurangi jumlah pangan yang dikonsumsi, dan sebanyak 70.1 persen tidak merubah distribusi makanan. Strategi yang dilakukan keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi sebanyak 52.4 persen, yaitu dengan membeli makanan yang lebih murah dan 50.7 persen dengan berhutang untuk membeli pangan. Perilaku coping pemenuhan pangan keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Bandung lebih dari setengah memilih membeli makanan yang lebih murah (68.6%), dibandingkan memilih strategi coping lainnya. Hal yang sama terjadi pada keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 60.5 persen melakukan coping pemenuhan pangan dengan membeli makanan yang murah. Berbeda dengan keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Cianjur (57.1%) dan Ciamis (72.7%) yang lebih dari setengahnya memilih berhutang untuk membeli pangan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur dan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang tingkat kepercayaan terhadap tetangga masih tinggi, dan belum terbawa arus perkembangan jaman sehingga berhutang ke warung masih dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa.

Tabel 17 Sebaran IRT (%) menurut perilaku coping dalam pemenuhan pangan

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
Kurangi kualitas-kuantitas pangan	42.9	17.1	35.3	58.1	39.5
Beli makanan yang lebih murah	68.6	40	38.2	60.5	52.4
Kurangi porsi makan	20	31.4	23.5	9.3	20.4
Kurangi jumlah pangan dikonsumsi	40	37.1	26.5	32.5	34
Beli Pangan Berhutang	25.7	57.1	72.7	48.8	50.7
Ubah Distribusi Makan	28.6	31.4	14.7	41.9	29.9

Tabel 18 menyajikan sebaran IRT menurut praktek pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga meliputi proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga proses evaluasi. Praktek pengelolaan keuangan keluarga ada baiknya dilakukan oleh pasangan suami istri sehingga pendapatan dan pengeluaran keluarga dapat tercatat dengan rapi. Akan tetapi, keluarga IRT peserta pendampingan banyak yang belum melakukan pengelolaan keuangan keluarga dengan baik dan benar.

Tabel 18 Sebaran IRT (%) menurut praktek pengelolaan keuangan keluarga

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<b>Merencanakan penggunaan uang setiap bulan</b>					
Tidak	20	31.4	55.9	34.9	35.4
Kadang	20	25.7	23.5	25.6	23.8
Selalu	60	42.9	20.6	39.5	40.8
Total	100	100	100	100	100
<b>Menghitung perkiraan biaya hidup sehari-hari</b>					
Tidak	17.1	42.9	47.1	44.2	38.1
Kadang	25.7	22.9	26.5	39.5	29.3
Selalu	57.1	34.3	26.5	16.3	32.7
Total	100	100	100	100	100
<b>Merencanakan pembelian</b>					
Tidak	20	74.3	50	44.2	46.9
Kadang	28.6	20	32.4	27.9	27.2
Selalu	51.4	5.7	17.6	27.9	25.9
Total	100	100	100	100	100
<b>Mencatat pengeluaran</b>					
Tidak	31.4	82.9	73.5	81.4	68
Kadang	14.3	11.4	17.6	14	14.3
Selalu	54.3	5.7	8.8	4.7	17.7
Total	100	100	100	100	100
<b>Menetapkan biaya maksimal dalam pengeluaran</b>					
Tidak	34.3	82.9	52.9	55.8	56.5
Kadang	31.4	8.6	32.4	20.9	23.1
Selalu	34.3	8.6	14.7	23.3	20.4
Total	100	100	100	100	100
<b>Menabung/ikut arisan</b>					
Tidak	40	71.4	44.1	25.6	44.2
Kadang	20	8.6	17.6	23.3	17.7
Selalu	40	20	38.2	51.2	38.1
Total	100	100	100	100	100
<b>Memisahkan uang sesuai peruntukkan</b>					
Tidak	42.9	31.4	50	46.5	42.9
Kadang	11.4	14.3	17.6	16.3	15
Selalu	45.7	54.3	32.4	37.2	42.2
Total	100	100	100	100	100
<b>Evaluasi pendapatan dan pengeluaran</b>					
Tidak	31.4	68.6	55.9	41.9	49
Kadang	25.7	17.1	23.5	27.9	23.8
Selalu	42.9	14.3	20.6	30.2	27.2
Total	100	100	100	100	100
<b>Membandingkan penerimaan dan pengeluaran</b>					
Tidak	14.3	48.6	44.1	25.6	32.7
Kadang	28.6	25.7	23.5	44.2	31.3
Selalu	57.1	25.7	32.4	30.2	36.1
Total	100	100	100	100	100
<b>Membicarakan masalah keuangan dengan pasangan</b>					
Tidak	28.6	20	32.4	20.9	25.2
Kadang	20	14.3	2.9	7	10.9
Selalu	51.4	65.7	64.7	72.1	63.9
Total	100	100	100	100	100

Empat dari sepuluh keluarga IRT peserta pendampingan selalu merencanakan penggunaan uang setiap bulannya. Akan tetapi masing-masing dalam jumlah

yang hampir semuanya tidak memiliki rencana penggunaan uang setiap bulannya (35%), tidak menghitung perkiraan biaya hidup sehari-hari (38%). Sebaliknya, sepertiga (32.7%) keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi selalu menghitung perkiraan biaya hidup sehari-hari. Sebanyak 46.9 persen keluarga IRT peserta pendampingan di lokasi tidak merencanakan pembelian, demikian juga sebanyak 68 persen tidak mencatat pengeluaran, sebanyak 56.5 persen tidak menetapkan biaya maksimal untuk pengeluaran, dan sebanyak 42.9 persen tidak memisahkan uang sesuai untuk peruntukannya (Tabel 18).

Arisan/tabungan merupakan bentuk penyimpanan uang sederhana agar keluarga memiliki uang cadangan saat menghadapi keadaan yang tidak terduga. Akan tetapi, keterlibatan keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi dalam arisan dan tabungan masih rendah. Hanya sebanyak 38.1 persen yang mengatakan selalu mengikuti arisan/tabungan dan 17.1 persen mengatakan kadang-kadang mengikuti arisan/tabungan.

Evaluasi terhadap pendapatan dan pengeluaran adalah hal yang terpenting, namun jarang dilakukan oleh keluarga. Evaluasi ini berguna untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengeluaran sehingga tidak ada lagi pengeluaran yang tidak bermanfaat. Sebanyak 49 persen keluarga IRT peserta pendampingan di 4 lokasi tidak melakukan evaluasi terhadap pendapatan dan pengeluaran. Akan tetapi, ada sebanyak 36.1 persen IRT peserta pendampingan di 4 lokasi yang membandingkan pendapatan dan pengeluaran. Meskipun masih sedikit yang melakukan pengelolaan keluarga, tapi banyak keluarga yang sudah memiliki kesadaran untuk mengelola keuangan dengan baik bersama pasangan mereka. Sebanyak 63.9 persen keluarga IRT di 4 lokasi selalu membicarakan masalah keuangan bersama pasangan dan sebanyak 10.9 persen kadang-kadang membicarakan masalah keuangan bersama pasangan.

### **3.3 IRT peserta pendampingan yang Menderita Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana**

Bencana gempa bumi merusak rumah, tempat usaha, serta fasilitas umum. Tabel 19 menunjukkan sebaran keluarga IRT peserta pendampingan yang rumahnya rusak akibat gempa bumi beserta nilai rumah sebelum gempa bumi.

Sebagian besar IRT peserta pendampingan (85%) di 4 lokasi mengalami kerusakan setelah bencana gempa bumi. Persentase terbesar (97.7%) rumah keluarga IRT peserta pendampingan yang mengalami kerusakan setelah bencana gempa bumi, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya. Hanya 54.3 persen rumah keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Bandung yang mengalami kerusakan. Rata-rata nilai rumah keluarga IRT peserta pendampingan sebelum gempa bumi di 4 lokasi, yaitu sebesar 44 juta rupiah.

Tabel 19 Sebaran IRT (%) menurut status rusak/tidak rusak rumah setelah gempa, nilai rumah sebelum

Rumah Rusak	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
Tidak Rusak	45.7	5.7	8.8	2.3	15
Rusak	54.3	94.3	91.2	97.7	85
Total	100	100	100	100	100
Nilai Rumah Sebelum Gempa (Rp.000.000) n=147					
<Rp 20	20	60	29.4	23.3	32.6
Rp 20-50	14.4	34.3	58.8	41.9	37.4
>Rp 50	65.7	5.8	11.7	35	29.9
Total	100	100	100	100	100
Minimal-Maksimal	3 -400	2 -150	2 -200	5 -150	2 -400
Rataan	72	22.4	38.8	44.8	44.6

Sebanyak 37.4 persen rumah keluarga IRT peserta pendampingan sebelum gempa bumi bernilai 20 juta sampai 50 juta rupiah. Namun, sebanyak 32.6 persen rumah keluarga IRT peserta pendampingan sebelum gempa bernilai di bawah dua puluh juta rupiah. Setelah gempa bumi, beberapa rumah keluarga IRT peserta pendampingan yang mengalami kerusakan diperbaiki sehingga nilai rumahnya bertambah setelah gempa bumi. Akan tetapi, sebanyak 5.9 persen rumah keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Ciamis dan 2.3 persen rumah keluarga IRT peserta pendampingan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi tidak bernilai setelah gempa bumi terjadi. Keluarga IRT peserta pendampingan tidak membangun kembali dan memilih pindah dari rumah yang terkena gempa karena kondisi rumah yang sudah tidak memungkinkan diperbaiki dengan budget terbatas.

Rata-rata nilai kerusakan IRT peserta pendampingan setelah gempa bumi di 4 lokasi, yaitu sebesar 3,9 juta rupiah (Tabel 20). Sebesar 48,7 persen nilai kerusakan IRT peserta pendampingan di 4 lokasi kurang dari satu juta rupiah. Persentase terbesar (69%) nilai kerusakan yang berada di bawah Rp satu juta rupiah adalah Kabupaten Cianjur yang merupakan lokasi paling jauh dari pusat gempa bumi. Sebanyak 12.4 persen nilai kerusakan IRT peserta pendampingan di 4 lokasi berada di atas sepuluh juta rupiah.

Nilai kerugian setelah bencana ditunjukkan oleh Tabel 21 Rata-rata kerugian akibat bencana yang dialami IRT peserta pendampingan, yaitu sebesar Rp 7,060,535. Sebanyak 37.2 persen kerugian yang dialami IRT peserta pendampingan di 4 lokasi kurang dari satu juta rupiah. Persentase terbesar (57.1%) IRT peserta pendampingan yang mengalami kerugian di bawah satu juta rupiah berada di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 20 Sebaran IRT (%) menurut nilai nominal kerusakan setelah bencana

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya a	Total
Selang Nilai Kerusakan (Rp.000) n=113					
< Rp 1.000	15.2	69	44	60.6	48.7
Rp 1.000-2.000	15.3	10.3	8	15.1	12.4
Rp 2.000-5.000	23.1	10.3	28	3	15.1
Rp 5.000-10.000	19.2	0	16	12.1	11.5
> Rp 10.000	26.9	10.2	4	9.1	12.4
Total	100	100	100	100	100
Minimal-Maksimal	125- 40.900	10- 23.500	140- 18.370	50-15.000	10- 40.900
Rataan	8675000	2585172	2995000	2480908	3991777

Kabupaten Bandung merupakan lokasi dengan nilai rata-rata kerugian paling tinggi dibandingkan dengan 3 lokasi lainnya, yaitu sebesar Rp 10,592,105. Sebanyak 31.6 persen nilai kerugian IRT peserta pendampingan di Kabupaten Bandung sebesar lima sampai sepuluh juta rupiah.

Tabel 21 Sebaran IRT (%) menurut nilai nominal kerugian setelah bencana

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya a	Total
Selang Nilai Kerugian (Rp.000) n=78					
< Rp 1.000	31.6	42.8	20.8	57.1	37.2
Rp 1.000-2.000	15.9	21.4	16.6	19.1	18
Rp 2.000-5.000	10.6	7.1	16.7	14.3	12.9
Rp 5.000-10.000	31.6	14.3	4.2	4.8	12.8
> Rp 10.000	10.6	14.3	41.7	4.8	19.3
Total	100	100	100	100	100
Minimal-Maksimal	500- 105.650	300- 15.000	51- 51.280	20-11.000	20- 105.650

Kerusakan yang dialami oleh IRT peserta pendampingan di 4 lokasi, meliputi barang elektronik dan kendaraan bermotor. Tabel 22 menunjukkan sebanyak 25.2 persen dan 9.5 persen IRT peserta pendampingan di 4 lokasi mengalami kerusakan barang elektronik dan kendaraan bermotor. Sisanya tidak mengalami kerusakan barang elektronik maupun kendaraan bermotor.

Tabel 22 Sebaran IRT (%) menurut jenis kerusakan yang dialami

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
Kerusakan barang elektronik					
Tidak Rusak	77.1	74.3	55.9	88.4	74.8
Rusak	22.9	25.7	44.1	11.6	25.2
Total	100	100	100	100	100
Kerusakan kendaraan					
Tidak Rusak	91.4	82.9	94.1	93	90.5
Rusak	8.6	17.1	5.9	7	9.5
Total	100	100	100	100	100

Tabel 23 menunjukkan sebanyak 65.9 persen keluarga IRT peserta pendampingan di empat lokasi mengalami kerusakan dan kerugian dan hanya 7.5 persen yang tidak mengalami kerusakan kerugian. Sebanyak 7.5 persen yang tidak mengalami kerusakan dan kerugian tersebut ialah kelompok pemuda serta industri yang memiliki prospek baik, unik dan berbasis kearifan lokal daerah setempat.

Tabel 23 Sebaran IRT (%) menurut status rusak dan rugi setelah bencana  
(n=148)

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
Status Rusak dan Rugi (n=148)					
Rusak dan Rugi	48.6	77.14	67.6	69.8	65.9
Rusak dan Tidak Rugi	5.7	17.14	23.5	30.23	19.7
Rugi dan Tidak Rusak	22.8	2.8	2.9	0	6.8
Tidak Rusak dan Tidak Rugi	22.8	2.8	5.9	0	7.5
Total	100	100	100	100	100

## IV. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

### 4.1. Pendekatan, Teknik, dan Metode Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan pada dasarnya merupakan pemberdayaan yang bertujuan mengubah atau memperbaiki suatu keadaan menjadi lebih baik. Pemberdayaan atau *empowerment* berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam, dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Oleh karenanya pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. sementara itu keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Berdasarkan pengertiannya, maka pemberdayaan keluarga memiliki dimensi tujuan yang luas dan beragam yaitu (Sunarti, 2010) :

- Membantu sasaran untuk menerima/melewati/menjalani / mempermudah proses perubahan yang harus / akan dijalani/ditemui individu / keluarga
- Menggali kapasitas / potensi laten anggota keluarga (kepribadian, keterampilan manajerial dan keterampilan kepemimpinan)
- Mendorong sasaran agar memiliki daya ungkit / daya lompat serta sebagai lecutan untuk lari mengejar cita-cita keluarga
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup seluruh anggota keluarga sepanjang tahap perkembangan dan siklus hidupnya
- Membangun daya tahan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan agar mampu menjalani kehidupan dengan sukses tanpa kesulitan dan hambatan yang berarti
- Membina dan mendampingi proses perubahan sampai pada tahap kemandirian dan tahapan tujuan yang dapat diterima

Berdasarkan luasnya tujuan pendampingan, maka indikator keberhasilan pendampingan dalam rangka pemberdayaan ditunjukkan oleh perubahan atau perbaikan antara kondisi awal dan kondisi akhir setelah pendampingan dilakukan. Dimensi perubahan atau perbaikan yang diharapkan dari hasil pendampingan bisa berupa pengetahuan, sikap, dan atau praktek/keterampilan. Untuk mencapai tujuannya, maka pemberdayaan atau pendampingan perlu memperhatikan pendekatan, teknik, dan metode yang tepat, saling melengkapi dan menguatkan.

Mengingat peserta pendampingan adalah orang dewasa yang telah menggeluti dan menjalankan usahanya dalam waktu yang cukup lama, maka pendekatan utama pendampingan adalah menggunakan pendidikan orang dewasa. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah mengkombinasikan pendekatan yang memfokuskan pada penguatan keunggulan dan atau pada perbaikan kelemahan yang dimiliki peserta pendampingan.

Pendampingan ekonomi bagi IRT binaan menggunakan teknik individual, kelompok kecil (5-15 orang), dan kelompok besar (30-40 orang). Teknik pendampingan individual dilakukan untuk pendampingan yang memerlukan penyelesaian masalah secara individual karena spesifiknya masalah yang dihadapi individu tersebut. Teknik pendampingan kelompok dilakukan terhadap sekelompok IRT binaan yang memiliki keragaan industry yang relative sama, juga permasalahan yang relative sama. Teknik pendampingan massal dilakukan terhadap kelompok besar yang memerlukan pendampingan dengan topik yang sama.

Metode pendampingan yang dilakukan dalam program ini mengacu Prahalad (2005) dalam proyeknya "*The Fortune at The Bottom of The Pyramid*" yang membahas beberapa kelompok program diantaranya kedalam pembahasan "*known problems and known solutions; what is the missing link*" dan "*known problems and unique solution*". Dua pembahasan tersebut digunakan sebagai arahan dalam kegiatan pendampingan untuk mencari solusi (dari masalah yang dialami) dan khususnya mencari solusi khusus/khas/unik (juga setelah mendalami masalah yang dialami). Oleh karenanya metode pendampingan dikelompokkan menjadi dua yaitu berupa program pendampingan umum (yang berlaku untuk semua IRT peserta pendampingan) serta program pendampingan khusus (yang hanya berlaku bagi peserta tertentu baik individu maupun kelompok). Adapun penentuan teknik, metode, dan lingkup pendampingan, dilakukan setelah elaborasi masalah yang dialami/ditemui IRT peserta pendampingan, analisis keragaan ekonomi wilayah, analisis potensi usaha, kelembagaan pembinaan usaha dan permodalan yang tersedia dan dapat digunakan, pemasaran, dan teknik produksi.

## **4.2. Program Pendampingan Umum**

### **4.2.1. Pelatihan**

Pelatihan dilaksanakan di setiap lokasi sebanyak lima kali, meliputi topik kewirausahaan, permodalan usaha dan pembukuan sederhana, manajemen usaha, teknik produksi (Cara Produksi Pangan yang Baik), proposal usaha, pemasaran, kepuasan pelanggan, dan manajemen keuangan keluarga. Pelatihan dilakukan di kantor kecamatan atau desa, diikuti seluruh IRT peserta binaan, pada waktu dan lama pelatihan yang disepakati bersama. Para peserta pelatihan (IRT binaan) cukup antusias mengikuti pelatihan, ditunjukkan oleh tingkat kehadiran yang tinggi yaitu 90-95% per lokasi kegiatan. Antusias peserta terlihat

pula pada sesi diskusi dan klinik bisnis dimana para peserta ikut serta dalam mengutarakan pendapat maupun pertanyaan terkait topik pelatihan dan hubungan topik dengan situasi usaha yang sedang dijalankan. Para peserta juga mengungkapkan pendapat terkait manfaat pelatihan bagi jalannya usaha ke arah yang lebih baik.

Berikut ini topik pelatihan yang diberikan kepada semua peserta, meliputi ruang lingkup tema, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus untuk masing-masing topik pelatihan :

- 1) **Topik Kewirausahaan.** Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Wirausaha merupakan bagian vital ekonomi. Alasan terpenting mengapa kewirausahaan menjadi bagian vital bagi ekonomi adalah karena kewirausahaan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga secara umum pelatihan kewirausahaan dilakukan agar peserta memahami kewirausahaan dan secara khusus ditujukan agar peserta mengetahui dan memahami (1) posisi penting kewirausahaan dan pengusaha, karakter dan prospek pengusaha, (2) motivasi berwirausaha dan keputusan orang berwirausaha, (3) modal dasar dan awal pengusaha, dan (4) faktor penyebab kegagalan berwirausaha, potensi yang membuat seseorang “mundur” dari kewirausahaan, dan tips mengatasi kegagalan bagi para pemula.
- 2) **Permodalan Usaha dan Pembukuan Sederhana.** Permodalan memegang peran penting dalam menjalankan sebuah usaha. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Sama halnya dengan pentingnya pembukuan, masalah tertib administrasi laporan keuangan (berbentuk pembukuan) sangat penting bagi pengusaha, sebab sebuah usaha yang tidak bagus administrasinya akan segera terpuruk akibat kerugian-kerugian yang berpangkal pada kelalaian. Sehingga secara umum pelatihan permodalan usaha dan pembukuan sederhana dilakukan agar peserta mengetahui permodalan usaha masyarakat desa dan secara khusus ditujukan agar setelah mendapat pelatihan, peserta mengetahui dan memahami (1) pengertian dan pentingnya aspek permodalan, (2) jenis-jenis modal usaha, penggunaan modal, sumber-sumber modal, (3) cara mengajukan pinjaman, dan (4) pembukuan sederhana.
- 3) **Manajemen Usaha.** Manajemen usaha adalah mengatur dengan benar aspek-aspek perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan pengendalian. Manajemen usaha penting agar usaha dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga secara umum pelatihan manajemen usaha dilakukan agar peserta mengetahui manajemen usaha yang baik agar bisnis tumbuh dan berkelanjutan dan secara khusus bertujuan agar setelah

mendapat pelatihan, peserta mengetahui dan memahami: (1) pentingnya manajemen usaha, (2) definisi dan jenis-jenis industri, (3) ruang lingkup manajemen usaha, dan (4) cara penerapan manajemen usaha yang baik.

- 4) **Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB).** Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi makanan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi. Sehingga secara umum pelatihan teknik produksi dilakukan agar peserta mengetahui cara menghasilkan produk (pangan) yang bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen baik konsumen dan secara khusus bertujuan agar setelah mendapat pelatihan, peserta mengetahui dan memahami (1) apa yang dimaksud dengan CPPB, (2) pengetahuan dasar tentang penerapan dan mengetahui lingkup kegiatan CPPB, (3) hubungan sanitasi lingkungan dan kesehatan serta kebersihan para pekerja dengan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan, (4) pentingnya penerapan CPPB pada proses pengendalian mutu, serta kemampuan untuk menerapkannya, dan (5) pentingnya IRT untuk memenuhi berbagai persyaratan produksi yang baik seperti persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas peralatan produksi, pengendalian hama, hygiene karyawan, pengendalian proses, dan pengawasan. Dokumentasi pelatihan terlampir pada lampiran 4.
- 5) **Proposal Usaha.** Proposal bisnis mencerminkan perusahaan, menggambarkan profil bisnis secara ringkas, dan berhubungan dengan mitra pemodal/ investor/ pemberi bantuan/ kebutuhan lain. Sehingga secara umum pelatihan pembuatan proposal bisnis dilakukan agar peserta mengetahui pentingnya proposal bisnis dan secara khusus bertujuan agar setelah mendapat pelatihan, peserta mengetahui dan memahami kegunaan proposal bisnis dan isi proposal bisnis.
- 6) **Pemasaran.** Kegiatan pemasaran tidak dapat dipisahkan dari suatu siklus usaha, termasuk usaha yang dilakukan oleh industri rumah tangga. Pemasaran melingkupi segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai kepada konsumen. Sehingga secara umum pelatihan bertopik pemasaran dilakukan agar peserta mengetahui berbagai aspek pemasaran dan secara khusus agar setelah mendapat pelatihan, peserta mengetahui dan memahami (1) definisi pemasaran, (2) jenis, peran, fungsi, investasi, dan riset pasar, (3) strategi dan bauran pemasaran, segmentasi pasar, saluran distribusi barang, evolusi manajemen pemasaran, dan siklus pasar, (4) produk, dan (5) promosi (sekilas tentang i-marketing).
- 7) **Kepuasan Pelanggan.** Pelatihan bertopik kepuasan konsumen dilakukan dengan mempraktekkan uji preferensi konsumen, yaitu dengan melakukan uji sederhana terkait penilaian konsumen terhadap produk IRT yang mencakup aspek kemasan, rasa, penampilan, dan harga. Tujuan umum pelatihan ini

agar peserta mengetahui kepuasan pelanggan dan secara khusus bertujuan agar setelah mendapat pelatihan, peserta mengetahui dan memahami (1) definisi kepuasan pelanggan, (2) pelanggan dan Faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan, dan (3) mengukur kepuasan pelanggan dan Strategi meningkatkan kepuasan pelanggan

- 8) **Manajemen Keuangan Keluarga.** Manajemen keuangan keluarga adalah suatu proses penataan, perencanaan dan pengelolaan keuangan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan keuangan keluarganya secara optimum. Tujuan umum pelatihan ini adalah agar peserta mengetahui manajemen keuangan keluarga dan secara khusus bertujuan agar setelah mendapat pelatihan, peserta mengetahui dan memahami (1) definisi, pentingnya, dan manfaat manajemen keuangan, (2) sikap dasar yang diperlukan manajemen keuangan, dan tahapan manajemen keuangan keluarga.

Topik pelatihan tersebut merupakan turunan dari pelatihan yang dilakukan kepada tenaga lapang, yaitu dengan menyederhanakan pesan dan ruang lingkup pengetahuan, sikap, dan praktek usaha yang secara ideal diketahui dan dipraktikkan oleh pengusaha. Sedangkan materi pelatihan bagi tenaga lapang lebih komprehensif dan mendalam. Modul pelatihan pendampingan usaha bagi tenaga lapang terlampir pada Lampiran 5.

Semua topik pelatihan dikembangkan sesuai tujuan pemberdayaan yaitu : 1) memberikan motivasi berusaha yang lebih baik, lebih efektif dan produktif, 2) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, 3) mobilisasi sumber, 4) meningkatkan manajemen dan organisasi diri, 5) membangun jejaring.

#### **4.2.2. Klinik Usaha**

Klinik usaha dilakukan baik kepada individu dan kelompok kecil untuk mengelaborasi masalah spesifik yang dihadapi IRT binaan serta mencari solusi yang spesifik pula. Kelompok klinik usaha diantaranya adalah kelompok usaha kue, usaha lantak dan sale pisang, kelompok usaha opak dan kelontong, kelompok usaha tahu dan tempe, kelompok usaha keripik dan kerupuk, dan kelompok usaha gula (gula aren dan gula nira). Untuk IRT non pangan, kelompok klinik usaha diantaranya adalah usaha pengolahan bamboo seperti bongso, bilik, besek, dan hasil bambu lainnya

#### **4.2.3. Kunjungan Lapang**

Kunjungan dan pendampingan lapang dilakukan secara intensif untuk memastikan implementasi materi pendampingan yang diberikan saat pelatihan dan klinik usaha dapat diimplementasikan. Pendampingan lapang terlebih lagi dilakukan untuk mendampingi, membantu, dan memonitor, dan juga

menevaluasi penggunaan dana stimulan yang diberikan kepada IRT peserta pendampingan. Dokumentasi pendampingan lapang terlampir pada Lampiran 6.

### **4.3. Program Pendampingan Khusus**

Selain program pendampingan yang bersifat umum bagi seluruh IRT binaan, kegiatan pendampingan juga memperhatikan kebutuhan solusi spesifik yang dibutuhkan oleh usaha tertentu. Oleh karena itu, dilakukan pendampingan yang spesifik bagi beberapa IRT yang dianggap penting dan memiliki urgensi penanganan, antara lain pembuatan mesin produksi, pelatihan budidaya gurame dan pembibitan jamur.

#### **4.3.1. Peningkatan Kapasitas Alat Produksi**

Peningkatan kapasitas alat produksi dilakukan terhadap salah seorang IRT binaan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya (Pak U'ang) yang mengolah limbah tempurung kelapa dan mengubahnya menjadi kancing yang artistik dengan finishing produk yang sudah baik. Namun demikian, proses dan kapasitas produksi dipandang belum optimal sehingga perlu pengembangan dan peningkatan kapasitas mesin. Pendampingan yang dilakukan berupa konsultasi disain mesin dan bantuan dana untuk pembuatan mesin pemotong dan pembolong yang dirancang sendiri dalam satu kesatuan serta mesin penghalus dan pengampelas yang juga dirancang sendiri. Mesin Semula pekerjaan memotong (bentuk lingkaran) dan membuat lubang (ditengah-tengah lingkaran kancing tersebut) adalah dua pekerjaan terpisah. Dengan memodifikasi mesin bor listrik, Pak U'ang menciptakan mesin yang dapat memotong dan membuat lubang bekerja sekaligus. Yang dilakukan adalah merubah mata bor menjadi dua mata gergaji melingkar. Sedang mesin penghalus dan pengampelas, menggantikan pekerjaan yang semula dilakukan manual. Pak U'ang menciptakan mesin penghalus dan pengampelas yang bekerja sekaligus, dengan prinsip kerja seperti mixer atau mesin cuci. Mesin yang dibuat memanfaatkan motor listrik 0,5 HP untuk memutar sirip pengaduk. Kancing yang dihaluskan dan diampelas ditempatkan dalam wadah drum plastic, sehingga dalam beberapa jam, kancing akan halus seperti diampelas.

Pada awal pendampingan, Pak U'ang mampu memproduksi 1.000 kancing per hari, setelah pendampingan dan bantuan dua macam alat yang dirancang sendiri, kapasitasnya bertambah menjadi 5.000 kancing per hari. Dengan harga jual kancing Rp 800 per kancing, maka peningkatan volume penjualan cukup signifikan, dari semula Rp 800.000 per hari, menjadi Rp 4.000.000 per hari.

#### **4.3.2. Pelatihan Pembuatan Bibit Jamur**

Salah satu jenis IRT yang diusahakan sasaran adalah produksi dan pengolahan jamur tiram dan jamur merang. usaha tersebut terdapat di 4 lokasi pendampingan, kecuali di Kecamatan Sindangbarang dimana usaha sempat

terhenti akibat gempa bumi. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para pengusaha jamur berkaitan dengan ketersediaan bibit, terutama bibit F0. Biasanya mereka membeli bibit berupa bibit F1 dari pengusaha-pengusaha atau lembaga-lembaga penelitian yang menjual bibit dalam bentuk F0 atau F1, sehingga apabila bibit tersebut habis atau tidak tersedia, hal tersebut bisa menghambat produksi jamur yang diusahakan. Untuk itu melalui program pendampingan ekonomi pasca bencana, dilakukan program peningkatan dan pengembangan usaha budi daya jamur dengan memberikan pelatihan pembuatan bibit jamur F0, agar IRT binaan dapat membuat bibit jamur sendiri dan tidak bergantung lagi pada tempat yang lain.

Pelatihan terlaksana atas kerjasama Pusat Studi Bencana IPB dengan PT DaFa Teknoagro Mandiri Bogor. Peserta merupakan wakil dari setiap lokasi, terdiri dari 5 orang yang berasal dari 3 kabupaten di Jawa Barat, yakni dari Cianjur 1 orang, dari Bandung 1 orang dan dari Ciamis 3 orang. Pelatihan mencakup penjelasan teori dan praktek langsung cara pembuatan bibit jamur F0, berupa (1) pengenalan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan, dalam hal ini alat-alat dan bahan-bahan yang mudah didapatkan atau bisa dibuat sendiri, (2) pembuatan media untuk pertumbuhan bibit F0 jamur, dalam hal ini adalah medium *Potato Dextrose Agar* (PDA). Medium PDA ini adalah medium yang sangat cocok untuk pertumbuhan hampir semua jenis jamur. Medium PDA ini ada dijual instan dalam kemasan botol plastik, tetapi harganya sangat mahal, dan (3) inisiasi jamur, yang diambil dari indukan dan ditanam dalam botol atau tabung yang mengandung medium PDA, yang ditanam secara kultur jaringan.

Disamping itu, peserta dibawa berkunjung ke tempat-tempat unit usaha jamur yang berada di sekitar Darul Fallah, agar dapat berbagi informasi dan pengalaman dalam menjalankan usaha jamur. Umumnya peserta pelatihan beranggapan bahwa untuk membuat bibit jamur F0 dibutuhkan keahlian khusus, disamping biaya untuk membuka laboratorium cukup mahal karena peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan harganya mahal dan sulit didapat di tempat mereka. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta mengetahui bahwa untuk membuat bibit jamur F0 ini tidaklah sulit dan mahal seperti yang dibayangkan semula. Para peserta dapat membuatnya dengan menggunakan peralatan sederhana dan bahan-bahan yang mudah di dapat, yang penting mengetahui prinsip kerja dari pembuatan bibit jamur F0 tersebut.

Peserta merasakan manfaat yang sangat nyata setelah mengikuti pelatihan pembuatan bibit jamur dan optimis dapat mengembangkan usaha jamur. Selain itu, para peserta memperoleh beberapa alat dan bahan untuk pembuatan bibit jamur F0, sehingga pada saat kembali ke tempat masing-masing, bisa langsung mempraktekkan cara membuat bibit F0 tersebut. Para peserta juga akan tetap berhubungan dengan PT DaFa Teknoagro Mandiri untuk berkonsultasi mengenai hal-hal yang mereka butuhkan, khususnya dalam budidaya jamur ini. Dokumentasi pelatihan pembibitan jamur terlampir pada lampiran 7.

#### 4.3.3. Penanaman Pohon Aren (*arenga pinnata*)

Tanaman Aren telah lama diketahui memiliki manfaat yang luas, sebagai harta karun dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua bagian tanaman aren bermanfaat, yaitu : nira untuk dibuat menjadi gula atau bioethanol; buah untuk kolang-kaling; serat ijuk untuk bahan tali, filter air dan bahan jok; bagian tepi batangnya merupakan kayu keras yang tahan tidak lapuk menyerupai sifat kayu Ulin; daun untuk pembungkus rokok kawung atau untuk bahan atap rumbia dan lidi; empelur batang juga merupakan bahan pembuat sugu aren yang merupakan sumber karbohidrat. Penanaman pohon Aren juga bermanfaat dalam mencegah banjir dan longsor, karena Aren mampu menyerap 200 liter air per hari.

Di wilayah binaan, ditemui banyak tanaman yang mati atau rusak (diantaranya karena bencana gempa bumi). Proses perusakan tidak sebanding dengan tanaman baru, karena nyaris tidak pernah ada Aren yg sengaja ditanam. Proses reproduksi tanaman Aren masih mengandalkan alam dengan jasa hewan Musang, karena biji Aren yang dapat disemai adalah yang telah dimakan oleh Musang dan dikeluarkan kembali bersama “feces”.

Terkait manfaat Aren dan masalah yang dihadapi industry pengolahan gula aren, Program Pendampingan Ekonomi korban bencana memfasilitasi pengadaan dan pembagian sebanyak 4.100 bibit Aren yang berhasil ditangkarkan di wilayah lain untuk kemudian dibagikan di wilayah IRT binaan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur dan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

Perkiraan ekonomis hasil dari penanaman Aren dalam 10 tahun yang akan datang, tanaman tersebut akan memiliki nilai ekonomi sebesar Rp 40 Milyar. Nilai prediksi tersebut diperoleh dari perhitungan :

- Setiap tangkai bunga Aren yang sudah produktif mampu menghasilkan 10 liter Nira per tangkai per 24 jam.
- Jika diasumsikan rata-rata 5 liter Nira per tangkai per 24 jam, maka akan dihasilkan 2 kg Gula Aren, yang dibeli oleh pedagang (datang sendiri) Rp 3.500 per kg, atau sebesar Rp 7.000.
- Sebuah pohon Aren yang produktif, biasanya memiliki 2 sampai 7 tangkai bunga yang dapat disadap bersamaan (dapat dihitung rata-rata 4 tangkai yang dapat disadap bersamaan).
- Dengan nilai Rp 7.000 per tangkai bunga (hasil penjualan 2 kg gula), maka untuk 4 tangkai bernilai Rp 28.000 per hari, atau setahun menghasilkan Rp 8.400.000 per pohon (asumsi 300 hari penyadapan).
- Dalam kenyataannya hasil yang diperoleh lebih dari Rp 10 juta per pohon per tahun. Perhitungan tersebut hanya dari Nira nya saja, belum menghitung nilai ekonomi lainnya.
- Pohon mulai menghasilkan pada umur 8 tahun setelah tanam dan akan produktif selama 10 tahun. Maka diasumsikan untuk 4.100 tanaman selama 10 tahun akan mampu menghasilkan sekitar Rp 40 Milyar.

Untuk menjamin keberhasilan penanaman pohon kaung, karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut, maka dilakukan penyuluhan penanaman dan pemeliharaan pohon kaung. Kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan bekerjasama dengan petugas penyuluh Dinas Kehutanan. Ruang lingkup penyuluhan meliputi tempat penanaman yang baik, jarak tanam, perawatan, dan waktu terbaik pengambilan nira. Topik tersebut merupakan topik yang menjadi pertanyaan dan hal yang ingin diketahui peserta, sehingga peserta sangat antusias mengikuti penyuluhan.

#### **4.3.4. Pelatihan Usaha Gurame**

Salah satu peserta pendampingan bergerak dalam usaha budidaya dan pengolahan ikan gurame. Usaha tersebut berupa usaha kelompok tani yang bernama Usaha Kelompok Tani Pelangi, berlokasi di Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Ketua kelompok usaha tersebut adalah Bapak Ujang Wahyu yang telah memulai usahanya sejak tahun 2005 dan membina 10 orang anggota petani ikan gurami. Dalam perjalanan usahanya, banyak masalah yang dihadapi sehingga usaha tersebut belum optimal dan menguntungkan. Beberapa masalah tersebut diantaranya adalah: (1) produktivitas telur gurami setiap tahun mengalami penurunan yang signifikan, (1) mengalami kendala dalam hal akses informasi tentang budidaya gurami yang baik dan benar, (3) penurunan jumlah pengangkatan telur gurami yang signifikan pasca gempa 2009. Dengan masalah tersebut, maka hanya beberapa petani yang bertahan dalam budidaya gurami di kelompok Tani "Pelangi" di desa Cikadu tersebut. Para pengusaha gurami merasakan kekecewaan terhadap balai riset yang hanya datang survey dan berteori tetapi tidak memberikan solusi terhadap permasalahan. Setelah melakukan konsultasi dan studi banding, Pak Ujang merasa tidak ada pelaku budidaya gurame di Tasikmalaya yang mampu menjelaskan teknik budidaya yang tepat dan solusi masalah produktivitas gurami yang dialaminya. Karena pengusaha sukses dalam bidang budidaya gurame di Tasikmalaya ternyata hanyalah pengumpul bukan sebagai pelaku langsung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dialami, namun tingginya semangat usaha yang dimiliki Pak Ujang serta tidak mudah menyerah untuk belajar serta mencari solusi untuk permasalahan terkait budidaya gurami, maka program pendampingan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana memfasilitasi secara khusus melalui pelatihan dan studi banding budidaya, pemasaran, dan pengolahan ikan Gurami. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan P4S (Pusat Pelatihan Pengembangan Pertanian Swadaya) di Kampung Ciseeng Kabupaten Bogor. Tujuan diadakannya pelatihan dan studi banding adalah untuk: (1) mengelaborasi lebih detail permasalahan terkait budidaya gurami dan mencari solusi terbaik, (2) memperdalam teknik dan praktek langsung pembudidayaan yang tepat, (3) membangun jejaring dengan pelaku langsung budidaya gurami yang sudah berhasil dan telah membina banyak petani kecil. Pelatihan yang diberikan meliputi (1) pemaparan tujuan dan manfaat pelatihan

dan studi banding, (2) penjelasan materi secara sistematis, (3) observasi langsung, (4) praktek langsung ke lapang, (5) tes pemahaman materi dengan tanya jawab langsung, dan (6) survey. Materi pelatihan individual disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24 Materi pelatihan budidaya dan pemasaran gurame

No	Materi
1	Penjelasan jadwal dan materi, diskusi singkat
2	Materi ciri-ciri induk unggulan (seleksi induk) Pakan alami gurami Turun lapang praktek pemilihan induk Praktek pembuatan kolam yang tepat Turun lapang praktek panen gurami
3	Kunjungan ke pasar Parung Kunjungan ke tempat pembenihan Kunjungan ke tempat pemijahan sistem massal Evaluasi hasil survey dan materi
4	Kunjungan ke pasar tradisional Ciseeng Materi pembuatan kultur kutu air Diskusi
5	Evaluasi akhir

Berikut ini beberapa catatan hasil pelatihan dan studi banding budidaya dan pemasaran ikan gurame yang menunjukkan kebutuhan informasi teknis dan mendalam terkait keberhasilan usaha budidaya dan pemasaran ikan gurame bagi IRT peserta pendampingan :

- Peserta mengetahui perlunya melakukan uji kualitas air kolam karena ada indikasi terjadi perubahan struktur mineral, suhu tanah, suhu air dan pH akibat gempa 2009.
- Peserta menjadi lebih mengenali perilaku induk unggulan. Induk unggulan mempunyai ciri-ciri yang agresif dan lincah. Induk Jantan pasti melindungi sarang telurnya dan bersifat posesif. Induk Betina mengejar induk jantan untuk masa perkawinan di waktu sore hari, sedangkan di pagi hari induk jantanlah yang mengejar induk betina.
- Peserta mengetahui kebutuhan pasangan kawin yang berasal dari lokasi pemijahan yang berbeda. Masa perkawinan, setiap induk baik jantan dan betina perlu pasangan baru yang bukan dari lokasi pemijahan yang sama. Misalnya induk jantan dari Ciseeng, sedangkan betinanya dari Tasikmalaya. Hal ini untuk memberikan stimulan bagi perkembangan gurami.
- Peserta mengenali adanya induk gurami "banci" yang ditunjukkan oleh beberapa perilaku yaitu: bertelur berantakan dan tidak teratur, suka mengacak-acak sarang telur gurami lainnya, bentuk fisiknya lain daripada ikan gurami lainnya. Bentuk fisiknya jantan tapi sifatnya betina ataupun sebaliknya. Peserta praktek membedakan induk jantan, betina, dan banci
- Peserta menemukan masalah teknik pengindukan yang selama ini dilakukan. Selama ini peserta memisahkan induk yang agresif karena dianggap sebagai

- induk yang “nakal dan pengganggu” padahal hal tersebut menunjukkan bahwa induk tersebut justru yang produktif.
- Peserta mengetahui teknik lain pengangkatan telur yang lebih aman, yaitu menggunakan rumput liar. Selama ini peserta menggunakan sedotan yang tidak baik digunakan untuk pengangkatan telur karena terlalu beresiko adanya zat kimia plastik yang akan merusak telur atau mengkontaminasi telur
  - Peserta lebih terlatih cara pembuatan kolam yang baik dan benar. Teknik pembudidayaan gurami berbeda-beda bergantung dari kondisi lingkungan budidaya. Kecocokan penggunaan teknik massal ataupun petakan dalam budidaya gurami bergantung dari pengalaman petani sendiri dan kondisi lingkungan juga harus diperhatikan.
  - Peserta lebih terlatih cara memanen gurame yang baik dan benar, juga teknik mengatasi ikan gurami yang stres dan keracunan makanan. Caranya adalah ikan yang stress dan atau keracunan dipisahkan terlebih dahulu disertai pemberian air yang bersih secara berkala serta diberi aero filter.
  - Teknik mempertahankan harga penting dilakukan agar petani tidak dirugikan karena keuntungan petani hanyalah sedikit dan lama. Harga di setiap daerah berbeda, terkait dengan perbedaan harga pelet, cacing sutra dan biaya pembuatan plankton. Jika di daerah Bogor, cacing sutra murah dan biaya pembuatan plankton mahal. Sedangkan di Tasikmalaya justru kebalikannya.
  - Survey pasar besar ikan di Parung menunjukkan bahwa petani gurami dapat langsung menjual hasil panen guraminya baik yang dedar ataupun ikan gurami konsumsi tanpa harus melalui pengumpul. Survey ke pasar tradisional tidak jauh berbeda dengan pasar besar atau modern. Hanya saja di pasar ini standar harga gurami sudah ditentukan dan petani kecil tidak dirugikan karena sedikitnya tengkulak. Negosiasi harga dengan konsumen harus baik dan tidak boleh menekan petani atau penjual.
  - Praktek seleksi pakan alami terbaik untuk gurami. Banyak sekali jenis pakan alami alternatif sebagai pakan untuk gurami, seperti sente, daun ubi jalar, daun muda suweg, rumput liar dan lainnya. Cacing sutra sebagai pelet juga harus diperhatikan kebersihannya. Pemilihan cacing sutra harus hati-hati, cacing sutra yang baik adalah warnanya merah dan tidak pucat. Cacing sutra yang berjamur akan mengakibatkan penyakit bagi ikan.

Evaluasi akhir pelatihan dan studi banding menunjukkan bahwa selama ini IRT binaan (Bapak Ujang dan kelompoknya) kurang memperhatikan seleksi induk dan teknik pengambilan telur yang kurang tepat sehingga mengakibatkan telur banyak yang rusak dan tidak menetas. Pelatihan dan studi banding dinilai berhasil dan memberi manfaat besar terhadap penyelesaian masalah usaha yang dihadapi. Selain itu, dengan studi banding tersebut terjalin komunikasi dan jejaring yang dapat memperlancar usaha. Dokumentasi pelatihan budidaya dan pemasaran gurami terlampir pada Lampiran 8.

## **V. ASPEK KELEMBAGAAN PEMBINAAN USAHA DAN PERMODALAN**

### **5.1. Kelembagaan Pembinaan Usaha**

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2008 mencapai 51,3 juta unit, yang menunjukkan bahwa UMKM merupakan pelaku ekonomi yang dominan dari seluruh pelaku ekonomi nasional. Keberadaan jumlah UMKM yang besar, dengan penyebaran hingga ke pelosok daerah, merupakan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi nasional.

Ditinjau dan penyerapan tenaga kerja, UMKM mampu menyerap sebanyak 90.896.270 orang tenaga kerja, atau 97,22 persen dari 93.491.243 jumlah pekerja nasional. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru, serta tumbuhnya wirausaha nasional yang tangguh dan mandiri.

Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Daerah Bersih (PDB) menurut harga berlaku, mencapai Rp.2.609,4 trilyun, atau 55,56 persen dari PDB nasional yang totalnya mencapai Rp.4.696,5 trilyun bersandar pada produktivitas UMKM (BPS 2008). Kontribusi yang besar tersebut merupakan akumulasi dari seluruh UMKM yang menyebar hingga ke daerah-daerah pelosok. Pengembangan selanjutnya akan membawa efek multiplier yang dinikmati oleh sebagian besar pelaku usaha di daerah (Renstra KUKM 2010-2014).

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya bagi kalangan usaha kecil dan usaha mikro sudah berlangsung sejak lama. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2010-2014, upaya-upaya pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil menengah, dan mikro terdiri atas:

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Arah pembinaan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi.
2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah pembinaan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan

- peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah pembinaan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.
  4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah pembinaan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.
  5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah pembinaan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota

Pembinaan usaha bagi Koperasi, usaha Mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai program diantaranya:

1. Program PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri
2. Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang merupakan program dari Kementerian Sosial
3. Program LPDB KUKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Mikro
4. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

#### **5.1.1. Program PNPM Mandiri Perdesaan**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dirancang sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM-MP mengembangkan sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan rumah tangga miskin. PNPM-MP berupaya mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Mandiri berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisir sumberdaya yang ada di lingkungannya maupun di luar lingkungannya dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Dalam upaya melakukan perubahan sosial, pemerintah dan masyarakat di wilayah kecamatan lokasi PNPM-MP membangun lembaga di tingkat kecamatan yaitu Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP. Usaha Pengembangan Kecamatan

(UPK) PNPM-MP adalah lembaga pengelola dana bergulir dengan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan marjinal dengan tetap melibatkan masyarakat secara umum.

Keunggulan komparatif UPK PNPM-MP adalah mengeliminir marginalisasi kelompok miskin dalam permodalan. UPK PNPM-MP menjawab permasalahan akses dana bagi kelompok miskin, kelompok perempuan dan masyarakat bawah yang selama ini tidak tersentuh oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lain yang disebabkan kurangnya persyaratan atau bahkan tidak masuk dalam persyaratan. UPK PNPM-MP. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan mengacu landasan idil Pancasila, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

### **5.1.2 Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama)**

KUBE merupakan salah satu program unggulan. KUBE sudah menjadi ikon bagi Kementerian Sosial sejak tahun 1983 dimana program KUBE ini pertama kali digulirkan. Program KUBE ini dibiayai dari APBN tetapi ada juga yang dibiayai dari APBD, dalam hal ini terdapat sharing anggaran. Walaupun terdapat anggaran pemerintah pusat dan daerah, tetap tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan masyarakat miskin kota dan desa, untuk itu diperlukan peran lain yaitu peran dari Dunia Usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peran Dunia Usaha ini dapat menambah anggaran dalam menanggulangi kemiskinan.

KUBE dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin, yang meliputi: terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan dinamika kehidupan kelompok sosial, seperti: pengembangan hubungan yang semakin harmonis, pengembangan kreativitas, munculnya semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, munculnya sikap kemandirian, munculnya kemauan, dan lain-lain, sehingga menjadi sumber daya manusia yang utuh dan mempunyai tanggung jawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Melalui pendekatan KUBE ini diharapkan juga kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lainnya yang ada di sekitarnya untuk kepentingan pengembangan potensi yang dimiliki, seperti: pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemanfaatan air untuk pengembangan usaha ternak ikan, pemanfaatan tenaga yang menganggur untuk menjadi tenaga kerja di KUBE yang dikelola, dan lain-lain. Diharapkan dengan pola seperti ini, mereka akan mudah mengintegrasikan sumber-sumber tersebut kedalam kepentingan-kepentingan kelompok.

Kelompok mempunyai wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan menikmati hasil-hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar KUBE dapat berhasil dengan baik. Dilihat dari komposisi ini, pendekatan KUBE merupakan pendekatan yang relevan didalam pemberdayaan kelompok miskin tersebut.

### **5.1.3. LPDB KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)**

Program ini digulirkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM, yang bertugas mengelola dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan KUMKM, dimana ketentuan mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan oleh LPDB

KUMKM. Pendirian Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), merupakan babak baru dalam sejarah Pengelolaan Keuangan Negara. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara no 17 Tahun 2003 yang didalamnya terdapat hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara. Sejalan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004, khususnya pasal 68 dan 69 yang secara spesifik mengatur tentang perlunya peranan Badan Layanan Umum yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangkaian tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 468a/KMK.01/2004 dan Nomor 07/SKB/M.KUKM/X/2004 tentang pendirian Badan Layanan Dana Bergulir (BLDB) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Pendirian LPDB terutama bertujuan untuk mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui pola dana bergulir. Di samping itu, LPDB juga bertujuan untuk memperkuat pendanaan lembaga keuangan dalam rangka memberdayakan lembaga dimaksud, agar dapat memberikan layanan pembiayaan secara mandiri bagi KUMKM yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum.

#### **5.1.4. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan pendirian BUMDes, yaitu 1) meningkatkan perekonomian desa, 2) meningkatkan pendapatan asli desa, 3) meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 4) menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional. Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: 1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; 2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; 4) Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Landasan dasar hukum BUMDes adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) "*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*" dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, terdiri dari:

#### Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

#### Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2. 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

3. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari: (a) Pemerintah Desa; (b) Tabungan masyarakat; (c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; (d) Pinjaman; dan/atau (e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
4. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat.

#### Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

#### Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat: (a) Bentuk badan hukum; (b) Kepengurusan; (c) Hak dan kewajiban; (d) Permodalan; (e) Bagi hasil usaha atau keuntungan; (f) Kerjasama dengan pihak ketiga; dan (g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainnya sebagai berikut :

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama,
2. Modal bersumber dari desa sebesar 51 persen dan dari masyarakat sebesar 49 persen melalui penyerataan modal (Saham atau andil),
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal,
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar,
5. Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal ) dan masyarakat melalui kebijakan desa,
6. Difasilitasi oleh Pemerintah Propinisi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa,
7. Operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh BPD,P emerintahan Desa dan Anggota.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3).

### 5.1.5 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perwujudan program pemerintah untuk memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi oleh para pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu masalah yang menghadang usaha mikro dan kecil diantaranya menyangkut kemampuan akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil serta akses informasi. Kesulitan usaha mikro-kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam.

Lembaga keuangan Bank adalah sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun untuk bermitra dengan Bank, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang *feasible* atau layak usaha dan menguntungkan. Disamping itu lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus *bankable* alias dapat memenuhi ketentuan bank. Akibat bank berlaku *prudent* atau hati-hati, maka makin mempersulit usaha mikro dan kecil untuk mengakses sumber modal, dan biasanya melakukan jalan pintas melakukan peminjaman kepada rentenir yang menerapkan bunga yang sangat tinggi.

Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disingkat KUR) merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum memenuhi syarat peminjaman Bank (*bankable*). Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

KUR telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 5 Nopember 2007. Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong Perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit

Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. Ketentuan Skema KUR untuk KUR Mikro sampai dengan nilai 20 juta rupiah :

1. Calon Debitur Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
2. Lama Usaha Minimal 6 bulan
3. Besar Kredit Maksimal Rp. 20 juta
4. Bentuk Kredit KMK atau KI menurun maksimal 3 tahun
5. Suku Bunga Efektif maksimal 1,125 persen flate rate per bulan
6. Agunan Pokok, baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai
7. Proyek yang dibiayai harus mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)

**Catatan :** UMKM-Koperasi yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah

## 5.2. Gambaran Kelembagaan Pembinaan Usaha Industri Rumah Tangga Binaan (IRT peserta pendampingan)

Secara umum Tabel 25 menggambarkan kondisi kelembagaan pembinaan usaha yang ada di masing-masing kecamatan. Tinjauan yang akan dilihat adalah pelaksanaan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah terkait kelembagaan dan permodalan usaha untuk IRT peserta pendampingan.

Tabel 25 Lembaga pembinaan usaha yang ada di lokasi pendampingan

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya
Lembaga pembinaan usaha	LPDB KUMKM	Tidak ada	PNPM Perdesaan, KUBe, dan LPDB KUMKM	PNPM Perdesaan dan KUBE
Jumlah IRT peserta pendampingan	36	35	34	43
Jumlah IRT peserta pendampingan yang memperoleh pembinaan	3	0	2	4

### **5.2.1 Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung**

Tabel 25 menunjukkan lembaga pembinaan usaha yang ada di Kecamatan Banjaran adalah LPDB dan KUMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 Perihal Alokasi Program PNPM Mandiri Perdesaan, untuk Kecamatan Banjaran tidak mendapatkan alokasi atas program tersebut. Untuk program LPDB KUMKM di Kecamatan Banjaran yang bertindak sebagai mitra kerjasama adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "AKUR" (Koperasi Rukun Bersama) yang berlokasi di Kota Kecamatan Banjaran, tepatnya di kompleks perkantoran Kecamatan Banjaran. Koperasi AKUR mendapatkan alokasi dana pinjaman dari LPDB KUMKM sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya yang selanjutnya disalurkan kepada para anggota koperasi AKUR yang membutuhkannya.

Dari 36 IRT peserta pendampingan di Kecamatan Banjaran, hanya tiga (3) IRT yang selama ini telah mendapatkan pembinaan usaha maupun akses permodalan. Tiga IRT tersebut telah mendapatkan pembinaan dari LPDB KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam AKUR tentang tatalaksana produksi dan pemasaran. Adapun 33 IRT peserta pendampingan lainnya tidak pernah mendapatkan sama sekali pembinaan usaha dari institusi atau lembaga terkait. Dari data ini menunjukkan bahwa hanya 8,5 persen saja IRT peserta pendampingan yang mendapatkan pembinaan usaha. Secara umum aktivitas pembinaan usaha yang diinisiasi oleh aparat pemerintah baik ditingkat desa maupun kecamatan tidak didapatkan oleh hampir seluruh responden IRT peserta pendampingan.

### **5.2.2 Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya**

Di kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya lembaga pembinaan usaha yang masih berjalan adalah PNPM Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri dan Program KUBE dari Kementerian Sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri alokasi dana bagi program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Cisayong pada tahun 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Untuk program PNPM Mandiri Perdesaan, dari total jumlah IRT peserta pendampingan se-Kecamatan Cisayong sebanyak 43 IRT, yang memperoleh pembinaan usaha dari PNPM Mandiri Perdesaan, sebanyak 4 IRT atau sebanyak 9,3 persen. Program KUBE terdapat di Desa Cisayong, dan dari IRT peserta pendampingan tidak ada satu pun yang menjadi binaan dari KUBE tersebut (Tabel 25).

### **5.2.3 Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis**

Tabel 25 menunjukkan lembaga pembinaan usaha di Kecamatan Banjarsari yang masih berjalan pada saat kegiatan pendampingan IRT dilakukan adalah PNPM Mandiri Perdesaan, KUBE, dan LPDB KUMKM. Dari jumlah total IRT peserta

pendampingan sebanyak 34 IRT, hanya ada 2 IRT yang mendapatkan pembinaan dari lembaga pembinaan usaha yang ada atau hanya mencakup 6 persen saja.

#### **5.2.4 Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur**

Lembaga pembinaan usaha di Kecamatan Sindangbarang pada saat kegiatan pendampingan tidak ada yang berjalan (Tabel 25). Kecamatan Sindangbarang tidak mendapatkan alokasi dana untuk Program PNPM Mandiri perdesaan yang relatif merata keberadaannya disetiap Kecamatan. Hal ini sesuai dengan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 Kecamatan Sindangbarang memang tidak mendapatkan alokasi dana. Program lainnya, seperti KUBE, LPDB KUMKM dan BUMDes tidak ada satu pun yang berjalan sehingga dari jumlah total IRT peserta pendampingan sebanyak 35 IRT, tidak ada satupun dari IRT peserta pendampingan yang pernah mendapatkan pembinaan usaha.

#### **5.3. Mekanisme Permodalan Usaha**

Permodalan usaha bagi IRT peserta pendampingan merupakan masalah yang paling menonjol disamping masalah-masalah lainnya seperti (a) tidak memiliki manajemen dan perencanaan usaha yang jelas; (b) menggunakan teknologi dan peralatan yang sederhana; (c) umumnya berasal dari masyarakat yang tidak memiliki budaya bisnis (masyarakat agraris) sehingga kurang memiliki wawasan bisnis; (d) minim dan kesulitan untuk mengakses berbagai informasi. Oleh karena itu, dalam perkembangannya IRT peserta pendampingan memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan perosalan permodalan tersebut. IRT peserta pendampingan banyak yang menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber lain, seperti koperasi, keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir yang lebih bersifat informal.

Lembaga permodalan yang berada di lokasi IRT peserta pendampingan, yaitu BRI Unit, Bank Perkreditan Rakyat Daerah, Bank Perkerditan Rakyat Syariah, Pegadaian, serta BMT (Baytul Maal wa Tamwil). Lembaga-lembaga keuangan tersebut memiliki badan hukum dan aktivitas khusus, seperti keuangan mikro. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga atau program lain yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi sebagai Lembaga permodalan seperti PNPM Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri, KUBE dari Kementerian Sosial, LPDB KUMKM dari Kementerian UKMK, dan BUMDes. Selain itu terdapat individu-individu yang berperan dalam penyediaan modal usaha seperti Koperasi Simpan Pinjam (yang dibentuk warga masyarakat) Pedagang Perantara (pengepul) dan juga rentenir.

Tabel. 26 Sebaran kelembagaan permodalan yang terdapat di lokasi IRT peserta pendampingan

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<b>Jenis Lembaga Permodalan</b>					
Koperasi SP	4	0	5	3	12
Bank Umum	3	0	1	3	7
Pedagang Perantara	0	0	2	5	7
BRI unit	1	1	1	1	4
PNPM Perdesaan	1	0	1	1	3
BMT	1	0	0	1	2
Rentenir	0	1	0	1	2
KUBe	0	0	1	1	2
BPR Kecamatan	0	0	0	1	1
Reksa Desa	0	0	0	1	1
Mitra Bina Keluarga V	0	0	0	1	1
BUMDes	0	0	0	1	1
BPRS	1	0	0	0	1
Pegadaian	1	0	0	0	1
LPDB	1	0	0	0	1
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>46</b>
<b>Jumlah IRT yang Mendapat Modal (148)</b>					
Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0	0	0
Bank Umum	4	0	0	2	6
Pedagang Perantara	0	0	5	4	9
BRI unit	6	0	0	10	16
PNPM Perdesaan	1	0	0	2	3
BMT	0	0	0	0	0
Rentenir	0	0	0	1	1
KUBe	0	0	0	0	0
BPR Kecamatan	1	0	0	0	1
Reksa Desa	0	0	0	3	3
Mitra Bisnis Keluarga V	0	0	0	1	1
BUMDes	0	0	0	0	0
BPRS	2	0	0	0	2
Pegadaian	1	0	0	0	1
LPDB	1	0	0	0	1
	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>44</b>

Tabel 26 menunjukkan terdapat 46 lembaga dan 15 jenis lembaga permodalan di empat lokasi kegiatan, yang paling banyak dan paling beragam terdapat di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan paling sedikit di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur. Data pada Tabel 26 juga menunjukkan hanya 44 dari 148 IRT peserta pendampingan yang memperoleh bantuan permodalan dari lembaga permodalan yang ada. Sebagaimana keragaan jumlah lembaga permodalan, jumlah IRT yang pernah memperoleh bantuan permodalan terbanyak terdapat di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya (53,5%), dan

tidak ada yang mendapatkan bantuan permodalan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur. BRI unit merupakan lembaga permodalan utama di tiga lokasi kegiatan (pernah membantu 16 IRT), kecuali di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur dan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis (tidak ada IRT yang mendapat modal dari BRI unit).

Lembaga Permodalan di Kecamatan Cisayong lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan lokasi yang lain (20 lembaga dengan 12 jenis). Hal tersebut sesuai dengan banyaknya IRT peserta pendampingan yang memperoleh bantuan permodalan (23 dari 43 IRT, atau 54%), dibandingkan dengan hal sama di lokasi lain. Namun demikian, hampir dari semua IRT peserta pendampingan tidak ada yang memperoleh permodalan dari Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Kecamatan Cisayong, termasuk dari BMT yang juga bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah, hal ini disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam itu sendiri. Hal ini terkait dengan pengalaman-pengalaman masa lalu dimana ketika masyarakat dimobilisasi untuk menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam yang bernaung dalam Koperasi Unit Desa (KUD Mitra Tani), kemudian koperasi tersebut bangkrut karena "*miss-management*" sehingga uang simpanan anggota tidak dapat diambil karena dipergunakan untuk membayar hutang-hutang koperasi tersebut kepada pihak ke tiga.

Di Kecamatan Ciamis, Lembaga permodalan terdiri dari 7 jenis dengan jumlah lembaga permodalan sebanyak 11 unit, dimana hanya 5 dari 34 IRT peserta pendampingan yang memperoleh permodalan. Tidak ada satupun IRT peserta pendampingan yang mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal, karena tidak terjangkau oleh kegiatan program serta keterbatasan akses informasi.

Lokasi Kecamatan Sindangbarang yang relatif sangat jauh dari Ibukota Kabupaten Cianjur, menjadikan keberadaan lembaga permodalan yang formal terbatas hanya berupa satu unit Bank Rakyat Indonesia, selebihnya yang bersifat informal yakni rentenir. Dari total IRT peserta pendampingan yang berjumlah 35 IRT tidak ada satupun yang mendapatkan modal dari lembaga permodalan yang ada.

Tabel 27 menunjukkan sebaran IRT pangan peserta dampingan menurut nilai pinjaman baik untuk modal usaha ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Tabel 27 menunjukkan 44.1 persen atau 42 IRT pangan dan Tabel 27 menunjukkan 19.6 persen atau 9 IRT produk non pangan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal maupun informal sehingga jumlah total IRT yang memperoleh modal adalah sebanyak 51 IRT. Rentang pinjaman yang dilakukan IRT pangan sangat lebar yaitu mulai tidak meminjam sampai 200 juta rupiah. Prosentase IRT pangan yang tidak melakukan pinjaman sebanyak 55 persen. Nilai pinjaman tertinggi (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh IRT produksi kerupuk untuk pengembangan pabrik dan pembelian alat produksi yang cukup mahal untuk

meningkatkan kapasitas produksi. Namun persentase terbesar IRT pangan melakukan pinjaman kurang dari tujuh juta rupiah (31.4%), seperti yang dilakukan IRT produk pangan kue, opak dan kolontong, dan gula.

Tabel 27 Sebaran IRT Pangan (%) menurut nilai pinjaman di empat lokasi kegiatan

Nilai (Juta rupiah)	Keripik dan Kerupuk	Jamur	Tempe dan Tahu	Kue	Opak dan Kolontong	Gula	Lainnya	Total
<Rp 7	35	33.3	31.2	33.3	22.2	36.4	30.8	31.4
Rp 7-15	5	0	6.2	0	5.6	0	7.7	3.9
Rp 15- 23	5	16.7	6.2	0	0	0	7.7	3.9
Rp 23- 31	0	0	12.5	0	0	0	7.7	2.9
>Rp 31	10	0	0	0	0	0	7.7	3
Tidak Ada	45	50	43.8	66.7	72.2	38.4	69.2	54.9
Min- Max	0-200	0-20	0.7-25	0-2	0-12	0-6	0-40	0-200
Rataan	2.4545	1.6667	2	3.388	1.2	1	3.7500	3.7391

Tabel 28 menunjukkan sebaran IRT non pangan menurut nilai pinjaman. Sebagian besar IRT non pangan tidak melakukan pinjaman, sedangkan sisanya (19.6%) memperoleh pinjaman yang dijadikan modal usaha. Rentang pinjaman yang dilakukan IRT produk non pangan maksimal sebesar tujuh belas juta rupiah. IRT non pangan yang tidak melakukan pinjaman didominasi oleh produk pengolahan bambu (keresek, bongsang, nyiru, aseupan). Pinjaman tertinggi dilakukan IRT pengolahan kaca hias untuk mengembangkan pemasaran produk usahanya dengan meningkatkan kapasitas produksi. Persentase terbesar IRT (17.4%) melakukan pinjaman senilai kurang dari tujuh juta rupiah seperti dilakukan IRT gipsum, dan batako.

Tabel 28 Sebaran IRT Non Pangan (%) menurut nilai pinjaman di empat lokasi kegiatan

Pinjaman (juta )	Tekstil	Kerajinan	Besek	Bongsang, Boboko, dan Bilik	Batako	Meubel dan Gipsum	Total
<Rp 7	50	0	0	16.6	16.6	25	17.4
Rp 7 -15	0	0	0	0	0	0	0
> Rp 15	0	12.5	0	0	0	0	2.2
Tidak Ada	50	87.5	0	83.3	83.3	75	80.4
Min-Max	0-7	0-17	0	0-1	0-0.2	0-5	0-17
Rataan	3.7	2.125	0	1.37	1.37	1.37	1.22

### 5.3.1 Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat bisa menjadi alternatif sumber permodalan bagi UKMK. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak UKMK, khususnya para IRT peserta pendampingan yang belum banyak mengetahui apa dan bagaimana program KUR tersebut. Data dibawah ini menunjukkan sejauh mana para IRT peserta pendampingan mengetahui adanya Program KUR tersebut.

Tabel 29 Pengetahuan IRT peserta pendampingan (%) terkait program Kredit Usaha Rakyat

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya
Pengetahuan IRT peserta pendampingan terkait program KUR				
Tahu	60	0	8.8	8.8
Tidak Tahu	40	100	83.7	91.2
Total	100	100	100	100

Data pada Tabel 29 menunjukkan sangat rendahnya masyarakat yang mengetahui KUR, bahkan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur tidak ada seorangpun IRT peserta program pendampingan yang pernah mendengar apalagi mengetahui KUR. Hal tersebut disebabkan karena akses informasi dari IRT peserta pendampingan terhadap lembaga perbankan dalam hal ini BRI Unit setempat, dan di pihak lain ternyata tidak setiap kantor BRI Unit memiliki petugas khusus yang disebut Asisten Mantri (Asman) yang bertugas melakukan sosialisasi tentang program KUR ini kepada masyarakat. Khusus untuk kecamatan Banjaran, pengetahuan tentang KUR tidak semata-mata berasal dari pihak BRI Unit tetapi lebih banyak diperoleh dari berbagai sumber informasi baik yang langsung maupun tidak langsung.

## VI. CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA

Bab ini memaparkan jumlah dan keragaman IRT peserta pendampingan, aspek-aspek cara produksi pangan yang baik (CPPB) serta keragaan IRT pangan peserta pendampingan menurut penerapan cara produksi pangan yang baik (CPPB).

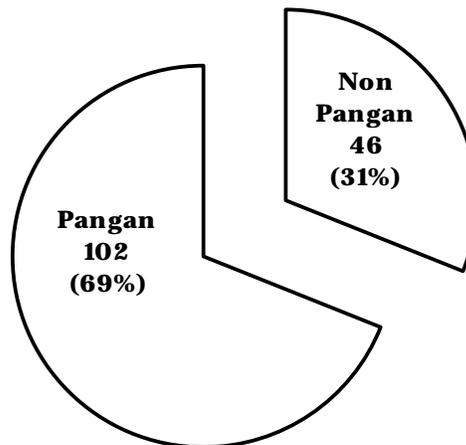
### 6.1. Jumlah dan Keragaman Industri Rumah Tangga Binaan

Jumlah industri rumah tangga (IRT) binaan yang berada di 4 (empat) kecamatan dari empat kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebanyak 148 IRT yang tergolong kepada usaha mikro. Diantara 148 usaha IRT, sebanyak 102 (70%) merupakan usaha IRT yang mengolah bahan pangan dan 46 unit usaha (30%) merupakan industri non pangan yaitu sebagai usaha kerajinan rumah tangga. Sebaran jumlah industri rumah tangga binaan di empat kabupaten disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30 Sebaran IRT peserta pendampingan di lokasi pendampingan

IRT Pangan dan Non	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Jumlah IRT
Jumlah IRT Pangan	24	24	23	31	102
Jumlah IRT Non Pangan	12	11	11	12	46
Total IRT peserta pendampingan	36	35	34	43	148

Catatan: Anggota Gula Merah Cianjur sebanyak 50 unit usaha



Gambar 8 Jumlah IRT pangan dan non pangan peserta pendampingan

Rincian industri rumah tangga menurut jenis usaha di lokasi pendampingan disajikan pada Tabel 31 dan Tabel 32.

Tabel 31 Sebaran IRT pangan peserta pendampingan menurut jenis industri di lokasi pendampingan

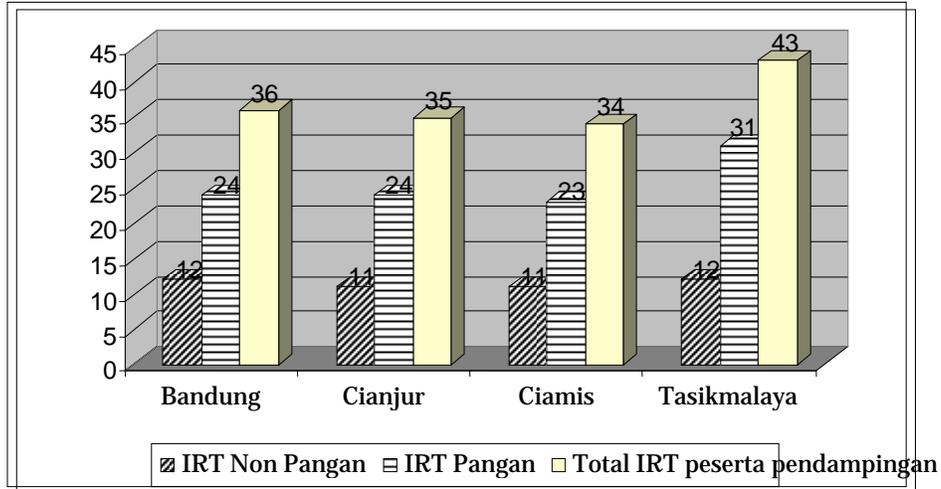
No	Nama Produk	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Jumlah Usaha
1	Beras			1		1
2	Bibit Gurame			1		1
3	Chrispy Jamur			1		1
4	Cincau	1				1
5	Coklat Kue	1				1
6	Cuhcur				2	2
7	Dodol Sirsak	1				1
8	Donat		2			2
9	Gula Merah (Aren*/Kelapa)		2	4	5	11
10	Jamur Merang/Tiram	2	1	1	1	5
11	Kelontong				5	6
12	Keripik Pisang/Singkong	2	3	2	1	8
13	Kerupuk	2	1		1	3
14	Kerupuk Kulit	2				2
15	Kerupuk Mie			2	0	2
16	Kerupuk Rangginang	1			2	3
17	Kopra			1		1
18	Kremes Ubi	1				1
19	Kue Kering	2	2			4
20	Kutu Mayang		2			2
21	Minyak Kelapa		1			1
22	Molen Sale Pisang				2	2
23	Jarangking (impun)		1			1
24	Opak		3	4	3	10
25	Sale Pisang		2	2		4
26	Rempeyek				1	1
27	Roti Rancis	1				1
28	Sirkam				1	1
29	Sistik				1	1
30	Tahu	1	1	2	1	5
31	Tape Singkong				2	2
32	Telur Asin	1		1		2
33	Tempe	4	3	1	1	9
34	Teng-teng				1	1
35	Wajit Ketan	1				1
36	Yoghurt	1			1	2
	Jumlah IRT Pangan	24	24	23	31	102

Tabel 32 Sebaran IRT non pangan peserta pendampingan menurut jenis industri di lokasi pendampingan

No	Nama Produk	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Jumlah Usaha
1	Anyaman Bambu			1		1
2	Arang		1			1
3	Aseupan				1	1
4	Batu Bata Merah	1	2	4		7
5	Besek				4	4
6	Bilik		3			3
7	Boboko besar dan kecil		1			1
8	Boneka	1				1
9	Bongsang Anyam		2			2
10	Gypsum		1			1
11	Gitar			1		1
12	Gurami				1	1
13	Hiasan kayu		1			1
14	Jaket	1				1
15	Kancing dari batok kelapa				1	1
16	kemasan kertas	1				1
17	Kerajian lidi			1		1
18	Keramba ayam			1		1
19	Kertas daur ulang	1				1
20	Lemari	2				2
21	Lukisan	1				1
22	lukisan kaca	1				1
23	piring, boboko			1		1
24	Sangkar Burung	1				1
25	Tampah				1	1
26	Tanaman hias	1				1
27	Tas	1			2	4
28	Tempat tidur			1		1
29	Topi			1		1
Jumlah IRT Non Pangan		12	11	11	12	46

## 6.2. Penerapan CPPB bagi Industri Rumah Tangga Pangan

Mengingat sebagian besar usaha IRT peserta pendampingan merupakan industri mikro pangan seperti tampak pada Gambar 9, maka dalam kegiatan pendampingan di bidang manajemen produksi perlu dilakukan pembinaan pada aspek pengendalian mutu melalui penerapan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) atau GMP (*good manufacturing practice*).



Gambar 9 Jumlah IRT peserta pendampingan pangan dan non pangan menurut lokasi

Aspek CPPB merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi industri rumah tangga ataupun industri mikro. Hal ini mengingat produk yang dihasilkan industri rumah tangga atau industri mikro pangan umumnya bersentuhan langsung dengan konsumen, dan terkadang tanpa ada pengawasan. Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi makanan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi. Pangan yang aman dikonsumsi berarti pangan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia. Sedangkan konsep layak dikonsumsi berarti bahwa makanan tersebut dalam keadaan normal, tidak busuk, tidak kotor, tidak menjijikkan, dan tidak ada penyimpangan lainnya.

Secara umum industri rumah tangga pangan masih dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut: (a) permodalan kecil, (b) tingkat pendidikan sumber daya manusia masih rendah, (c) manajemen usaha tradisional, (d) kurangnya kebersihan dan higienitas tempat, alat dan proses produksi, (e) terbatasnya pemasaran, dan (f) minimnya kemampuan mengorganisasikan dan mengadministrasikan usaha dengan baik. Permasalahan yang kerap dihadapi oleh industri mikro dan kecil pada umumnya, tidak dapat hanya diserahkan penyelesaiannya kepada industri mikro dan kecil itu sendiri saja, melainkan diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk sama-sama memberikan perhatian yang serius untuk mendukung penyelesaian permasalahan dan mendorong berkembangnya industri mikro dan kecil. Dalam rangka pendampingan ekonomi terhadap IRT korban gempa bumi di Jawa Barat, pembinaan yang diberikan juga mencakup berbagai aspek yang menjadi permasalahan yang umumnya dihadapi oleh usaha mikro dan kecil tersebut.

Perhatian pemerintah dalam membuat peraturan sebagai dasar hukum kegiatan industri di bidang pangan sudah cukup memadai, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Bagi industri pangan, mutu produk sangat terkait dengan keamanan pangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, pemenuhan persyaratan di seluruh kegiatan rantai pangan hendaknya dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara produksi atau cara penanganan yang baik yang meliputi: (a) cara budidaya yang baik; (b) cara produksi pangan segar yang baik; (c) cara produksi pangan olahan yang baik; (d) cara distribusi pangan yang baik; (e) cara ritel pangan yang baik; dan (f) cara produksi pangan siap saji yang baik. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka seluruh rantai pangan termasuk dalam kegiatan pengolahannya yang biasa dilakukan di industri harus menerapkan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB). Mengingat pelaku IRT merupakan pelaku usaha terbanyak dan tersebar di berbagai daerah di seluruh tanah air, perhatian aspek CPPB dan pengendalian mutu merupakan hal sangat penting untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) diatur dan ditetapkan Melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK. 00.05.5.1639, Tanggal 30 April Tahun 2003.

Produk pangan yang aman berarti bebas dari sumber cemaran atau bahaya pangan. Sumber cemaran atau bahaya pangan meliputi: (1) bahaya fisik, misalnya pecahan kaca, kerikil, batu, benda tajam, logam, rambut, kuku, tulang, dan lain-lain, (2) bahaya kimia, misalnya bahan beracun, pestisida, oli, pupuk, limbah kimia, dan bahan kimia lainnya, (3) bahaya biologis seperti mikroorganisme (jamur, kapang bakteri, virus) yang membahayakan, dan (4) kontaminasi silang. Jika tidak dilindungi dengan baik, produk pangan yang sudah diolah mungkin saja tercemar kembali oleh cemaran–cemaran fisik, kimia dan biologis yang berasal dari alat, bahan, pekerja dan lainnya.

Penerapan cara produksi pangan yang baik akan memberi manfaat bagi industri rumah tangga, konsumen dan pemerintah. Manfaat bagi industri rumah tangga diantaranya adalah (1) sebagai syarat untuk mendapatkan No P.IRT (produksi pangan industri rumah tangga) yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat, (2) kemudahan untuk pembinaan, (3) menghasikan produk bermutu, aman & sehat sehingga akan memberi dampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen/pasar, kemudahan memperluas pasar, dan (4) ikut serta dalam melestarikan lingkungan. Manfaat bagi pemerintah dengan penerapan GMP pada industri rumah tangga yaitu: menjalankan tugasnya dalam melindungi

konsumen, memberi jaminan kepada konsumen dan sekaligus memberikan acuan bagi industri. Manfaat yang dirasakan oleh konsumen adalah diperolehnya rasa aman untuk mendapatkan produk yang baik aman dan bermutu.

### **6.3. Kondisi Penerapan CPPB pada IRT peserta pendampingan**

Aspek yang menjadi perhatian dalam pendampingan industri rumah tangga adalah aspek aspek yang diperlukan untuk menerapkan CPPB yang meliputi (1) lingkungan dan lokasi usaha, (2) bangunan dan fasilitas unit usaha, (3) fasilitas dan kegiatan sanitasi, (4) sistem pengendalian hama, (5) *hygiene* karyawan, (6) pengendalian proses mencakup bahan baku, *food additive*, (c) diagram alir proses, kemasan, label, dan penyimpanan, (7) manajemen pengawasan, dan (8) pencatatan dan dokumentasi. Pada kenyataannya, penerapan cara produksi yang baik dan cara pengendalian mutu yang dilakukan oleh industri rumah tangga sangat beragam, bergantung pada jenis usaha yang dilakukan, pengetahuan pemilik usaha, skala ekonomi usaha, dan sikap atau cara hidup bersih yang dijalankan oleh pelaku usaha. Berikut ini diuraikan aspek CPPB dan pengendalian mutu yang dijalankan oleh industri rumah tangga binaan.

#### **6.3.1. Aspek Lingkungan dan Lokasi usaha**

Lingkungan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan menjalankan usaha. Idealnya kondisi lingkungan suatu unit industri atau sarana pengolahan hendaknya: (1) terawat baik, bersih dan bebas sampah, (2) sistem pembuangan dan penanganan limbah cukup baik, (3) sistem saluran pembuangan air lancar. Lokasi usaha hendaknya berada pada wilayah yang aman dan bersih, yaitu: (1) jauh dari tempat sampah, tidak kumuh, (2) tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, (3) bebas banjir, polusi asap, debu, bau, dan kontaminan lain, (4) bebas hama, (5) tidak dekat industri logam dan kimia, atau limbah.

Secara umum lingkungan usaha industri mikro binaan berada pada lingkungan pemukiman, sebagian memiliki lokasi usaha yang terpisah namun berdekatan dengan rumah tempat tinggal. Sebagian lainnya tempat melakukan usaha menyatu dengan rumah tempat tinggal. Kerap dijumpai industri rumah tangga juga memanfaatkan lahan pekarangan yang berdekatan dengan tempat tinggal sebagai tempat untuk menunjang kegiatan usaha. Gambaran kondisi lingkungan dan tempat usaha IRT peserta pendampingan secara umum disajikan pada Gambar 10.



Gambar 10 Kondisi lokasi dan bangunan tempat pengolahan pada IRT

### 6.3.2. Bangunan dan Fasilitas Unit Usaha IRT peserta pendampingan

Bangunan dan fasilitas unit pengolahan idealnya didesain untuk memudahkan dan memperlancar kegiatan produksi. Secara umum ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam mendirikan bangunan dan fasilitas unit pengolahan, yaitu desain bangunan, keberadaan pintu, jendela dan ventilasi, dan tata letak ruang dan peralatan produksi. Desain bangunan untuk tempat pengolahan sebaiknya meliputi: (1) desain, konstruksi dan tata ruang harus sesuai dengan alur proses, (2) bangunan tempat produksi cukup luas dan mudah dibersihkan, (3) terpisah antara ruang bersih dan ruang kotor, (3) lantai dan dinding terbuat dari bahan tidak menyerap air, kuat dan mudah dibersihkan, serta sudut pertemuannya berbentuk lengkung, dan (4) langit-langit didesain sehingga kuat, mencegah menumpuk debu, jamur, hama, terkelupas, dan mudah dibersihkan.

Keberadaan pintu, jendela dan ventilasi hendaknya dibuat sebaik mungkin yaitu: (1) pintu dan jendela dibuat dari bahan tahan lama, tidak mudah pecah, rata,halus, berwarna terang, dan mudah dibersihkan, (2) pintu dan jendela dilengkapi kasa yg mudah dibersihkan, (3) pintu didesain terbuka keluar/samping dan selalu dapat tertutup, dan (4) ventilasi cukup

memungkinkan udara segar mengalir di ruang produksi, dan mudah dibersihkan. Tata letak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang, hal yang dapat dilakukan antara lain (1) peralatan produksi terbuat dari bahan yang kuat, tidak berkarat, mudah dibongkar pasang sehingga mudah dibersihkan, (2) permukaan yang kontak langsung dengan pangan seharusnya halus, tidak bercelah, tidak mengelupas, dan tidak menyerap air, (3) peralatan produksi harus diletakkan sesuai dengan urutan prosesnya, sehingga memudahkan bekerja dan mudah dibersihkan, dan (4) semua peralatan seharusnya dipelihara agar berfungsi dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih.

Secara umum hasil penilaian terhadap bangunan dan fasilitas unit usaha industri rumah tangga tergolong sederhana. Beberapa IRT peserta pendampingan memiliki bangunan menyatu dengan rumah tempat tinggal, atau memanfaatkan bangunan rumah tempat tinggal sebagai tempat produksi. Gambaran kondisi bangunan, ventilasi, dan penerangan pada IRT peserta pendampingan secara umum disajikan pada Tabel 33. Data pada Tabel 33 menunjukkan bahwa sekitar 18-30 persen industri rumah tangga (IRT) binaan yang sudah memperhatikan desain bangunan tempat usaha dengan baik. Hal ini bila dilihat dari keberadaan bangunan, kecukupan ventilasi dan pencahayaan, serta kebersihan lantai. IRT peserta pendampingan lainnya (30 – 37 % IRT) memiliki ventilasi dan pencahayaan pada bangunan tempat produksi yang tergolong cukup dan sebagian lainnya masih memiliki masalah terhadap bangunan usaha, khususnya kurangnya ventilasi (33%), kurangnya pencahayaan (45%), sehingga terkadang ruang produksi terasa gelap dan pengap. Bagi IRT yang kondisi fasilitas bangunan usahanya kurang baik perlu dilakukan pendampingan dan bila diperlukan memberi bantuan teknis untuk meningkatkan kesehatan ruang produksi.

Tata letak ruang dan peralatan bagi industri rumah tangga sebagian (29%) sudah tertata dengan baik, sebagian lainnya (40%) dinilai cukup dalam penataan tempat dan peralatan produksi, sementara sebagian lainnya (31%) masih memerlukan perbaikan penataan ruangan produksi. Kondisi lantai tempat usaha sebagian IRT masih banyak yang memerlukan peningkatan, baik dari segi kebersihan lantai maupun keberadaan bangunan lantai tempat usahanya. Berdasarkan Tabel 33 tampak bahwa 45 persen IRT memerlukan perbaikan lantai tempat usaha, 37 persen lainnya dinilai memiliki lantai tempat usaha yang cukup memadai dan 18 persen IRT lainnya sudah memiliki kondisi lantai tempat usaha yang baik.

Tabel 33 Sebaran IRT (%) menurut kondisi bangunan dan fasilitas tempat usaha IRT peserta pendampingan sebelum dan setelah pembinaan

Kondisi Bangunan dan Fasilitas Unit Usaha IRT	Sebelum Pembinaan				Setelah Pembinaan				Total (%)
	Baik	Cukup	Kurang	Buruk	Baik	Cukup	Kurang	Buruk	
Ventilasi dan aliran udara	30	37	29	4	41	45	14	-	100
Cahaya tanpa lampu	25	30	38	7	36	36	26	2	100
Kondisi lantai	18	37	36	9	33	44	23	-	100
Tata letak ruangan & alat	29	40	28	3	39	47	14	-	100
atap	35	32	31	2	44	34	22	-	100
Kelengkapan perabotan	40	48	11	1	49	47	4	-	100

Sumber: Data Primer, 2011

Data pada Tabel 33 menunjukkan terdapat peningkatan perhatian IRT peserta pendampingan pada aspek penataan bangunan usaha, yaitu dari 18-30 persen IRT yang sudah memperhatikan desain bangunan tempat usaha dengan baik meningkat menjadi 33-41 persen. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah IRT yang melakukan perbaikan keberadaan bangunan usahanya, kecukupan ventilasi dan pencahayaan meningkat dari 30-37 persen menjadi 36-45 persen, kebersihan lantai meningkat dari 55 persen IRT yang menjaga kebersihan cukup baik meningkat menjadi 77 persen.

Terdapat peningkatan tata letak ruang dan peralatan yang digunakan industri rumah tangga setelah dilakukan pembinaan. Dari sebanyak 29 persen yang sudah menata dengan baik sebelum dilakukan pembinaan meningkat menjadi 39 persen IRT, dan sebagian lainnya yang dinilai cukup dalam penataan tempat dan peralatan produksi meningkat dari 40 persen menjadi 47 persen IRT, sementara sebagian IRT lainnya yang masih memerlukan perbaikan penataan ruangan produksi jumlahnya menurun dari sebelumnya 31 persen menjadi 14 persen IRT.



Gambar 11 Kondisi bangunan dan fasilitas pengolahan pada IRT (sebelum pembinaan)



Gambar 12 Kondisi bangunan dan fasilitas pengolahan pada IRT (setelah pembinaan)

### 6.3.3. Perbaikan Tata Letak dan Bangunan Tempat Usaha

Perbaikan tata letak tempat usaha bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan tata letak tempat usaha industri rumah tangga. Perbaikan tata letak dapat meliputi perbaikan letak bangunan, perbaikan letak peralatan dan mesin yang digunakan, perbaikan letak bahan-bahan dan perlengkapan produksi, letak alur proses produksi, ataupun terkait perbaikan sarana sanitasi dan pengolahan limbah, serta pencahayaan dan ventilasi di ruang produksi. Perbaikan tataletak tempat usaha dilakukan beragam untuk setiap industri rumah tangga, disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas yang perlu dibenahi dalam kegiatan produksi pada setiap industri rumah tangga.

Kegiatan perbaikan tata letak tempat produksi industri rumah tangga dilakukan seiring dan selaras dengan kegiatan pembinaan cara produksi pangan yang baik (CPPB), dan merupakan bagian dari kegiatan CPPB tersebut. Pembinaan yang diberikan berupa pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan yang terkait dan fasilitasi dana bantuan untuk perbaikan tataletak/sanitasi tempat usaha. Dalam kegiatan pelatihan diberikan penerangan tentang pentingnya pengaturan tata letak dalam kegiatan produksi, kaitannya dengan cara produksi pangan yang baik, pengaturan tataletak sebagai upaya pencegahan atau pengurangan terjadinya kontaminasi silang pada proses produksi pangan, dan tidak kalah pentingnya adalah kaitannya dengan perbaikan tata cara kerja pada industri rumah tangga. Selanjutnya dalam kegiatan pembinaan juga dilakukan pendampingan industri rumah tangga sehingga dapat mengatasi masalahnya dengan cepat.

Perbaikan tataletak dirasakan penting dalam industri rumah tangga, khususnya bagi industri rumah tangga yang sudah mulai berkembang. Tataletak akan sangat mempengaruhi pola kerja dalam setiap kegiatan produksi. Terkadang tanpa disadari oleh industri rumah tangga, dengan memulai usaha pada skala yang sangat kecil dimana persoalan tataletak belum memberi dampak yang besar pada kegiatan produksi namun tata letak dan pola kerja yang sama masih dipertahankan ketika volume usaha atau kapasitas produksi semakin bertambah. Hal ini berdampak pada semerawutnya kondisi ruang produksi, tidak jarang ditemui letak peralatan yang tidak tertata dengan rapi, penanganan bahan baku dan bahan jadi yang tidak rapi, serta adanya tumpukan bahan-bahan atau peralatan yang tidak lagi digunakan dalam ruang produksi.

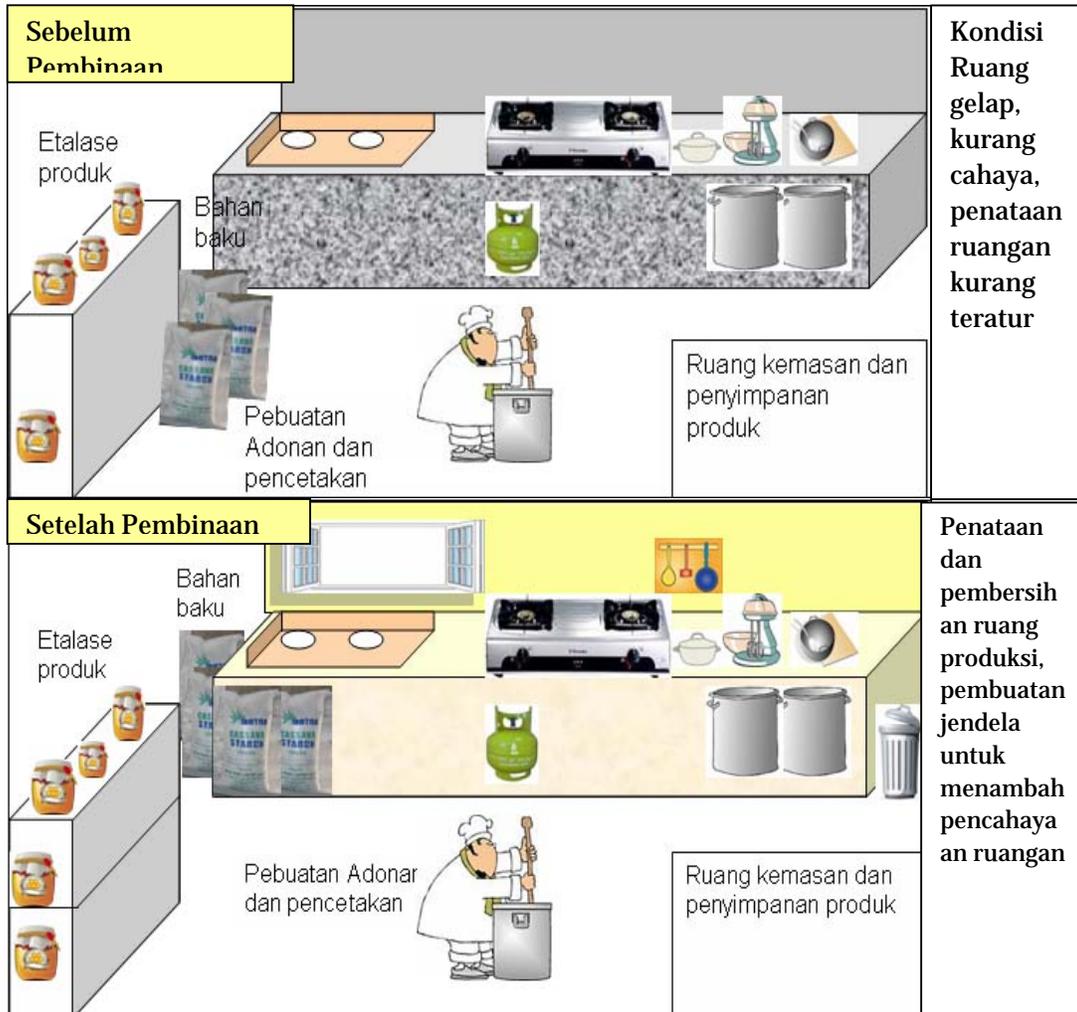
Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan pada industri rumah tangga aspek tataletak dan perbaikan pola kerja mendapat perhatian yang baik dari para industri rumah tangga. Hal ini terlihat dari IRT tanggap dan menerima serta melaksanakan saran perbaikan yang diberikan selama pembinaan. Dapat dilihat dari meningkatnya jumlah IRT yang menata dengan baik tempat usahanya, dari sebanyak 29 persen sebelum dilakukan pembinaan menjadi 39 persen IRT, dan yang dinilai cukup dalam penataan tempat dan peralatan produksi meningkat dari 40 persen menjadi 47 persen IRT, sementara IRT yang penataan tempat usahanya belum baik jumlahnya menurun dari sebelumnya 31 persen menjadi 14 persen IRT.

**Berikut ini beberapa contoh hasil pendampingan perbaikan tata letak dan penataan ruang produksi di lokasi pendampingan.**

### **1) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung**

Perbaikan tataletak dan ruang produksi seperti yang dilakukan terhadap IRT di desa Kiangroke (Ibu Neneng, Produksi Kue). Sebelum pembinaan ruang produksi kurang pencahayaan sehingga gelap, tumpukan bahan baku dan peralatan

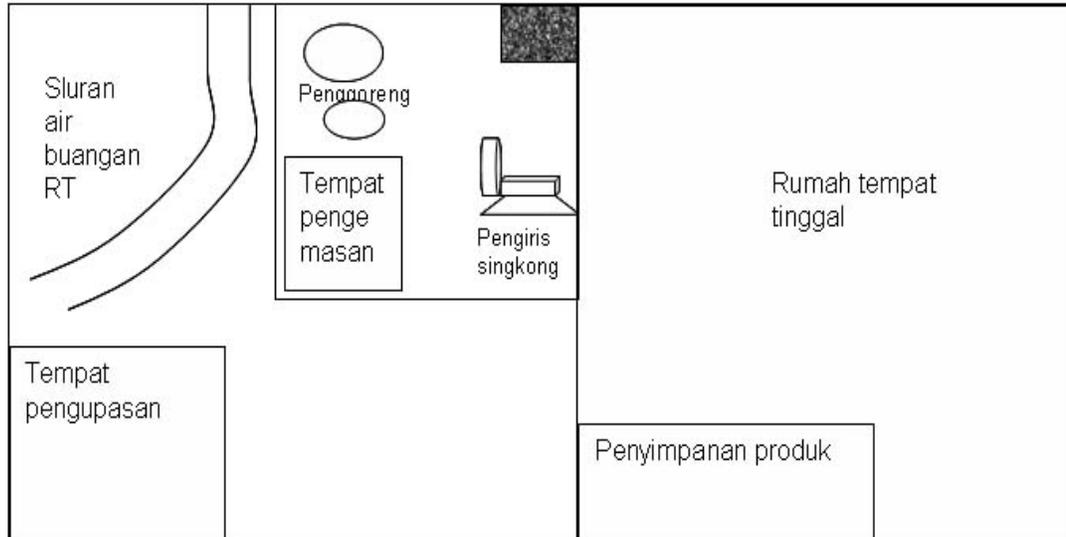
kurang teratur. Setelah melalui pembinaan telah dilakukan penataan ruang produksi, pembersihan ruangan dan perbaikan pencahayaan dengan menambah jendela pada ruang produksi.



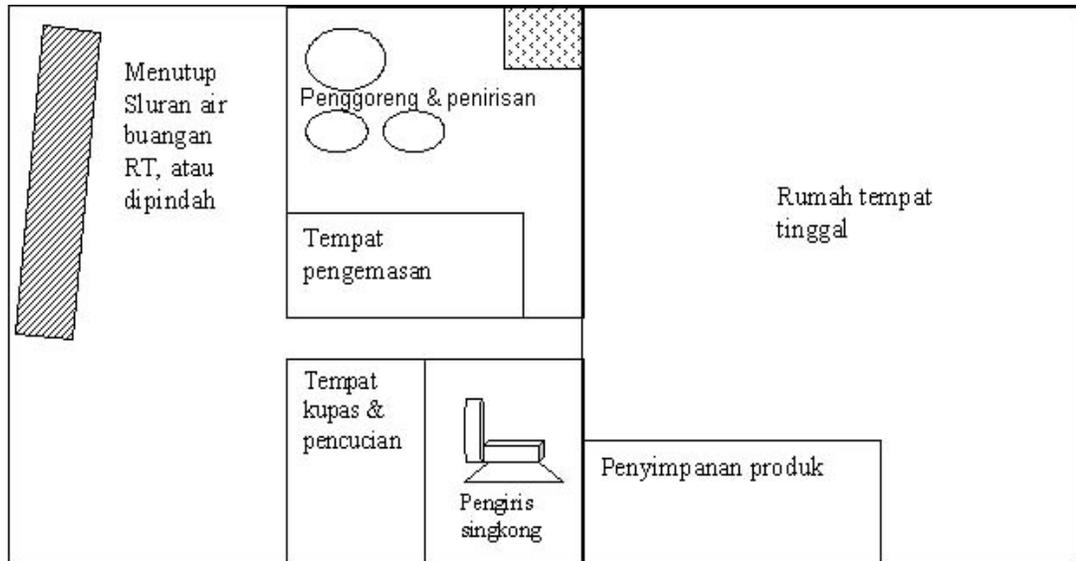
Gambar 13 Penataan ruang produksi, pembersihan ruangan dan perbaikan pencahayaan pada IRT peserta pendampingan (Ibu Neneng, Produksi Kue), Desa Kiang Roke Kec. Banjaran, Kab. Bandung

Perbaikan tataletak dan ruang produksi dilakukan terhadap IRT di desa Banjaran Wetan, Kec Banjaran, Kab. Bandung (Bapak Wawan Riswandi, Produksi Keripik). Sebelum pembinaan ruang produksi dan tempat pengupasan berdekatan dengan saluran air buangan rumah tangga. Ruang penggorengan, pengemaan dan pengirisan singkong berdekatan sehingga relatif menumpuk dan sempit. Pencahayaan dan ventilasi cukup. Setelah melalui pembinaan telah dilakukan penataan ruang produksi, pembersihan ruangan dan penutupan/pemindahan saluran limbah, serta pemindahan tempat pengupasan dan pengirisan singkong.

Sebelum Pembinaan



Setelah Pembinaan

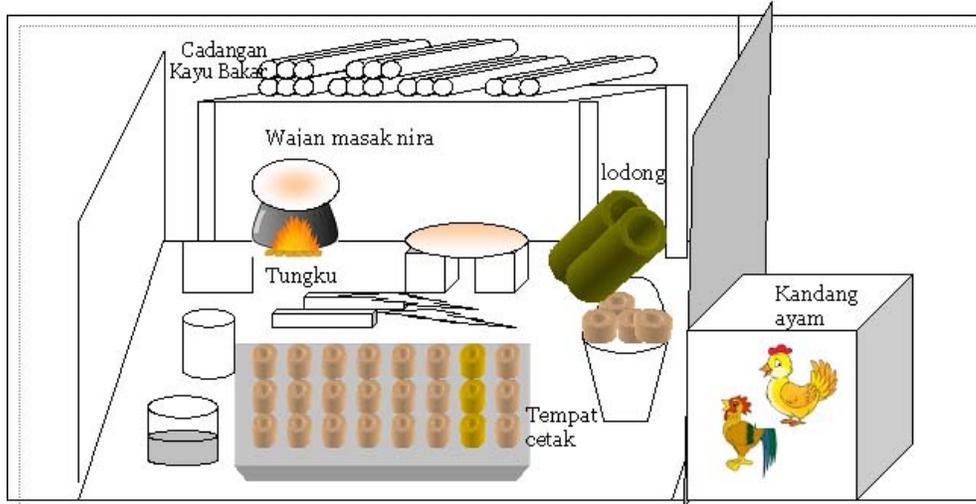


Gambar 14 Penataan dan perbaikan lantai dan bangunan ruang produksi, penutupan/pemindahan saluran limbah pada IRT peserta pendampingan (Wawan Riswandi, Produksi Keripik), Desa Banjaranwetan Kec. Banjaran, Kab. Bandung

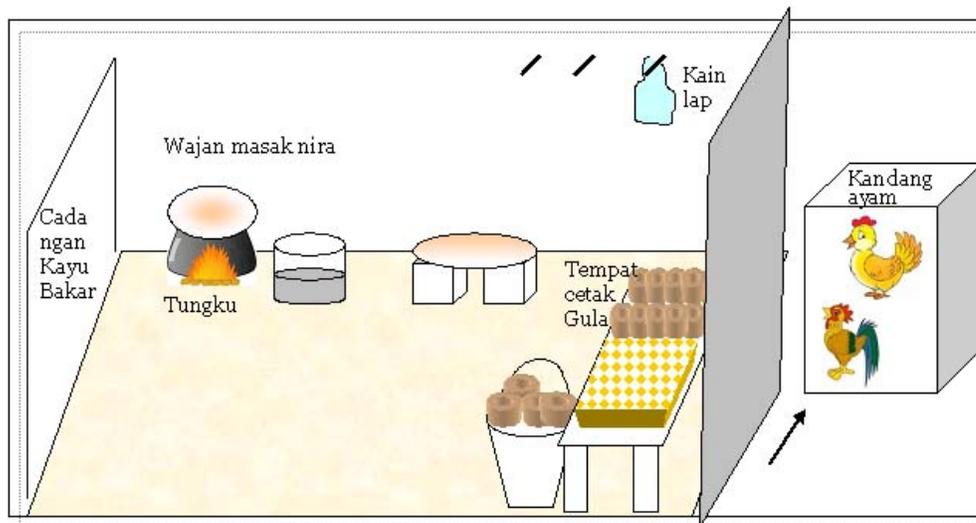
## 2) Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya

Perbaikan tataletak dan ruang produksi dilakukan terhadap IRT produksi gula aren (Bapak Lili Ruhli). Sebelum pembinaan ruang produksi relatif kurang teratur dan terasa sempit dengan tumpukan kayu bakar diatas tungku dan berbagai perlengkapan, aliran udara yang kurang lancar menyebabkan asap dari kayu bakar memenuhi tempat produksi. Proses pencetakan gula menggunakan papan cetakan yang dilakukan langsung diatas lantai tanah menyatu dengan tumpukan dan serpihan sisa kayu bakar. Setelah melalui pembinaan telah dilakukan renovasi tempat produksi, pembersihan ruangan dan perbaikan lantai dengan semen/keramik, pemindahan tumpukan kayu dan menjauhkan kandang ternak dari tempat produksi.

### Sebelum Pembinaan



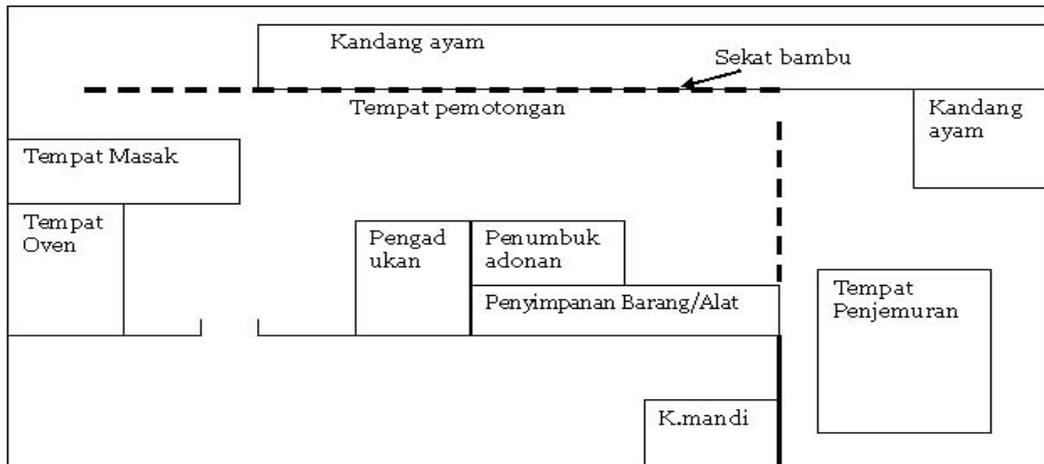
### Setelah Pembinaan



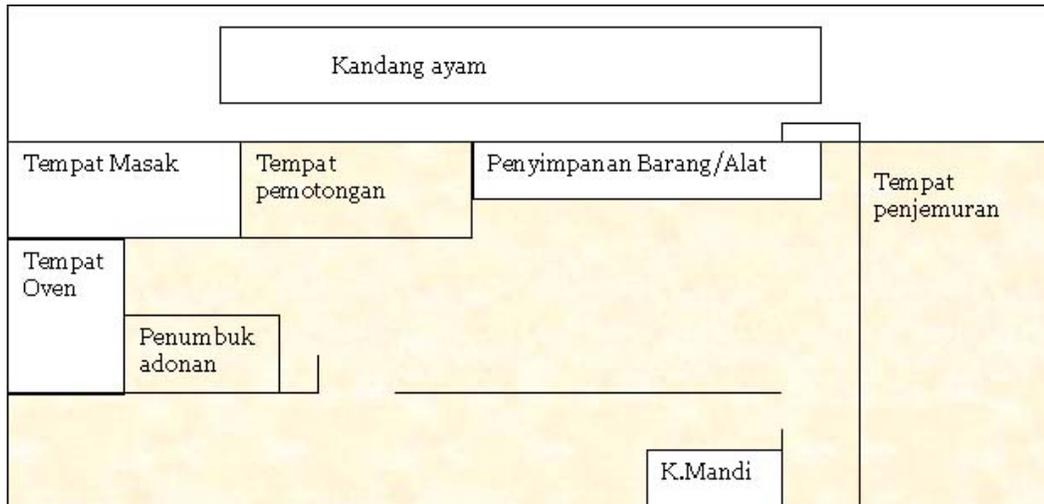
Gambar 15 Perbaikan lantai (semen/keramik) dan bangunan ruang produksi, penataan layout tempat peralatan (IRT Bapak Lili Ruhli, Produksi Gula Aren. Kec. Cisayong. Kab. Tasikmalaya)

Gambar 16 memperlihatkan ilustrasi perbaikan tataletak dan ruang produksi dilakukan terhadap IRT Bapak Bapak Nandang, Produksi Opak kelontong, di Kecamatan Cisayong, Kab. Tasikmalaya. Sebelum pembinaan ruang produksi relatif kurang teratur, kondisi atap yang bocor, tempat produksi dan tempat penjemuran berdekatan dengan kandang ayam. Tempat penyimpanan peralatan produksi kurang tertata rapi. Setelah melalui pembinaan telah dilakukan penataan tempat produksi, pembersihan ruangan dan perbaikan lantai dengan semen/keramik, pemindahan tumpukan kayu dan menjauhkan kandang ternak dari tempat produksi.

#### Sebelum Pembinaan



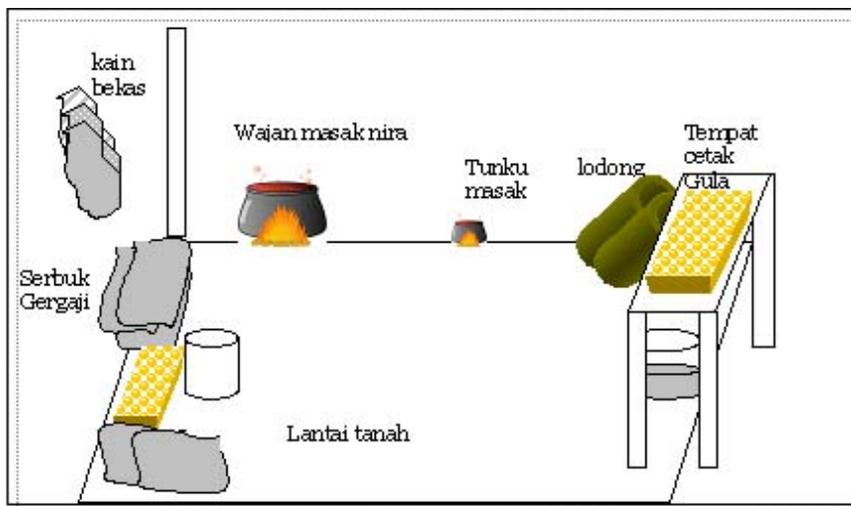
#### Setelah Pembinaan



### 3) Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis

Gambar 17 menunjukkan ilustrasi perbaikan tataletak dan ruang produksi pada IRT peserta pendampingan Bapak Ade Wawan, produksi gula kelapa, di Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis. Sebelum pembinaan ruang tempat pengolahan gula relatif kurang pencahayaan sehingga terasa gelap dan pengap, lantai tanah yang lembab dan penataan peralatan dan perlengkapan produksi yang belum teratur. Tempat penyimpanan peralatan produksi belum tertata rapi. Setelah melalui pembinaan telah dilakukan penataan tempat produksi, merehap bangunan, perbaikan lantai dengan semen, penataan tumpukan kayu bakar dan serbuk gergaji dan merapikan tempat pencetakan gula.

#### Sebelum Pembinaan



Ruang produksi gelap, kurang pencahayaan, lantai tanah terasa lembab, penataan peralatan dan perlengkapan produksi yang belum

#### Setelah Pembinaan

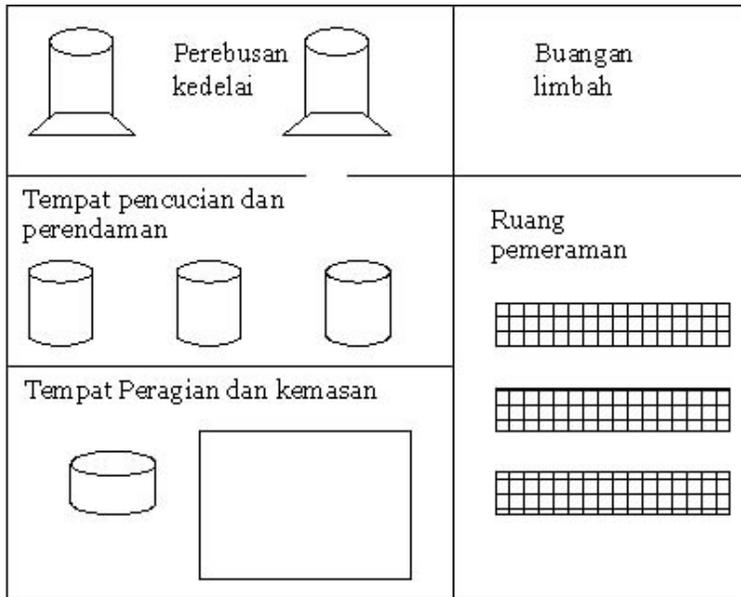


Renovasi bangunan tempat produksi, pembuatan jendela untuk pencahayaan, lantai tanah semen, dan penataan peralatan dan perlengkapan cetak gula

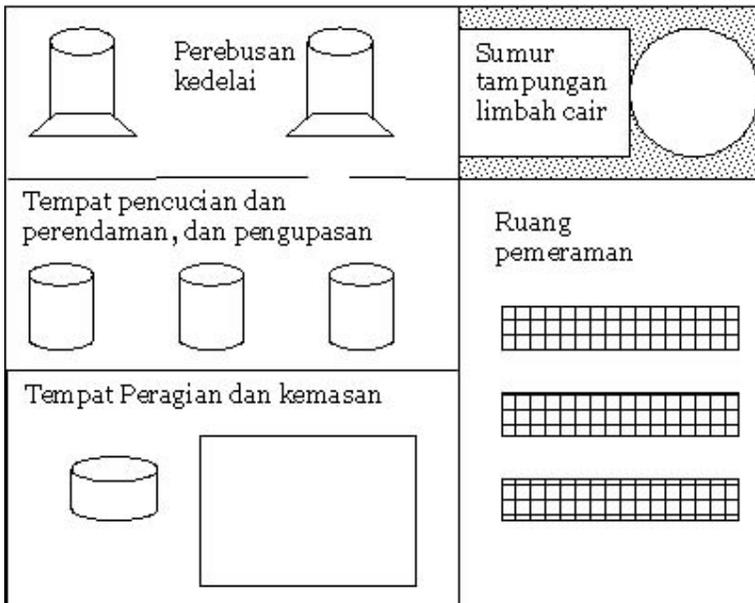
Gambar 17 Perbaikan lantai (semen/keramik) dan bangunan ruang produksi, penataan layout tempat peralatan (Bapak Ade Wawan, Produksi Gulakelapa, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis)

Gambar 18 menunjukkan ilustrasi perbaikan tataletak dan ruang produksi pada IRT peserta pendampingan Bapak Ujang Rusli, produksi tahu tempe, di Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis. Pembinaan diarahkan untuk peningkatan kebersihan tempat produksi dan penanganan limbah dengan baik. Sebelum pembinaan belum dilakukan penanganan limbah dari pengolahan. Setelah pembinaan telah dilakukan penataan tempat produksi, menjaga kebersihan, dan membuat tempat penampungan limbah cair sebelum lebih lanjut dialirkan ke badan air (sungai).

Sebelum Pembinaan



Setelah Pembinaan

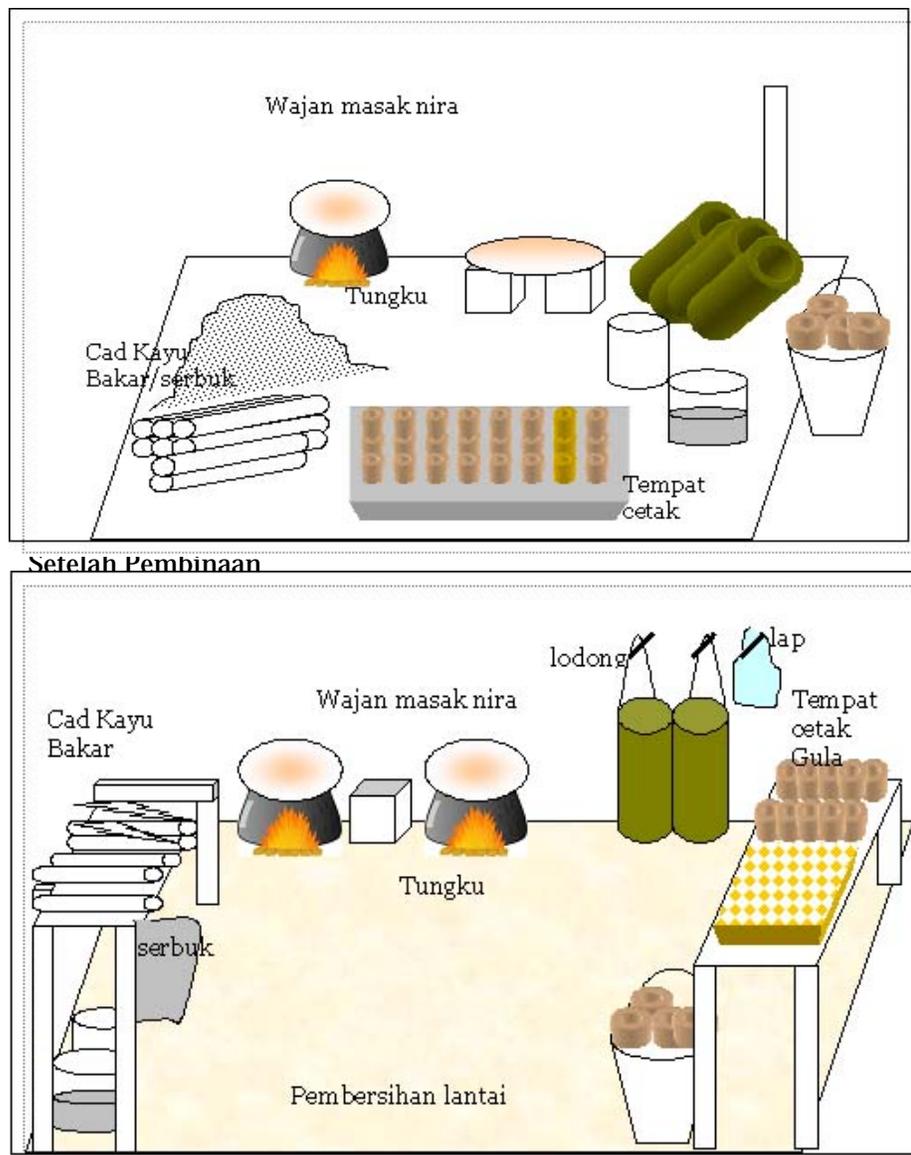


Gambar 18 Perbaikan kebersihan dan pembuatan penampungan limbah cair sebelum dialirkan ke badan air (Bapak Ujang Rusli, Tahu Tempe, Kec. Baniarsari, Kab. Ciamis)

### 3.4. Perbaikan tata letak ruang produksi IRT di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur

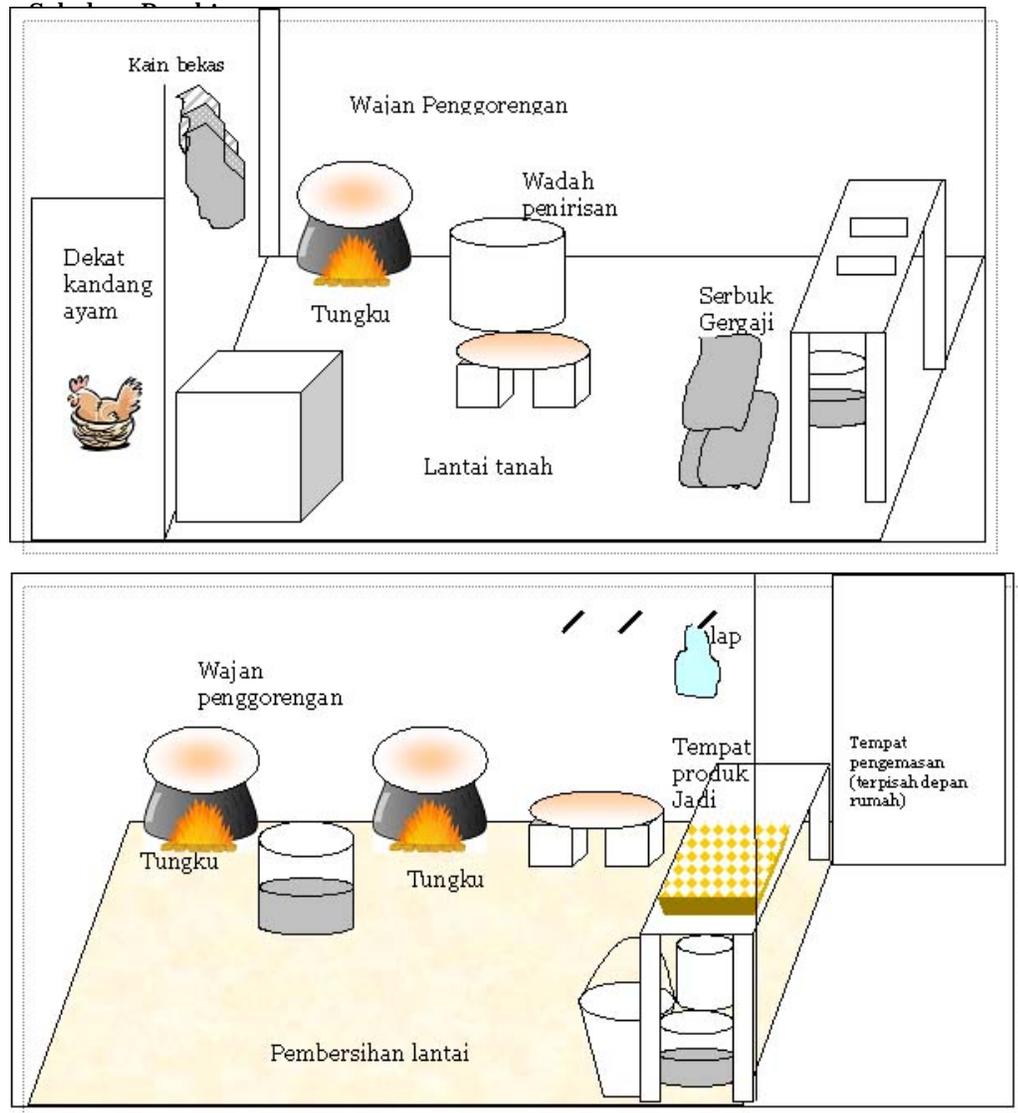
#### 4) Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur

Gambar 19 menunjukkan ilustrasi perbaikan tataletak dan ruang produksi pada IRT peserta pendampingan Bapak Enggan, produksi gula aren, di desa Ciakar Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur. Sebelum pembinaan penataan peralatan dan perlengkapan produksi belum tertata rapi, demikian juga tumpukan kayu bakar dan serbuk sedikit berserakan, serta kondisi lantai tanah yang terkadang kurang bersih. Setelah pembinaan telah dilakukan penataan tempat produksi, merapikan tumpukan bahan dan peralatan, membersihkan lantai, serta dapat menambah tungku tempat pemasakan nira untuk membuat gula.



Gambar 19 Perbaikan lantai (semen/keramik) dan bangunan ruang produksi, penataan layout tempat peralatan (Bapak Enggan, Produksi Gula Aren, Desa. Ciakar, Kec. Sindangbarang, Kab. Cianjur)

Gambar 20 menunjukkan ilustrasi perbaikan tataletak dan ruang produksi pada IRT peserta pendampingan Bapak Kosim, produksi keripik, di Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur. Sebelum pembinaan penataan peralatan dan perlengkapan produksi belum tertata rapi, demikian juga tumpukan kayu bakar dan serbuk sedikit berserakan, serta kondisi lantai tanah yang terkadang kurang bersih. Setelah pembinaan telah dilakukan penataan tempat produksi, merapikan tumpukan bahan dan peralatan, membersihkan lantai, emindahkan kandang ayam, serta menambah tungku tempat penggorengan.



Gambar 20 Perbaikan lantai dan penataan ruang produksi (IRT Bapak Kosim, Produksi Keripik, Kec. Sindangbarang, Kab. Cianjur)

#### 6.3.4. Fasilitas dan Kegiatan Sanitasi

Fasilitas unit usaha dan fasilitas untuk kegiatan sanitasi pada industri pengolahan pangan paling tidak terdapat fasilitas pencucian dan kebersihan yang dapat digunakan oleh para pekerja untuk menjaga kebersihan diri, peralatan produksi dan kebersihan selama proses produksi. Fasilitas yang diperlukan meliputi: (1) tersedianya penerangan yang cukup, sesuai spesifikasi proses, (2) sarana pencucian tangan dan kaki dilengkapi sabun dan pengering atau desinfektan, (3) tersedia perlengkapan PPPK, (4) gudang mudah dibersihkan, terjaga dari hama dan binatang pengerat, pengaturan suhu dan kelembaban sesuai, penyimpanan sistem FIFO dilengkapi dengan pencatatan, dan (5) tempat penyimpanan bahan baku terpisah dari produk jadi, serta tempat penyimpanan bahan pangan dan non pangan juga dipisahkan

Fasilitas untuk kegiatan sanitasi meliputi : Sarana penyediaan air, Sarana pembuangan air dan limbah, Sarana pembersihan /pencucian, Sarana toilet/jamban, dan Sarana hygiene karyawan. Gambaran keberadaan dan kondisi fasilitas sanitasi pada IRT peserta pendampingan secara umum disajikan pada Tabel 34.

Tabel 34 Sebaran IRT (%) menurut keberadaan dan kondisi fasilitas sanitasi sebelum dan setelah pembinaan

Keberadaan dan kondisi Fasilitas Sanitas	Sebelum Pembinaan				Setelah Pembinaan				Total (%)
	baik	Cukup	kurang	buruk	baik	cukup	kurang	buruk	
Ketersediaan Air Bersih	26	62	11	1	39	57	4	-	100
Kain pembersih (LaP)	20.2	45.45	29.29	5.05	32	46	20	2	100
Sapu, Tempat sampah	11.11	57.58	29.29	2.02	29	57	14	-	100
Tempat Cuci tangan	11	52	33	4	23	57	20	-	100
Toilet	12.12	50.51	33.33	4.04	21	57	20	2	100

Sumber: Olahan kuesioner IRT RR2 Jawa Barat 2011

Data pada Tabel 34 menunjukkan bahwa keberadaan dan kondisi fasilitas sanitasi pada IRT peserta pendampingan sudah tergolong cukup, yaitu rata-rata 65 persen IRT sudah mampu menyediakan fasilitas sanitasi untuk kegiatan produksi dan sebagian besar tergabung untuk kegiatan rumah tangga. Saran air bersih sudah cukup memadai dimiliki oleh sebahagian besar IRT (88%). Meskipun demikian beberapa IRT masih memerlukan perhatian untuk penyediaan sarana kebersihan, yaitu masing masing kurangnya penyediaan perlengkapan kebersihan (33%) IRT, belum tersedianya tempat cuci (37%),

kondisi toilet yang kurang baik (37%) dan perlu peningkatan sarana penyediaan air bersih (12%).

Tabel 35 menunjukkan baru sebagian kecil IRT (14-20%) yang sudah menjalankan prinsip sanitasi dengan baik (kondisi kebersihan ruang produksi, kebersihan lantai dan dinding tempat usaha, kebersihan alat dan mesin yang digunakan). Sekitar setengahnya (49 – 53%) IRT sudah menerapkan sanitasi namun pada berbagai aspek perlu peningkatan dan bahkan 35 persen IRT belum menerapkan aspek sanitasi dengan baik dalam kegiatan usahanya. Beberapa IRT perlu peningkatan kebersihan terhadap ruang, lantai dan dinding (38%), peningkatan kebersihan alat dan mesin produksi (33%). Bagi IRT yang perlu peningkatan sanitasi dan IRT yang belum menerapkan aspek sanitasi dengan baik perlu dilakukan pendampingan dan dilakukan pendekatan persuasif serta bila diperlukan memberi bantuan teknis untuk meningkatkan sanitasi pada lingkungan dan ruang produksi.

Tabel 35 Sebaran IRT (%) menurut kondisi dan kegiatan sanitasi sebelum dan setelah pembinaan

Kondisi Penerapan sanitasi/higieine	Sebelum Pembinaan				Setelah Pembinaan				Total (%)
	Baik	Cukup	Kurang	Buruk	Baik	Cukup	Kurang	Buruk	
Kebersihan Ruang, Lantai & dinding	13	49	37	1	23	61	16	-	100
perabot, alat/mesin	14	53	29	4	28	51	19	2	100
Keberadaan kandang ternak	20	58	22	-	24	68	8	-	100
Kebersihan Pekerja	68	11	13	8	71	14	13	2	100

Sumber: Olahan kuesioner IRT RR2 Jawa Barat 2011

Tabel 35 menunjukkan peningkatan jumlah IRT yang melakukan perbaikan kebersihan tempat usaha (dari 13 dan 49% menjadi 23 dan 61%). Perhatian IRT terhadap kebersihan peralatan dan kebersihan pekerja juga mengalami peningkatan. Perbaikan keberadaan kandang ternak yang sebelumnya berdekatan dengan ruang tempat produksi, setelah dilakukan pembinaan cukup ditanggapi oleh semua IRT dan memindahkan keberadaan kandang ternak jauh dari tempat produksi atau membuat dan menambah sekat pembatas pada bangunan usahanya. Contoh perbaikan sanitasi tempat usahanya pada IRT peserta pendampingan disajikan pada Gambar 21 sampai 24.



Gambar 21 Perubahan tempat produksi pembuatan gula (Pak Lili Ruhli) sebelum dan setelah pembinaan

Gambar 22 menunjukkan contoh penataan kebersihan lingkungan bangunan tempat usaha yang dilakukan IRT peserta pendampingan setelah mengikuti pendampingan, yaitu dengan membersihkan dan merapikan halaman, ruangan produksi serta dengan pengapuran dinding bangunan, sehingga tempat usaha lebih terlihat bersih dan terang.

Gambar 22 Contoh perubahan bangunan tempat usaha sebelum dan setelah pembinaan

Gambar 23 menunjukkan contoh penataan tempat usaha pembuatan keripik pisang salah satu IRT di Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur sebelum dan setelah pembinaan. Sebelum pembinaan tempat produksi kurang tertata rapi, serta terdapat kandang ternak ayam yang sangat dekat dengan tempat produksi. Setelah dilakukan pembinaan, penataan ruang produksi menjadi lebih rapi, dilakukan perbaikan saluran limpasan air hujan, serta pemindahan kandang ayam pada tempat yang lebih jauh.



Gambar 23 Merapikan dan membersihkan tempat usaha pembuatan Keripik Pisang di Kec. Sindang Barang Cianjur, Jawa Barat (Sebelum dan setelah Pembinaan)

Gambar 24 menunjukkan perbaikan ruang produksi oleh IRT dengan merapikan lantai ruang produksi serta menambah ventilasi dan pencahayaan sehingga ruang produksi lebih bersih, terang dan tidak pengap.



Gambar 24 Merapikan dan membersihkan tempat usaha pembuatan Gula Merah (sanitasi dan pencahayaan) di Kec. Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (sebelum dan setelah pembinaan)

### **6.3.5. HieGINE Karyawan**

Perhatian terhadap kesehatan dan cara hidup sehat (hieGINE) bagi karyawan atau pekerja pada industri pengolahan pangan perlu dijaga. Hal yang perlu diperhatikan antara lain: (a) karyawan harus memenuhi persyaratan sehat, (b) karyawan sakit tidak boleh menangani bahan pangan, dan (c) lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karyawan harus menjaga kebersihan dengan baik, mandi setiap hari, gosok gigi, selalu mebiasakan diri cuci tangan (sebelum masuk area produksi, setelah ke toilet, setelah makan, dan setelah merokok). Karyawan seharusnya mengenakan pakaian kerja/ celemek lengkap dengan penutup kepala, sarung tangan, dan sepatu kerja. Pakaian dan perlengkapannya hanya dipakai untuk bekerja. Karyawan harus menutup luka dengan perban. Karyawan tidak boleh bekerja sambil mengunyah, makan dan minum, merokok, tidak boleh meludah, tidak boleh bersin atau batuk ke arah pangan, tidak boleh mengenakan perhiasan seperti giwang, cincin, gelang, kalung, arloji, dan peniti. Kebersihan karyawan dan tata cara penggunaan fasilitas kebersihan karyawan perlu dibiasakan agar terbiasa dengan pola hidup sehat, seperti tidak mandi pada ruang produksi, dan selalu menjaga kebersihan diri dan pakaian kerja.

Hasil elaborasi di lapang menunjukkan masih rendahnya IRT peserta pendampingan yang memperhatikan kebersihan karyawannya, baru 11 persen IRT peserta pendampingan yang cukup memperhatikan hal tersebut. Terdapat IRT peserta pendampingan yang masih kurang memperhatikan hieGINE karyawan (13%), bahkan terdapat yang tergolong buruk (8%). Hal ini perlu dilakukan pembinaan melalui kegiatan yang bersifat persuasif.

Perilaku bersih pekerja selama kegiatan produksi juga perlu diperhatikan. Masih ditemukan karyawan yang menggunakan kaki untuk kegiatan yang bersentuhan dengan bahan pangan langsung misalnya saat pemotongan atau pengupasan bahan. Demikian halnya masih ditemukan penggunaan alat yang dapat membahayakan atau mengundang terjadi cemaran pada bahan pangan (pisau atau alat rebus yang berkarat), serta tidak menggunakan lap dari bahan bekas pakaian dalam.



Merokok  
diruang  
kemasan  
produk

Menggunakan  
kaki

Gambar 25 Diperlukan peningkatan kesadaran kebersihan dan menerapkan pola kerja yang baik bagi pekerja pada IRT pangan

Untuk meningkatkan kesadaran kebersihan dan perbaikan perilaku kerja karyawan selama kegiatan produksi perlu disampaikan dan diingatkan pentingnya kebersihan bahan pangan dan pengenalan pakaian dan perlengkapan kerja yang baik (Gambar 25).

#### 6.3.6. Sistem Pengendalian Hama

Tempat produksi pangan hendaknya dirawat dan dipelihara kebersihan di sekitarnya sehingga terhindar dari sumber datangnya hama yang dapat menimbulkan cemaran atau gangguan pada kegiatan produksi. Beberapa hal dapat dilakukan untuk menghindari masuknya hama pada proses pangan yaitu (1) pengawasan atas barang/bahan yg masuk, sehingga bebas hama, (2) penerapan/praktek higienis yg baik, (3) menutup lubang dan saluran yg memungkinkan masuknya hama, (4) memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan (5) mencegah hewan piaraan berkeliaran di lokasi unit usaha.



Gambar 26 Pengenalan pakaian dan perlengkapan kerja bagi pekerja pada IRT pangan

Hasil pengamatan menunjukkan pentingnya pembinaan kepada IRT peserta pendampingan terkait pencegahan masuknya hama, biasanya hewan pengerat saat malam hari ke unit pengolahan bahan pangan. Solusi terhadap masalah tersebut diantaranya adalah pembinaan pada IRT peserta pendampingan untuk memperhatikan dan memperbaiki kondisi bangunan yang kurang penutup, lantai tanah yang lembab, dan kurang terpeliharanya alat produksi dari sisa bahan pengolahan proses sebelumnya, serta sebagian IRT dengan kebersihan ruangan yang kurang baik.

### **6.3.7. Pengendalian Proses dan Kegiatan Pengendalian Mutu (Quality Control)**

Proses produksi harus dikendalikan untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara: (1) penetapan spesifikasi bahan baku, bahan pembantu dan bahan tambahan, (2) penetapan komposisi dan formulasi bahan, (3) penetapan cara produksi yang baku, dengan membuat diagram alir proses, (4) penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan, dan (5) penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa.

Pengetahuan terhadap bahan baku dan cara produksi merupakan modal dasar dalam pengendalian proses dan pengendalian mutu produk. Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam proses produksi adalah: (1) menentukan secara jelas jumlah dan spesifikasi bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam kegiatan produksi. Mutu bahan baku atau bahan penolong perlu diperhatikan, dan sedapat mungkin ada standardisasi yang digunakan sebagai acuan, misalnya penetapan syarat mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau

standar lainnya yang disepakati antara produsen dan konsumen, (2) bahan baku dan penolong yang digunakan harus aman (tidak mengandung bahan berbahaya, tidak tercemar), dan bila menggunakan Bahan Tambahan Makanan (BTM) harus yangizinkan digunakan pada makanan bukan untuk penggunaan lain seperti cat, kemasan, tekstil dll, (3) penetapan komposisi dan formulasi bahan perlu dilakukan melalui penentuan jumlah Bahan baku, Air, BTM, pewarna, Kandungan Gizi, PH, gula, emulsi dll, (4) penetapan cara produksi yang baku, melalui pembuatan : diagram alir proses, standar prosedur baku (SOP), dan cara pengendalian produksi, dan (5) Tentukan tahapan kritis dan parameternya seperti suhu, PH, warna, penampakan, dll.

Umumnya IRT peserta pendampingan melakukan proses produksi untuk periode tertentu berdasarkan jumlah pesanan atau kemampuan membeli bahan baku. Proses produksi antar unit usaha beragam sesuai produk dan bahan baku yang digunakan. Pemetaan proses produksi IRT peserta pendampingan disajikan dalam bentuk diagram alir. Diagram tersebut yang dilengkapi dengan permasalahan dan solusi yang dibutuhkan, menjadi dasar aspek pendampingan untuk masing-masing IRT peserta pendampingan. Contoh diagram aliran proses produksi beberapa IRT peserta pendampingan disajikan pada Lampiran 3. Dalam kegiatan produksinya IRT telah melakukan pengendalian mutu dan pengendalian produksi sederhana. Pemilihan dan penentuan penggunaan bahan baku yang sudah dilakukan oleh sebagian besar IRT. Hampir semua IRT (80%) mengetahui dan dapat menyebutkan titik kritis usahanya yang perlu diantisipasi selama kegiatan produksi.

### **Pembuatan Diagram Alur Produksi IRT**

Dalam rangka pembinaan dan pendampingan terhadap semua IRT dilakukan identifikasi baik terhadap usahanya, produk yang dihasilkan dan proses produksi. Identifikasi produk dan proses produksi bagi setiap IRT dilakukan dengan pembuatan diagram aliran proses menurut tahapan proses yang dilakukan. Sebelum dilakukan pembinaan sebagian besar bahkan seluruh IRT belum memiliki prosedur baku yang tertulis dalam proses produksinya. Prosedur untuk proses produksi pada sebagian besar IRT tidak pernah ditulis dan didokumentasikan.

Diagram alir yang dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan neraca bahan sederhana dapat digunakan sebagai bahan acuan dan evaluasi dalam kegiatan produksi. Dalam rangkaian pembinaan terhadap IRT, semua produk IRT telah disusun diagram aliran proses dan neraca bahan sederhana yaitu untuk 148 IRT pangan dan non pangan. Diagram alir dan neraca bahan dibuat berdasarkan proses produksi yang dilakukan oleh setiap IRT untuk setiap produk yang dihasilkan. Diagram alir proses ini selanjutnya dapat bermanfaat bagi IRT yang bersangkutan sebagai bahan dokumentasi proses produksi, salah satu alat evaluasi dalam kegiatan produksi dan sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan

mutu produk. Diagram alir proses untuk setiap produk IRT disajikan terlampir pada Lampiran 3.

### **Standar Mutu Produk IRT peserta pendampingan**

Produk industri rumah tangga dibuat berdasarkan kondisi permintaan pasar, bila produknya laku dipasaran maka akan dibuat sesuai jenis yang sering laku dipasaran. Meskipun semua IRT mengenal atau mengetahui tentang pentingnya mutu produk namun tidak ada ditetapkan standar baku untuk produk yang dihasilkan. Acuan yang digunakan hanya berdasarkan preferensi konsumen. Beberapa produk yang dihasilkan oleh IRT sebahagian sudah ada acuan standar mutu produk yang berlaku secara nasional, yaitu dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Penyusunan Standar Nasional Indonesia bertujuan untuk meningkatkan mutu produk dan melindungi konsumen serta mendorong ekspor produk dalam negeri. Beberapa standar mutu produk yang telah dikeluarkan SNI nya yang dapat digunakan sebagai patokan dalam kegiatan produksi nasional. Produk-produk IRT peserta pendampingan yang tersedia SNI nya adalah sebagai berikut (Tabel 36).

Tabel 36 Daftar standar mutu produk (SNI) yang dapat digunakan sebagai patokan dalam kegiatan produksi IRT secara nasional

Nama Produk	No Standar SNI
Kerupuk Kulit	SNI 01-4308-1996
Kerupuk Beras	SNI 01-4307-1996
Keripik Pisang	SNI 01-4315-1996
Keripik Singkong	SNI 01-4305-1996
Tahu	SNI 01-3142-1998
Tempe	SNI 01-3144-20009
Telur Asin	SNI 01-4277-1996
Sale Pisang	SNI 01-4319-1996
Dodol Sirsak	(SNI 01-4297-1996
Wajit Ketan	SNI 01-4272-1996
Yoghurt	SNI 2981: 2009
Gula Merah (Aren*/Kelapa)	Gula kelapa (SNI.013743.1995)
Chrispy jamur	Keripik jamur kancing SNI 01-4303-1996
Jamur Merang Segar	SNI 01-6945-2003
Beras	SNI NO 6128 2008
Standar Mutu Kopra	SNI 01-3946-1995

#### **a. Standar Produk Kerupuk Kulit**

Syarat mutu kerupuk kulit disajikan pada Tabel 37.

Tabel 37 Syarat mutu Kerupuk Kulit menurut SNI 01-4308-1996

Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan	
		Mentah	Siap dikonsumsi
<b>Keadaan:</b>			
Bau	-	normal	normal
Rasa	-	khas	khas
Warna	-	normal	normal
Tekstur	-	renyah	renyah
Keutuhan	% b/b	min. 95	min. 90
Benda-benda asing, serangga dan potongan-potongannya	-	tidak boleh ada	tidak boleh ada
Air	% b/b	maks.8	maks.6
Abu tanpa garam	% b/b	maks.1	maks.1
Asam lemak bebas (dihitung sebagai asam laurat)	% b/b		
<b>Cemaran logam</b>			
Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 2,0	maks. 2,0
Tembaga (Cu)	mg/kg	maks. 20,0	maks. 20,0
Timah (Sn)	mg/kg	maks. 40,0	maks. 40,0
Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 40,0	maks. 40,0
Arsen (As)	mg/kg	maks. 1,0	maks. 1,0
<b>Cemaran mikroba:</b>			
Angka lempeng total	koloni/g	maks. 5 x10 <sup>4</sup>	maks. 5 x10 <sup>4</sup>
Coliform	APM/g	< 3	< 3
Salmonella	koloni/g	negatif	negatif

Sumber: SNI 01-4308-1996

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dimaksud dengan kerupuk kulit adalah produk makanan ringan, dibuat dari kulit sapi (*Bos Indicus*), atau kerbau (*Bos Bubalus*) melalui tahap proses pembuangan bulu, pengembangan kulit, perebusan, pengeringan dan dikemas untuk kerupuk bulit mentah atau dilanjutkan penggorengan untuk kerupuk kulit siap dikonsumsi.

### b. Standar Mutu Produk Kerupuk Beras

Kerupuk beras (*Oryza sativa* LINN) merupakan produk makanan kering yang dibuat dari beras (*Oryza sativa* INN) yang telah dimasak (nasi) dengan penambahan garam dan bahan tambahan makanan yang diizinkan, baik dalam bentuk mentah maupun sudah digoreng. Syarat mutu kerupuk beras disajikan pada Tabel 38.

Tabel 38 Syarat mutu Kerupuk Beras menurut SNI 01-4307-1996

Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan	
		Mentah	Sudah digoreng
<b>Keadaan:</b>			
Bau	-	Normal	normal
Rasa	-	Khas	Khas
Warna	-	Normal	normal
Kenampakan	-	Renyah	renyah
Keutuhan	% b/b	min. 95	min. 85
Benda-benda asing, serangga	-	tidak boleh ada	tidak boleh ada

Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan	
		Mentah	Sudah digoreng
dan potongan-potongannya			
Air	% b/b	maks.12	maks.8
Abu tanpa garam	% b/b	maks.1	maks.1
Bahan tambahan makanan			
Pewarna	-	Sesuai SNI 01-0222-1995 dan peraturan menkes NO 722/Men.Kes/Per/IX/88	
Boraks	-	tidak ternyata	tidak ternyata
Cemaran logam			
Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 2,0	maks. 2,0
Tembaga (Cu)	mg/kg	maks. 30,0	maks. 30,0
Timah (Sn)	mg/kg	maks. 40,0	maks. 40,0
Seng (Zn)	mg/kg	maks. 40,0	maks. 40,0
Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0.03	maks. 0.03
Arsen (As)	mg/kg	maks. 1,0	maks. 1,0
Cemaran mikroba:			
Angka lempeng total	koloni/g	maks. 5 x10 <sup>6</sup>	maks. 5 x10 <sup>5</sup>
Coliform (E. Coli)	APM/g	< 3	< 3
Kapang	koloni/g	maks.10 <sup>5</sup>	maks.10 <sup>4</sup>

Sumber: SNI 01-4307-1996

### c. Standar Mutu Produk Keripik Pisang

Keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng, dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan. Syarat mutu Keripik pisang disajikan pada Tabel 39.

Tabel 39 Syarat mutu Keripik pisang SNI 01-4315-1996

Kriteria uji	Satuan	Persyaratan
Keadaan :		
Bau	-	normal
Rasa	-	khas pisang
Warna	-	normal
Tekstur	-	renyah
Keutuhan	%	min. 70
Kadar air, b/b	%	maks. 6
Lemak, b/b	%	maks. 30
Abu, b/b	%	maks. 8
Cemaran logam		
Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 1,0
Tembaga (Cu)	mg/kg	maks. 10
Seng (Zn)	mg/kg	maks. 40
Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,05
Cemaran mikroba		
Angka lempeng total	koloni/g	maks. 1,0 x 10 <sup>6</sup>
E. Coli	APM/g	3
Kapang	koloni/g	maks. 1,0 x 10 <sup>4</sup>

#### d. Standar Mutu Produk Keripik Singkong

Keripik singkong adalah produk makanan ringan, dibuat dari umbi singkong (manihot sp) diiris/dirajang, digoreng dengan atau tanpa tambahan makanan yang diizinkan. Syarat mutu keripik singkong disajikan pada Tabel 40.

Tabel 40 Syarat mutu Keripik singkong SNI 01-4305-1996

Kriteria uji	Satuan	Persyaratan
<b>Keadaan</b>		
Bau	-	normal
Rasa	-	khas
Warna	-	normal
Tekstur	-	renyah
Keutuhan, b/b	%	min. 90
Air, b/b	%	maks. 6,0
Abu, b/b	%	maks. 2,5
Asam lemak bebas (dihitung sebagai asam laurat), b/b	%	maks. 0,7
<b>Bahan tambahan makanan</b>		
Pewarna	sesuai SNI 01-0222-1995 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.722/Menkes/Per/IX/88.	
Pemanis buatan	tidak boleh ada	
<b>Cemaran logam:</b>		
Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 1,0
Tembaga (Cu)	mg/kg	maks. 10,0
Seng (Zn)	mg/kg	maks. 40,0
Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,05
Arsen	mg/kg	maks. 0,5
<b>Cemaran mikroba</b>		
Angka lempeng total	koloni/ g	maks. 104
Coliform	APM/g koloni/ g	< 3
Kapang	g	maks. 104

#### e. Standar Mutu Tahu

Tahu adalah suatu produk makanan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedele (*Glycine Species*) dengan cara pengendapan proteinnya, dengan atau tanpa bahan tambahan lain yang diijinkan. Syarat mutu tahu disajikan pada Tabel 41.

Tabel 41 Syarat mutu Tahu Menurut SNI 01-3142-1998

No. Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
Keadaan :		
Bau		normal
Rasa		normal
Warna		putih normal atau kuning normal
Penampakan		normal tidak berlendir dan tidak berjamur
Abu	% (b/b)	maks. 1,0
Protein (N x 6,25)	% (b/b)	min. 9,0
Lemak	% (b/b)	min. 0,5
Serat kasar	% (b/b)	maks. 0,1
Bahan tambahan makanan	% (b/b)	Sesuai SNI 01-0222-1995 dan - Peraturan Men.Kes No 722/Men.Kes/Per/IX/1988
Cemaran logam :		
Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 2,0
Tembaga (Cu)	mg/kg	maks. 30,0
Sang (Zn)	mg/kg	maks. 40,0
Timah (Sn)	mg/kg	maks. 40,0 / 250,0
Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,03
Cemaran Arsen (As)		
(As)	mg/kg	maks. 1,0
Cemaran mikroba :		
Escherichia Colli	APM/g	maks. 10
Salmonella	/25 g	negatif

#### f. Standar Mutu Tempe Kedelai

Tempe merupakan jenis makanan yang terbuat dari kedelai. Syarat mutu tempe kedelai disajikan pada Tabel 42.

Tabel 42 Syarat mutu Tempe Kedelai Menurut SNI 01-3144-20009

No. Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
Keadaan :		
Bau		normal, khas
Warna		normal
Rasa		normal
Kadar Air	% (b/b)	maks. 65
Kadar Abu	% (b/b)	maks. 1,5
Kadar Lemak	% (b/b)	min. 10
Kadar Protein (Nx6,25)	% (b/b)	min. 16
Serat kasar	% (b/b)	maks. 2,5
Cemaran logam :		
Kadmium (Cd)	mg/kg	maks. 0,2
Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 0,25
Timah (Sn)	mg/kg	maks. 40,0
Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,03
Cemaran Arsen (As)	mg/kg	maks. 0,25
Cemaran mikroba :		
Escherichia Colli (bakteri coliform)	APM/g	maks. 10
Salmonella Sp	/25 g	negatif/ 25g

Tempe kedelai merupakan produk yang diperoleh dari fermentasi biji kedelai dengan menggunakan kapang *Rhizopus* sp., berbentuk padat kompak, berwarna putih sedikit keabu-abuan dan berbau khas.

#### g. Standar Mutu Telur Asin

Telur asin merupakan produk olahan telur itik/ bebek yang telah diasinkan dengan proses tertentu dan belum dimasak. Syarat Mutu Telur Asin pada Tabel 43.

Tabel 43 Syarat mutu Telur Asin Menurut SNI 01-4277-1996

Jenis uji	Satuan	Persyaratan
Keadaan :		
Bau	-	normal
Warna	-	normal
Kenampakan	-	normal
Garam	b/b %	min. 2,0
Cemaran mikroba :		
<i>Salmonella</i>	koloni/25g	negatif
<i>Staphylococcus aureus</i>	koloni/g	< 10

#### h. Standar Mutu Sale Pisang

Sale pisang adalah makanan semi basah dibuat dari buah pisang segar dengan cara pengeringan dan atau pengasapan dengan atau tanpa penambahan pengawet. Syarat mutu sale pisang disajikan pada Tabel 44.

Tabel 44 Syarat mutu Sale Pisang SNI 01-4319-1996

Kriteria uji	Satuan	Persyaratan
Keadaan :		
Bau	-	normal
Rasa	-	manis, khas
Warna	-	normal, khas
Air	% b/b	maks. 40
Abu	% b/b	maks. 2,0
Gula sebagai sakarosa	% b/b	min. 35
Zat (SO <sub>2</sub> ) pengawet	mg/kg	maks. 500
Cemaran logam		
Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 1,0
Tembaga (Cu)	mg/kg	maks. 10,0
Seng (Zn)	mg/kg	maks. 40,0
Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,05
Arsen (As)	mg/kg	maks. 1,0
Cemaran mikroba		
E. Coli	APM/g	negatif
Angka lempeng total	koloni/g	maks. 1 x 10 <sup>6</sup>
Kapang dan khamir	koloni/g	maks. 1 x 10 <sup>4</sup>

### i. Standar Mutu Dodol Sirsak

Dodol sirsak adalah makanan yang dibuat dari daging buah sirsak (*Anona Muricata*) matang yang dihancurkan, dimasak dengan penambahan gula, dengan penambahan bahan makanan lain dan dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan. Syarat mutu dodol sirsak disajikan pada Tabel 45.

Tabel 45 Syarat mutu Dodol Sirsak (SNI 01-4297-1996)

No. Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
<b>Keadaan :</b>		
Bau		normal, khas
Rasa		normal, khas
Warna		normal, khas
Penampakan		normal tidak berlendir dan tidak berjamur
Air	% (b/b)	maks. 2,0
Abu	% (b/b)	maks. 1,0
Jumlah gula dihitung sebagai sakarosa	% (b/b)	min. 35 - 45
Serat kasar	% (b/b)	maks. 2,0
Bahan tambahan makanan	% (b/b)	Sesuai SNI 01-0222-1995 dan - Peraturan Men.Kes No 722/Men.Kes/Per/IX/1988
Pemanis (sakarín dan siklamat)		tidak bole ada
Pewarna		Sesuai SNI 01-0222-1995 dan - Peraturan Men.Kes No 722/Men.Kes/Per/IX/1988
Pengawet		Sesuai SNI 01-0222-1995
<b>Cemaran logam :</b>		
Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 2,0
Tembaga (Cu)	mg/kg	maks. 5,0
Sang (Zn)	mg/kg	maks. 40,0
Timah (Sn)	mg/kg	maks. 40,0
Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,03
Cemaran Arsen (As)	mg/kg	maks. 1,0
<b>Cemaran mikroba :</b>		
Angka lempeng total	koloni/g	
	r	maks. 5,0 x 10 <sup>2</sup>
Escherichia Coll	APM/g	maks. 20
Salmonella	koloni/g	
	r	negatif
Staphylococcus Aureus	koloni/g	
	r	0
Vibrio Corellas	koloni/g	
	r	negatif
Kapang	koloni/g	
	r	maks. 50
Khamir	koloni/g	
	r	maks. 50

## j. Standar Mutu Wajik

Wajik adalah penganan semi basah hasil pengolahan beras ketan, gula dan santan kelapa, dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan lainnya. Syarat mutu wajik disajikan pada Tabel 46.

Tabel 46 Syarat Mutu Wajik (SNI 01-4272-1996)

No. Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
Keadaan :		
Bau		normal
Warna		normal
Rasa		Manis khas wajik
Benda Asing		tak ternyata
Air	% (b/b)	maks. 30,0
Jumlah gula dihitung sebagai sakarosa	% (b/b)	min. 15
Assam lemak bebas (dihitung sebagai asam laurat)	% (b/b)	maks. 0,1
Kadar Abu	% (b/b)	maks. 1,5
Pemanis buatan	-	negatif
Pengawet	mg/kg	Sesuai SNI 01-0222-1995 dan - Peraturan Men.Kes No 722/Men.Kes/Per/IX/1988
Pewarna tambahan		
Cemaran logam :		
Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 1,0
Tembaga (Cu)	mg/kg	maks. 10,0
Cemaran mikroba :		
Kapang	koloni/gr	maks. $1 \times 10^2$
Khamir	koloni/gr	maks. 50

## k. Standar Mutu Yoghurt

Yoghurt merupakan produk yang diperoleh dari fermentasi susu dan atau susu rekonstitusi dengan menggunakan bakteri *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* dan atau bakteri asam laktat lainnya yang sesuai, dengan/atau tanpa penambahan bahan pangan yang diizinkan. Syarat mutu yoghurt disajikan pada Tabel 47.

Tabel 47 Syarat Mutu Yoghurt (SNI 2981-2009)

Kriteria Uji	Satuan	Yoghurt tanpa perlakuan panas setelah fermentasi			Yoghurt dengan perlakuan panas setelah fermentasi		
		Yoghurt	Yoghurt Rendah Lemak	Yoghurt Tinggi Lemak	Yoghurt	Yoghurt Rendah Lemak	Yoghurt Tinggi Lemak
<b>Keadaan :</b>							
Penampakan		cairan kental-padat normal/khas			cairan kental-padat normal/khas		
Bau		asam/khas			asam/khas		
Rasa		homogen			Homogeny		
Konsistensi							
Kadar lemak	% (b/b)	min. 0.3	0.6 - 2.9	Maks 0.5	min. 0.3	0.6 - 2.9	maks. 0,5
Total padatan susu bukan lemak	% (b/b)		min. 8.2			min. 8.2	
Protein (Nx6,38)	% (b/b)		min. 2.7			min. 2.7	
Kadar Abu	% (b/b)		maks. 1,0			maks. 1,0	
Keasaman (dihitung sebagai asam laktat)	% (b/b)		0.5 - 2.0			0.5 - 2.0	
<b>Cemaran logam :</b>							
Timbal (Pb)	mg/kg		maks. 0,3			maks. 0,3	
Tembaga (Cu)	mg/kg		maks. 20,0			maks. 20,0	
Timah (Sn)	mg/kg		maks. 40,0			maks. 40,0	
Raksa (Hg)	mg/kg		maks. 0,03			maks. 0,03	
Cemaran Arsen (As)	mg/kg		maks. 0,1			maks. 0,1	
<b>Cemaran mikroba :</b>							
Bakteri coliform (Escherichia Coll)	-		negatif/25gr			negatif/25gr	
Salmonella	-		negatif/25gr			negatif/25gr	
Listeria monocytogenes	koloni /gr		negatif/25gr			negatif/25gr	
Jumlah bakteri starter*	koloni /gr		min 10 <sup>7</sup>			min 10 <sup>7</sup>	

\* sesuai dengan pasal 2 (istilah dan definisi)

## I. Standar Mutu Gula Kelapa

Gula kelapa atau aren adalah gula yang dihasilkan dari air nira kelapa atau nira aren yang ditampung dari tangkai bunga kelapa/aren dan dipanaskan sampai mengental dan kemudian dicetak menjadi gula kelapa/aren. Syarat mutu gula kelapa disajikan pada Tabel 48.

Tabel 48 Syarat mutu Gula Kelapa (SNI.013743.1995)

Parameter	Satuan	Standar SNI
Keadaan	-	Normal
- Bau	-	Normal, Khas
- Rasa	-	Kuning Kecoklatan Sampai Coklat
- Warna	-	
Bagian Yang Tak Larut Dalam Air	%bb	Maks 1,00
Air	%bb	Maks. 10,00
Abu	%bb	Maks. 2,00
Gula Produksi	%bb	Maks. 10,00
Jumlah Gula Sebagai Sakrosa	%bb	Min. 77,00
Cemaran Logam		
- Seng (Zn)	mg/kg	Maks 40,00
- Timbal (Tb)	mg/kg	Maks 2,00
- Tembaga (Cu)	mg/kg	Maks 10,00
- Raksa (Hg)	mg/kg	Maks 0,03
- Timah (Sn)	mg/kg	-
Cemaran Arsen (As)	mg/kg	Maks 40,00
Kalsium (Ca)	%	-

Sumber: SNI.013743.1995

## m. Standar Mutu Keripik Jamur Kancing

Keripik Jamur kancing adalah makanan kering yang dibuat dari jamur geus agaricus (A. bisforus, A. campesfris, A. biforquis) dikukus, diiris tipis sehingga berbentuk lempeng, diberi bumbu, kemudian digoreng dengan atau tanpa penambahan tepung. Syarat mutu keripik jamur kancing disajikan pada Tabel 49.

Tabel 49 Syarat mutu Keripik Jamur Kancing (SNI 01-4303-1996 )

Kriteria uji	Satuan	Persyaratan
Keadaan		
Bau	-	normal
Rasa	-	normal, khas
Warna	-	normal
Tekstur	-	renyah
Air, b/b	% (b/b)	maks. 4
Abu, b/b	% (b/b)	maks. 2
Protein	% (b/b)	Minimum 10
Asam lemak bebas (dihitung sebagai asam laurat), b/b	% (b/b)	maks. 1
Serat Kasar	% (b/b)	maks. 2,5
Cemaran logam:		

Kriteria uji	Satuan	Persyaratan
Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 2,0
Tembaga (Cu)	mg/kg	maks. 30,0
Seng (Zn)	mg/kg	maks. 40,0
Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,03
Arsen	mg/kg	maks. 1,0
Cemaran mikroba		
Angka lempeng total	koloni/g	maks. 10 <sup>5</sup>
Coliform	APM/g	negatif
Kapang	koloni/g	maks. 10 <sup>4</sup>

#### n. Standar Mutu Jamur Merang Segar

Jamur merang adalah hasil dari tanaman jamur merang (*Volvaria volvaceae*) dalam tingkatan perkembangan yang cukup, belum mekar atau masih berbentuk kuncup dengan tudungnya tersungkup ketat (tidak mempunyai cabang) atau masih dalam stadia kuncup, utuh, segar dan bersih. Jamur merang segar dinyatakan cukup baik untuk dikonsumsi apabila terasa masih agak keras jika ditekan sedikit dengan jari. Dinyatakan cukup keras jika fisiknya terasa masih cukup keras bila ditekan sedikit dengan jari-jari.

Tabel 50 Ciri khas kultivar Jamur Merang Segar

Komponen	Jamur merang segar ( <i>Volvaria volvaceae</i> )
Ukuran	Kecil sampai besar
Bobot (gram)	100 – 400
Bentuk	Bulat atau lonjong dan tidak bertangkai
Kulit	Haus, berbulu tipis
Warna	Putih bersih
Daging	Tebal
Aroma	Tidak berbau

Keseragaman ukuran: Ukuran bobot jamur merang segar dipakai sebagai dasar untuk menentukan penggolongan bobot segar. Jamur merang segar digolongkan dalam 3 ukuran bobotnya, yaitu besar, sedang, dan kecil yang masing-masing digolongkan dalam 3 jenis mutu yaitu mutu A, mutu B dan mutu C.

Tabel 51 Klasifikasi jamur merang berdasarkan ukuran bobot

Ukuran Bobot	Jamur merang ( <i>Volvaria volvaceae</i> )	
	Diameter (cm)	Berat (g)
Besar	>3	40 – 70
Sedang	2 - 3	25 – 40
Kecil	1 - 1.99	10 – 25

Keseragaman ukuran jamur merang segar: Ukuran keseragaman dinyatakan sesuai dengan ketentuan mengenai bobot yang dinyatakan dalam masing-masing standar jamur merang segar. Setiap ukuran bobot dibedakan menjadi 3

golongan mutu, A, B atau C. Syarat mutu jamur merang segar disajikan pada Tabel 52.

Tabel 52 Persyaratan mutu Jamur Merang Segar (SNI 01-6945-2003)

Jenis Uji	satuan	Persyaratan Mutu		
		Mutu A	Mutu B	Mutu C
Kesegaran Kultivar	%	100	100	100
Tingkat Ketuaan	-	Tua	Tua	Tua
Kekerasan	-	Cukup keras	Cukup keras	Cukup keras
Keseragaman ukuran	%	95	90	85
Jamur merang busuk	Maks, %	0	0	0
Panjang Tangkai	Maks, cm	0	0	0
Kaar Kotoran	%	0	0	0

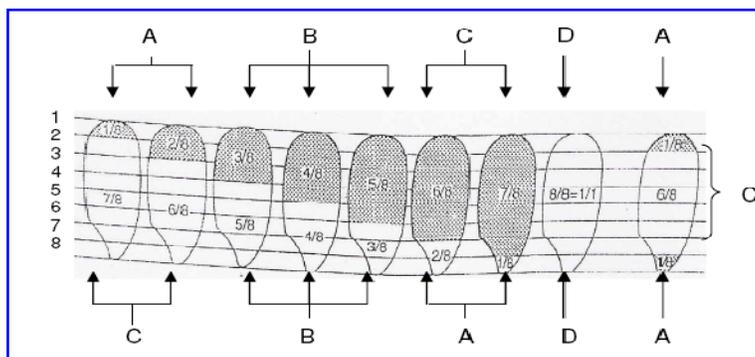
Sumber: SNI 01-6945-2003

#### o. Standar Mutu Beras

Beras adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi (*Oryza sativa* L.) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan. Syarat mutu beras disajikan pada Tabel 53.

Tabel 53 Spesifikasi persyaratan mutu Beras (SNI NO 6128 2008)

No	Komponen mutu	Satuan	Mutu				
			I	II	III	IV	V
1.	Derajat sosoh (min)	(%)	100	100	95	95	85
2.	Kadar air (maks)	(%)	14	14	14	14	15
3.	Butir kepala (min)	(%)	95	89	78	73	60
4.	Butir patah (maks)	(%)	5	10	20	25	35
5.	Butir menir (maks)	(%)	0	1	2	2	5
6.	Butir merah (maks)	(%)	0	1	2	3	3
7.	Butir kuning/rusak (maks)	(%)	0	1	2	3	5
8.	Butir mengapur (maks)	(%)	0	1	2	3	5
9.	Benda asing (maks)	(%)	0	0,02	0,02	0,05	0,20
10.	Butir gabah (maks)	(butir/100g)	0	1	1	2	3



Keterangan gambar: (A) Patahan kecil; (B) Patahan besar; (C) Beras kepala, dan (D) Beras utuh

Gambar 27 Bagian Beras

Beberapa pengertian kriteria dan istilah mutu yang digunakan pada syarat mutu beras dalam SNI No 6128 2008:

1. Derajat sosoh: tingkat terlepasnya lapisan bekatul (pericarp, testa dan aleuron) dan lembaga dari butir beras
2. Derajat sosoh 100% tingkat terlepasnya seluruh lapisan bekatul, lembaga dan sedikit endosperm dari butir beras
3. Derajat sosoh 95% tingkat terlepasnya sebagian besar lapisan bekatul, lembaga dan sedikit endosperm dari butir beras sehingga sisa yang belum terlepas sebesar 5%
4. Derajat sosoh 85% tingkat terlepasnya sebagian besar lapisan bekatul, lembaga dan sedikit endosperm dari butir beras sehingga sisa yang belum terlepas sebesar 15%
5. Kadar air jumlah kandungan air di dalam butir beras yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah (wet basis)
6. Beras utuh butir beras baik sehat maupun cacat, yang utuh (ukuran 8/8) atau tidak ada yang patah sama sekali
7. Butir kepala butir beras baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih besar atau sama dengan 0,75 bagian dari butir beras utuh
8. Butir patah butir beras baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih besar dari 0,25 sampai dengan lebih kecil 0,75 dari butir beras utuh
9. Butir menir butir beras baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 0,25 bagian butir beras utuh
10. Butir merah butir beras utuh, beras kepala, patah maupun menir yang berwarna merah akibat faktor genetik
11. Butir kuning butir beras utuh, beras kepala, beras patah dan menir yang berwarna kuning, kuning kecoklat-coklatan, dan kuning semu akibat proses fisik atau aktivitas mikroorganisme
12. Butir mengapur butir beras yang separuh bagian atau lebih berwarna putih seperti kapur (chalky) dan bertekstur lunak yang disebabkan oleh faktor fisiologis
13. Butir rusak butir beras utuh, beras kepala, beras patah dan menir berwarna putih/bening, putih mengapur, kuning dan berwarna merah yang mempunyai lebih dari satu bintik yang merupakan noktah disebabkan proses fisik, kimiawi, dan biologi. Beras yang berbintik kecil tunggal tidak termasuk butir rusak
14. Benda asing benda-benda yang tidak tergolong beras, misalnya jerami, malai, batu kerikil, butir tanah, pasir, logam, potongan kayu, potongan kaca, biji-bijian lain serangga mati, dan lain sebagainya
15. Butir gabah butir padi yang sekamnya belum terkelupas atau hanya terkelupas sebagian

**p. Standar Mutu Kopra**

Kopra adalah bagian dari daging buah tanaman kelapa (*Cocos nucifera linn*) yang dikeringkan dengan penjemuran, pengasapan atau pengeringan mekanis lainnya.

Kopra berasal dari daging buah kelapa yang sudah tua, yaitu buah yang dipetik setelah berumur minimal 13 bulan setelah pembungaan. Mutu Kopra digolongkan menjadi 3 yaitu mutu A (siap dikapalkan), Mutu B (kopra kering) dan mutu C (cukup kering). Syarat mutu kopra disajikan pada Tabel 54.

Tabel 54 Spesifikasi dan Syarat Mutu Kopra (SNI 01-3946-1995)

Jenis Uji	Satuan	Persyaratan Mutu			
		A I	A II	B	C
Kadar Air	% b/b, Maks	5	5	8	12
Kadar Minyak	% b/b, Min	65	60	55	50
Kadar asam lemak bebas dalam minyak (asam laurat)	% b/b, Maks	2	2	3	4
Benda Asing	% b/b, Maks	0	1	1	1
Bagian Berkapang	% b/b, Maks	2	2	3	3
again Berhama	% b/b, Maks	1	1	2	2
Bagian cacat	% b/b, Maks	2	5	10	10

Sumber: SNI 01-3946-1995

### Pengendalian Bahan Baku dan Bahan penolong pada IRT peserta pendampingan

Dalam melakukan proses produksi sebahagian besar IRT telah melakukan pengendalian mutu bahan baku dan bahan penolong yang digunakan. Setiap IRT memiliki cara masing-masing untuk menentukan mutu dan memilih bahan baku yang akan digunakan untuk produksinya, sebagaimana disajikan pada Tabel 55 untuk IRT Pangan Peserta Pendampingan dan Tabel 56 untuk IRT non pangan peserta pendampingan.

Tabel 55 Pengendalian bahan baku yang dilakukan IRT peserta pendampingan produk pangan

No	Nama Produk	Pengendalian Yang Dilakukan Terhadap	
		Bahan Baku	Bahan Penolong
1	Beras	Mensyaratkan gabah harus kering	
2	Bibit gurame	Sortasi induk dan pengangkatan telur hati-hati, bibit Ikan yang sehat ukuran 1 cm	
3	Chrispy jamur	Memilih bahan jamur	Penggunaan minyak yang baik
4	Cincau	Daun cincau hitam	Penggunaan tapioka yang baik
5	Coklat Kue	Memilih bubuk coklat	
6	Cucur	Memilih merk dan kualitas tepung terigu yang konstan (tetap)	Pemilihan gula merah yang tetap dan hati-hati
7	Dodol sirsak	Mutu tepung dan sirsak yang baik	
8	Donat	Memilih bahan baku yang sesuai dengan tujuan penggunaan	Menggunakan minyak yang masih baru (tidak tengik)
9	Gula Aren	Kebersihan tempat nira	Obat gula, dan kapur untuk mencegah nira asam
10	Jamur merang	Memilih bibit jamur	Pembuatan media yang baik
11	Kelontong	Ketan berkualitas	Gula merah yang murni

No	Nama Produk	Pengendalian Yang Dilakukan Terhadap	
		Bahan Baku	Bahan Penolong
12	Keripik pisang/singkong	Menyortir pisang yang matang, singkong khusus, talas yang baik	Memilih minyak goreng non kolesterol, penyedap rasa, garam, pewarna makanan yang aman
13	Kerupuk/ kerupuk kulit	Ketelitian pembelian Bahan (kulit sapi/tapioka). Kontrol terhadap takaran penggunaan bahan baku	Bumbu, pewarna, minyak yang baik
14	Rangginang	Tepung yang bagus	
15	Opak	Ketan berkualitas bagus	Gula merah murni, kelapa tua, garam beriodium
16	Opak Kulit Singkong	Pemilihan kulit singkong yang baik	daun pisang harus kering
17	Kopra/ Minyak kelapa	Menggunakan kelapa yang tua	
18	Kremes ubi	Pemilihan ubi kualitas terbaik	
19	Kue kering	Terigu yang baik (seperti Segitiga Biru)	Mentega, keju terbaik
20	Kutu mayang	Memilih beras yang baik untuk menjadi tepung beras	
21	Molen sale pisang	Pemilihan pisang dan bahan adonan	
22	Sale pisang	Pilih pisang angka, siyem, tidak berbiji	
23	Ranginang	Beras berkualitas	
24	Rempeyek	Beras dipilih yg berkualitas	Kacang tanah yang besar
25	Roti Rancis	Serpihan roti yang masih segar	Pembuatan selai bermutu
26	Tahu	Pilih kedele berkualitas super	Penggunaan asam cuka
27	Tape singkong	Ubi kayu yang bagus	Penggunaan ragi yang sesuai
28	Telur asin	Telur disinari dengan lampu senter untuk melihat kualitasnya	
29	Tempe	Pemilihan kedelai yang bulat dan besar (berkualitas super)	Penggunaan ragi yang teruji dan harus sesai ukuran
30	Teng-teng	Pemilihan beras berkualitas	Karamelisasi gula terkontrol
31	Wajit ketan	Ketan yang berkualitas baik	Gula, dan kelapa yang bagus
32	Yoghurt	Susu murni yang terjamin kesegaran	Inokulan dan bahan terjamin sesuai bpom

Tabel 56 Pengendalian bahan baku yang dilakukan IRT peserta pendampingan produk non pangan

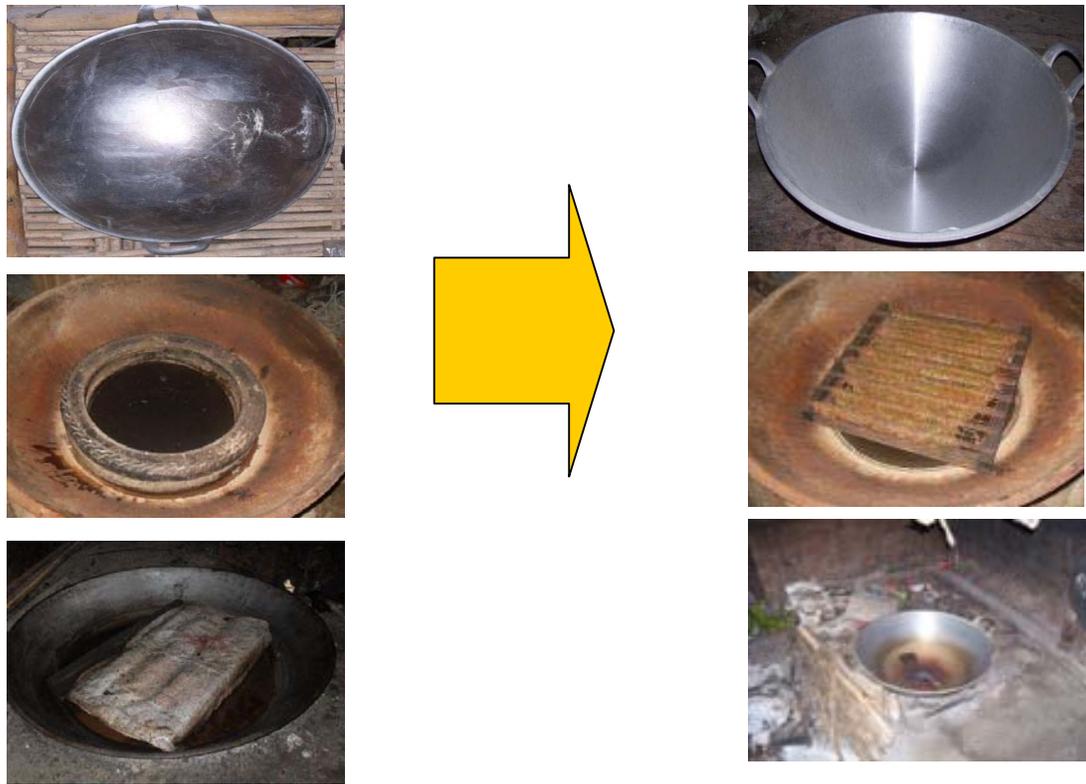
No	Nama Produk	Pengendalian Yang Diakukan Terhadap	
		Bahan Baku	Bahan Penolong
1	Anyaman Bambu	Pilih bambu muda	
2	Bata merah	Tanahnya lempung/tanah merah	Pasir
3	Besek	Bambu yang setengah tua dan tidak condong	
4	Bilik	Menyortir bambu dan dipilih yang sudah tua	
5	Boboko besar dan kecil	Pemilihan bambu yang tidak terlalu tua	
6	Boneka	Pemilihan kain	Jenis busa
7	Bongsang anyam	Bambu dipilih yang sedang	
8	Gypsum	Memilih gipsum dan kain yang baik	

No	Nama Produk	Pengendalian Yang Diakukan Terhadap	
		Bahan Baku	Bahan Penolong
9	Gitar	Pemilihan kayu yang tidak cacat	Kualitas triplek
10	Hiasan kayu	Bahan kayu	
11	Jaket	Pemilihan kain bahan jaket	Pemilihan benang, aksesoris
12	Kancing dari batok kelapa	Tempurung yang masih baik	Bahan pernis
13	Kerajinan lidi	Lidi dari daun kelapa yang masih baru	
14	Kertas dari pisang	Pilih pohon pisang	Pewarna baju
15	Lemari	Pemilihan dan perlakuan bahan Kayu	lem, paku, hampelas
16	lukisan kaca	Bahan kaca ukuran dan ketebalan yang sesuai	cat, beudak yang sesuai
17	Sangkar Burung	Bambu yang bagus	Kayu. Triplek, paku,
18	Tampah	Bambu yang sudah tua	Rotan yang bagus
19	Tanaman	Semen, pasir	Kawat, cat, besi, kawat
20	Tas	Sortasi bahan baku kulit imitasi dari supplier	Pengecekan aksesoris
21	Tempat tidur	Jenis kayu	
22	Topi	Pemilihan kain tidak cacat	Sepon

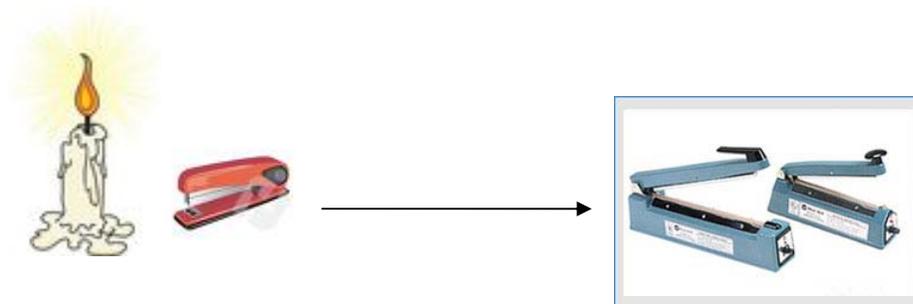
Sumber: Data Primer IRT RR2 Jabar 2011

### **Perbaikan Alat produksi pada IRT peserta pendampingan**

Alat-alat produksi yang dimiliki oleh IRT peserta pendampingan ada yang kondisinya sudah rusak dan memerlukan pergantian. Dalam rangka pembinaan dan pendampingan IRT sebagian dana bantuan yang dialurkan ada yang digunakan untuk pengadaan alat, diantaranya untuk pembelian peralatan produksi yang baru, perbaikan alat, pembuatan alat dan mesin oleh IRT sendiri dan ada juga untuk pengadaan alat pengemasan produk.



Gambar 28 Penggantian alat produksi IRT yang rusak atau sudah usang



Gambar 29 Pengadaan alat kemasan (hand sealer) bagi IRT pangan

### 7.5. Perbaikan dalam Proses Produksi pada IRT peserta pendampingan

Beberapa IRT peserta pendampingan memerlukan perhatian khusus dalam kegiatan proses produksi agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, sehat dan aman untuk dikonsumsi. Salah satu yang menjadi perhatian dalam kegiatan pembinaan diantaranya adalah penggunaan minyak untuk penggorengan yang digunakan secara berulang dan terus menerus.

Penggunaan Minyak Yang Berulang

Memberbaharui Minyak Penggoreng

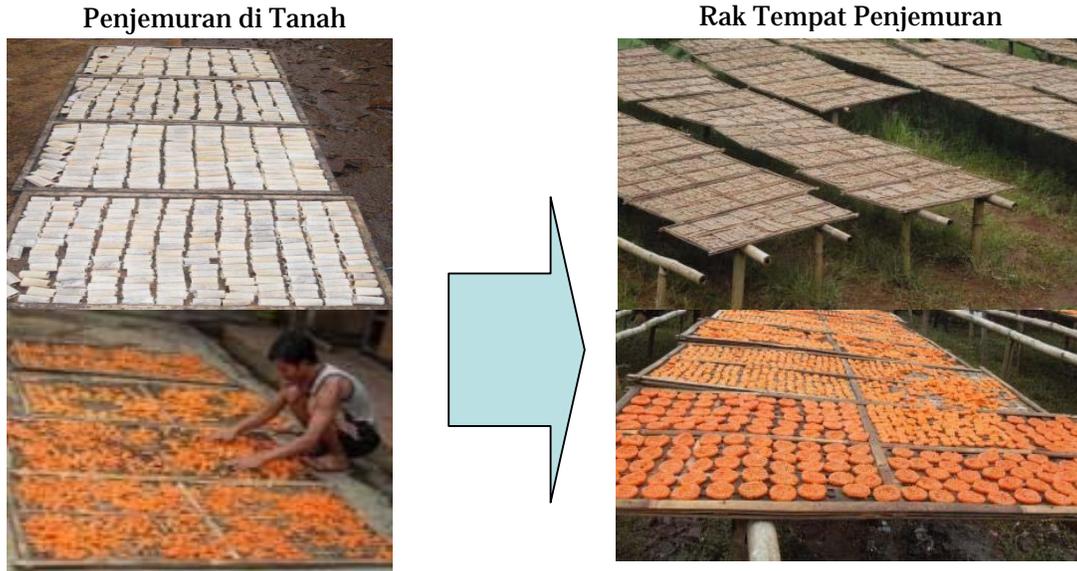
Gambar 30 Hindari penggunaan minyak tengik dan perlu pembiasaan  
memperbaharui minyak penggorengan pada IRT Pangan

Cara mengurangi minyak dari bahan yang digoreng merupakan pertanyaan yang banyak diajukan oleh IRT. Selain cara penirisan biasa menggunakan alat pemutar (spiner) merupakan cara yang cepat mengurangi minyak dari bahan yang digoreng. Pada IRT peserta pendampingan belum ada yang menggunakan alat ini meskipun banyak yang berminat, dikarenakan memerlukan biaya investasi yang relatif besar.



Gambar 31 Penggunaan alat spiner salah satu cara mengurangi minyak dalam produk

Selama proses pengeringan pada panas matahari, kerap sekali proses pengeringan dilakukan langsung di atas tanah terbuka dengan hanya beralaskan anyaman bambu atau tikar. Pada daerah yang lingkungannya kurang bersih cara penjemuran seperti ini sebaiknya dihindari dan diupayakan menggunakan rak penjemuran untuk mengurangi sumber cemaran bagi bahan pangan.



Gambar 32 Perbaikan tempat penjemuran dengan menggunakan rak penjemuran

### 6.3.8. Penggunaan Bahan Tambah Makanan (*Food additive*)

Sesuai dengan SK.Menkes No.722 / Menkes / Per /IX /88 Tgl .20-9-1988 yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan (BTP) atau disebut juga Food Additif (FA), adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan diantaranya adalah: bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental. BTP dalam proses pangan berguna untuk (1) mengawetkan pangan, (2) membentuk pangan menjadi lebih baik, renyah dan lebih enak, (3) memberikan warna dan aroma lebih menarik, (4) meningkatkan warna dan aroma lebih menarik, dan (5) menghemat biaya.

Berdasarkan fungsi dan kegunaannya terdapat berbagai jenis bahan tambahan pangan, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengawet Makanan (Preservative)
2. Pewarna Makanan (Colour)
3. Pemanis Buatan (Artificial Sweetener);
4. Penyedap Rasa & Aroma, Penguat Rasa (Flavour, Flavour Enhancer);

5. Pemutih & Pematang Tepung (Flour Treatment Agent);
6. Pengeras (Firming Agent)
7. Pengemulsi, Pemantap, Pengental (Emulsifier, Stabilizer, Thickener);
8. Anti Oksidan (Antioxidant);
9. Pengatur Keasaman (Acidity Regulator);
10. Anti Kempal/Anti Gumpal (Anticaking Agent);
11. Sekuestran (Sequestrant).

Ketentuan penggunaan kadar maksimum dalam setiap bahan makanan dapat dilihat pada SNI No 01-0222-1995 tentang bahan tambahan makanan. Hal ini meliputi (1) untuk makanan yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam antioksidan, maka hasil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu, (2) untuk makanan yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam pengawet, maka hasil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu, dan (3) batas penggunaan "secukupnya" adalah penggunaan yang sesuai dengan cara produksi yang baik, yang maksudnya jumlah yang ditambahkan pada makanan tidak melebihi jumlah wajar yang diperlukan sesuai dengan tujuan penggunaan bahan tambahan makanan tersebut.

Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Berdasarkan Peraturan Menkes RI, Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 dalam SNI No 01-0222-1995 terdapat sebanyak 75 jenis bahan pengawet yang diizinkan penggunaannya. Bahan pengawet diantaranya yang sering digunakan adalah Asam benzoat ( $C_7H_6O_2$  atau  $C_6H_5COOH$ ), adalah padatan kristal berwarna putih dan merupakan asam karboksilat aromatik yang paling sederhana. Bahan pengawet makanan yang diizinkan adalah seperti disajikan pada Tabel 28.

Tabel 57 Bahan Pengawet yang Diizinkan Penggunaannya pada Makanan

Bahan TBM	Contttoh Penggunaan pada makanan	Batas maksimum penggunaan
Pengawet (Preservative)		
Asam Benzoat	Bahan pangan	1 g/kg
Asam Propionat	Keju olahan	3 g/kg
Asam sorbet	Keju olahan	3 g/kg
Belerang dioksida	Ekstrak kopi keraing	150 mg/kg
Kalium Benzoat	Bahan pangan	1 g/kg
Kalium Bisulfit	Pekatan sari nenas	500 mg/kg
Kalium Sorbat	Margarin	1 g/kg
Kalsium Benzoat	Saos, sirop	1 g/kg
Natrium Benzoat	Jam, Jeli, Makanan lain	1 g/kg
Natrium Bisulfit	Potongan Kentang goreng	50 mg/kg
Natrium Metabisulfit	Potongan Kentang goreng	50 mg/kg
Bahan lainnya sesuai SNI		

Pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Pemerintah melalui Peraturan Menkes RI, Nomor 722/Menkes/ Per/IX/88 dan perubahannya, yang juga tertera dalam SNI No 01-0222-1995 telah mengatur jenis bahan pewarna yang diizinkan penggunaannya dalam bahan pangan. Berdasarkan pengamatan selama pendampingan IRT peserta pendampingan menggunakan pewarna yang diizinkan untuk makanan. Namun dalam kegiatan produksi sehari-hari IRT perlu diinformasikan tentang dosis penggunaan serta di beri penerangan pewarna yang tidak diizinkan digunakan pada bahan pangan.



Gambar 33 Penggunaan pewarna makanan pada IRT pangan

Tabel 58 Daftar zat pewarna alami yang diizinkan di Indonesia

Bahan TBM	Contoh Penggunaan pada makanan	Batas maksimum penggunaan
Anato	Es krim Keju	100 mg/kg 600 mg/kg
Beta Apo		
Karotenal		
Katasantin	Eskrim, jem, udang kaleng	60 mg/kg
Karamel	Yoghurt	150 mg/kg
Karmin	Yoghurt	20 mg/kg
Beta karoten	Keju	600 mg/kg
Beta karoten	Es krim	100 mg/kg
Clorofil	keju olahan	secukupnya
Kurkumin	Es krim	60 mg/kg
Riboflavin	Es krim	60 mg/kg
Titanium dioksida	kembang gula	secukupnya

Selain pewarna alami, terdapat zat pewarna sintetis yang diizinkan penggunaannya di Indonesia. Zat pewarna sintetis yang diizinkan penggunaannya disajikan pada Tabel 59.

Tabel 59 Daftar zat pewarna sintetis yang diizinkan di Indonesia

Pewarna	Nomor Indeks Warna (C.I.No.)	Batas Maksimum
Biru berlian	Briliant blue FCF : C. I. No 42090	Secukupnya
Eritrosin	Food Red 2 Erithrosin : C.I. No 45430	Secukupnya
Hijau FCF	Food red 14 fast green FCF : C.I. No 42053	Secukupnya
Hijau S.	Food Green 3 Green S : C.I. NO 44090	Secukupnya
Indigotin	Food Green 4 Indigotin : C.I. No. 73015	Secukupnya
Ponceau 4R	Food Blue I Ponceau 4R : C.I. No. 16255	Secukupnya
Kuning	Food Red 7Quineline yellow C.I. No. 74005	Secukupnya
Kuinelin	Food Yellow 13 Sunset Yellow FCF C.I. No.	Secukupnya
Kuning FCF	15980	Secukupnya
Riboflavina	Food Yellow 3	Secukupnya
Tartrazine	Riboflavina Tartrazine 19140	

Sumber: Peraturan Menkes RI, Nomor 722/Menkes/Per/IX/88

Pewarna Amaranth meskipun berasal dari bahan nabati dan pernah digunakan pada bahan makanan, karena pertimbangan keamanan dilarang penggunaannya pada bahan pangan, terutama FDA melarang penggunaannya sejak tahun 1976. Beberapa bahan pewarna sintetis dilarang penggunaannya pada makanan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rhodamin-B (C.I. No. 45170) sebagai pewarna tekstil
2. Methanyl Yellow (C.I. No. 13065) sebagai pewarna tekstil
3. Asam Scarlet 3R (C.I. No. 16255) merupakan pewarna tekstil, tinta, kayu, plastik.
4. Asam Scarlet MOO (C.I. No. 27290) pewarna kertas, sabun, detergen, bahan pembersih.

Selain itu, terdapat pula pewarna lain yang banyak digunakan untuk pewarna tekstil yang dilarang penggunaannya dalam bahan pangan. Beberapa pewarna tersebut adalah:

1. Melachit green (C.I. No 42000),
2. Diamond green (C.I. No 42040),
3. Methyl violet (C.I. No 42535),
4. Victoria blue (C.I. No 44045),
5. Auramine o (C.I. No 41000),
6. Crysodine-Y/R (C.I No 53821),
7. Blamark brown Y/R (C.I. No 21000/21010),
8. Methylen blue (C.I. No 52015), dan
9. Ultramarine blue (C.I. No 52015),

Pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. Pemanis buatan diantaranya yang dibolehkan adalah:

1. Sakarin, dosis 2,5mg/kg berat badan/hari
2. Sodium Siklamat/Pemanis, dosis 11mg/kg berat badan/hari
3. Aspartam.dosis 40mg/kg berat badan/hari
4. Sorbitol (digunakan untuk penderita Diabetes dan orang yang membutuhkan kalori rendah)

Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa adalah bahan tambahan makanan yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma. Bahan ini terdiri dari bahan pemberi rasa dan aroma (*flavour*) serta bahan penguat rasa (*flavour enhancer*). Berdasarkan Peraturan Menkes RI, Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 dalam SNI No 01-0222-1995, terdapat sebanyak 75 jenis bahan penyedap (*flavour*) yang diizinkan penggunaannya seperti vanillin, eugenol. Terpeneol dan lain sebagainya. Jumlah penggunaan secukupnya untuk setiap jenis bahan pangan. Adapun bahan Penguat rasa terdapat sebanyak 4 macam yaitu asam glutamate, biasa digunakan dalam bentuk MSG (Mono Sodium Glutamate) Micin/Vetsin Dosis 120mg /kg berat badan /hari. Selain itu adalah asam guanilat, asam inosinat, serta kalsium dan natrium ribonucleotida.

Pemutih dan pematang tepung adalah bahan tambahan makanan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan atau pematang tepung sehingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan. Bahan pemutih dan pematang yang diijinkan disajikan pada Tabel 60.

Tabel 60 Bahan tambahan makanan (*flour treatment agent*) yang diijinkan

Nama Bahan Tambahan Makanan	Jenis /Bahan Makanan	Batas Maksimum Penggunaan
<u>Asam Askorbat</u> (Ascorbic Acid)	Tepung	200 mg/kg
<u>Aseton Peroksida</u> (Aceton Peroxide)	Tepung	Secukupnya
<u>Azodikarbonamida</u> (Azodicarbon amide)	Tepung	45 mg/kg
<u>Kalsium Stearoil-2</u> Calcium Stearoyl-2)- -laktilat lactylate	1. Adonan kue 2. Roti dan sejenisnya	5 g/kg bahan kering 3,75 g/kg tepung
<u>Natrium Stearyl</u> Sodium (Stearil Fumarat Fumarate)	Roti dan sejenisnya	5 g/kg tepung
Natrium Stearoil-2 (Sodium Stearoyl-2) -laktilat - lactylate	1. Roti dan sejenisnya 2. Wafel dan tepung Campuran wafel 3. Adonan kue 4. Serabi dan tepung Campuran serabi	3,75 g/kg tepung 3 g/kg bahan kering 5 g/kg bahan kering 3 g/kg bahan kering
L – Sisteina L-Cysteine (Hidroklorida) (Hydrochloride)	1. Tepung 2. Roti dan sejenisnya	90 mg/kg secukupnya

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/per/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan.

Pengemulsi, pemantap, dan pengental (*emulsifier, stabilizer, thickener*) adalah bahan tambahan makanan yang dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. Bahan pengemulsi, pemantap, pengental yang diizinkan penggunaannya pada bahan pangan disajikan pada Tabel 32.

Tabel 61 Bahan pengemulsi, pemantap, pengental yang diizinkan penggunaannya pada bahan pangan

Nama Bahan Tambahan Makanan	Jenis /Bahan Makanan	Batas Maksimum Penggunaan
Agar	Yoghurt	5 g/kg
	es krim dan sejenisnya	10 g/kg
Amonium Alginat	Yoghurt	5 g/kg
	es krim dan sejenisnya	10 g/kg
Amonium Fosfatida	Coklat bubuk	7 g/kg
Asam Alginat	Keju	5 g/kg
Asetil Dipati Adipat	Yoghurt	10 g/kg
Asetil Dipati fosfat	Yoghurt	10 g/kg
Asetil Dipati gliserol	Yoghurt	10 g/kg
Dextrin	Yoghurt	10 g/kg
Fulselaran	Yoghurt	5 g/kg
Gelatin	yoghurt	10 g/kg
Gam Arab/Guar/Kacang	yoghurt	5 g/kg
Gam Xanthan	yoghurt	5 g/kg
Pektin, CMC, dll	yoghurt	5 g/kg
Bahan lainnya sesuai SNI		

Sumber: SNI No 01-0222-1995

Pengeras (*firming agent*) adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya makanan. Beberapa bahan pengeras yang diijinkan diantaranya disajikan pada Tabel 62.

Tabel 62 Bahan pengeras yang diizinkan penggunaannya pada bahan pangan

Bahan TBM	Contoh Penggunaan pada makanan	Batas maksimum penggunaan
Alumunium Amonium Sulfat	Acar	Secukupnya
Kalsium Glukonat	Jem dan jeli	200 mg/kg
Kalsium Karbonat	Jem dan jeli	200 mg/kg
Kalsium Klorida	Jem dan jeli	200 mg/kg
Kalsium Laktat	Jem dan jeli	200 mg/kg
Kalsium Sulfat	Tomat kaleng	450 mg/kg

Sumber: SNI No 01-0222-1995

Antioksidan adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat terjadinya proses oksidasi. Bahan yang termasuk kepada antioksidan yaitu (1) butil hidroksi anisol (BHA) dan butil hidroksitoluena (BHT) ditambahkan pada makanan yang mengandung lemak dan minyak goreng agar tidak cepat basi (tengik), Dosis 200mg/kg, dan (2) asam askorbat (serta garam kaliumnya, garam kalsiumnya, dan garam natriumnya) di tambahkan ke dalam daging olahan, makanan bayi, Dan kaldu , atau produk daging. Dosis Asam Ascorbat/Ascorbic Acid/Vitamin C 500mg/kg produk daging. Batas penggunaan antioksidan pada beberapa bahan pangan adalah disajikan pada Tabel 63.

Tabel 63 Beberapa bahan antioksidan sebagai tambahan makanan yang diizinkan

Bahan TBM	Contoh Penggunaan pada makanan	Batas maksimum penggunaan
Asam askorbat	potongan kentang goreng	100 mg/kg
Asam eritorbat	daging olahan	500 mg/kg
Askorbil palmitat	minyak kelapa	200 mg/kg
Askorbil Stearat	minyak kelapa	200 mg/kg
Butil Hidroksi Anisol (BHA)	minyak kelapa	200 mg/kg
Butil Hidrokinon Tersier	minyak kelapa	200 mg/kg
Butil Hidroksi Toluen (BHT)	minyak kelapa	200 mg/kg
Dilauril Tiodipropionat	minyak kelapa	200 mg/kg
Propil Galat	minyak kelapa	100 mg/kg
Timah II Klorida	Sari Nenas Pekat	8 mg/kg
alpha tokoferol	Kaldu	50 mg/kg
Tokoferol campuran pekat	minyak kelapa	secukupnya

Sumber: SNI No 01-0222-1995

Bahan tambahan untuk menurunkan pH atau derajat keasaman, diantaranya adalah Asam Sitrat, Asam Malat (Apel), Asam Tartarat (Anggur), Buffered Lactic Acid (Asam Susu) sedangkan untuk menaikkan pH sering digunakan Soda Kue (Sodium Bikarbonat, Dosis 2g/Kg) Dan Sodium Carbonate.

Tabel 64 Pengatur keasamaan yang diizinkan penggunaannya pada bahan pangan

Bahan TBM	Contoh Penggunaan pada makanan	Batas maksimum penggunaan
Aluminium Amonium Sulfat	Soda Kue	Secukupnya
Aluminium Kalium Sulfat	Soda Kue	Secukupnya
Aluminium Natrium Sulfat	Soda Kue	Secukupnya
Amonium Bikarbonat	Coklat	50 g/kg
Amonium Hidroksida	Coklat	50 g/kg
Amonium Karbonat	Coklat	50 g/kg
Asam Adipat	Kembang gula	secukupnya

Asam asetat glacial	Keju olahan	40 g/kg
Asam tartarat (anggur)	Coklat	5 g/kg
Asam sitrat/ asam malat	Kue	3 g/kg
Kalium Hidroksida	Coklat	5 g/kg
Natrium Hidroksida	Coklat	50 g/kg
Bahan lainnya sesuai SNI		

Sumber: SNI No 01-0222-1995

Antikempal adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah mengempalnya makanan yang berupa serbuk. Terdapat beberapa bahan antikempal yang biasa digunakan pada industri pangan, yaitu Magnesium Karbonat/Magnesium Carbonate, Magnesium Stearat, Silica, dan Premium ACA/Light Silica

Tabel 65 Bahan anti kempal yang diizinkan penggunaannya pada bahan pangan

No	Bahan TBM	Contoh Penggunaan pada makanan	Batas maksimum penggunaan
1	Aluminium silikat	Susu Bubuk/Krim	1 g/kg
2	Kalsium aluminium silikat	Garam Meja	10 g/kg
3	Kalsium silikat	Susu Bubuk/Krim	10 g/kg
4	Magnesium silikat, magnesium oksida dan magnesium karbonat	Susu Bubuk/Krim	10 g/kg
5	Garam dari Meristat, palmitat dan stearat	Susu Bubuk/Krim	15 g/kg
6	Natrium alumino silikat	Garam Meja	10 g/kg
7	Silikon dioksida amorf	Gula Bubuk/Krim	15 g/kg
8	Tri-kalsium fosfat	Kaldu Bubuk	15 mg/kg
9	Trimagnesium fosfat	Susu Bubuk/Krim	1 g/kg

Sumber: SNI No 01-0222-1995

Sekuestran merupakan bahan penstabil yang digunakan dalam berbagai makanan olahan. Sekuestran mengikat logam dalam bahan makanan sehingga menjaga kestabilan bahan. Berdasarkan Peraturan Menkes RI, Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 dalam SNI No 01-0222-1995, terdapat sebanyak 75 jenis sekuestran. Bahan sekuestran yang paling sering digunakan adalah asam sitrat dan turunannya, asam fosfat dan garam etilendiamintetraasetat (EDTA), dengan kadar penggunaan rata-rata sekitar 100 mg/kg.

### Contoh Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang Di Gunakan Dalam Makanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan, bahan tambahan yang dilarang penggunaannya dalam makanan adalah sebagai berikut:

1. Asam Borat (Boric Acid) dan senyawanya
2. Asam Salisilat dan garamnya (Salicylic Acid and its salt)

3. Dietilpirokarbonat (Diethylpirocarbonate DEPC)
4. Dulsin (Dulcin)
5. Kalium Klorat (Potassium Chlorate)
6. Kloramfenikol (Chloramphenicol)
7. Minyak Nabati yang dibrominasi (Brominated vegetable oils)
8. Nitrofurazon (Nitrofurazone)
9. Formalin (Formaldehyde)
10. Kalium Bromat (Potassium Bromate)

Asam borat ( $H_3BO_3$ ) merupakan asam organik lemah yang sering digunakan sebagai antiseptik, dan dapat dibuat dengan menambahkan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) atau asam klorida ( $HCl$ ) pada boraks. Boraks merupakan garam natrium yang banyak digunakan di berbagai industri nonpangan, khususnya industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan keramik. Ia tidak berwarna dan gampang larut dalam air. Boraks bersifat iritan dan racun bagi sel tubuh, berbahaya bagi susunan saraf pusat, ginjal dan hati.

Asam salisilat (asam ortohidroksibenzoat) merupakan iritan lemah dan bersifat okal, biasa digunakan sebagai campuran obat untuk penggunaan luar kulit. Asam salisilat bersifat anti jamur, dapat mencegah penjamuran pada buah. Namun asam salisilat dilarang penggunaannya sebagai bahan pengawet di Indonesia. Asam salisilat memiliki sifat iritasi kuat ketika terhirup atau tertelan, bahkan bila ditambah air asam salisilat masih dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti dapat menyebabkan nyeri, mual dan muntah.

Dietilpirokarbonat (Diethylpirocarbonate DEPC) termasuk bahan kimia karsinogenik mengandung unsur kimia  $C_6H_{10}O_5$  sebagai bahan kimia sintetis digunakan sebagai penjegahan proses fermentasi pada makanan atau minuman. DEP bila masuk dalam tubuh dan terakumulasi dalam jangka panjang dapat memicu timbulnya kanker.

Dulsin dengan rumus  $C_9H_{12}N_2O_2$ . dalam bahan pangan digunakan sebagai pengganti sukrosa bagi orang yang perlu diet karena dulsin tidak memiliki nilai gizi. Kristal dulsin membentuk jarum yang mengkilap dan intensitas rasa manisnya sekitar 250 kali (antara 70–350 kali) dari rasa manis sukrosa. Peredarannya secara komersial ditarik sejak 1954 setelah diketahui dapat memicu timbulnya kanker.

Kalium Klorat ( $KClO_3$ ) salah satu fungsinya sebagai pemutih, sering dimasukkan dalam obat kunur dan pasta gigi. Bila terpapar dalam tubuh Kalium Klorat dapat menyebabkan kelainan dalam darah, kerusakan hati dan ginjal, bersifat iritasi pada mata, kulit dan saluran pernapasan.

Kloramfenikol merupakan kristal putih yang sukar larut dalam air (1:400) dan rasanya sangat pahit. Kloramfenikol mempunyai daya antimikroba yang kuat maka penggunaan Kloramfenikol meluas dengan cepat sampai pada tahun 1950.

Setelah diketahui bahwa Kloramfenikol dapat menimbulkan anemia aplastik yang fatal penggunaannya pada bahan pangan dilarang. Brominated vegetable oils (BVO) sebelumnya digunakan sebagai emulsifier pada flavor rasa jeruk untuk soft drink. Saat ini BVO telah dilarang penggunaannya pada lebih dari 1000 negara dikarenakan bersifat racun.

Nitrofurazone atau 2-((5-nitro-2-furanyl)methylene)hydrazinecarboxamide, merupakan senyawa kimia dengan rumus molekul  $C_6H_6N_4O_4$ , berbentuk kristal berwarna kuning pucat. Nama lainnya adalah nitrofural dan furacilin. Furacin digunakan pada obat luka bakar. Efek farmakologi nitrofurazan dari hasil penelitian terhadap tikus pada dosis 0,59 g/kg pemberian secara oral dapat menyebabkan skin lesion pada kulit serta infeksi pada kandung kemih.

Formalin adalah larutan formaldehida (HCHO) dalam air dan dilarang digunakan dalam pangan sebagai pengawet. Formalin biasa digunakan pada industri plastik, anti busa, bahan konstruksi, kertas, karpet, textile, cat, mebel, dan pengawet. Pada bahan pangan Formalin dapat menyebabkan [kanker](#), sekitar 2 sendok makan formalin dapat menyebabkan kematian.

Kalium Bromat ( $KBrO_3$ ) biasa digunakan pada pabrik roti, penggunaannya dilarang karena bersifat karsinogenik (karena dapat memicu kanker). Kalium Bromat digunakan untuk memperbaiki tepung yang dapat mengeraskan roti, bila digunakan dalam jumlah kecil dapat hilang selama pemanasan, namun jika dalam jumlah banyak masih tertinggal di dalam roti.

### **Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang Digunakan oleh IRT peserta pendampingan**

Sebagian industri rumah tangga dalam kegiatan produksi ada yang menggunakan bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan yang digunakan adalah yang diizinkan atau dibolehkan penggunaannya. Meskipun demikian bagi IRT peserta pendampingan perlu diingatkan dan diberitahu tentang dosis penggunaannya agar selalu menggunakan pada batas kadar yang diperbolehkan. Bahan-bahan Tambahan Makanan yang digunakan oleh industri rumah tangga binaan adalah seperti disajikan pada Gambar 34 dan Tabel 66.



Gambar 34 Contoh penggunaan bahan pengawet pada industri rumah tangga

Tabel 66 Beberapa penggunaan bahan tambahan pangan oleh IRT di empat lokasi

Kecamatan	Jenis Usaha Makanan	Bahan Baku	Bahan Tambahan
Banjaran, Kab. Bandung	Keripik	Singkong, Pisang, Jamur	Penyedap, Pewarna
	Kerupuk	Kulit, Tapioka	Penyedap, Pewarna, Pengawet
	Kue	Terigu, Tapioka	Penyedap, Pewarna
	Dodol	Tape, Sirsak	Penyedap, Pewarna
	Keremes	Ubi jalar	Penyedap, Pewarna
Sindang Barang, Kab. Cianjur	Wajik	Ketan	Penyedap, Pewarna, Pengawet
	Keripik	Pisang	Penyedap, Pewarna
	Sale	Pisang	
	Gula	Nira Aren	Pengawet
	Tahu, Tempe	Kedelai	Pewarna
	Opak	Tepung tapioka	
	Rangginang	Beras	
Kelontong	Beras ketan, gula		
Cisayong, Kab Tasik	Kue kutu	Tepung Beras	Penyedap, pewarna
	Mayang		
	Keripik	Ubikayu, Pisang	Penyedap, Pewarna
	Opak	Tepung tapioka	
	Rangginang	Beras	
	Kelontong	Beras ketan, gula	
	Tahu	Kedelai	Pewarna Kunyit
	Tape Singkong	Ubi Kayu	
Banjarsari, Kab Ciamis	Rempeyek	Kacang Tanah	
	Kacang		
	Opak	Ketan, gula	
	Gula Merah	Nira kelaa	Pengawet (Sulfit, kapur)
	Telur Asin	Telur Itik	Garam
	Kerupuk mie	Tapioka	Pewarna makanan
	Sale	Pisang (siem, Koyut, ambon)	
	Tempe	Kacang Kedelai	
	Tahu	Kacang Kedelai	
Keripik	Pisang, Singkong		
Cryspi Jamur	Jamur, Tepung	Penyedap Rasa	
Lanting Sigkong	Singkong	Penyedap Rasa/vetsin	
Kopra		Daging kelapa	

### 6.3.9. Kemasan dan Label

Pengemasan produk dilakukan untuk memperpanjang umur simpan dan menjadikan produk terlihat lebih menarik. Kemasan memang bukan yang utama namun memegang peranan penting dalam mendapatkan hati konsumen untuk memilih produk tertentu. Kemasan sangat mempengaruhi penampilan sehingga menarik konsumen. Kemasan juga sangat penting dalam menjaga keawetan dan higienitas produk selama jangka waktu tertentu. Kemasan makanan tidak hanya sekedar bungkus makanan dan cenderung dianggap sebagai “pelindung” makanan. Sebenarnya pengemasan akan tergantung pada jenis bahan kemasan. Kemasan pada makanan mempunyai fungsi kesehatan, pengawetan, kemudahan, penyeragaman, promosi, dan informasi.

Fungsi utama dari kemasan adalah sebagai (1) wadah, (2) memelihara kesegaran dan kemantapan, (3) melindungi dari kontaminasi, (4) media komunikasi dan promosi, dan (5) mencegah kehilangan. Dalam kegiatan pengemasan perlu menentukan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan yang digunakan. Untuk Industri pangan harus menggunakan bahan kemasan yang sesuai untuk pangan, sedangkan bagi industri non pangan kemasan sangat tergantung pada nilai dan sifat produk yang dibuat.

Sebagian besar IRT peserta pendampingan sudah menggunakan kemasan dalam memasarkan produknya. Jenis kemasan yang umum digunakan industri rumah tangga adalah kemasan plastik polos. Kemasan yang digunakan umumnya sederhana dan belum memperhatikan estetika kemasan sehingga lebih terlihat menarik. Sebanyak 95 industri pangan sudah menggunakan kemasan untuk bahan pangan terhadap produk yang dihasilkan. Sedangkan industri non pangan hanya sebagian kecil saja (30%) yang menggunakan kemasan produknya. Hal ini dikarenakan bagi industri non pangan tidak seluruhnya perlu mengemas produk yang dihasilkan. Hanya industri seperti tas, jaket, kancing, dan kerajinan hias yang membuat kemasan terhadap produk yang dihasilkan.

Tabel 67 Sebaran IRT menurut penggunaan kemasan primer dan sekunder

Menggunakan kemasan	Kemasan Primer		Total	Kemasan Sekunder	
	Menggunakan	Tidak Menggunakan n		Menggunakan	Tidak Menggunakan n
Pangan	95	7	102	32	70
Non Pangan	8	38	46	1	45
Jumlah	103	45	148	33	115
Persentase Jlh	70	30	100	22	78

Untuk bahan kemasan dipilih bahan kemasan yang aman dan menarik, dan tentukan jenis kemasan primer, sekunder atau tersier. Pada industri rumah tangga binaan rata-rata menggunakan kemasan dari bahan plastik sebagai kemasan primer dan sekunder. Industri pangan wajib tetap mempertahankan

kekhasannya menggunakan kemasan primer dari daun jagung dan baru ditambah kemasan sekunder dari bahan plastik.

Pada kemasan harus disertakan label yang menerangkan tentang produk yang ada di dalam kemasan. Label pada kemasan yang minimal memuat nama produk, nama produsen, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan komposisi bahan. Label yang digunakan harus dapat memuat catatan yang dapat digunakan sebagai informasi ini untuk pemantauan produk (misal *nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, spesifikasi*)

Label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsikan pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan. Berdasarkan peraturan pemerintah No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, keterangan pada label sekurang-kurangnya memuat (1) nama produk, (2) daftar bahan yang digunakan, (3) berat bersih atau isi bersih, (4) nama dan alamat pihak yang memproduksi, (5) tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, dan (6) nomor Sertifikasi Produksi (P-IRT). Beberapa IRT ada yang sudah menggunakan Label, dan mencantumkan nama dan merek produk. Umumnya IRT belum mencantumkan label secara lengkap sebagaimana yang disyaratkan dalam PP No 69 Tahun 1999, meskipun demikian kemampuan IRT dalam berusaha untuk membuat label produk merupakan usaha yang patut dihargai dan perlu ditingkatkan melalui kegiatan pembinaan oleh Pemda sehingga IRT mampu mencantumkan label secara sempurna.



Gambar 35 Contoh kemasan dan label pada IRT

Bila dibandingkan sebelum dan setelah dilakukan pembinaan, jumlah IRT yang menggunakan label mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 13 IRT (8,8% ) yang menggunakan label setelah pebinaan meningkat menjadi 49 IRT (33%).

Tabel 68 Sebaran IRT menurut penggunaan label pada produk sebelum dan setelah pembinaan

	Jenis Industri	Lokasi IRT peserta pendampingan								Total	
		Bandung		Cianjur		Ciamis		Tasikmalaya		B	A
		B	A	B	A	B	A	B	A		
Jumlah IRT	Pangan	8	18	4	6	1	8	0	13	13	45
Pengguna Label	Pangan	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4
	Jumlah	8	19	4	6	1	9	0	15	13	49
											43.6
Persentase IRT Pengguna Label	Pangan	33.33	75	16.67	25	4.35	34.78	-	40.63	12.62	9
	Non Pangan	-	8.33	-	-	-	9.09	-	20	-	9.09
	Jumlah	22.22	52.78	11.43	17.14	2.94	26.47	-	35.71	8.84	33.33

Keterangan, B:sebelum dan A: Sesudah

Berdasarkan data pada Tabel 68, bila dilihat berdasarkan lokasi IRT peserta pendampingan, penggunaan label lebih banyak dilakukan oleh IRT di wilayah yang berada dekat perkotaan seperti Bandung (53%) dan Tasik (36%) sedangkan pada IRT di wilayah yang lebih jauh dari perkotaan penggunaan label relatif lebih sedikit. Meskipun demikian pada kedua wilayah tersebut faktor adanya sentuhan seperti adanya pembinaan cukup menunjukkan adanya respon yang positif terhadap perbaikan kegiatan usaha oleh industri rumah tangga.

### 6.3.10. Penyimpanan

Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk yang diolah. Kegiatan penyimpanan diperuntukkan bagi (1) penyimpanan bahan baku dan bahan penolong, (2) penyimpanan produk, (3) penyimpanan bahan berbahaya, (4) penyimpanan label dan kemasan, dan (5) penyimpanan peralatan. Persyaratan yang perlu diperhatikan selama penyimpanan adalah: suhu penyimpanan, kelembaban, sirkulasi udara/ventilasi dan jauh dari kemungkinan hama atau bahan cemar.

Penyimpanan terhadap bahan, produk dan peralatan harus ditempatkan pada tempat yang bersih, bebas dari cemar. Tempat penyimpanan sebaiknya terpisah atau minimal diberi sekat yang aman antara tempat penyimpanan bahan baku dengan tempat penyimpanan bahan penolong atau peralatan produksi. Demikian juga bahan-bahan ataupun produk yang memenuhi syarat diberi tanda dan dibedakan tempat penimpanannya dengan bahan atau produk yang tidak memenuhi syarat. Pengaturan tempat dan lokasi penyimpanan diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk pengambilan bahan yang diperlukan serta bahan atau produk yang disimpan lebih dahulu dapat dikeluarkan lebih dahulu (*first in-first out*).



Gambar 36 Contoh kondisi penyimpanan bahan baku pada IRT

### **6.3.11. Pencatatan dan Dokumentasi**

Pencatatan dan dokumentasi perlu dilakukan dengan baik, hal ini akan bermanfaat dan diperlukan bagi IRT untuk memudahkan penelusuran masalah atau jika diperlukan evaluasi yang terkait dengan proses produksi. Pencatatan dan dokumentasi diperlukan untuk hal mencakup (1) tentang penerimaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan pangan, (2) pencatatan tentang proses pengolahan, line produksi, penanggung jawab produksi, (3) pencatatan tentang produk akhir, sekurang-kurangnya memuat tanggal produksi, kode produksi, dan jumlah produksi, dan distribusi produk, dan (4) pencatatan dan dokumentasi tentang kadaluarsa, perkiraan tanggal kadaluarsa, distribusi dan penarikan produk karena kadaluarsa.

Pencatatan dan dokumentasi yang baik akan meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Catatan dan dokumen yang dibuat disimpan minimal selama dua kali umur simpan produk yang dihasilkan atau sesuai kebutuhan pada setiap perusahaan. Terhadap IRT peserta pendampingan baru diinformasikan tentang pentingnya dilakukan pencatatan dan dokumentasi terkait dengan produk yang dihasilkan. Pada IRT peserta pendampingan baru sebagian kecil saja yang melakukan pencatatan seiring dengan pembuatan pembukuan usaha.

### **6.3.12. Limbah dan Penanganannya**

#### **Sumber dan Karakteristik Limbah IRT**

Industri rumah tangga dalam proses produksinya menghasilkan limbah baik berupa limbah padat maupun cair. Jumlah limbah yang dihasilkan bervariasi menurut jenis industrinya. Beberapa industri rumah tangga menghasilkan limbah dalam jumlah yang banyak seperti pada industri pengolahan tahu dan tempe dan memerlukan penanganan yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat biasanya mudah ditangani karena bisa dijadikan pakan ternak atau dibuat menjadi hasil olahan lainnya seperti tepung untuk dijadikan kue, atau produk lainnya. Limbah cair dari pabrik tahu dan tempe dihasilkan dalam jumlah yang lebih banyak dibanding limbah padat. Pengolahan limbah secara sederhana telah dilakukan, misalnya dengan membuat kolam penampungan untuk

penampungan limbah cair pabrik tahu sebelum dibuang ke badan air. Limbah tahu dan tempe perlu ditangani lebih dulu sebelum dibuang atau dialirkan ke badan air, karena kandungan bahan organik masih tinggi.

Tabel 69 Karakteristik limbah cair industri tempe

Parameter	Satuan	Baku Mutu Air Limbah (Gol. 1V)	Limbah Cair Dari rebusan kedelai (rata rata)	Limbah Cair Dari rendaman kedelai (rata rata)
Suhu	°C	45	75	32
TDS (Total Dissolve Solid)	mg / l	5.000,00	25.060,00	25.254,00
TSS (Total Suspended Solid)	mg / l	500,00	4.012,00	4.551,00
pH	-	40.672,00	6,00	4,16
NH3N (Amoniak Bebas)	mg / l	20,00	16,50	26,70
NO3N (Nitrat)	mg / l	50,00	12,52	14,08
DO (Dissolve Oxygen)	mg / l	-	ttd	Ttd
BOD (Biological Demand)	mg / l	300,00	1.302,03	31.380,87
COD (Chemical Demand)	mg / l	600,00	4.188,27	35.398,87

Sumber: Wiryani, E (2005) Lab. Ekologi Dan Biosistematik Jur. Biologi F MIPA. UNDIP Semarang.

Keterangan: Tercetak tebal berarti melampaui standar Baku Mutu Limbah Cair .  
Ttd berarti tidak terdeteksi.

Pada Industri tahu dan tempe potensi limbah cair dihasilkan berasal dari proses perendaman, pencucian dan perebusan kedelai. Pada Industri tahu dan tempe potensi limbah berkisar antara 15-25 liter limbah cair untuk setiap kg kedelai. Sedangkan beban cemaran pabrik tahu juga tinggi pada nilai COD, BOD dan N total. Beban cemaran hasil limbah pabrik tahu disajikan pada Tabel 40.

Tabel 70 Kandungan Pencemar Limbah Tahu

Nomor Sampel	COD (Mg/ l)	BOD (mg/l)	N-Total (mg/ l)	pH
1	7,250.00	5,643.00	169,5	3,94
2	6,870.00	5,395.00	153,4	4,28
Rata-rata	7,050.00	5389,5	161,5	4,11

Damayanti, et al (2004) Jurnal Purifikasi, Vol.5, No.4, Oktober 2004 : 151-156

Jumlah air yang dibutuhkan dari proses pembuatan tahu mulai dari tahap perendaman sampai pencucian ampas adalah 135 liter untuk 3 kg kedelai atau 45 liter per 1 kg kedelai (Sani, Y.E. , 2006). Kesimbangan bahan pada proses pembuatan tahu dapat diilustrasikan sebagai berikut

Air	+	Kedelai	=	Tahu	+	Ampas tahu	+	Whey
2.700 kg	+	60 kg	=	80 kg	+	70 kg	+	Whey
Whey	+		=	2.610 kg atau 0.26 m <sup>3</sup>				

Jumlah air limbah tahu yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu kirakira 15-20 l/kg bahan baku kedelai, sedangkan beban pencemarannya kira-kira sebesar 30 kg. Total Suspended Solids (TSS) / kg bahan baku kedelai , Biological

Oxygen Demand (BOD) 65 gr/kg bahan baku kedelai dan Chemical Oxygen Demand (COD) 130 gr/ kg bahan baku kedelai. (Potter, C.Soeparwadi, M & Gani A. 1994, di dalam Sani Y.E., 2006).

Istilah COD singkatan dari *Chemical Oxygen Demand* adalah jumlah total oksigen (mg O<sub>2</sub>) yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik terlarut dan juga untuk mengoksidasi senyawa anorganik seperti amonia dan nitrit yang ada dalam satu liter sampel air. Sedangkan istilah BOD singkatan dari *Biological Oxygen Demand*, atau kebutuhan oksigen biologis untuk memecah bahan buangan di dalam air oleh mikroorganisme. BOD menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme aerob dalam menguraikan senyawa organik terlarut dalam air.

Nilai COD dan BOD merupakan ukuran pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut / *dissolved oxygen* (DO) di dalam air. Oksigen terlarut dalam air berkurang karena oksigen yang terlarut tersebut digunakan oleh mikroorganisme. Sehingga jika air limbah tahu langsung dibuang ke badan air akan menurunkan oksigen terlarut dalam air. Total Suspended Solids (Padatan Total tersuspensi) adalah zat-zat padat tersuspensi yang tersisa sebagai residu dalam suatu bejana, bila sampel air dalam bejana tersebut dikeringkan pada suhu tertentu.

### **Penanganan limbah IRT peserta pendampingan**

Limbah dari IRT peserta pendampingan yang mengolah tahu dan tempe perlu dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Umumnya IRT pada lokasi binaan sudah melakukan upaya pengelolaan limbah dari pengolahan tahu dan tempe, namun belum optimal. Bahkan terdapat IRT peserta pendampingan yang diprotes warga sekitar karena menyebabkan limbah yang sangat mengganggu lingkungan. Upaya pengelolaan limbah tahu dan tempe yang dilakukan bervariasi sesuai dengan lokasi dan tingkat teknologi yang digunakan untuk penanganannya, serta sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh IRT.

Air buangan dari pengolahan tahu dan tempe ada yang ditampung ke kolam penampungan sebelum di buang ke sungai atau badan air. Kolam atau bak penampungan yang dibuat umumnya masih sederhana cukup untuk menampung air buangan yang dihasilkan sebelum kemudian dialirkan secara bertahap ke badan air. Terkadang persoalan muncul bila musim hujan dimana kolam penampungan meluap dan dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi hal ini beberapa IRT disarankan membuat bak penampungan yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan limbah oleh mikroorganisme sebelum dibuang ke badan air. Upaya yang dilakukan dengan menabuh atau memperdalam bak penampungan, membuat sekat bak penampungan dan menutup bagian atas bak penampungan.

Beberapa IRT juga disarankan untuk memanfaatkan air buangan pengolahan tempe dan tahu untuk keperluan lainnya seperti campuran minuman ternak, atau membuat unit pengolahan biogas. Pembuatan unit pengolahan biogas sebenarnya cocok untuk usaha tempe atau tahu, karena gas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali dalam proses pemasakan. Namun pembuatan pengolahan biogas memerlukan dana yang dirasakan cukup besar sehingga dirasa memeratkan IRT peserta pendampingan.

## VII. MANAGEMEN USAHA

### 7.1. Definisi Industri, Pelaku Usaha, dan Manajemen Usaha

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Menurut UU UMKM tahun 2008, usaha mikro memiliki kriteria (a) kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan (b) penjualan bersih tahunan maksimal Rp 300 juta (maksimal 25 juta per bulan). Jenis industri pada lokasi pendampingan umumnya merupakan industri yang berorientasi pada bahan baku (*supply oriented industry*), dimana jenis industri berdasarkan tempat bahan baku umumnya merupakan industri ekstraktif yaitu industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar.

Keberhasilan suatu industri rumah tangga adalah ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya dalam melakukan manajemen usaha. Dengan manajemen usaha yang benar dapat mengatur perusahaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pelaku industri rumah tangga harus memahami dan menguasai manajemen usaha. Pengertian manajemen menurut H.Koontz O. Donnell adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Sedangkan menurut GR Terry, Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan pengendalian.

Tabel 71 Aspek-aspek perusahaan dalam industri rumah tangga

Aspek-aspek Industri Rumah Tangga	
1	Aspek Legal
	SITU/HO
	SIUP
	TDP
	TDI
	NPWP
	PKP
	PIRT
2	Aspek Organisasi dan Manajemen
	Company Profile
	Struktur Organisasi IRT
	Job Description
	Visi dan misi company
3	Aspek Produksi
	Katalog Produk
4	Aspek Pemasaran
	Gambaran umum pasar
	Permintaan
	Penawaran
	Rencana Penjualan
	Strategi Pemasaran
	Internet Marketing
5	Aspek Keuangan
	Laporan Keuangan
	Proyeksi Laba Rugi
	Proyeksi Arus Kas
	Proyeksi Neraca
	Analisa Keuangan
	Proposal Bisnis
6	Aspek Tenaga Kerja
	Jumlah Tenaga Kerja

Aspek-aspek Industri Rumah Tangga	
Bahan baku dan Pembantu	Reward and punishment
Proses Produksi /SOP	Pelatihan
Tata letak produksi	Sistem Upah
Alat dan Mesin Produksi	
Kapasitas Produksi	
QC/QA/GMP Produk	

Pelaku usaha menurut pengertian Pasal 1 angka 3 UU PK adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Maka secara sederhana pengertian manajemen usaha adalah mengatur dengan benar aspek-aspek perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan pengendalian (Tabel 71).

## 7.2. Masalah Usaha yang Dihadapi IRT Binaan

Industri rumah tangga peserta pendampingan di empat lokasi pendampingan ekonomi menghadapi masalah yang bervariasi dalam usahanya, antara lain keterbatasan modal, alat kerja, tidak memiliki izin usaha, sanitasi yang kurang, manajemen, teknik produksi, dan pemasaran yang kurang baik, dan masalah tentang harga produk maupun bahan baku. Analisis masalah IRT peserta pendampingan dibedakan berdasarkan produk pangan dan non pangan. Produk pangan IRT peserta pendampingan berjumlah 102 IRT yang meliputi jamur (6 IRT), keripik (20 IRT), temped an tahu (16 IRT), kue (15 IRT), gula (11 IRT), opak dan kolontong (18 IRT), dan produk pangan lainnya (16 IRT). Hasil analisis melalui data primer yang dikumpulkan menunjukkan bahwa lebih dari setengah IRT produk pangan menghadapi masalah kekurangan modal (53.9%) dan sanitasi (56.9%). Masalah lain yang cukup banyak dihadapi IRT produk pangan adalah manajemen (37.25%), pemasaran (28.9%), alat kerja dan teknik produksi yang masing-masing sebesar 25.5 persen, dan alat kerja (24.5%). Selain itu, terdapat beberapa IRT produk pangan yang menghadapi masalah terkait harga, baik harga produk maupun harga bahan baku dan bahan pembantu. IRT tersebut mengeluhkan tentang terus naiknya harga bahan baku dan bahan pembantu produk sedangkan harga jual produk tetap atau sulit untuk dinaikkan (Tabel 72).



### **7.3. Hasil Pendampingan Aspek-aspek Industri Rumah Tangga (IRT)**

Pelaksanaan pendampingan terhadap IRT korban gempa 2 September 2009 yang dilakukan adalah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh (enam) aspek industri rumah tangga. Sub bab ini menguraikan hasil pendampingan pada aspek legal, organisasi dan manajemen, dan aspek tenaga kerja.

#### **7.3.1. Aspek Legal**

Aspek legal industri rumah tangga menunjukkan keabsahan industri rumah tangga tersebut dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek legal sangat penting untuk kepercayaan diri IRT dalam melakukan usahanya serta jaminan produk bagi konsumen. Terdapat 7 (tujuh) aspek legal dalam industri rumah tangga yang dilakukan pendampingan yaitu HO, SITU, SIUP, TDP, TDI, NPWP, PKP dan PIRT. Aspek legal HO menunjukkan izin tetangga, RT, desa, dan bahkan kecamatan untuk melaksanakan kegiatan usaha, dan biasanya dikeluarkan oleh kecamatan. Aspek legal SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) merupakan aspek legal dari Dinas Perdagangan untuk pemasaran produk. Aspek legal TDI (Tanda Daftar Industri) atau IUI (Izin Usaha Industri) merupakan aspek legal dari Dinas Perindustrian untuk melakukan kegiatan industri. Aspek legal NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Aspek legal PKP merupakan aspek legal yang menggambarkan Perusahaan Kena Pajak. NPWP dan PKP sangat penting bagi IRT untuk masuk produk kepada perusahaan-perusahaan besar yang mewajibkan adanya pembayaran pajak. Aspek legal PIRT merupakan aspek legal dari Dinas Kesehatan untuk IRT. IRT Pangan tanpa PIRT menunjukkan tidak ada jaminan produk pangan dari dinas kesehatan terhadap produk. Urutan tingkatan aspek legal adalah (1) HO dan SITU, (2) TDI/IUI, SIUP, dan TDP, (3) PIRT khusus untuk IRT pangan, dan (4) NPWP/ PKP. IRT tanpa HO dan SITU maka IRT tidak boleh beroperasi. IRT akan dibina langsung baik pelatihan dan bantuan-bantuan lainnya dari dinas perindustrian dan perdagangan kalau memiliki izin terkait. Bantuan pemerintah sangat besar bagi IRT yang sudah memiliki izin. Aspek legal PIRT merupakan aspek legal dari Dinas Kesehatan untuk IRT yang menjamin dari dinas kesehatan bahwa produk tersebut layak dikonsumsi. Hasil elaborasi menunjukkan bahwa umumnya IRT belum memiliki perizinan yang lengkap untuk sebuah usaha.

##### **7.3.1.1. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung**

Pelaksanaan pelatihan manajemen usaha terkait aspek legal kepada IRT peserta pendampingan memberikan pemahaman dan kesadaran bagi IRT peserta pendampingan akan pentingnya semua aspek legal bagi kemajuan usaha. Bagi beberapa IRT pangan peserta pendampingan yang memiliki urgensi dalam

pembuatan ijin dilakukan pendampingan untuk mendapatkan aspek legal terutama HO/SITU, NPWP dan PIRT (Depkes). Bagi industri rumah tangga pangan, aspek legal PIRT sangat penting bagi jaminan konsumen, sehingga diharapkan akan memperlancar pemasaran produk.

Pengurusan HO di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung diberikan oleh kecamatan tanpa ada biaya dengan persyaratan KTP. Biaya pengurusan SITU, TDP, dan SIUP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung sebesar seratus ribu rupiah dengan persyaratan pengisian formulir isian, foto 4x6, fotokopi KTP, KK, PBB, dan NPWP. Biaya pengurusan NPWP di kantor pelayanan pajak sebesar lima puluh ribu rupiah dengan syarat pengisian formulir dan fotokopi KTP. Biaya pengurusan PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebesar lima ratus ribu rupiah (Rp 500 000,00) dengan syarat pengisian formulir, foto, fotokopi KTP, KK, NPWP, dan pelatihan selama 2 hari yang dilaksanakan oleh audit. Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan Sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 74.

Tabel 74 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung

Kepemilikan Perijinan	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
HO/SITU	6	15
SIUP	4	11
TDP	2	10
TDI	1	1
NPWP	3	9
PKP	1	1
PIRT	6	13

Kepemilikan ijin IRT peserta pendampingan atas aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran ada yang mengalami perubahan dan ada yang tetap. Tabel 74 menunjukkan bahwa kepemilikan IRT peserta pendampingan aspek legal TDI dan PKP tetap, sedangkan untuk aspek legal HO/SITU, SIUP, TDP, NPWP, dan PIRT mengalami perubahan yaitu meningkat. Peningkatan 5 (lima) aspek legal tersebut cukup tinggi, yaitu terdapat peningkatan 6 (enam) hingga 9 (sembilan) IRT peserta pendampingan. Peningkatan kepemilikan ijin usaha ini diasumsikan karena peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya aspek legal demi keamanan dan kelancaran usaha.

#### **7.3.1.2. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis**

Pelaksanaan pelatihan manajemen usaha terkait aspek legal kepada IRT peserta pendampingan memberikan menjadi pengetahuan tentang pentingnya aspek legal bagi kemajuan usaha. Sebagian besar pelaku IRT di Kecamatan Banjarsari

berada pada kelompok usia yang sudah tua dengan skala usaha mikro sekali, sehingga aspek legal atau perizinan dianggap belum terlalu penting karena lebih mengutamakan untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Namun terdapat 1 (satu) IRT peserta pendampingan yang didampingi dalam perolehan aspek legal, yaitu usaha *crisphy* jamur dimana ijin dianggap penting demi kemungkinan sukses usaha di masa yang akan datang.

Biaya pengurusan HO di kecamatan Banjarsari adalah minimal Rp 150 000,00 untuk luasan usaha 1 m<sup>2</sup> dengan syarat memperoleh tanda persetujuan minimal dari 4 orang untuk tetangga depan, belakang, kiri, dan kanan. Biaya pengurusan SIUP sebesar Rp 300 000,00 dan biaya pengurusan TDP sebesar Rp 450 000,00 yang diurus oleh pihak kecamatan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis, dan biaya pengurusan NPWP sebesar Rp 50 000,00. Jumlah industri rumah tangga yang mendapat pendampingan di Kecamatan Banjaran adalah sebanyak 34 IRT. Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan Sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Cianjur disajikan pada Tabel 75.

Tabel 75 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis

Kepemilikan Perijinan	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
HO/SITU	3	3
SIUP	3	3
TDP	2	3
TDI	1	1
NPWP	4	5
PKP	0	0
PIRT	0	0

Kepemilikan ijin IRT peserta pendampingan atas aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari tidak signifikan. Tabel 75 menunjukkan bahwa kepemilikan IRT peserta pendampingan aspek legal yang berubah hanya TDP dan NPWP dengan peningkatan kepemilikan ijin 1 IRT. Perubahan yang tidak signifikan disebabkan ijin belum dianggap sebagai prioritas karena pelaku IRT menganggap biaya yang cukup besar untuk pengurusan ijin lebih baik digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

### 7.3.1.3. Hasil Pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Skala usaha IRT peserta pendampingan di Kecamatan Cisayong pada umumnya merupakan usaha dengan skala mikro. Oleh karena itu, sebagian besar IRT peserta pendampingan belum memahami makna pentingnya aspek legal atau perizinan.

Biaya pengurusan HO, NPWP, SIUP, TDP dan IUI dilakukan kolektif oleh pihak kecamatan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan biaya total Rp 1.250.000,-. Dan biaya pengurusan PIRT langsung dari Dinas Kesehatan sebesar Rp 400.000,- dengan persyaratan adalah pengisian formulir, fotocopy KTP, KK, Denah lokasi, usaha dan bangunan dan flowchart usaha. Jumlah industri rumah tangga yang mendapat dampingan di kecamatan Cisayong adalah sebanyak 43 IRT. Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan Sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada **Tabel 76.**

Tabel 76 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya

Kepemilikan Perijinan	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
HO/SITU	2	3
SIUP	0	1
TDP	0	1
TDI	0	1
NPWP	1	2
PKP	0	0
PIRT	1	2

Hasil dampingan aspek legal bagi IRT di Kecamatan Cisayong yang berubah hanya IRT Ade Tarmidi, yaitu dari tidak punya HO, SIUP, TDP, IUI, NPWP dan PIRT menjadi memiliki semua aspek legal tersebut. Sehingga akhir dampingan di Kecamatan Cisayong yang memiliki HO menjadi 3 IRT, memiliki SIUP menjadi 1 IRT, memiliki TDP menjadi 1 IRT, memiliki IUI menjadi 1 IRT, memiliki NPWP menjadi 2 IRT dan memiliki PIRT menjadi 2 IRT.

Kepemilikan ijin IRT peserta pendampingan atas aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong tidak signifikan. Sebanyak 6 dari 7 aspek legal mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi hanya 1 IRT peserta pendampingan. Perubahan yang tidak signifikan disebabkan ijin belum dianggap sebagai prioritas karena pelaku IRT menganggap biaya yang cukup besar untuk pengurusan ijin lebih baik digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga disebabkan karena pengurusan yang harus dilakukan di kecamatan yang memiliki jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal pemilik usaha.

Akan tetapi sebenarnya pengurusan ijin dapat dilakukan secara gratis jika masing-masing instansi masih memiliki anggaran untuk hal tersebut. Sertifikat halal dan PIRT sebesar 300.000 rupiah, belum termasuk biaya untuk auditor. Uji untuk enentuan kadaluarsa produk ditentukan jenis produlnya dan dapat mencapai 500.000 bahkan bisa lebih tergantung kesesuaian parameter dengan produk (sumber info dari BP-POM di bogor dan laboran PAU-IPB). untuk perzinan SIUP dan SITU di tasik sudah tersedia kantor pelayanan perizinan

terpadu Pengurusan PIRT ada waiting list supaya minimal quota 30 orang dengan biaya 300.000 belum termasuk inspeksi (ransport, uang makan, dll).

#### **7.3.1.4. Hasil Pendampingan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur**

Kondisi sebagian besar IRT pendampingan di Kecamatan Sindangbarang dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha atau IRT sebatas bertahan hidup (*survival economic strategy*), sehingga pendampingan yang lebih pendampingan aspek legal bukan termasuk hal *urgent*. Meski demikian pelaksanaan pendampingan aspek legal IRT di Kecamatan Sindangbarang tetap dijalankan, namun lebih mengutamakan untuk mengingatkan akan pentingnya aspek legal bagi kemajuan usaha mereka. Oleh karena itu, tidak terdapat perubahan kepemilikan ijin sebelum dan sesudah pendampingan. Untuk aspek legal, kecamatan mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan biaya Rp 25 000,00. Pengurusan HO, SITU, TDP, TDI dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Cianjur. NPWP dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Cianjur, dan perizinan PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

#### **7.3.2. Aspek Organisasi dan Managemen**

Aspek organisasi dan managemen industri rumah tangga merupakan aspek yang mengatur bagaimana berjalannya kegiatan industri rumah tangga tersebut. Terdapat 4 (empat) sub aspek organisasi dan managemen yang menjadi program pendampingan perbaikan kepada industri rumah tangga korban gempa. Sub aspek tersebut adalah keragaan Usaha (*Company Profile*), Visi dan Misi IRT, Struktur Organisasi dan prosedur kerja (*Job Description*). *Company Profile* menjelaskan identitas dan kapasitas dari perusahaan/IRT yang sangat diperlukan dalam promosi terutama dengan pihak distributor. Visi dan misi menggambarkan sejauh mana pendiri atau pemilik perusahaan/IRT mempunyai visi dan misi dalam menggerakkan usahanya. Dalam bahasa sederhana visi misi perusahaan diterjemahkan menjadi misi dan moto usaha Struktur organisasi menggambarkan bagaimana menjalankan operasional perusahaan/IRT. *Job description* (prosedur kerja) menggambarkan bagaimana prosedur kerja setiap orang pada struktur organisasi perusahaan/IRT.

#### **7.3.2.1. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung**

Aspek organisasi dan managemen IRT peserta pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 77.

Tabel 77 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut aspek organisasi dan manajemen sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Aspek Organisasi dan Manajemen	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Company Profile	0	36
Misi dan moto Usaha	0	36
Struktur Organisasi	2	36
Prosedur Kerja	0	0

Hasil pelaksanaan pendampingan terkait pentingnya *company profile* dan misi-motto IRT menunjukkan bahwa sebelum pendampingan seluruh IRT peserta pendampingan tidak memiliki dan setelah mendapat pendampingan seluruh IRT peserta pendampingan yaitu sebanyak 36 IRT menjadi memiliki *company profile* dan visi dan misi IRT. Sedangkan untuk kepemilikan struktur organisasi, kondisi awal terdapat 2 IRT yang memiliki struktur organisasi dan setelah pendampingan seluruh IRT peserta pendampingan memiliki struktur organisasi, yaitu terdapat penambahan sebanyak 94,4 persen.

Kotak 1 Motto dan Misi IRT peserta pendampingan (Bapak Asep, Kue Errysa)

**Motto:** Kue kering lezat sebagai cemilan favorit warga Banjaran

### 7.3.2.2. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Aspek organisasi dan manajemen IRT peserta pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 78.

Tabel 78 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut aspek organisasi dan manajemen sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis

Aspek Organisasi dan Manajemen	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Company Profile	0	34
Misi dan Motto	0	34
Struktur Organisasi	1	34
Prosedur Kerja	1	34

Perubahan aspek organisasi dan manajemen di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis yang mencakup *company profile*, visi dan misi IRT, dan prosedur kerja (*job description*) sebelum dan sesudah pendampingan sangat signifikan. Aspek *company profile* dan visi dan misi menunjukkan bahwa dari tidak ada IRT peserta pendampingan yang memiliki menjadi seluruhnya memiliki. Sedangkan aspek struktur organisasi dan *job description* menunjukkan

bahwa dari hanya 1 IRT peserta pendampingan yang memiliki menjadi seluruhnya memiliki, terjadi peningkatan sebesar 97 persen.

Kotak 2 Motto dan Misi IRT peserta pendampingan (Tiram Ruswandi, Keripik Jamur)

Motto: Menjadikan keripik jamur tiram makanan khas Ciamis

### 7.3.2.3. Hasil Pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Aspek organisasi dan manajemen IRT peserta pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 79. Aspek organisasi dan manajemen di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya yang mencakup *company profile*, visi dan misi IRT, dan prosedur kerja (*job description*) menunjukkan bahwa terdapat perubahan peningkatan yang signifikan dan yang tidak. Aspek *company profile* dan *job description* terjadi peningkatan 100 persen dan 97.7 persen. Sedangkan untuk perubahan kepemilikan visi dan misi terjadi peningkatan sebesar 94.9 persen dan peningkatan aspek struktur organisasi terjadi sebesar 30 persen.

Tabel 79 Sebaran IRT Peserta Pendampingan Menurut Aspek Organisasi dan Manajemen Sebelum dan Sesudah Pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Aspek Organisasi dan Manajemen	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Company Profile	0	43
Misi dan Motto	4	6
Struktur Organisasi	0	13
Prosedur Kerja	1	43

### 7.3.2.4. Hasil Pendampingan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Pelaksanaan pendampingan IRT di Kecamatan Sindangbarang ditujukan dan diarahkan agar seluruh IRT peserta pendampingan agar memiliki semua aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi dan manajemen IRT peserta pendampingan sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 80.

Tabel 80 Sebaran IRT menurut aspek organisasi dan manajemen IRT peserta pendampingan Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Aspek Organisasi dan Manajemen	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Company Profile	0	35
Misi dan Motto	0	35
Struktur Organisasi	16	35
Prosedur Kerja	0	35

Sebanyak 3 dari 4 pelatihan aspek organisasi dan manajemen yaitu *company profile*, visi dan misi IRT, dan prosedur kerja (*job description*) mengalami perubahan setelah pendampingan, dimana seluruh IRT peserta pendampingan tidak memiliki ketiga aspek tersebut menjadi memiliki setelah dilakukan pendampingan. Sedangkan aspek struktur organisasi mengalami peningkatan sebesar 54 % setelah pendampingan dibandingkan dengan kondisi awal.

Kotak 3 Visi, Misi dan Motto IRT IRT Peserta Pendampingan (Ali Sadikin, Lantak)

**Visi:** “Menjadi Produsen Makanan Ringan Terbesar se-kecamatan Sindangbarang”

**Misi:** Menambah kapasitas produksi, Perluasan distribusi produk, Meningkatkan promosi untuk meningkatkan permintaan

### 7.3.3. Aspek Tenaga Kerja

Aspek tenaga kerja industri rumah tangga merupakan aspek yang mengatur semua kegiatan tenaga kerja di industri rumah tangga tersebut. Pelaksanaan pendampingan ini mencakup 4 (empat) sub aspek tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja, aturan sistem upah atau gaji, penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*), dan rencana program pelatihan bagi tenaga kerja.

Aturan sistem upah atau gaji penting untuk menjelaskan adanya kepastian hak dan kewajiban tenaga kerja dalam IRT. Aturan *reward and punishment* penting untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja dimana yang berprestasi mendapat *reward*/hadiah dan yang lalai atau salah mendapat *punishment*/sanksi. Rencana Pelatihan bagi Tenaga Kerja penting untuk mengukur sejauh rencana IRT dalam peningkatan kemampuan tenaga kerjanya. Kemampuan tenaga kerja adalah hal penting dalam pengembangan IRT.

#### 7.3.3.1. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Dalam pelaksanaan pelatihan manajemen usaha kepada IRT peserta pendampingan, secara umum IRT sangat sadar akan pentingnya penanganan aspek tenaga kerja. Salah satu kunci sukses IRT adalah penanganan tenaga kerja

yang benar. Penanganan aspek tenaga kerja yang ditekankan adalah adanya aturan sistem upah dan gaji, aturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja. Jumlah industri rumah tangga yang mendapat dampingan di kecamatan Banjaran adalah sebanyak 36 IRT. Perubahan aspek tenaga kerja IRT peserta pendampingan sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 81.

Tabel 81 Sebaran IRT Menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Jenis Aspek Tenaga Kerja	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Jumlah Tenaga Kerja	198	214
Aturan Sistem Upah/Gaji	22	32
Aturan <i>Reward and Punishment</i>	20	29
Rencana Pelatihan Tenaga Kerja	2	14

Tabel 81 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 16 tenaga kerja dimana sebelum pendampingan jumlah total tenaga kerja sebanyak 198 orang dan setelah pendampingan jumlah tenaga kerja menjadi 214 orang. Penambahan tenaga kerja ini disebabkan oleh penambahan bahan baku dan penambahan order produk. Sama halnya dengan aturan sistem upah atau gaji, aturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja dimana ketiga aspek ini mengalami peningkatan IRT peserta dampingan yang sebelumnya tidak memiliki menjadi memiliki, yaitu dengan jumlah IRT yang bertambah dari 10 hingga 12 IRT peserta pendampingan. Hal ini diduga karena setelah pendampingan IRT peserta pendampingan lebih memahami penting aspek-aspek tersebut demi lancar dan berjalan baiknya usaha.

#### **7.3.3.2. Hasil Pendampingan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur**

Tabel 82 menunjukkan bahwa hasil pendampingan terhadap IRT peserta pendampingan terkait aspek tenaga kerja di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur berindikasi kepada peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengadaan aturan sistem upah/gaji. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terjadi adalah penambahan sebanyak 23 tenaga kerja dan pada aspek perubahan aturan sistem upah dan gaji terdapat 23 penambahan IRT peserta pendampingan yang memiliki aspek tersebut.

Tabel 82 Sebaran IRT menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Jenis Aspek Tenaga Kerja	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Jumlah Tenaga Kerja	63	89
Aturan Sistem Upah/Gaji	12	35
Aturan <i>Reward and Punishment</i>	0	0
Rencana Pelatihan Tenaga Kerja	0	0

Sedangkan untuk aturan penghargaan dan sangsi (*reward and punishment*) dan rencana pelatihan tenaga kerja, tidak terdapat perubahan pada kondisi sebelum dan sesudah pendampingan. Hal ini karena kondisi IRT peserta pendampingan di Kecamatan Sindangbarang umumnya berada pada skala usaha sangat mikro dan pelaku IRT umumnya orang yang sudah tua.

### 7.3.3.3. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Tabel 83 menunjukkan bahwa hasil pendampingan terhadap IRT peserta pendampingan terkait aspek tenaga kerja di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis mengalami perubahan yaitu peningkatan di keempat aspeknya yang meliputi jumlah tenaga kerja, sistem upah/gaji, aturan penghargaan dan sangsi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja. Tenaga kerja yang sebelumnya berjumlah 113, setelah pendampingan menjadi sebanyak 119 orang.

Tabel 83 Sebaran IRT Menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Jenis Aspek Tenaga Kerja	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Jumlah Tenaga Kerja	113	119
Aturan Sistem Upah/Gaji	0	34
Aturan <i>Reward and Punishment</i>	0	34
Rencana Pelatihan Tenaga Kerja	0	34

Perubahan/peningkatan yang sangat signifikan ditunjukkan oleh aspek aturan sistem upah/gaji, aturan penghargaan dan sangsi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja. Ketiga aspek ini mengalami peningkatan dimana pada awalnya atau sebelum pendampingan tidak ada IRT peserta pendampingan yang memiliki ketiga aspek tersebut, namun setelah pendampingan seluruh IRT peserta pendampingan memiliki aspek aturan sistem upah/gaji, aturan penghargaan dan sangsi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dan pemahaman tentang pentingnya pengaturan aspek tenaga kerja demi berjalan lancarnya usaha IRT peserta pendampingan adalah sangat baik.

#### 7.3.3.4. Hasil Pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Hasil pendampingan aspek tenaga kerja di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel 84. Dari empat aspek tenaga kerja, hanya terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja dan aturan system upah, sementara yang lainnya tidak terjadi peningkatan.

Tabel 84 Sebaran IRT menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Jenis Aspek Tenaga Kerja	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Jumlah Tenaga Kerja	114	115
Aturan Sistem Upah/Gaji	22	23
Aturan <i>Reward and Punishment</i>	6	6
Rencana Pelatihan Tenaga Kerja	3	3

#### 7.4. Pemasaran

Kegiatan pemasaran tidak dapat dipisahkan dari suatu siklus usaha, termasuk usaha yang dilakukan oleh industri rumah tangga. Pemasaran melingkupi segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai kepada konsumen. Dalam prakteknya kegiatan pemasaran akan berlangsung jika melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli atau pada pasar yang lebih kompleks adanya interaksi antara sekumpulan penjual dan sekumpulan pembeli. Dalam kegiatan pemasaran diperlukan adanya komunikasi, pertukaran informasi, perpindahan barang dan uang antar pembeli dan penjual. Agar sebuah usaha dapat menjalankan kegiatan pemasaran dengan baik perlu dilakukan dengan terencana, terarah, terorganisir dengan baik, serta dapat dilakukan evaluasi. Dalam hal inilah diperlukan manajemen pemasaran, termasuk bagi usaha kecil industri rumah tangga.

Pembinaan yang dilakukan terhadap IRT peserta pendampingan adalah memberi pengertian dan pemahaman manajemen pemasaran dalam praktek usaha yang dijalankan. Cakupan pembinaan aspek pemasaran yang diberikan kepada IRT meliputi pengertian pemasaran dan manajemen pemasaran, bauran pemasaran, pengenalan jenis jenis pasar, segemen pasar, konsep tentang produk, keunggulan produk, cara distribusi produk, celah dan peluang pasar, bagaimana melakukan promosi serta pengenalan pada kegiatan pemasaran melalui internet (*internet marketing*).

##### 7.4.1. Kegiatan Pemasaran Oleh IRT peserta pendampingan

Industri rumah tangga yang menjadi binaan telah melakukan kegiatan pemasaran menurut kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing IRT.

Kemampuan pemasaran dari IRT dapat dilihat dari jangkauan wilayah pemasaran yang dilakukan, nilai omset pemasaran, dan promosi yang dilakukan. Bila dilihat berdasarkan jangkauan wilayah pemasarannya sebahagian besar IRT (43,9%) melakukan pemasaran pada wilayah kecamatan, diikuti oleh IRT yang memiliki pemasaran di wilayah kabupaten (18,0%), memaarkan di wilayah desa (15,5%), ke luar daerah/luar propinsi (8,1%), di Kabupaten dan Luar Daerah (7,4%), hanya dipasarkan di tempat, melalu tengkulak (3,4%), di Kecamatan dan Kabupaten (2%) dan sebahagan kecil IRT (0,7%) ada yang sudah memasarkan ke luar negeri, khususnya produk kerajinan. Sebaran IRT peserta pendampingan menurut wilayah pemasaran dapat dilihat pada **Tabel 85**.

Tabel 85 Sebaran IRT (%) menurut wilayah pemasaran

Uraian	Bandung	Ciamis	Tasikmalaya	Cianjur	Total
Wilayah Pemasaran					
Tengkulak	0	14.7	0	0	3.4
Desa	0	20.6	4.7	40	15.5
Kecamatan	33.3	47.1	51.2	42.9	43.9
Kabupaten	36.1	11.8	11.6	17.1	18.9
Kecamatan dan Kabupaten	8.3	0	0	0	2
Kecamatan dan Luar Negeri	0	2.9	0	0	0.7
Kabupaten dan Luar Daerah	11.1	2.9	14	0	7.4
Luar Daerah	11.1	0	18.6	0	8.1
Total	100	100	100	100	100

Konsep dasar yang melandasi kegiatan pemasaran adalah adanya kebutuhan manusia dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pemasaran adalah konsumen mengerti dan tertarik pada produk yang ditawarkan. Dalam ilmu pemasaran, dikenal adanya elemen 4 P atau merupakan singkatan dari product (produk), promotion (promosi), place (tempat pemasaran) dan price (harga).

Promosi adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mengenalkan dan juga membujuk para calon pembeli agar mau mengeluarkan uang buat membeli produk. Kegiatan promosi dapat dilakukan melalui iklan, melalui publikasi, melalui promosi penjualan (sales promotion), dan melalui penjualan sendiri (personal selling) ata penjualan langsung (direct selling).

*Place* artinya tempat penjualan produk dan menyangkut strategi distribusi yang lakukan. Terdapat tiga model distribusi, yakni distribusi eksklusif, distribusi selektif, dan distribusi intensif. Distribusi eksklusif hanya memasarkan produk dan jasa pada outlet yang terbatas guna menjaga prestise dan reputasi produk. Distribusi selektif adalah rangkaian produk yang hanya dijual di outlet tertentu. Sementara distribusi intensif merupakan produk yang dipasarkan ke seluruh jenis pasar, baik modern ataupun tradisional, dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

*Pricing* adalah menyangkut strategi dalam menetapkan harga produk. Tiga strategi penetapan harga, pertama harga ditetapkan berdasarkan berdasarkan biaya, dimana pemasar menentukan harga dengan menghitung biaya-biaya, biaya overhead, dan kemudian menambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Strategi kedua adalah harga berdasarkan permintaan, atau pemasar menentukan harga setelah meneliti keinginan konsumen dan memastikan range harga yang dapat diterima oleh target pasar. Strategi ketiga harga berdasar pola persaingan, dimana harga ditentukan berdasar kondisi harga yang ditawarkan oleh pesaing. Harga dapat ditetapkan berada di bawah pasar, sesuai pasar, atau di- atas pasar, tergantung pada kesediaan pelanggan, reputasi, dan kondisi lingkungan persaingan.

Industri rumah tangga (IRT) binaan sudah menerapkan bauran pemasaran sebagaimana tersebut di atas dengan karakteristiknya masing-masing. Bila dilihat berdasarkan kegiatan promosi yang dilakukan, sebahagian besar IRT (52,7%) melakukan promosi penjualan langsung (*direct selling*), sebahagian lainnya IRT melakukan promosi dari mulut ke mulut atau personal selling (35,1%) yang banyak dilakukan IRT di Kabupaten Cianjur. Promosi melalui iklan atau publikasi sangat sedikit sekali (0,7%). Sebaran IRT peserta pendampingan menurut promosi yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 86.

Tabel 86 Sebaran IRT (%) menurut promosi yang dilakukan sebelum pendampingan

Promosi yang dilakukan saat ini	Bandung	Ciamis	Tasikmalaya	Cianjur	Total
Brosur	0	0	2.3	0	0.7
Distributor	0	0	0	8.6	2
Pintu ke Pintu	0	0	2.3	5.7	2
Langsung	69.4	58.8	62.8	8.6	52.7
Mulut ke Mulut	19.4	38.2	18.6	68.6	35.1
Pameran	5.6	0	0	0	1.4
Brosur dan catalog	0	0	2.3	0	0.7
Katalog, Distributor, dan Sales	0	0	2.3	0	0.7
Langsung dan Kemasan	0	0	2.3	0	0.7
Majalah Priangan dan <i>Yellow Pages</i>	2.8	0	0	0	0.7
Menyebarkan Kartu Nama, Mulut ke Mulut, dan Langsung	0	0	0	2.9	0.7
Mulut ke Mulut dan Distributor	0	0	0	2.9	0.7
Mulut ke Mulut dan Pemasangan Plang Perusahaan di Depan Gang	2.8	0	0	0	0.7
Pameran, Langsung, Mulut ke Mulut, dan Kemasan	0	0	2.3	0	0.7
Penitipan sample pada rumah makan	0	2.9	0	0	0.7
Total	100	100	100	100	100

Promosi yang dilakukan oleh IRT yang sebagian besar melalui promosi langsung dan dari mulut ke mulut memiliki keterbatasan jangkauan baik dari segi jumlah sasaran konsumen yang dicapai maupun lokasi sasaran pemasaran yang dapat dituju. Kegiatan promosi melalui iklan dan papan nama usaha baru dilakukan oleh sebahagian kecil IRT (2,8%) yang berada diperkotaan di Kabupaten Bandung. Demikian juga kegiatan pameran baru diikuti oleh sebahagian kecil IRT (5,6%) di Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa IRT memerlukan bantuan pihak lain dalam memperluas pasar produknya. Diantara-upaya upaya yang dapat dilakukan adalah pemberian akses pemanfaatan internet bagi IRT, mengikutsertakan IRT pada program promosi berkala yang dilakukan disetiap wilayah semacam pameran atau bazar, atau mencarikan mitra dengan usaha yang lebih besar.

#### 7.4.2. Pemasaran melalui Internet (*Internet Marketing*)

Dalam kegiatan pembinaan industri rumah tangga juga diperkenalkan dan dipraktekkan cara pemasaran melalui internet. Bila dilihat berdasarkan pemanfaatan internet oleh IRT peserta pendampingan dalam memasarkan atau mempromosikan produk, masih sangat sedikit sekali IRT yang memanfaatkan internet untuk kegiatan usahanya. Dokumentasi website disajikan pada Lampiran 9. Pemanfaatan internet untuk kegiatan promosi hanya dilakukan oleh 2,8 persen IRT, yaitu oleh IRT yang berdomisili di Kabupaten Bandung dan sebahagian besar IRT lainnya (99,3%) belum memanfaatkan internet. Setelah dilakukan pembinaan seluruh IRT difasilitasi dan diberi akses untuk dapat mempromosikan produknya melalui internet. Sebaran IRT peserta pendampingan berdasarkan pemanfaatan internet untuk kegiatan pemasaran sebelum dan setelah pembinaan dapat dilihat dilihat pada Tabel 87.

Tabel 87 Sebaran IRT berdasarkan pemanfaatan internet untuk kegiatan pemasaran (sebelum dan setelah pembinaan)

Uraian	Bandung	Ciamis	Tasikmalaya	Cianjur	Total
Promosi internet sebelum pembinaan					
Iya	2.8	0	0	0	07
Tidak	97.2	100	100	100	99.3
Total	100	100	100	100	100
Promosi internet sesudah pembinaan					
Iya	100	100	100	100	100
Total	100	100	100	100	100

Untuk memperkenalkan manfaat internet dalam kegiatan pemasaran masing-masing IRT diminta membuat contoh produk dan membuat foto produknya untuk ditampilkan pada website. Dalam rangka pembinaan IRT melalui kegiatan RR2 Jawa Barat bagi IRT peserta pendampingan diberi akses dan dibuatkan website yang nantinya dapat dikelola sendiri oleh kelompok IRT di setiap lokasi binaan. Memperkenalkan dan memberikan akses pemasaran melalui internet merupakan salah satu upaya meningkatkan dan memperluas jangkauan pemasaran produk IRT. Melalui web site yang disediakan disetiap daerah

binaan, IRT dapat memanfaatkannya untuk kegiatan pemasaran, promosi, dan memungkinkan juga terjadinya transaksi jual beli. Penyediaan akses pemasaran melalui internet bagi IRT memiliki beberapa keunggulan, yaitu (1) mudah untuk dilakukan, (2) biaya pemasaran/promosi murah, (3) dapat berfungsi sebagai toko online, (4) promosi dapat berlangsung 24 jam tanpa harus menyita waktu pelaku usahanya, (5) dapat dilakukan interaktif (via email, chat dan lainnya), dan (6) dapat diperbaharui dengan biaya murah sesuai dengan perkembangan produk IRT

Harga pokok produksi atau biaya produksi per sekali produksi produk industri rumah tangga di empat lokasi pendampingan ekonomi bervariasi. Tabel 88 menunjukkan selang harga pokok produksi produk pangan di empat lokasi pendampingan. Persentase terbesar harga pokok produksi produk pangan berada pada selang biaya kurang dari Rp 200.000 yaitu sebesar 37.3 persen. Produk pangan yang harga pokok produksinya berada pada selang tersebut adalah telur asin, jamur, cincau, dan gula. Persentase terbesar kedua harga pokok produksi berada pada selang Rp 200.000 hingga Rp 500.000 sebesar 29.3 persen dengan produk pangan yang meliputi tahu dan tempe, opak dan kolontong, dan kue. Sebesar 17.7 persen produk pangan yang meliputi wajit, kerupuk dan keripik, dan coklat berada pada selang harga produksi Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000. Selain itu, terdapat 15.6 persen produk pangan yang harga pokok produksinya lebih dari Rp 2.000.000 per tiap kali melakukan proses produksi, yang antara lain produk pangan pada usaha dodol dan hieler beras.

Tabel 88 Sebaran IRT menurut HPP (harga pokok produksi, ribu rupiah) produk pangan

HPP	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<200	12.6	41.6	49.9	43.6	37.3
200-500	37.5	45.9	4.5	28	29.3
500-2.000	25	4.2	22.7	18.7	17.7
>2.000	25.1	8.4	22.7	9.3	15.6
Total	100	100	100	100	100
Rataan	1.086	434	3.480	636,5	1.307
Min -Maks	44-5.760	20-3.000	26-40.000	14-3.983	14-40.000

Tabel 89 menunjukkan selang harga pokok produksi produk non pangan di empat lokasi pendampingan. Persentase terbesar harga pokok produksi produk pangan berada pada selang biaya kurang dari Rp 200.000 yaitu sebesar 56.5 persen. Produk non pangan yang harga pokok produksinya berada pada selang tersebut adalah besek, bongsang, arang, bata, dan impun. Persentase terbesar kedua harga pokok produksi berada pada selang Rp 200.000 hingga Rp 500.000 sebesar 23.9 persen dengan produk pangan yang antara lain boneka. Sebesar 17.3 persen produk non pangan yang meliputi kerajinan, gitar, dan meubel berada pada selang harga produksi Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000. Selain itu, terdapat 2.2 persen produk pangan yang harga pokok produksinya lebih dari Rp 2.000.000 per tiap kali melakukan proses produksi, yang antara lain produk pangan pada usaha tas dan jaket.

Tabel 89 Sebaran IRT menurut HPP (harga pokok produksi dalam ribu rupiah) produk non pangan

HPP	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<200	25	90.9	33.3	81.8	56.5
200-500	16.6	9.1	24.9	18.2	17.3
500-2.000	50	0	41.6	0	23.9
>2.000	8.3	0	0	0	2.2
Total	100	100	100	100	100
Rata-rata	3.931	81,2	633,9	104,8	1.235
Min-Maks	63-37.000	30-215	75-2.100	14-443	14-37.000

Keuntungan yang diperoleh dari usaha industri rumah tangga binaan beragam, dari puluhan ribu hingga jutaan. Tabel 90 memaparkan selang keuntungan yang diperoleh industri rumah tangga produk pangan binaan. Persentase terbesar keuntungan yang diperoleh berada pada selang kurang dari Rp 100.000 (45.1%), dengan produk pangan yang antara lain wajit, tempe dan tahu, opak dan kolontong, jamur. Persentase kedua terbesar berada pada selang Rp. 100.000 hingga Rp 500.000 (37.4%), dengan produk pangan yang antara lain gurame dan aneka kue. Kemudian terdapat 12.7 persen indutri rumah tangga yang berada pada selang keuntung lebih dari Rp. 1.000.000, produk pangan tersebut antara lain minyak kelapa dan hueler beras. Persentase terkecil (4.9%) keuntungan industri rumah tangga produk pangan binaan berada pada selang Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 yaitu produk dodol, kerupuk dan keripik.

Tabel 90 Sebaran IRT pangan (%) menurut keuntungan (dalam ribu rupiah)

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<100	50.1	41.8	27.2	56.2	45.1
100-500	33.4	41.7	45.4	31.1	37.4
500-1.000	12.5	0	0	6.2	4.9
>1.000	4.2	16.7	27.3	6.2	12.7
Total	100	100	100	100	100
Rataan	351977	765012.5	2169277	2669066	1514159
Min -Maks	13-3.642	20-6.300	14-25.000	18-49.456	13-49.456

Tabel 91 menunjukkan selang keuntungan yang diperoleh industri rumah tangga produk non pangan binaan. Persentase terbesar keuntungan yang diperoleh berada pada selang kurang dari Rp 100.000 (39.1%), dengan produk non pangan antara lain boboko, bilik, bongsang, dan besek. Persentase kedua terbesar berada pada selang Rp. 100.000 hingga Rp 500.000 (34.7%), dengan produk non pangan antara lain kerajinan, meubel, dan gipsum. Kemudian terdapat masing-masing 13 persen indutri rumah tangga produk non pangan yang memperoleh keuntungan pada selang Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 dan lebih dari Rp. 1.000.000. Industri rumah tangga binaan dengan keuntungan Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 antara lain industry kopra dan bata, sedangkan industri rumah tangga binaan dengan keuntungan lebih dari Rp.1.000.000 adalah industri jaket dan tas.

Tabel 91 Sebaran IRT non pangan (%) menurut keuntungan (dalam ribu rupiah)

Keuntungan	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<100	24.9	45.5	16.6	72.7	39.1
100-500	50	54.6	16.6	18.2	34.7
500-1.000	8.3	0	33.3	9.1	13
>1.000	16.7	0	33.3	0	13
Total	100	100	100	100	100
Rataan	1862333	130454.5	1137917	124026	843527.96
Min -Maks	30-17.000	30-385	35-5.875	20-587	20-17.000

Peningkatan produktivitas sejalan dengan peningkatan pendapatan dan peningkatan keuntungan. Berikut adalah peningkatan produktivitas yang dialami oleh IRT peserta pendampingan setelah mendapatkan dana stimulan. Rata-rata peningkatan produktivitas IRT peserta pendampingan di 4 lokasi, yaitu sebesar 52.1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan dan pemberian dana stimulan mampu meningkatkan rata-rata produktivitas, pendapatan dan keuntungan sebanyak 52,1 persen. Dari seluruh IRT peserta pendampingan sebanyak 33 persen mengalami kenaikan produktivitas antara 20-50 persen. Selain itu, sebanyak 13,7 persen IRT peserta pendampingan mengalami kenaikan produktivitas lebih dari 100 persen. Nilai maksimal peningkatan produktivitas IRT peserta pendampingan adalah 500 persen, yaitu pada salah satu IRT peserta pendampingan di Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak 134 IRT peserta pendampingan pangan non pangan yang mendapatkan bantuan modal usaha dan alat produksi diharapkan mampu mengalami peningkatan produktivitas. Pemberian modal usaha bagi IRT peserta pendampingan berupa bahan baku mampu secara langsung meningkatkan produktivitas IRT peserta pendampingan. Pemberian modal usaha berupa alat produksi mampu meningkatkan keefektifan dan keefisienan pekerjaan IRT peserta pendampingan sehingga produktivitas IRT peserta pendampingan menjadi meningkat. Akan tetapi, ada 14 IRT peserta pendampingan yang tidak mengalami peningkatan produktivitas secara langsung setelah program pendampingan selesai. Hal ini disebabkan bantuan yang diberikan kepada IRT tersebut lebih bersifat investasi yang dampaknya belum bisa langsung dilihat. Hal ini terjadi pada IRT peserta pendampingan dengan jenis produk gula aren, IRT diberi bibit aren yang harus ditanam dan baru bisa dipanen 5 hingga 8 tahun ke depan dan juga pada IRT peserta pendampingan yang mendapat bantuan berupa aspek legal dan studi banding ke luar daerah.

Tabel 92 Sebaran IRT (%) menurut Peningkatan Produktivitas (N=134)

Peningkatan Produktivitas	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasik	Total
< 20	8.3	54.5	47.1	32.2	35
20.1-50	61.1	27.3	20.5	19.3	32.9
50.1-100	25	9.1	23.5	41.9	24.6
>100.1	5.6	9.1	8.8	6.4	13.7
Total	100	100	100	100	100
Rata-rata	52.6	38.87	44.01	74.33	52.1
Min-Maks	11.12	0-200	0-150	0-500	0-500

Peningkatan produktivitas akan meningkatkan pendapatan IRT peserta binaan. Akan tetapi, terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi peningkatan produktivitas dan pendapatan. Kendala yang dialami IRT peserta pendampingan dipengaruhi berbagai faktor yang menunjang proses produksi maupun di luar proses produksi. Tabel 93 menyajikan sebaran IRT menurut kendala yang dihadapi IRT peserta pendampingan.

Tabel 93 Sebaran IRT (%) menurut kendala yang dihadapi

Jenis Kendala	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasik	Total
Keterampilan	2.9	0	0	9.3	3.4
Bahan baku	5.7	2.9	2.9	2.3	3.4
Hutang	0	0	0	2.3	0.7
Kesehatan	0	16.2	5.9	13.9	9.6
Kesempatan	0	0	0	2.3	0.7
Lokasi	0	5.8	0	0	1.4
Modal	82.9	57.1	63.7	37.2	58.5
Musim	0	0	2.9	0	0.7
Pemasaran	5.7	5.8	5.9	7	6.1
Peralatan	0	2.9	2.9	0	1.4
Persaingan	0	0	2.9	0	0.7
Pohon masih sewa	0	0	8.8	0	2
Produk usaha yang suka gagal	0	0	2.9	0	0.7
Tenaga kerja	0	5.8	2.9	0	2.1
Waktu kerja	0	0	0	25.6	7.5
Tidak ada kendala	2.9	2.9	0	0	1.4
Total	100	100	100	100	100

Lebih dari setengah (58.5%) IRT peserta pendampingan di 4 lokasi mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam usaha adalah faktor modal. Modal menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan produksi dan penghasilan. Bahkan sebanyak 82.9 persen IRT peserta pendampingan di Kabupaten Bandung mengatakan bahwa modal menjadi faktor penghambat meningkatnya pendapatan, begitu juga di lokasi lainnya, persentase terbesar yang menjadi kendala adalah faktor modal. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan oleh peserta pendampingan adalah bantuan modal usaha baik berupa bahan baku maupun alat produksi. Selain itu, sebanyak 25.6 persen IRT peserta pendampingan di Kabupaten Tasikmalaya yang mengatakan waktu yang menjadi kendala sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatan.

## VIII. MANAGEMEN USAHA

### 7.2. Definisi Industri, Pelaku Usaha, dan Manajemen Usaha

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Menurut UU UMKM tahun 2008, usaha mikro memiliki kriteria (a) kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan (b) penjualan bersih tahunan maksimal Rp 300 juta (maksimal 25 juta per bulan). Jenis industri pada lokasi pendampingan umumnya merupakan industri yang berorientasi pada bahan baku (*supply oriented industry*), dimana jenis industri berdasarkan tempat bahan baku umumnya merupakan industri ekstraktif yaitu industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar.

Keberhasilan suatu industri rumah tangga adalah ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya dalam melakukan manajemen usaha. Dengan manajemen usaha yang benar dapat mengatur perusahaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pelaku industri rumah tangga harus memahami dan menguasai manajemen usaha. Pengertian manajemen menurut H.Koontz O. Donnell adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Sedangkan menurut GR Terry, Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan pengendalian.

Tabel 71 Aspek-aspek perusahaan dalam industri rumah tangga

Aspek-aspek Industri Rumah Tangga			
1	Aspek Legal	4	Aspek Pemasaran
	SITU/HO		Gambaran umum pasar
	SIUP		Permintaan
	TDP		Penawaran
	TDI		Rencana Penjualan
	NPWP		Strategi Pemasaran
	PKP		Internet Marketing
	PIRT		
2	Aspek Organisasi dan Manajemen	5	Aspek Keuangan
	Company Profile		Laporan Keuangan
	Struktur Organisasi IRT		Proyeksi Laba Rugi
	Job Description		Proyeksi Arus Kas
	Visi dan misi company		Proyeksi Neraca
			Analisa Keuangan
			Proposal Bisnis
3	Aspek Produksi	6	Aspek Tenaga Kerja
	Katalog Produk		Jumlah Tenaga Kerja

Aspek-aspek Industri Rumah Tangga	
Bahan baku dan Pembantu	Reward and punishment
Proses Produksi /SOP	Pelatihan
Tata letak produksi	Sistem Upah
Alat dan Mesin Produksi	
Kapasitas Produksi	
QC/QA/GMP Produk	

Pelaku usaha menurut pengertian Pasal 1 angka 3 UU PK adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Maka secara sederhana pengertian manajemen usaha adalah mengatur dengan benar aspek-aspek perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan pengendalian (Tabel 71).

#### **7.5. Masalah Usaha yang Dihadapi IRT Binaan**

Industri rumah tangga peserta pendampingan di empat lokasi pendampingan ekonomi menghadapi masalah yang bervariasi dalam usahanya, antara lain keterbatasan modal, alat kerja, tidak memiliki izin usaha, sanitasi yang kurang, manajemen, teknik produksi, dan pemasaran yang kurang baik, dan masalah tentang harga produk maupun bahan baku. Analisis masalah IRT peserta pendampingan dibedakan berdasarkan produk pangan dan non pangan. Produk pangan IRT peserta pendampingan berjumlah 102 IRT yang meliputi jamur (6 IRT), keripik (20 IRT), temped an tahu (16 IRT), kue (15 IRT), gula (11 IRT), opak dan kolontong (18 IRT), dan produk pangan lainnya (16 IRT). Hasil analisis melalui data primer yang dikumpulkan menunjukkan bahwa lebih dari setengah IRT produk pangan menghadapi masalah kekurangan modal (53.9%) dan sanitasi (56.9%). Masalah lain yang cukup banyak dihadapi IRT produk pangan adalah manajemen (37.25%), pemasaran (28.9%), alat kerja dan teknik produksi yang masing-masing sebesar 25.5 persen, dan alat kerja (24.5%). Selain itu, terdapat beberapa IRT produk pangan yang menghadapi masalah terkait harga, baik harga produk maupun harga bahan baku dan bahan pembantu. IRT tersebut mengeluhkan tentang terus naiknya harga bahan baku dan bahan pembantu produk sedangkan harga jual produk tetap atau sulit untuk dinaikkan (Tabel 72).



## **7.6. Hasil Pendampingan Aspek-aspek Industri Rumah Tangga (IRT)**

Pelaksanaan pendampingan terhadap IRT korban gempa 2 September 2009 yang dilakukan adalah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh (enam) aspek industri rumah tangga. Sub bab ini menguraikan hasil pendampingan pada aspek legal, organisasi dan manajemen, dan aspek tenaga kerja.

### **7.6.1. Aspek Legal**

Aspek legal industri rumah tangga menunjukkan keabsahan industri rumah tangga tersebut dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek legal sangat penting untuk kepercayaan diri IRT dalam melakukan usahanya serta jaminan produk bagi konsumen. Terdapat 7 (tujuh) aspek legal dalam industri rumah tangga yang dilakukan pendampingan yaitu HO, SITU, SIUP, TDP, TDI, NPWP, PKP dan PIRT. Aspek legal HO menunjukkan izin tetangga, RT, desa, dan bahkan kecamatan untuk melaksanakan kegiatan usaha, dan biasanya dikeluarkan oleh kecamatan. Aspek legal SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) merupakan aspek legal dari Dinas Perdagangan untuk pemasaran produk. Aspek legal TDI (Tanda Daftar Industri) atau IUI (Izin Usaha Industri) merupakan aspek legal dari Dinas Perindustrian untuk melakukan kegiatan industri. Aspek legal NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Aspek legal PKP merupakan aspek legal yang menggambarkan Perusahaan Kena Pajak. NPWP dan PKP sangat penting bagi IRT untuk masuk produk kepada perusahaan-perusahaan besar yang mewajibkan adanya pembayaran pajak. Aspek legal PIRT merupakan aspek legal dari Dinas Kesehatan untuk IRT. IRT Pangan tanpa PIRT menunjukkan tidak ada jaminan produk pangan dari dinas kesehatan terhadap produk. Urutan tingkatan aspek legal adalah (1) HO dan SITU, (2) TDI/IUI, SIUP, dan TDP, (3) PIRT khusus untuk IRT pangan, dan (4) NPWP/ PKP. IRT tanpa HO dan SITU maka IRT tidak boleh beroperasi. IRT akan dibina langsung baik pelatihan dan bantuan-bantuan lainnya dari dinas perindustrian dan perdagangan kalau memiliki izin terkait. Bantuan pemerintah sangat besar bagi IRT yang sudah memiliki izin. Aspek legal PIRT merupakan aspek legal dari Dinas Kesehatan untuk IRT yang menjamin dari dinas kesehatan bahwa produk tersebut layak dikonsumsi. Hasil elaborasi menunjukkan bahwa umumnya IRT belum memiliki perizinan yang lengkap untuk sebuah usaha.

#### **7.6.1.1. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung**

Pelaksanaan pelatihan manajemen usaha terkait aspek legal kepada IRT peserta pendampingan memberikan pemahaman dan kesadaran bagi IRT peserta pendampingan akan pentingnya semua aspek legal bagi kemajuan usaha. Bagi beberapa IRT pangan peserta pendampingan yang memiliki urgensi dalam

pembuatan ijin dilakukan pendampingan untuk mendapatkan aspek legal terutama HO/SITU, NPWP dan PIRT (Depkes). Bagi industri rumah tangga pangan, aspek legal PIRT sangat penting bagi jaminan konsumen, sehingga diharapkan akan memperlancar pemasaran produk.

Pengurusan HO di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung diberikan oleh kecamatan tanpa ada biaya dengan persyaratan KTP. Biaya pengurusan SITU, TDP, dan SIUP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung sebesar seratus ribu rupiah dengan persyaratan pengisian formulir isian, foto 4x6, fotokopi KTP, KK, PBB, dan NPWP. Biaya pengurusan NPWP di kantor pelayanan pajak sebesar lima puluh ribu rupiah dengan syarat pengisian formulir dan fotokopi KTP. Biaya pengurusan PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebesar lima ratus ribu rupiah (Rp 500 000,00) dengan syarat pengisian formulir, foto, fotokopi KTP, KK, NPWP, dan pelatihan selama 2 hari yang dilaksanakan oleh audit. Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan Sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 74.

Tabel 74 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung

Kepemilikan Perijinan	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
HO/SITU	6	15
SIUP	4	11
TDP	2	10
TDI	1	1
NPWP	3	9
PKP	1	1
PIRT	6	13

Kepemilikan ijin IRT peserta pendampingan atas aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran ada yang mengalami perubahan dan ada yang tetap. Tabel 74 menunjukkan bahwa kepemilikan IRT peserta pendampingan aspek legal TDI dan PKP tetap, sedangkan untuk aspek legal HO/SITU, SIUP, TDP, NPWP, dan PIRT mengalami perubahan yaitu meningkat. Peningkatan 5 (lima) aspek legal tersebut cukup tinggi, yaitu terdapat peningkatan 6 (enam) hingga 9 (sembilan) IRT peserta pendampingan. Peningkatan kepemilikan ijin usaha ini diasumsikan karena peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya aspek legal demi keamanan dan kelancaran usaha.

#### 7.6.1.2. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Pelaksanaan pelatihan manajemen usaha terkait aspek legal kepada IRT peserta pendampingan memberikan menjadi pengetahuan tentang pentingnya aspek legal bagi kemajuan usaha. Sebagian besar pelaku IRT di Kecamatan Banjarsari

berada pada kelompok usia yang sudah tua dengan skala usaha mikro sekali, sehingga aspek legal atau perizinan dianggap belum terlalu penting karena lebih mengutamakan untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Namun terdapat 1 (satu) IRT peserta pendampingan yang didampingi dalam perolehan aspek legal, yaitu usaha *crisphy* jamur dimana ijin dianggap penting demi kemungkinan sukses usaha di masa yang akan datang.

Biaya pengurusan HO di kecamatan Banjarsari adalah minimal Rp 150 000,00 untuk luasan usaha 1 m<sup>2</sup> dengan syarat memperoleh tanda persetujuan minimal dari 4 orang untuk tetangga depan, belakang, kiri, dan kanan. Biaya pengurusan SIUP sebesar Rp 300 000,00 dan biaya pengurusan TDP sebesar Rp 450 000,00 yang diurus oleh pihak kecamatan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis, dan biaya pengurusan NPWP sebesar Rp 50 000,00. Jumlah industri rumah tangga yang mendapat pendampingan di Kecamatan Banjaran adalah sebanyak 34 IRT. Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan Sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Cianjur disajikan pada Tabel 75.

Tabel 75 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis

Kepemilikan Perijinan	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
HO/SITU	3	3
SIUP	3	3
TDP	2	3
TDI	1	1
NPWP	4	5
PKP	0	0
PIRT	0	0

Kepemilikan ijin IRT peserta pendampingan atas aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari tidak signifikan. Tabel 75 menunjukkan bahwa kepemilikan IRT peserta pendampingan aspek legal yang berubah hanya TDP dan NPWP dengan peningkatan kepemilikan ijin 1 IRT. Perubahan yang tidak signifikan disebabkan ijin belum dianggap sebagai prioritas karena pelaku IRT menganggap biaya yang cukup besar untuk pengurusan ijin lebih baik digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

#### 7.3.1.5. Hasil Pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Skala usaha IRT peserta pendampingan di Kecamatan Cisayong pada umumnya merupakan usaha dengan skala mikro. Oleh karena itu, sebagian besar IRT peserta pendampingan belum memahami makna pentingnya aspek legal atau perizinan.

Biaya pengurusan HO, NPWP, SIUP, TDP dan IUI dilakukan kolektif oleh pihak kecamatan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan biaya total Rp 1.250.000,-. Dan biaya pengurusan PIRT langsung dari Dinas Kesehatan sebesar Rp 400.000,- dengan persyaratan adalah pengisian formulir, fotocopy KTP, KK, Denah lokasi, usaha dan bangunan dan flowchart usaha. Jumlah industri rumah tangga yang mendapat dampingan di kecamatan Cisayong adalah sebanyak 43 IRT. Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada **Tabel 76**.

Tabel 76 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut perubahan kepemilikan aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya

Kepemilikan Perijinan	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
HO/SITU	2	3
SIUP	0	1
TDP	0	1
TDI	0	1
NPWP	1	2
PKP	0	0
PIRT	1	2

Hasil dampingan aspek legal bagi IRT di Kecamatan Cisayong yang berubah hanya IRT Ade Tarmidi, yaitu dari tidak punya HO, SIUP, TDP, IUI, NPWP dan PIRT menjadi memiliki semua aspek legal tersebut. Sehingga akhir dampingan di Kecamatan Cisayong yang memiliki HO menjadi 3 IRT, memiliki SIUP menjadi 1 IRT, memiliki TDP menjadi 1 IRT, memiliki IUI menjadi 1 IRT, memiliki NPWP menjadi 2 IRT dan memiliki PIRT menjadi 2 IRT.

Kepemilikan ijin IRT peserta pendampingan atas aspek legal sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong tidak signifikan. Sebanyak 6 dari 7 aspek legal mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi hanya 1 IRT peserta pendampingan. Perubahan yang tidak signifikan disebabkan ijin belum dianggap sebagai prioritas karena pelaku IRT menganggap biaya yang cukup besar untuk pengurusan ijin lebih baik digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga disebabkan karena pengurusan yang harus dilakukan di kecamatan yang memiliki jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal pemilik usaha.

Akan tetapi sebenarnya pengurusan ijin dapat dilakukan secara gratis jika masing-masing instansi masih memiliki anggaran untuk hal tersebut. Sertifikat halal dan PIRT sebesar 300.000 rupiah, belum termasuk biaya untuk auditor. Uji untuk penentuan kadaluarsa produk ditentukan jenis produknya dan dapat mencapai 500.000 bahkan bisa lebih tergantung kesesuaian parameter dengan produk (sumber info dari BP-POM di bogor dan laboran PAU-IPB). Untuk perizinan SIUP dan SITU di tasik sudah tersedia kantor pelayanan perizinan

terpadu Pengurusan PIRT ada waiting list supaya minimal quota 30 orang dengan biaya 300.000 belum termasuk inspeksi (ransport, uang makan, dll).

#### **7.3.1.6. Hasil Pendampingan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur**

Kondisi sebagian besar IRT pendampingan di Kecamatan Sindangbarang dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha atau IRT sebatas bertahan hidup (*survival economic strategy*), sehingga pendampingan yang lebih pendampingan aspek legal bukan termasuk hal *urgent*. Meski demikian pelaksanaan pendampingan aspek legal IRT di Kecamatan Sindangbarang tetap dijalankan, namun lebih mengutamakan untuk mengingatkan akan pentingnya aspek legal bagi kemajuan usaha mereka. Oleh karena itu, tidak terdapat perubahan kepemilikan ijin sebelum dan sesudah pendampingan. Untuk aspek legal, kecamatan mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan biaya Rp 25 000,00. Pengurusan HO, SITU, TDP, TDI dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Cianjur. NPWP dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Cianjur, dan perizinan PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

#### **7.6.2. Aspek Organisasi dan Manajemen**

Aspek organisasi dan manajemen industri rumah tangga merupakan aspek yang mengatur bagaimana berjalannya kegiatan industri rumah tangga tersebut. Terdapat 4 (empat) sub aspek organisasi dan manajemen yang menjadi program pendampingan perbaikan kepada industri rumah tangga korban gempa. Sub aspek tersebut adalah keragaan Usaha (*Company Profile*), Visi dan Misi IRT, Struktur Organisasi dan prosedur kerja (Job Description). *Company Profile* menjelaskan identitas dan kapasitas dari perusahaan/IRT yang sangat diperlukan dalam promosi terutama dengan pihak distributor. Visi dan misi menggambarkan sejauh mana pendiri atau pemilik perusahaan/IRT mempunyai visi dan misi dalam menggerakkan usahanya. Dalam bahasa sederhana visi misi perusahaan diterjemahkan menjadi misi dan moto usaha Struktur organisasi menggambarkan bagaimana menjalankan operasional perusahaan/IRT. Job description (prosedur kerja) menggambarkan bagaimana prosedur kerja setiap orang pada struktur organisasi perusahaan/IRT.

##### **7.6.2.1. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung**

Aspek organisasi dan manajemen IRT peserta pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 77.

Tabel 77 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut aspek organisasi dan manajemen sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Aspek Organisasi dan Manajemen	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Company Profile	0	36
Misi dan moto Usaha	0	36
Struktur Organisasi	2	36
Prosedur Kerja	0	0

Hasil pelaksanaan pendampingan terkait pentingnya *company profile* dan misi-motto IRT menunjukkan bahwa sebelum pendampingan seluruh IRT peserta pendampingan tidak memiliki dan setelah mendapat pendampingan seluruh IRT peserta pendampingan yaitu sebanyak 36 IRT menjadi memiliki *company profile* dan visi dan misi IRT. Sedangkan untuk kepemilikan struktur organisasi, kondisi awal terdapat 2 IRT yang memiliki struktur organisasi dan setelah pendampingan seluruh IRT peserta pendampingan memiliki struktur organisasi, yaitu terdapat penambahan sebanyak 94,4 persen.

Kotak 1 Motto dan Misi IRT peserta pendampingan (Bapak Asep, Kue Errysa)

**Motto:** Kue kering lezat sebagai cemilan favorit warga Banjaran

#### 7.6.2.2. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Aspek organisasi dan manajemen IRT peserta pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 78.

Tabel 78 Sebaran IRT peserta pendampingan menurut aspek organisasi dan manajemen sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis

Aspek Organisasi dan Manajemen	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Company Profile	0	34
Misi dan Motto	0	34
Struktur Organisasi	1	34
Prosedur Kerja	1	34

Perubahan aspek organisasi dan manajemen di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis yang mencakup *company profile*, visi dan misi IRT, dan prosedur kerja (*job description*) sebelum dan sesudah pendampingan sangat signifikan. Aspek *company profile* dan visi dan misi menunjukkan bahwa dari tidak ada IRT peserta pendampingan yang memiliki menjadi seluruhnya memiliki. Sedangkan aspek struktur organisasi dan *job description* menunjukkan bahwa dari hanya 1 IRT peserta pendampingan yang memiliki menjadi seluruhnya memiliki, terjadi peningkatan sebesar 97 persen.

Kotak 2 Motto dan Misi IRT peserta pendampingan (Tiram Ruswandi, Keripik Jamur)

Motto: Menjadikan kerpik jamur tiram makanan khas Ciamis

### 7.6.2.3. Hasil Pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Aspek organisasi dan manajemen IRT peserta pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 79. Aspek organisasi dan manajemen di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya yang mencakup *company profile*, visi dan misi IRT, dan prosedur kerja (*job description*) menunjukkan bahwa terdapat perubahan peningkatan yang signifikan dan yang tidak. Aspek *company profile* dan *job description* terjadi peningkatan 100 persen dan 97.7 persen. Sedangkan untuk perubahan kepemilikan visi dan misi terjadi peningkatan sebesar 94.9 persen dan peningkatan aspek struktur organisasi terjadi sebesar 30 persen.

Tabel 79 Sebaran IRT Peserta Pendampingan Menurut Aspek Organisasi dan Manajemen Sebelum dan Sesudah Pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Aspek Organisasi dan Manajemen	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Company Profile	0	43
Misi dan Motto	4	6
Struktur Organisasi	0	13
Prosedur Kerja	1	43

### 7.6.2.4. Hasil Pendampingan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Pelaksanaan pendampingan IRT di Kecamatan Sindangbarang ditujukan dan diarahkan agar seluruh IRT peserta pendampingan agar memiliki semua aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi dan manajemen IRT peserta pendampingan sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 80.

Tabel 80 Sebaran IRT menurut aspek organisasi dan manajemen IRT peserta pendampingan Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Aspek Organisasi dan Manajemen	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Company Profile	0	35
Misi dan Motto	0	35
Struktur Organisasi	16	35
Prosedur Kerja	0	35

Sebanyak 3 dari 4 pelatihan aspek organisasi dan manajemen yaitu *company profile*, visi dan misi IRT, dan prosedur kerja (*job description*) mengalami perubahan setelah pendampingan, dimana seluruh IRT peserta pendampingan tidak memiliki ketiga aspek tersebut menjadi memiliki setelah dilakukan pendampingan. Sedangkan aspek struktur organisasi mengalami peningkatan sebesar 54 % setelah pendampingan dibandingkan dengan kondisi awal.

Kotak 3 Visi, Misi dan Motto IRT IRT Peserta Pendampingan (Ali Sadikin, Lantak)

**Visi:** “Menjadi Produsen Makanan Ringan Terbesar se-kecamatan Sindangbarang”

**Misi:** Menambah kapasitas produksi, Perluasan distribusi produk, Meningkatkan promosi untuk meningkatkan permintaan

### 7.6.3. Aspek Tenaga Kerja

Aspek tenaga kerja industri rumah tangga merupakan aspek yang mengatur semua kegiatan tenaga kerja di industri rumah tangga tersebut. Pelaksanaan pendampingan ini mencakup 4 (empat) sub aspek tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja, aturan sistem upah atau gaji, penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*), dan rencana program pelatihan bagi tenaga kerja.

Aturan sistem upah atau gaji penting untuk menjelaskan adanya kepastian hak dan kewajiban tenaga kerja dalam IRT. Aturan *reward and punishment* penting untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja dimana yang berprestasi mendapat *reward/hadiah* dan yang lalai atau salah mendapat *punishment/sangsi*. Rencana Pelatihan bagi Tenaga Kerja penting untuk mengukur sejauh rencana IRT dalam peningkatan kemampuan tenaga kerjanya. Kemampuan tenaga kerja adalah hal penting dalam pengembangan IRT.

#### 7.6.3.1. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Dalam pelaksanaan pelatihan manajemen usaha kepada IRT peserta pendampingan, secara umum IRT sangat sadar akan pentingnya penanganan aspek tenaga kerja. Salah satu kunci sukses IRT adalah penanganan tenaga kerja yang benar. Penanganan aspek tenaga kerja yang ditekankan adalah adanya aturan sistem upah dan gaji, aturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja. Jumlah industri rumah tangga yang mendapat dampingan di kecamatan Banjaran adalah sebanyak 36 IRT. Perubahan aspek tenaga kerja IRT peserta pendampingan sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 81.

Tabel 81 Sebaran IRT Menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Jenis Aspek Tenaga Kerja	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Jumlah Tenaga Kerja	198	214
Aturan Sistem Upah/Gaji	22	32
Aturan <i>Reward and Punishment</i>	20	29
Rencana Pelatihan Tenaga Kerja	2	14

Tabel 81 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 16 tenaga kerja dimana sebelum pendampingan jumlah total tenaga kerja sebanyak 198 orang dan setelah pendampingan jumlah tenaga kerja menjadi 214 orang. Penambahan tenaga kerja ini disebabkan oleh penambahan bahan baku dan penambahan order produk. Sama halnya dengan aturan sistem upah atau gaji, aturan penghargaan dan sangsi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja dimana ketiga aspek ini mengalami peningkatan IRT peserta pendampingan yang sebelumnya tidak memiliki menjadi memiliki, yaitu dengan jumlah IRT yang bertambah dari 10 hingga 12 IRT peserta pendampingan. Hal ini diduga karena setelah pendampingan IRT peserta pendampingan lebih memahami penting aspek-aspek tersebut demi lancar dan berjalan baiknya usaha.

#### 7.6.3.2. Hasil Pendampingan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Tabel 82 menunjukkan bahwa hasil pendampingan terhadap IRT peserta pendampingan terkait aspek tenaga kerja di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur berindikasi kepada peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengadaan aturan sistem upah/gaji. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terjadi adalah penambahan sebanyak 23 tenaga kerja dan pada aspek perubahan aturan sistem upah dan gaji terdapat 23 penambahan IRT peserta pendampingan yang memiliki aspek tersebut.

Tabel 82 Sebaran IRT menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Jenis Aspek Tenaga Kerja	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Jumlah Tenaga Kerja	63	89
Aturan Sistem Upah/Gaji	12	35
Aturan <i>Reward and Punishment</i>	0	0
Rencana Pelatihan Tenaga Kerja	0	0

Sedangkan untuk aturan penghargaan dan sangsi (*reward and punishment*) dan rencana pelatihan tenaga kerja, tidak terdapat perubahan pada kondisi sebelum

dan sesudah pendampingan. Hal ini karena kondisi IRT peserta pendampingan di Kecamatan Sindangbarang umumnya berada pada skala usaha sangat mikro dan pelaku IRT umumnya orang yang sudah tua.

#### 7.6.3.3. Hasil Pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Tabel 83 menunjukkan bahwa hasil pendampingan terhadap IRT peserta pendampingan terkait aspek tenaga kerja di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis mengalami perubahan yaitu peningkatan di keempat aspeknya yang meliputi jumlah tenaga kerja, sistem upah/gaji, aturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja. Tenaga kerja yang sebelumnya berjumlah 113, setelah pendampingan menjadi sebanyak 119 orang.

Tabel 83 Sebaran IRT Menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Jenis Aspek Tenaga Kerja	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Jumlah Tenaga Kerja	113	119
Aturan Sistem Upah/Gaji	0	34
Aturan <i>Reward and Punishment</i>	0	34
Rencana Pelatihan Tenaga Kerja	0	34

Perubahan/peningkatan yang sangat signifikan ditunjukkan oleh aspek aturan sistem upah/gaji, aturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja. Ketiga aspek ini mengalami peningkatan dimana pada awalnya atau sebelum pendampingan tidak ada IRT peserta pendampingan yang memiliki ketiga aspek tersebut, namun setelah pendampingan seluruh IRT peserta pendampingan memiliki aspek aturan sistem upah/gaji, aturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dan pemahaman tentang pentingnya pengaturan aspek tenaga kerja demi berjalan lancarnya usaha IRT peserta pendampingan adalah sangat baik.

#### 7.6.3.4. Hasil Pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Hasil pendampingan aspek tenaga kerja di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel 84. Dari empat aspek tenaga kerja, hanya terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja dan aturan sistem upah, sementara yang lainnya tidak terjadi peningkatan.

Tabel 84 Sebaran IRT menurut perubahan aspek tenaga kerja sebelum dan sesudah pendampingan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Jenis Aspek Tenaga Kerja	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Jumlah Tenaga Kerja	114	115
Aturan Sistem Upah/Gaji	22	23
Aturan <i>Reward and Punishment</i>	6	6
Rencana Pelatihan Tenaga Kerja	3	3

## 7.7. Pemasaran

Kegiatan pemasaran tidak dapat dipisahkan dari suatu siklus usaha, termasuk usaha yang dilakukan oleh industri rumah tangga. Pemasaran melingkupi segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai kepada konsumen. Dalam prakteknya kegiatan pemasaran akan berlangsung jika melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli atau pada pasar yang lebih kompleks adanya interaksi antara sekumpulan penjual dan sekumpulan pembeli. Dalam kegiatan pemasaran diperlukan adanya komunikasi, pertukaran informasi, perpindahan barang dan uang antar pembeli dan penjual. Agar sebuah usaha dapat menjalankan kegiatan pemasaran dengan baik perlu dilakukan dengan terencana, terarah, terorganisir dengan baik, serta dapat dilakukan evaluasi. Dalam hal inilah diperlukan manajemen pemasaran, termasuk bagi usaha kecil industri rumah tangga.

Pembinaan yang dilakukan terhadap IRT peserta pendampingan adalah memberi pengertian dan pemahaman manajemen pemasaran dalam praktek usaha yang dijalankan. Cakupan pembinaan aspek pemasaran yang diberikan kepada IRT meliputi pengertian pemasaran dan manajemen pemasaran, bauran pemasaran, pengenalan jenis jenis pasar, segemen pasar, konsep tentang produk, keunggulan produk, cara distribusi produk, celah dan peluang pasar, bagaimana melakukan promosi serta pengenalan pada kegiatan pemasaran melalui internet (*internet marketing*).

### 7.4.1. Kegiatan Pemasaran Oleh IRT peserta pendampingan

Industri rumah tangga yang menjadi binaan telah melakukan kegiatan pemasaran menurut kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing IRT. Kemampuan pemasaran dari IRT dapat dilihat dari jangkauan wilayah pemasaran yang dilakukan, nilai omset pemasaran, dan promosi yang dilakukan. Bila dilihat berdasarkan jangkauan wilayah pemasarannya sebahagian besar IRT (43,9%) melakukan pemasaran pada wilayah kecamatan, diikuti oleh IRT yang memiliki pemasaran di wilayah kabupaten (18,0%), memaarkan di wilayah desa (15,5%), ke luar daerah/luar propinsi (8,1%), di Kabupaten dan Luar Daerah (7,4%), hanya dipasarkan di tempat, melalu tengkulak (3,4%), di Kecamatan dan Kabupaten (2%) dan sebahagian kecil IRT (0,7%) ada yang sudah memasarkan ke

luar negeri, khususnya produk kerajinan. Sebaran IRT peserta pendampingan menurut wilayah pemasaran dapat dilihat pada **Tabel 85**.

**Tabel 85 Sebaran IRT (%) menurut wilayah pemasaran**

Uraian	Bandung	Ciamis	Tasikmalaya	Cianjur	Total
<b>Wilayah Pemasaran</b>					
Tengkulak	0	14.7	0	0	3.4
Desa	0	20.6	4.7	40	15.5
Kecamatan	33.3	47.1	51.2	42.9	43.9
Kabupaten	36.1	11.8	11.6	17.1	18.9
Kecamatan dan Kabupaten	8.3	0	0	0	2
Kecamatan dan Luar Negeri	0	2.9	0	0	0.7
Kabupaten dan Luar Daerah	11.1	2.9	14	0	7.4
Luar Daerah	11.1	0	18.6	0	8.1
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Konsep dasar yang melandasi kegiatan pemasaran adalah adanya kebutuhan manusia dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pemasaran adalah konsumen mengerti dan tertarik pada produk yang ditawarkan. Dalam ilmu pemasaran, dikenal adanya elemen 4 P atau merupakan singkatan dari product (produk), promotion (promosi), place (tempat pemasaran) dan price (harga).

Promosi adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mengenalkan dan juga membujuk para calon pembeli agar mau mengeluarkan uang buat membeli produk. Kegiatan promosi dapat dilakukan melalui iklan, melalui publikasi, melalui promosi penjualan (sales promotion), dan melalui penjualan sendiri (personal selling) ata penjualan langsung (direct selling).

*Place* artinya tempat penjualan produk dan menyangkut strategi distribusi yang lakukan. Terdapat tiga model distribusi, yakni distribusi eksklusif, distribusi selektif, dan distribusi intensif. Distribusi eksklusif hanya memasarkan produk dan jasa pada outlet yang terbatas guna menjaga prestise dan reputasi produk. Distribusi selektif adalah rangkaian produk yang hanya dijual di outlet tertentu. Sementara distribusi intensif merupakan produk yang dipasarkan ke seluruh jenis pasar, baik modern ataupun tradisional, dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

*Pricing* adalah menyangkut strategi dalam menetapkan harga produk. Tiga strategi penetapan harga, pertama harga ditetapkan berdasarkan berdasarkan biaya, dimana pemasar menentukan harga dengan menghitung biaya-biaya, biaya overhead, dan kemudian menambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Strategi kedua adalah harga berdasarkan permintaan, atau pemasar menentukan harga setelah meneliti keinginan konsumen dan memastikan range harga yang dapat diterima oleh target pasar. Strategi ketiga harga berdasar pola persaingan, dimana harga ditentukan berdasar kondisi harga yang ditawarkan oleh pesaing. Harga dapat ditetapkan berada di bawah pasar, sesuai pasar, atau di- atas pasar, tergantung pada kesetiaan pelanggan, reputasi, dan kondisi lingkungan persaingan.

Industri rumah tangga (IRT) binaan sudah menerapkan bauran pemasaran sebagaimana tersebut di atas dengan karakteristiknya masing-masing. Bila dilihat berdasarkan kegiatan promosi yang dilakukan, sebahagian besar IRT (52,7%) melakukan promosi penjualan langsung (*direct selling*), sebahagian lainnya IRT melakukan promosi dari mulut ke mulut atau personal selling (35,1%) yang banyak dilakukan IRT di Kabupaten Cianjur. Promosi melalui iklan atau publikasi sangat sedikit sekali (0,7%). Sebaran IRT peserta pendampingan menurut promosi yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 86.

Tabel 86 Sebaran IRT (%) menurut promosi yang dilakukan sebelum pendampingan

Promosi yang dilakukan saat ini	Bandung	Ciamis	Tasikmalaya	Cianjur	Total
Brosur	0	0	2.3	0	0.7
Distributor	0	0	0	8.6	2
Pintu ke Pintu	0	0	2.3	5.7	2
Langsung	69.4	58.8	62.8	8.6	52.7
Mulut ke Mulut	19.4	38.2	18.6	68.6	35.1
Pameran	5.6	0	0	0	1.4
Brosur dan catalog	0	0	2.3	0	0.7
Katalog, Distributor, dan Sales	0	0	2.3	0	0.7
Langsung dan Kemasan	0	0	2.3	0	0.7
Majalah Priangan dan <i>Yellow Pages</i>	2.8	0	0	0	0.7
Menyebarkan Kartu Nama, Mulut ke Mulut, dan Langsung	0	0	0	2.9	0.7
Mulut ke Mulut dan Distributor	0	0	0	2.9	0.7
Mulut ke Mulut dan Pemasangan Plang Perusahaan di Depan Gang	2.8	0	0	0	0.7
Pameran, Langsung, Mulut ke Mulut, dan Kemasan	0	0	2.3	0	0.7
Penitipan sample pada rumah makan	0	2.9	0	0	0.7
Total	100	100	100	100	100

Promosi yang dilakukan oleh IRT yang sebagian besar melalui promosi langsung dan dari mulut ke mulut memiliki keterbatasan jangkauan baik dari segi jumlah sasaran konsumen yang dicapai maupun lokasi sasaran pemasaran yang dapat dituju. Kegiatan promosi melalui iklan dan papan nama usaha baru dilakukan oleh sebahagian kecil IRT (2,8%) yang berada diperkotaan di Kabupaten Bandung. Demikian juga kegiatan pameran baru diikuti oleh sebahagian kecil IRT (5,6%) di Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa IRT memerlukan bantuan pihak lain dalam memperluas pasar produknya. Diantara-upaya upaya yang dapat dilakukan adalah pemberian akses pemanfaatan internet bagi IRT, mengikutsertakan IRT pada program promosi berkala yang dilakukan disetiap wilayah semacam pameran atau bazar, atau mencarikan mitra dengan usaha yang lebih besar.

#### 7.4.2. Pemasaran melalui Internet (*Internet Marketing*)

Dalam kegiatan pembinaan industri rumah tangga juga diperkenalkan dan dipraktekkan cara pemasaran melalui internet. Bila dilihat berdasarkan pemanfaatan internet oleh IRT peserta pendampingan dalam memasarkan atau mempromosikan produk, masih sangat sedikit sekali IRT yang memanfaatkan internet untuk kegiatan usahanya. Dokumentasi website disajikan pada Lampiran 9. Pemanfaatan internet untuk kegiatan promosi hanya dilakukan oleh 2,8 persen IRT, yaitu oleh IRT yang berdomisili di Kabupaten Bandung dan sebahagian besar IRT lainnya (99,3%) belum memanfaatkan internet. Setelah dilakukan pembinaan seluruh IRT difasilitasi dan diberi akses untuk dapat mempromosikan produknya melalui internet. Sebaran IRT peserta pendampingan berdasarkan pemanfaatan internet untuk kegiatan pemasaran sebelum dan setelah pembinaan dapat dilihat dilihat pada Tabel 87.

Tabel 87 Sebaran IRT berdasarkan pemanfaatan internet untuk kegiatan pemasaran (sebelum dan setelah pembinaan)

Uraian	Bandung	Ciamis	Tasikmalaya	Cianjur	Total
Promosi internet sebelum pembinaan					
Iya	2.8	0	0	0	07
Tidak	97.2	100	100	100	99.3
Total	100	100	100	100	100
Promosi internet sesudah pembinaan					
Iya	100	100	100	100	100
Total	100	100	100	100	100

Untuk memperkenalkan manfaat internet dalam kegiatan pemasaran masing-masing IRT diminta membuat contoh produk dan membuat foto produknya untuk ditampilkan pada website. Dalam rangka pembinaan IRT melalui kegiatan RR2 Jawa Barat bagi IRT peserta pendampingan diberi akses dan dibuatkan website yang nantinya dapat dikelola sendiri oleh kelompok IRT di setiap lokasi binaan. Meperkenalkan dan memberikan akses pemasaran melalui internet merupakan salah satu upaya meningkatkan dan memperluas jangkauan pemasaran produk IRT. Melalui web site yang disediakan disetiap daerah binaan, IRT dapat memanfaatkannya untuk kegiatan pemasaran, promosi, dan memungkinkan juga terjadinya transaksi jual beli. Penyediaan akses pemasaran melalui internet bagi IRT memiliki beberapa keunggulan, yaitu (1) mudah untuk dilakukan, (2) biaya pemasaran/promosi murah, (3) dapat berfungsi sebagai toko online, (4) promosi dapat berlangsung 24 jam tanpa harus menyita waktu pelaku usahanya, (5) dapat dilakukan interaktif (via emal, chat dan lainnya), dan (6) dapat diperbaharui dengan biaya murah sesuai denga perkembangan pruduk IRT

Harga pokok produksi atau biaya produksi per sekali produksi produk industri rumah tangga di empat lokasi pendampingan ekonomi bervariasi. Tabel 88 menunjukkan selang harga pokok produksi produk pangan di empat lokasi pendampingan. Persentase terbesar harga pokok produksi produk pangan berada pada selang biaya kurang dari Rp 200.000 yaitu sebesar 37.3 persen.

Produk pangan yang harga pokok produksinya berada pada selang tersebut adalah telur asin, jamur, cincau, dan gula. Persentase terbesar kedua harga pokok produksi berada pada selang Rp 200.000 hingga Rp 500.000 sebesar 29.3 persen dengan produk pangan yang meliputi tahu dan tempe, opak dan kolontong, dan kue. Sebesar 17.7 persen produk pangan yang meliputi wajit, kerupuk dan keripik, dan coklat berada pada selang harga produksi Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000. Selain itu, terdapat 15.6 persen produk pangan yang harga pokok produksinya lebih dari Rp 2.000.000 per tiap kali melakukan proses produksi, yang antara lain produk pangan pada usaha dodol dan hieler beras.

Tabel 88 Sebaran IRT menurut HPP (harga pokok produksi, ribu rupiah) produk pangan

HPP	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<200	12.6	41.6	49.9	43.6	37.3
200-500	37.5	45.9	4.5	28	29.3
500-2.000	25	4.2	22.7	18.7	17.7
>2.000	25.1	8.4	22.7	9.3	15.6
Total	100	100	100	100	100
Rataan	1.086	434	3.480	636,5	1.307
Min -Maks	44-5.760	20-3.000	26-40.000	14-3.983	14-40.000

Tabel 89 menunjukkan selang harga pokok produksi produk non pangan di empat lokasi pendampingan. Persentase terbesar harga pokok produksi produk pangan berada pada selang biaya kurang dari Rp 200.000 yaitu sebesar 56.5 persen. Produk non pangan yang harga pokok produksinya berada pada selang tersebut adalah besek, bongsang, arang, bata, dan impun. Persentase terbesar kedua harga pokok produksi berada pada selang Rp 200.000 hingga Rp 500.000 sebesar 23.9 persen dengan produk pangan yang antara lain boneka. Sebesar 17.3 persen produk non pangan yang meliputi kerajinan, gitar, dan meubel berada pada selang harga produksi Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000. Selain itu, terdapat 2.2 persen produk pangan yang harga pokok produksinya lebih dari Rp 2.000.000 per tiap kali melakukan proses produksi, yang antara lain produk pangan pada usaha tas dan jaket.

Tabel 89 Sebaran IRT menurut HPP (harga pokok produksi dalam ribu rupiah) produk non pangan

HPP	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<200	25	90.9	33.3	81.8	56.5
200-500	16.6	9.1	24.9	18.2	17.3
500-2.000	50	0	41.6	0	23.9
>2.000	8.3	0	0	0	2.2
Total	100	100	100	100	100
Rata-rata	3.931	81,2	633,9	104,8	1.235
Min-Maks	63-37.000	30-215	75-2.100	14-443	14-37.000

Keuntungan yang diperoleh dari usaha industri rumah tangga binaan beragam, dari puluhan ribu hingga jutaan. Tabel 90 memaparkan selang keuntungan yang

diperoleh industri rumah tangga produk pangan binaan. Persentase terbesar keuntungan yang diperoleh berada pada selang kurang dari Rp 100.000 (45.1%), dengan produk pangan yang antara lain wajit, tempe dan tahu, opak dan kolontong, jamur. Persentase kedua terbesar berada pada selang Rp. 100.000 hingga Rp 500.000 (37.4%), dengan produk pangan yang antara lain gurame dan aneka kue. Kemudian terdapat 12.7 persen industri rumah tangga yang berada pada selang keuntung lebih dari Rp. 1.000.000, produk pangan tersebut antara lain minyak kelapa dan hueler beras. Persentase terkecil (4.9%) keuntungan industri rumah tangga produk pangan binaan berada pada selang Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 yaitu produk dodol, kerupuk dan keripik.

Tabel 90 Sebaran IRT pangan (%) menurut keuntungan (dalam ribu rupiah)

Uraian	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<100	50.1	41.8	27.2	56.2	45.1
100-500	33.4	41.7	45.4	31.1	37.4
500-1.000	12.5	0	0	6.2	4.9
>1.000	4.2	16.7	27.3	6.2	12.7
Total	100	100	100	100	100
Rataan	351977	765012.5	2169277	2669066	1514159
Min -Maks	13-3.642	20-6.300	14-25.000	18-49.456	13-49.456

Tabel 91 menunjukkan selang keuntungan yang diperoleh industri rumah tangga produk non pangan binaan. Persentase terbesar keuntungan yang diperoleh berada pada selang kurang dari Rp 100.000 (39.1%), dengan produk non pangan antara lain boboko, bilik, bongsoang, dan besek. Persentase kedua terbesar berada pada selang Rp. 100.000 hingga Rp 500.000 (34.7%), dengan produk non pangan antara lain kerajinan, meubel, dan gipsum. Kemudian terdapat masing-masing 13 persen industri rumah tangga produk non pangan yang memperoleh keuntungan pada selang Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 dan lebih dari Rp. 1.000.000. Industri rumah tangga binaan dengan keuntungan Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 antara lain industri kopra dan bata, sedangkan industri rumah tangga binaan dengan keuntungan lebih dari Rp.1.000.000 adalah industri jaket dan tas.

Tabel 91 Sebaran IRT non pangan (%) menurut keuntungan (dalam ribu rupiah)

Keuntungan	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasikmalaya	Total
<100	24.9	45.5	16.6	72.7	39.1
100-500	50	54.6	16.6	18.2	34.7
500-1.000	8.3	0	33.3	9.1	13
>1.000	16.7	0	33.3	0	13
Total	100	100	100	100	100
Rataan	1862333	130454.5	1137917	124026	843527.96
Min -Maks	30-17.000	30-385	35-5.875	20-587	20-17.000

Peningkatan produktivitas sejalan dengan peningkatan pendapatan dan peningkatan keuntungan. Berikut adalah peningkatan produktivitas yang dialami oleh IRT peserta pendampingan setelah mendapatkan dana stimulan. Rata-rata

peningkatan produktivitas IRT peserta pendampingan di 4 lokasi, yaitu sebesar 52,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan dan pemberian dana stimulan mampu meningkatkan rata-rata produktivitas, pendapatan dan keuntungan sebanyak 52,1 persen. Dari seluruh IRT peserta pendampingan sebanyak 33 persen mengalami kenaikan produktivitas antara 20-50 persen. Selain itu, sebanyak 13,7 persen IRT peserta pendampingan mengalami kenaikan produktivitas lebih dari 100 persen. Nilai maksimal peningkatan produktivitas IRT peserta pendampingan adalah 500 persen, yaitu pada salah satu IRT peserta pendampingan di Kabupaten Tasikmalaya.

Sebanyak 134 IRT peserta pendampingan pangan non pangan yang mendapatkan bantuan modal usaha dan alat produksi diharapkan mampu mengalami peningkatan produktivitas. Pemberian modal usaha bagi IRT peserta pendampingan berupa bahan baku mampu secara langsung meningkatkan produktivitas IRT peserta pendampingan. Pemberian modal usaha berupa alat produksi mampu meningkatkan keefektifan dan keefisienan pekerjaan IRT peserta pendampingan sehingga produktivitas IRT peserta pendampingan menjadi meningkat. Akan tetapi, ada 14 IRT peserta pendampingan yang tidak mengalami peningkatan produktivitas secara langsung setelah program pendampingan selesai. Hal ini disebabkan bantuan yang diberikan kepada IRT tersebut lebih bersifat investasi yang dampaknya belum bisa langsung dilihat. Hal ini terjadi pada IRT peserta pendampingan dengan jenis produk gula aren, IRT diberi bibit aren yang harus ditanam dan baru bisa dipanen 5 hingga 8 tahun ke depan dan juga pada IRT peserta pendampingan yang mendapat bantuan berupa aspek legal dan studi banding ke luar daerah.

Tabel 92 Sebaran IRT (%) menurut Peningkatan Produktivitas (N=134)

Peningkatan Produktivitas	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasik	Total
< 20	8.3	54.5	47.1	32.2	35
20.1-50	61.1	27.3	20.5	19.3	32.9
50.1-100	25	9.1	23.5	41.9	24.6
>100.1	5.6	9.1	8.8	6.4	13.7
Total	100	100	100	100	100
Rata-rata	52.6	38.87	44.01	74.33	52.1
Min-Maks	11.12	0-200	0-150	0-500	0-500

Peningkatan produktivitas akan meningkatkan pendapatan IRT peserta binaan. Akan tetapi, terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi peningkatan produktivitas dan pendapatan. Kendala yang dialami IRT peserta pendampingan dipengaruhi berbagai faktor yang menunjang proses produksi maupun di luar proses produksi. Tabel 93 menyajikan sebaran IRT menurut kendala yang dihadapi IRT peserta pendampingan.

Tabel 93 Sebaran IRT (%) menurut kendala yang dihadapi

Jenis Kendala	Bandung	Cianjur	Ciamis	Tasik	Total
Keterampilan	2.9	0	0	9.3	3.4
Bahan baku	5.7	2.9	2.9	2.3	3.4
Hutang	0	0	0	2.3	0.7
Kesehatan	0	16.2	5.9	13.9	9.6
Kesempatan	0	0	0	2.3	0.7
Lokasi	0	5.8	0	0	1.4
Modal	82.9	57.1	63.7	37.2	58.5
Musim	0	0	2.9	0	0.7
Pemasaran	5.7	5.8	5.9	7	6.1
Peralatan	0	2.9	2.9	0	1.4
Persaingan	0	0	2.9	0	0.7
Pohon masih sewa	0	0	8.8	0	2
Produk usaha yang suka gagal	0	0	2.9	0	0.7
Tenaga kerja	0	5.8	2.9	0	2.1
Waktu kerja	0	0	0	25.6	7.5
Tidak ada kendala	2.9	2.9	0	0	1.4
Total	100	100	100	100	100

Lebih dari setengah (58.5%) IRT peserta pendampingan di 4 lokasi mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam usaha adalah faktor modal. Modal menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan produksi dan penghasilan. Bahkan sebanyak 82.9 persen IRT peserta pendampingan di Kabupaten Bandung mengatakan bahwa modal menjadi faktor penghambat meningkatnya pendapatan, begitu juga di lokasi lainnya, persentase terbesar yang menjadi kendala adalah faktor modal. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan oleh peserta pendampingan adalah bantuan modal usaha baik berupa bahan baku maupun alat produksi. Selain itu, sebanyak 25.6 persen IRT peserta pendampingan di Kabupaten Tasikmalaya yang mengatakan waktu yang menjadi kendala sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatan.

## VIII. STIMULAN KERJA BERSAMA

### 8.1. Stimulan Kerja Bersama

#### 8.1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat mengandung arti bahwa bencana menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama lingkungan di sekitar pemukiman tempat terjadi bencana. Selain itu, bencana mengakibatkan penurunan atau pengurangan sumber daya keluarga baik energi, materi, dan informasi. Saat bencana, waktu, energi, dan perhatian keluarga korban biasanya lebih tertuju kepada pemulihan ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga. Hal tersebut menyebabkan penurunan kebersihan, keindahan, sanitasi, dan hygiene lingkungan, demikian juga sarana prasarana di sekitar permukiman. Oleh karena itu, perlu dilakukan program kegiatan yang mampu merangsang usaha perbaikan dan pemeliharaan lingkungan yang diharapkan pula dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong antar keluarga yang berada pada wilayah terkena bencana. Kegiatan-kegiatan bersama perlu dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial yang dapat menjadi dukungan sosial bagi keluarga terkena bencana (Sunarti dkk 2010). Hal tersebut sesuai Armstrong, Lefcovitch, dan Ungar (2005) yang menyatakan bahwa dukungan sosial dapat melindungi individu dari efek stres yang berbahaya. Kegiatan tersebut berupa pemberian dana stimulan untuk kerja bersama yang sekaligus merupakan wahana penambahan pendapatan bagi warga masyarakat korban bencana yang dikenal dengan *cash for works* (CFW).

CFW merupakan kegiatan fasilitasi dana stimulan kerja bersama (gotong royong) memperbaiki atau memelihara lingkungan dan atau memperbaiki fasilitas umum dan atau infrastruktur pedesaan yang terkena bencana yang diawali dengan sosialisasi tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat, serta identifikasi masalah dan kebutuhan program. Pelaksana program CFW adalah masyarakat sekitar tempat bencana terjadi. Masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan CFW memperoleh penggantian korbanan waktu dan tenaga melalui upah kerja yang disesuaikan dengan harian orang kerja (HOK).

Thorburn (2009) menyatakan bahwa CFW memiliki tujuan dalam hal pemberian kesempatan kerja jangka pendek untuk menghasilkan pendapatan rumah tangga bagi keluarga. CFW bertujuan pula untuk merangsang kembali pembangunan infrastruktur pedesaan dan infrastruktur skala kecil lainnya yang diperlukan untuk kepentingan publik selama fase proses rehabilitasi pasca bencana. Selain itu CFW memiliki tujuan: (1) menjadi wahana yang dapat memberikan pendapatan tambahan bagi warga; sekaligus juga (2) memperbaiki sanitasi lingkungan dan sarana fasilitas umum yg rusak atau kurang berfungsi untuk kepentingan bersama, (3) meningkatkan atau memelihara kembali nilai

kebersamaan dan gotong royong pada masyarakat korban bencana, dan (4) mengurangi beban psikososial sesama korban gempa melalui wahana kerja bersama memperbaiki sanitasi lingkungan (Sunarti dkk 2010).

### **8.1.2. Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan**

Kegiatan CFW didesain sebagai stimulus bagi korban gempa untuk memperoleh tambahan pendapatan sekaligus melakukan perbaikan sanitasi dan fasilitas umum. Hasil identifikasi masalah dan kebutuhan di empat lokasi kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa terdapat beberapa tempat di lokasi pendampingan yang mengalami beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
  - a. Kondisi jalan setapak tanah ketika hujan menjadi terhambat dan berbahaya bagi masyarakat yang menggunakan jalan karena licin dan becek, sehingga perlu diperbaiki dan dibangun jalan setapak yang beralaskan semen (cor). Perbaikan jalan yang dilakukan memberi keamanan dan kenyamanan lebih bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan meskipun dimusim hujan.
  - b. Kondisi atap MCK Mushola yang rusak menghambat aktivitas MCK yang dilakukan di mushola, sehingga perlu dilakukan perbaikan atap mushola.
  - c. Kondisi tempat pembuangan sampah yang menggantung disebabkan oleh banjir bandang dan pembuangan sampah yang sembarangan, sehingga dilakukan pembersihan sampah yang menggantung untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.
  - d. Kondisi jembatan yang merupakan akses transportasi masyarakat kurang aman digunakan, sehingga perbaikan jembatan perlu dilakukan demi keamanan dan kelancaran akses transportasi masyarakat.
  - e. Kebersihan sanitasi dan kelayakan pakai toilet umum sangat kurang, yakni beberapa bagian pintu toilet berlubang sehingga mengurangi keamanan dan kenyamanan aktivitas yang dilakukan di toilet. Oleh karena itu, perlu untuk pintu toilet diperbaiki dan diganti.
  - f. Kondisi tempat wudhu yang masih berbentuk sumur perlu dibangun tempat wudhu yang lebih nyaman dan dapat diakses secara aman oleh masyarakat.
2. Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur
  - a. Kondisi jembatan yang merupakan akses transportasi masyarakat dalam keadaan sudah miring dan hampir putus, sehingga perlu dilakukan perbaikan jembatan demi kelancaran dan keselamatan perjalanan.
  - b. Kondisi sanitasi dan kebersihan MCK umum yang dimanfaatkan warga tidak memadai, sehingga perlu dibangun sarana MCK umum.

### 3. Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

- a. Kebersihan sanitasi posyandu yakni dinding rumah yang dijadikan tempat posyandu sudah kusam, sehingga harus di cat ulang.
- b. Kondisi jalan protokol Kecamatan yang sangat gersang dan ditambah cuaca panas, perlu dilakukan penghijauan jalan sebagai percontohan pentingnya penghijauan untuk menciptakan suasana jalan Kecamatan yang lebih hijau dan dijadikan contoh bagi penduduk yang berada disekitar jalan untuk melakukan penanaman pohon dan pemeliharaan.
- c. Kebersihan sanitasi poskamling yakni genteng poskamling yang bocor, cat kayu yang sudah kusam, dan genangan air di depan pos ketika hujan, sehingga perlu dilakukan perbaikan poskamling.
- d. Kondisi jalan yang kurang baik ketika musim penghujan yang seringkali becek, jalan di akses oleh banyak pihak untuk kegiatan ekonomi, dan jalan merupakan jalan kampung yang menyambungkan antara wilayah Desa ke Kecamatan, sehingga perlu dilakukan penggerosakan jalan.
- e. Sanitasi penerangan lingkungan di area pemakaman umum Desa Sindangsari menunjukkan suasana gelap gulita ketika malam menjelang dan kesan angker karena wilayah berada di sekitar area pemakaman, sehingga perlu dilakukan pemasangan lampu jalan.

### 4. Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

- a. Jarak MCK umum ke pemukiman warga sangat jauh dan MCK yang ada tidak memadai, sehingga perlu dibangun sarana MCK umum berikut tempat wudhu dan akses terhadap sumber air.

#### **8.1.3. Penetapan Kegiatan CFW**

Mengacu laporan Pendampingan Psikososial Ekonomi Pasca Bencana Gema Bumi 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat (Sunarti dkk 2010), terdapat beberapa pertimbangan dalam penetapan kegiatan yang disepakati sebagai kegiatan CFW. Pertimbangan tersebut pada mulanya merupakan prasyarat dari perencanaan program, namun pada umumnya disetujui oleh tokoh masyarakat setelah menimbang faktor pendukung dan pembatas dimana kegiatan akan dilaksanakan. Berikut adalah 10 dasar pertimbangan penetapan CFW yaitu :

1. Kegiatan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak.
2. Bukan kegiatan yang sudah disetujui dibiayai pemerintah atau pihak lainnya
3. Bukan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang besar yang membutuhkan dana banyak
4. Melibatkan wakil warga dan dilakukan musyawarah dalam penetapannya
5. Pelaksanaan kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak mungkin.
6. Kegiatan tersebut dapat membangkitkan kembali dan melestarikan swadaya dan jiwa-aktivitas gotong-royong serta kerukunan-kebersamaan warga desa

7. kegiatan yang direncanakan tidak akan merusak nilai-nilai kepedulian dan kegotong royongan masyarakat
8. kegiatan tidak akan menimbulkan masalah dan kecemburuan social
9. Volume kegiatan dan besarnya dana stimulan direncanakan secara rasional dan proporsional sesuai kebutuhan real di lapangan
10. Menghindari perbaikan untuk kepentingan individual, kecuali milik individu yang berfungsi pelayanan umum

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang disepakati bersama, baik karena usulan pemerintah terkait keunggulan dan keterbatasan kegiatan CFW yang diusulkan, maka kegiatan CFW yang disepakati untuk dilaksanakan adalah: (CEK NOMOR DAN POIN)

1. Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
  - a) Pembenahan Jalan di Mushola Dusun Lembang Desa Kiongroke RT 05/01 karena kondisi jalan setapak tanah ketika hujan menjadi terhambat dan berbahaya bagi masyarakat yang menggunakan jalan karena licin dan becek, sehingga perlu diperbaiki dan dibangun jalan setapak yang beralaskan semen (cor). Perbaikan jalan yang dilakukan memberi keamanan dan kenyamanan lebih bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan meskipun dimusim hujan.
  - b) Pembenahan atap MCK di Mushola Dusun Lembang Desa Kiongroke RT 05/01 karena kondisi atap MCK Mushola yang rusak menghambat aktivitas MCK yang dilakukan di mushola, sehingga perlu dilakukan perbaikan atap mushola.
  - c) Pembenahan Tempat Pembuangan Sampah di Dusun Bojongpulus Desa Banjaran Wetan RW 02 karena kondisi tempat pembuangan sampah yang menggunung disebabkan oleh banjir bandang dan pembuangan sampah yang sembarangan, sehingga dilakukan pembersihan sampah yang menggunung untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.
  - d) Perbaikan Jembatan Kampung Girang Desa Ciapus karena kondisi jembatan yang merupakan akses transportasi masyarakat kurang aman digunakan, sehingga perbaikan jembatan perlu dilakukan demi keamanan dan kelancaran akses transportasi masyarakat.
  - e) Perbaikan Pintu Toilet Kampung Girang Desa Ciapus karena kebersihan sanitasi dan kelayakan pakai toilet umum sangat kurang, yakni beberapa bagian pintu toilet berlubang sehingga mengurangi keamanan dan kenyamanan aktivitas yang dilakukan di toilet. Oleh karena itu, perlu untuk pintu toilet diperbaiki dan diganti.
  - f) Perbaikan Tempat Wudhu Kampung Girang Desa Ciapus karena kondisi tempat wudhu yang masih berbentuk sumur perlu dibangun tempat wudhu yang lebih nyaman dan dapat diakses secara aman oleh masyarakat.
2. Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

- a) Pembenahan Jembatan Gantung (Rawayan) Cisawer karena kondisi jembatan yang merupakan akses transportasi masyarakat dalam keadaan sudah miring dan hampir putus, sehingga perlu dilakukan perbaikan jembatan demi kelancaran dan keselamatan perjalanan.
  - b) Pembangunan MCK Umum Kp. Ciakar RT 02 RW 05 desa Girimukti karena kondisi sanitasi dan kebersihan MCK umum yang dimanfaatkan warga tidak memadai, sehingga perlu dibangun sarana MCK umum.
3. Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
- a. Pengecatan Posyandu di Desa Sindangsari karena kebersihan sanitasi posyandu yakni dinding rumah yang dijadikan tempat posyandu sudah kusam, sehingga harus di cat ulang.
  - b. Penghijauan Jalan di Sepanjang Jalan Kecamatan Banjarsari karena kondisi jalan protokol Kecamatan yang sangat gersang dan ditambah cuaca panas, perlu dilakukan penghijauan jalan sebagai percontohan pentingnya penghijauan untuk menciptakan suasana jalan Kecamatan yang lebih hijau dan dijadikan contoh bagi penduduk yang berada disekitar jalan untuk melakukan penanaman pohon dan pemeliharaan.
  - c. Perbaikan Poskamling di Desa Sindangsari karena kebersihan sanitasi poskamling yakni genteng poskamling yang bocor, cat kayu yang sudah kusam, dan genangan air di depan pos ketika hujan, sehingga perlu dilakukan perbaikan poskamling.
  - d. Penggerosakan jalan di Dusun Sindanghayu dan Sindangtawang Desa Sindanghayu karena kondisi jalan yang kurang baik ketika musim penghujan yang seringkali becek, jalan di akses oleh banyak pihak untuk kegiatan ekonomi, dan jalan merupakan jalan kampung yang menyambungkan antara wilayah Desa ke Kecamatan, sehingga perlu dilakukan penggerosakan jalan.
  - e. Pemasangan Lampu di Area Pemakaman Umum Desa Sindangsari karena sanitasi penerangan lingkungan di area pemakaman umum Desa Sindangsari menunjukkan suasana gelap gulita ketika malam menjelang dan kesan angker karena wilayah berada di sekitar area pemakaman, sehingga perlu dilakukan pemasangan lampu jalan.
4. Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
- a) Pembangunan MCK Umum, tempat wudhu, dan akses terhadap sumber air di Masjid At-Takwa di Desa Girimukti Sukajadi dilatarbelakangi jarak MCK umum, tempat wudhu, dan akses terhadap sumber air ke pemukiman warga sangat jauh, sehingga sarana tersebut perlu dibangun.

#### **8.1.4. Perencanaan dan Perhitungan Kebutuhan**

Perencanaan kegiatan CFW melibatkan berbagai pihak yang ada di tempat pelaksanaan CFW berlangsung untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Pola proses perencanaan kegiatan CFW di empat lokasi pendampingan relatif sama, yaitu ketua RT dan para tokoh masyarakat bermusyawarah dengan masyarakat

tentang rencana teknis dan kebutuhan-kebutuhan pada hari pelaksanaan CFW. Demi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan CFW, Ketua RW atau RT dan tokoh masyarakat berperan langsung sebagai koordinator pelaksanaan CFW. Selain dikarenakan ketua RW merupakan pemimpin warga, hal ini juga dilatarbelakangi oleh ketua RW dianggap lebih mengetahui karakteristik masing-masing warga, sehingga pembagian tugas yang dilakukan akan menjadi lebih tepat dan pelaksanaan kegiatan CFW akan berjalan lebih natural dengan ketua RW sebagai pihak yang mengkoordinir. Meskipun demikian, hal-hal pengambilan keputusan terkait rencana teknis pelaksanaan tetap dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat.

Secara umum, musyawarah terkait perencanaan pelaksanaan CFW berjalan cepat dan lancar, sebab masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan masih memiliki kesadaran dan kepedulian untuk bekerja secara bergotong royong demi kepentingan bersama. Penentuan jumlah dan besarnya hari kerja dinyatakan dalam HOK (hari orang kerja) yang diberikan pada setiap kegiatan dihitung dan dipertimbangkan sesuai beban kerja yang dibutuhkan selama proses pekerjaan berlangsung. Perhitungan Kebutuhan hari orang kerja (HOK) dalam CFW untuk masing-masing lokasi kegiatan disajikan pada Tabel 94.

Tabel 94 Perhitungan kebutuhan Hari Orang Kerja (HOK) dalam CFW

No	Jenis Kegiatan CFW	HOK
A Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung		250
1	Pembenahan Jalan di Mushola Dusun Lembang Desa Kiongroke RT 05/01	
2	Pembenahan Atap MCK Umum di Mushola Dusun Lembang Desa Kiongroke RT 05/01	
3	Pembenahan Tempat Pembuangan Sampah di Dusun Bojongpulus Desa Banjaran Wetan RW 02	
4	Perbaikan Jembatan Kampung Girang Desa Ciapus	
5	Perbaikan Pintu Toilet Kampung Girang Desa Ciapus	
6	Perbaikan Tempat Wudhu Kampung Girang Desa Ciapus	
B Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur		250
1	Pembenahan Jembatan Gantung (Rawayan) Cisawer	
2	Pembangunan MCK Umum Kp. Ciakar RT 02 RW 05 desa Girimukti	
C Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis		250
1	Pengecetan dua Posyandu di Desa Sindangsari	
2	Penghijauan Jalan di Sepanjang Jalan Kecamatan Banjarsari	
3	Pbaikan Poskamling di Desa Sindangsari	
4	Penggerosokan jalan di Dusun Sindanghayu dan Sindangtawang Desa Sindanghayu	
5	Pemasangan Lampu di Area Pemakaman Umum Desa Sindangsari	
D Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya		250
1	Pembangunan MCK Umum, Tempat Wudhu, dan Akses terhadap Sumber Air Masjid At-Takwa di Desa Girimukti Sukajadi	

### 8.1.5. Pelaksanaan

Sub bab ini menguraikan pelaksanaan setiap kegiatan CFW di empat lokasi kegiatan. Secara teknis seluruh kegiatan CFW di seluruh lokasi dilaksanakan oleh masyarakat. Dokumentasi kegiatan disajikan pada Lampiran 10. Dalam pelaksanaan kegiatan CFW, masing-masing kegiatan memiliki proses yang serupa tapi juga berbeda menurut jenis kegiatan yang telah dipilih karena masing-masing kegiatan memiliki latar belakang kebutuhan dan tujuannya sendiri.

1. Kegiatan CFW di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dilaksanakan dalam beberapa jenis kegiatan yaitu;
  - a. Pembenahan jalan di Mushola Dusun Lembang Desa Kiongroke RT 05/01. Jalan yang awalnya beralaskan tanah dibenahi dan dijadikan jalan beralaskan semen (cor). Pembenahan jalan yang dilakukan memberi keamanan dan kenyamanan lebih bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan meskipun di musim hujan.
  - b. Pembenahan atap MCK Mushola di Mushola Dusun Lembang Desa Kiongroke RT 05/01 dilakukan dengan mengganti atap yang sudah sangat rusak dan bocor. Pembenahan atap yang dilakukan memberi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna mushola dalam melakukan aktivitas di MCK mushola.
  - c. Pembenahan tempat pembuangan sampah di Dusun Bojongpulus Desa Banjaran Wetan RW 02 dilakukan dengan membersihkan gunung sampah yang ada. Kondisi tempat pembuangan sampah yang menggunung mengganggu kesehatan, pemandangan, sanitasi, dan menyebabkan polusi udara di kampung sekitar pembuangan sampah. Pembenahan tempat pembuangan sampah melalui pembersihan sampah menjadikan lingkungan sekitarnya lebih baik kebersihannya sehingga berdampak positif bagi kehidupan sehat masyarakat.
  - d. Perbaikan jembatan Kampung Girang Desa Ciapus. Kondisi jembatan dengan beberapa tiang pagar yang tidak ada menjadikan jembatan kurang aman diakses oleh kendaraan. Perbaikan jembatan yang dilakukan adalah dengan membangun kembali tiang-tiang yang sudah lepas dan menambah kerapatan jarak antar tiang demi keamanan dan kelancaran akses transportasi masyarakat. Dengan demikian, akses melalui jembatan menjadi lebih nyaman dan aman.
  - e. Perbaikan pintu toilet Kampung Girang Desa Ciapus. Kondisi pintu toilet umum terdapat beberapa bagian yang berlubang sehingga mengurangi keamanan dan kenyamanan aktivitas yang dilakukan di dalam toilet. Perbaikan pintu toilet dilakukan dengan mengganti pintunya dengan yang baru. Perbaikan pintu memberi kenyamanan dan keamanan bagi pengguna toilet.
  - f. Perbaikan tempat wudhu Kampung Girang Desa Ciapus dilakukan dengan membangun tempat wudhu. Tempat wudhu yang awalnya merupakan

sumur, kini dibangun menjadi tempat wudhu yang lebih nyaman dan dapat diakses secara aman oleh masyarakat. Tempat wudhu dibangun seperti tempat wudhu yang terdapat di mushola-mushola, yakni dibangun secara sederhana dengan lantai dan dinding keramik dan terdapat beberapa keran dengan sumber air sumur tempat masyarakat awalnya mengambil wudhu.

## 2. Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur

- a. Pembenahan Jembatan Gantung (Rawayan) Cisawer. Kondisi jembatan yang miring dan hampir putus dibenahi dengan pembangunan jembatan yang lebih baik, yaitu penguatan dasar dan rangka jembatan serta permukaan jembatan yang awalnya terdapat banyak lubang diganti dengan kayu yang lebih baik dan kuat. Perbaikan jembatan memberikan manfaat yang sangat besar yakni kelancaran dan keselamatan perjalanan bagi seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas melalui jembatan tersebut sebagai akses utama.
- b. Pembangunan MCK Umum Kp. Ciakar RT 02 RW 05 desa Girimukti. Pembangunan MCK umum dengan pendirian MCK yang memadai dari segi sanitasi, hygiene, kenyamanan, dan keamanan. MCK dibangun dengan dinding semen, lantai dan bak keramik, dan fasilitas WC yang baik.

## 3. Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

- a) Pengecetan dua Posyandu di Desa Sindangsari. Pengecetan ulang posyandu merupakan salah satu hal yang dilakukan demi perbaikan sanitasi posyandu sebagai sarana kesehatan.
- b) Penghijauan jalan di sepanjang jalan Kecamatan Banjarsari. Penghijauan jalan dilakukan dengan penanaman pohon di sepanjang jalan protokol. Kondisi jalan setelah aktivitas penghijauan menjadi lebih hijau, asri, dan indah. Penghijauan jalan bertujuan pula sebagai percontohan pentingnya penghijauan untuk menciptakan suasana jalan yang lebih indah dan motivasi dalam aktivitas penanaman dan pemeliharaan pohon.
- c) Perbaikan Poskamling di Desa Sindangsari. Perbaikan poskamling merupakan salah satu hal yang dilakukan demi perbaikan sanitasi poskamling. Hal dilakukan yakni perbaharuan genteng poskamling yang sudah bocor, pengecetan cat kayu yang sudah kusam, dan pembenahan pekarangan di depan poskamling yang sering tergenangi air ketika hujan.
- d) Penggerosokan jalan di Dusun Sindanghayu dan Sindangtawang Desa Sindanghayu dilakukan terutama demi keamanan perjalanan warga. Penggerosokan dilakukan dengan pemadatan dan pengerasan tanah yang sering menjadi genangan air. Penggerosokan jalan yang seringkali becek ketika hujan memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat yang mengakses jalan tersebut. Jalan menjadi lebih nyaman dan aman dilewati.

- e) Pemasangan lampu di area pemakaman umum Desa Sindangsari yang banyak dilalui warga. Pemasangan lampu di area pemakaman desa merupakan salah satu hal yang dilakukan demi perbaikan sanitasi lalu lintas masyarakat. Suasana gelap gulita dan angker ketika malam tidak perlu lagi dirasakan masyarakat yang melewati daerah tersebut.

#### 4. Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya

- a. Pembangunan MCK umum, tempat wudhu, dan akses terhadap sumber air Masjid At-Takwa di Desa Girimukti Sukajadi. MCK umum, tempat wudhu, dan akses terhadap sumber air dibangun dengan dinding dan lantai keramik, tempat wudhu dengan beberapa keran, dan WC yang memadai. Pembangunan sarana MCK umum memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

Tabel 95 Besarnya sumbangan dana stimulan dan masyarakat dalam Kegiatan CFW di lokasi kegiatan

No	Jenis Kegiatan CFW	Kontribusi (%)	
		Stimulan	Masyarakat
<b>A Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung</b>			
1	Pembenahan Tempat Pembuangan Sampah di Dusun Bojongpulus Desa Banjaran Wetan RW 02	35.3	64.7
2	Pembenahan Jalan di Mushola Dusun Lembang Desa Kiongroke RT 05/01	60.0	40.0
3	Pembenahan Atap MCK Umum di Mushola Dusun Lembang Desa Kiongroke RT 05/01	75.0	25.0
4	Perbaikan Jembatan Kampung Girang Desa Ciapus	73.9	26.09
5	Perbaikan Pintu Toilet Kampung Girang Desa Ciapus	83.3	16.7
6	Perbaikan Tempat Wudhu Kampung Girang Desa Ciapus	58.3	41.7
<b>B Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur</b>			
1	Pembenahan Jembatan Gantung (Rawayan) Cisawer	66.7	33.3
2	Pembangunan MCK Umum Kp. Ciakar RT 02 RW 05 desa Girimukti	30.23	69.8
<b>C Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis</b>			
1	Pengecetan Posyandu di Desa Sindangsari	100	0
2	Penghijauan Jalan di Sepanjang Jalan Kecamatan Banjarsari	48.4	51.6
3	Pebaikan Poskamling di Desa Sindangsari	85.7	14.3
4	Penggerosokan jalan di Dusun Sindanghayu dan Sindangtawang Desa Sindanghayu	66.7	33.3
5	Pemasangan Lampu di Area Pemakaman Umum Desa Sindangsari (NB. Bersamaan dengan pembabatan rumput)	100	0
<b>D Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya</b>			
1	Pembangunan MCK Umum Masjid At-Takwa di Desa Girimukti Sukajadi	88.4	11.6

### **8.1.6. Temuan dan Rekomendasi**

Berikut ini uraian temuan-temuan dalam pelaksanaan program CFW yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan program pendampingan aspek psikososial ekonomi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana pada lokasi dan keragaan sosial-ekonomi-budaya yang relatif sama di waktu yang berbeda. Pada dasarnya temuan-temuan tersebut menguatkan temuan dari kegiatan pendampingan psikososial korban bencana gempa di provinsi Jawa Barat (Sunarti dkk 2010).

Hasil elaborasi pelaksanaan program CFW di empat lokasi pendampingan ekonomi bagi korban gempa bumi menunjukkan bahwa :

1. Program CFW dimaknai sebagai kesempatan masyarakat untuk memperbaiki lingkungan
2. Program CFW dimaknai sebagai kesempatan membangun kebersamaan dan gotong royong warga masyarakat
3. Program CFW meningkatkan wewenang pemimpin formal terkecil di tingkat RT dan RW
4. Program CFW memunculkan kepemimpinan informal dan pemuda di masyarakat
5. Program CFW Berpotensi Meningkatkan atau Memelihara Modal Sosial
6. Program CFW memunculkan keinginan menyumbang dari warga masyarakat untuk melakukan kegiatan yang diyakini penting untuk masyarakat seperti perbaikan jembatan di Kampung Ciakar, Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur

Masyarakat di lokasi perdesaan yang jarang memperoleh program stimulan (Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Cisayong), lebih menghargai program dibandingkan masyarakat di wilayah perkotaan (Kecamatan Banjaran). Sehingga diperlukan pemilihan lokasi dan kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan program stimulant kerja bersama di Kecamatan Banjaran agar program yang direncanakan mencapai tujuan dan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat. Selain itu struktur ekonomi dan pekerjaan masyarakat juga menentukan kelancaran program CFW. Masyarakat yang pekerjaannya dominan sebagai PNS, pedagang, atau petani memiliki waktu tersendiri untuk melaksanakan program CFW.

Kelancaran program CFW juga ditentukan oleh partisipasi aktif pemimpin local (formal maupun informal), serta seberapa jauh pemimpin formal mengenal masyarakat dan wilayahnya. Tidak semua camat mengenal secara baik masyarakat dan wilayahnya, terutama bagi yang baru menduduki jabatan tersebut di wilayahnya, oleh karenanya, sekretaris kecamatan diharapkan bisa lebih mengetahui hal tersebut. Namun demikian, dalam penentuan pemilihan sasaran, diperlukan cross-check informasi dari beberapa sumber agar program dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut untuk mencegah

pertimbangan sepihak yang terkadang tidak sesuai dengan criteria dilaksanakannya program CFW.

Pelimpahan wewenang kepada pemimpin local untuk mengerjakan kegiatan CFW setelah disepakati ruang lingkup, besaran, dan hasil dari kegiatan, menyebabkan terjadinya komunikasi-koordinasi serta pengaturan yang disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan CFW ternyata mampu membangkitkan kepedulian masyarakat dan aparat untuk memperbaiki sanitasi lingkungan dan infrastruktur pokok (seperti bangunan MCK, sarana wudhu, tempat posyandu, dan tempat pengajian); dimana selama ini kurang memperoleh perhatian dan menjadi prioritas kegiatan pembangunan. Mekanisme tersebut juga menghindarkan kekhawatiran tidak memadainya dana “upah kerja” yang dapat mendatangkan kecemburuan social. Sosialisasi dan pendekatan yang memadai melalui system yang berlaku di masyarakat, ternyata dapat meningkatkan atau memelihara, atau memperbaiki modal sosial (*Social Capital*) yang sebetulnya selama ini telah melembaga; baik berupa gotong-royong, berupa partisipasi berkontribusi (tenaga, dan/atau materi) dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan aspek social bagi korban bencana harus dilakukan, karena masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan *me-recovery* secara mandiri.

Melihat hasil kegiatan CFW dalam memperbaiki sanitasi lingkungan, membangun kebersamaan, dan memperbaiki kepedulian serta gotong royong, membawa kepada upaya untuk mereplikasinya. Terdapat usulan dan harapan kegiatan sejenis diimplementasikan di wilayah lainnya. Bahkan setelah kegiatan selesai, para warga kembali merencanakan kegiatan serupa yang berasal dari kemampuannya sendiri.

## IX. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menguraikan kesimpulan kegiatan pendampingan psikososial ekonomi korban gempa bumi 2 September 2009 di empat kecamatan dari empat kabupaten korban bencana di Provinsi Jawa Barat serta rekomendasinya bagi penguatan komponen sistem penanggulangan bencana, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

### 9.1. Kesimpulan

1. IRT peserta kegiatan pendampingan dalam rangka pemulihan pasca gempa bumi merupakan IRT yang mengalami kerusakan dan kerugian akibat bencana (kecuali peserta pendampingan dari kelompok pemuda yang sengaja diikutsertakan untuk keberlanjutan program), dan merupakan IRT yang mengalami atau menghadapi berbagai permasalahan usaha sehingga membutuhkan pendampingan. Peserta pendampingan memiliki karakteristik sosial ekonomi menengah kebawah yang ditunjukkan oleh: (1) dua dari tiga IRT peserta pendampingan memiliki pendidikan rendah (<9 tahun), (2) sepertiganya mengalami penurunan pendapatan, dan hampir 60 persen suami telah menjalankan pola nafkah ganda, setengahnya memiliki pola pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, (3) masih terdapat setengahnya dari anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dan semua peserta (100%) mengakui bahwa biaya pendidikan mahal, (4) sebanyak 30 sampai 52 persen IRT peserta pendampingan telah melakukan coping strategi pengurangan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan.
2. Industri rumah tangga yang dibina termasuk usaha berskala mikro, yang sebagian besar masih dihadapkan pada berbagai kendala usaha dan memerlukan bantuan pihak lain dalam pengembangan usahanya. IRT peserta pendampingan memiliki masalah usaha yang beragam, bahkan terdapat banyak IRT peserta pendampingan yang menghadapi berbagai masalah bersamaan. Masalah yang dirasakan IRT yang paling banyak dihadapi adalah menyangkut modal usaha, pemasaran, dan teknik produksi. Sedangkan masalah manajemen, perizinan, kualitas produk, sanitasi, dan keamanan kerja merupakan masalah usaha yang seringkali tidak disadari oleh IRT peserta pendampingan.
3. Hanya sedikit Lembaga pembinaan usaha (PNPM Perdesaan, KUBe, LPDB KUMKM) dan lembaga permodalan di lokasi pendampingan, dan leboh sedikit lagi IRT (6%) yang mengaku memperoleh pembinaan secara insidental dari lembaga pembinaan usaha yang ada di lokasi pendampingan. Terkait bantuan peminjaman modal usaha, hanya 44 dari 148 IRT (30%) yang pernah memperoleh modal usaha dengan rata-rata pinjaman sebesar 3.7 juta rupiah untuk IRT pangan dan sebesar 1.2 juta rupiah untuk IRT non pangan. Hasil

pendataan menunjukkan sebagian besar IRT peserta pendampingan tidak mengetahui program pemerintah KUR (kredit usaha rakyat).

4. Aspek pembinaan dan pendampingan meliputi aspek organisasi, manajemen, permodalan, aspek produksi, dan pemasaran. Terkait dengan aspek produksi mengingat sebagian besar merupakan IRT pangan, materi pembinaan ditekankan pada penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) atau *Good Manufacturing Practices* (GMP). Pembinaan aspek CPPB meliputi: (1) lingkungan dan lokasi usaha (2) bangunan dan fasilitas unit usaha, (3) fasilitas dan kegiatan sanitasi (4) sistem pengendalian hama (5) higiene karyawan, (6) pengendalian proses, meliputi bahan baku, bahan tambahan pangan (BTP), diagram alir proses, kemasan, label, dan penyimpanan (7) manajemen Pengawasan, dan (8) pencatatan serta dokumentasi.
5. Pembinaan dan pendampingan pada aspek CPPB mendapat sambutan positif dari IRT peserta pendampingan, menumbuhkan kesadaran pentingnya penerapan CPPB, serta memahami akan manfaat dari penerapan CPPB baik bagi pengusaha sendiri maupun bagi konsumen. Penerapan CPPB oleh IRT merupakan prasyarat jaminan keamanan pangan yang dapat membantu meyakinkan konsumen sehingga memperluas pasar. Keinginan IRT untuk dapat menerapkan CPPB dalam kegiatan produksi cukup baik, hal ini dapat dilihat dari partisipasi IRT untuk ikut serta dalam pelatihan, melakukan perbaikan dan penataan bangunan tempat usaha, sanitasi tempat dan peralatan, pengendalian mutu serta perbaikan kemasan dan label produk. Terdapat perubahan atau perbaikan penerapan CPPB yang nyata setelah pendampingan. Pendampingan komponen CPPB yang sensitive terhadap biaya dan harga hendaknya harus dilakukan dengan persuasive dan metode penjelasan yang tepat.
6. Dana bantuan yang diberikan kepada IRT pangan peserta pendampingan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sesuai kebutuhan dan permasalahan usaha yang dihadapi (pembelian bahan baku oleh 78%, pembelian alat produksi oleh 55%, pembelian bahan penolong oleh 30%, perbaikan tempat usaha oleh 28%, pembelian bahan kemasan oleh 9%, dan alat kemasan oleh 5%). Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan kapasitas produksi 91% IRT dengan besaran peningkatan produktivitas yang bervariasi mulai dari 20 persen sampai lebih dari 100 persen.
7. Pendekatan, teknik, dan metode pendampingan yang dirancang dan diimplementasikan sesuai kondisi dan kebutuhan, menyebabkan pendampingan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat dapat mendorong perubahan dan perbaikan di berbagai aspek usaha. Selain dilakukan pelatihan, klinik usaha, pendampingan di lapang, juga dilakukan pendampingan yang bersifat khusus untuk mencari solusi yang bersifat khusus yaitu penanaman 4100 bibit aren kaung, pelatihan pembibitan  $F_0$  jamur, pembuatan mesin pengolahan limbah batok kelapa, dan pelatihan budidaya dan usaha gurame.

8. Kegiatan pendampingan berhasil meningkatkan pengetahuan, perbaikan manajemen dan teknik produksi, khususnya CPPB. Keberhasilan lainnya ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu: (1) terjadi peningkatan produktivitas usaha rata-rata sebesar 52 persen, (2) setelah pendampingan, seluruh IRT peserta memiliki *company profile*, sebagian besar memiliki struktur organisasi dan prosedur kerja, (3) terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 10 persen (49 orang, dari 488 orang menjadi 537 orang), dan (4) perluasan pemasaran melalui website yang memperomosisikan produk IRT peserta pendampingan dan yang secara khusus dibuat untuk masing-masing kabupaten, (5) terkait perizinan, terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya izin usaha, namun masih belum menjadi prioritas. Pendampingan berhasil memfasitasi kepemilikan HO/SITU (10 IRT), SIUP (8 IRT), TDP (10 IRT), TDI (1 IRT), NPWP (8 IRT), dan PIRT (8 IRT). Penambahan perizinan berasal dari tiga lokasi pendampingan kecuali Kabupaten Cianjur.
9. Secara umum kegiatan pendampingan memberikan dampak positif bagi pengusaha IRT antara lain adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tumbuhnya semangat berusaha, mendorong terciptanya pertukaran informasi dan jalinan kerjasama dari IRT yang dibina, tumbuhnya semangat kebersamaan dalam berusaha dan penanggulangan bencana.
10. Pembinaan pasca bencana terhadap industri rumah tangga sebagai salah satu pelaku ekonomi dapat memberikan *multiplier effect* terhadap kegiatan ekonomi lainnya di lingkungan IRT berada. Walau dalam skala terbatas, melalui pemulihan dan peningkatan kegiatan produksi IRT mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong tumbuhnya perdagangan dari aktivitas pengadaan bahan baku dan penjualan hasil produksi, serta peningkatan pendapatan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di wilayah IRT peserta pendampingan berada.
11. Program pendampingan memberi manfaat lain yaitu peningkatan kesadaran kepada para pejabat kecamatan untuk lebih mengenal masyarakat dan kegiatan ekonominya. Manfaat lainnya adalah terbangunnya komunikasi dan hubungan kerja antara pelaku usaha di tingkat kecamatan.
12. Program pemberian dana stimulant untuk penambahan pendapatan dan perbaikan lingkungan berhasil melakukan 15 kegiatan perbaikan fasilitas umum yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di empat lokasi pendampingan. Program tersebut juga menumbuhkan kebersamaan, gotong royong, serta kepemimpinan di masyarakat.
13. Agar hasil pendampingan dapat berkelanjutan, dilakukan beberapa upaya terminasi program pendampingan yang dimungkinkan yaitu melalui cara: (1) pelibatan pemuda sebagai peserta pendampingan, (2) wahana pemasaran melalui web site serta pihak yang mengelola selama tiga tahun setelah

kegiatan pendampingan, (3) pengembangan jejaring usaha, (4) penyerahan informasi *company profile* IRT peserta pendampingan kepada lembaga keuangan di lokasi pendampingan agar bisa ditindaklanjuti, (5) penyerahan laporan kegiatan khususnya *company profile* IRT peserta pendampingan kepada pejabat dan BPBD setempat untuk dapat digunakan dalam perencanaan program pembangunan regular.

## 9.2. Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil kegiatan ini ditujukan kepada empat pihak yaitu pihak pelaksana kegiatan pendampingan psikososial ekonomi pasca bencana, BPBD dan Instansi terkait di Lokasi Pendampingan, Instansi pemerintah yang berwenang melaksanakan penanggulangan bencana baik dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota, dan stakeholder penanggulangan bencana non pemerintah. Rekomendasi kepada instansi pemerintah penanggungjawab penanggulangan bencana mengacu kepada komponen sistem penanggulangan bencana.

### 1. Rekomendasi Bagi Pelaksana Program Pendampingan Psikososial Ekonomi Pasca Bencana

Mengingat pendampingan seringkali dilakukan dalam waktu yang terbatas, sementara banyak kendala di lapangan, dan pencapaian indikator program, maka terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian pelaksana program pendampingan psikososial ekonomi bagi korban bencana, yaitu hendaknya:

- Memperhatikan dan menggunakan beragam pendekatan, teknik, dan metode pendampingan supaya saling melengkapi dan menguatkan sehingga dapat mencapai tujuan program. Sebagai contoh, Proses pembinaan dan pendampingan IRT tentang CPPB perlu mempertimbangkan latar belakang dari IRT yang dibina mengingat tingkat pendidikan dan tingkat umur yang berbeda-beda. Penyampaian materi pembinaan CPPB melalui pendekatan personal, dengan mendalami permasalahan yang dihadapi oleh setiap IRT lebih memberi pengaruh positif bila dibanding dengan penyampaian materi dalam bentuk forum, dan akan lebih baik bila menggabungkan kedua pendekatan tersebut.
- Memilih dan melakukan pelatihan tenaga lapang yang memadai, mengingat keberhasilan program sangat berkaitan dengan kinerja tenaga pendamping di lapang.
- Merencanakan dan mempersiapkan program secara matang, termasuk koordinasi dengan pejabat daerah, khususnya terkait data dan penetapan sasaran. Dalam rangka pengembangan usaha kecil pembinaan terhadap IRT tentang cara produksi yang baik perlu terus dilakukan secara berkala agar secara bertahap IRT mampu menerapkan CPPB dalam proses

produksinya dengan baik. Program pembinaan yang dilakukan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah/kecamatan/desa atau instansi terkait sehingga kelanjutan program pembinaan yang dibutuhkan oleh IRT dapat berlanjut.

## **2. Rekomendasi Bagi BPBD Kabupaten dan Instansi Terkait di Lokasi Pendampingan**

BPBD Kabupaten tempat dilaksanakannya kegiatan pendampingan diharapkan dapat melanjutkan pembinaan kepada IRT peserta pendampingan baik melalui program yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan sektor terkait dan pihak kecamatan.

### **Pembinaan Lanjutan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung**

- Untuk aspek legal, terdapat peningkatan IRT yang memperoleh izin usaha, namun perlu pendampingan agar semua IRT memiliki aspek-aspek legal terutama aspek legal PIRT bagi industri rumah tangga pangan sehingga bisa memperlancar pemasaran karena adanya jaminan PIRT bagi konsumennya.
- Untuk aspek-aspek organisasi dan manajemen, semua IRT sebanyak 36 IRT sudah mendapat pendampingan sehingga semua sudah memiliki *company profile*, misi dan struktur organisasi, namun perlu pembinaan lebih lanjut dalam pembuatan prosedur kerja (*job description*).
- Untuk aspek tenaga kerja, sudah banyak perbaikan dan penataan meskipun belum semua IRT melakukannya, namun perlu pendampingan lebih lanjut terutama dalam hal rencana pelatihan tenaga kerja, aturan upah atau gaji dan aturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*).
- Pembinaan yang perlu dilanjutkan adalah pembinaan atau pelatihan khusus yang sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan setiap IRT, seperti contohnya IRT kerupuk kulit yang masih memerlukan pelatihan khusus pengolahan kulit yang baik, pengolahan limbah, dan pemasaran produk kerupuk kulit agar usahanya lebih meningkat. Selain itu dibutuhkan program berkelanjutan dan mengikutsertakan IRT lebih banyak agar semuanya mendapat bantuan pembinaan serta pameran produk yang dibina agar produk lebih dikenal masyarakat. Pembinaan yang diperlukan adalah pelatihan, pemasaran, modal, bantuan peralatan produksi, dan perizinan.

### **Pembinaan Lanjutan di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis**

- Aspek legal masih belum dianggap penting oleh IRT peserta pendampingan di Kecamatan Banjarsari, sehingga perlu pembinaan lanjutan agar IRT minimal mendapatkan HO/SITU, SIUP dan NPWP.
- Pendampingan pada aspek organisasi dan manajemen menghasilkan perubahan dimana semua IRT memiliki *company profile*, misi, struktur organisasi dan prosedur kerja (*job description*). Pembinaan lebih lanjut yang

- diperlukan adalah pelatihan bagaimana mengoptimalkan aspek-aspek organisasi dan manajemen tersebut untuk kemajuan usahanya.
- Pendampingan pada aspek tenaga kerja menghasilkan semua IRT menjadi memiliki aturan sistem upah atau gaji, aturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*), dan rencana pelatihan tenaga kerja. Pembinaan lebih lanjut untuk aspek tenaga kerja adalah optimisasi aturan-aturan tersebut dan perbaikan-perbaikan seandainya diperlukan.
  - Pembinaan yang diperlukan oleh industri rumah tangga di kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis adalah kemasan, sanitasi dan higienitas, pemasaran, permodalan, manajemen dan kewirausahaan.

### **Pembinaan Lanjutan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya**

- Perlu sosialisasi lebih lanjut pentingnya aspek legal serta bantuan pengurusan izin-izin bagi IRT seperti HO, SITU, SIUP, TDP dan PIRT. Aspek legal PIRT ini penting bagi IRT di kecamatan Cisayong karena banyaknya IRT kolontong dan opak sehingga bisa menembus pasar yang lebih baik.
- Pendampingan aspek organisasi dan manajemen, menghasilkan semua IRT memiliki *company profile* dan prosedur kerja (*job description*). Namun masih perlu pembinaan lanjutan terkait visi dan misi serta struktur organisasi karena belum semua IRT memilikinya.
- Walaupun tidak banyak namun terdapat penambahan tenaga kerja setelah pendampingan. Pembinaan lebih lanjut adalah agar semua IRT bisa memiliki aturan upah atau gaji, aturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dan rencana pelatihan bagi tenaga kerja.
- Pembinaan lanjutan yang diperlukan adalah pemasaran, produksi dan manajemen keuangan. Pembinaan yang diperlukan adalah pelatihan, bantuan pemasaran, kualitas produk, sanitasi dan lingkungan usaha, dan bantuan modal.

### **Pembinaan Lanjutan di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur**

- Aspek legal masih belum dianggap penting oleh IRT peserta pendampingan di Kecamatan Sindangbarang. Hal ini disebabkan lebih utama karena kondisi semua IRT dampingan di Kecamatan Sindangbarang bisa diklasifikasikan lebih sebagai pelaku usaha atau IRT hanya sebatas bertahan hidup (*survival economic strategy*). Sehingga perlu sosialisasi lebih lanjut pentingnya aspek legal dan program gratis aspek legal bagi IRT minimal HO, SIUP dan NPWP.
- Pendampingan membantu semua IRT menjadi memiliki *company profile*, visi dan misi IRT, struktur organisasi dan prosedur kerja (*job description*). Pembinaan lebih lanjut dalam aspek organisasi dan manajemen adalah pelatihan bagaimana mengoptimalkan aspek-aspek organisasi dan manajemen tersebut untuk kemajuan usahanya.

- Pembinaan lebih lanjut dalam aspek tenaga kerja adalah dorongan penerapan aturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dan rencana pelatihan tenaga kerja.
- Pembinaan lanjutan yang diperlukan IRT adalah peningkatan keahlian, pengembangan usaha (pemasaran dan inovasi), dan peningkatan kualitas produk serta pengemasan. Pembinaan tersebut diperlukan karena kecenderungan masyarakat hanya mengikuti masyarakat yang lainnya yang memiliki usaha yang dapat dikatakan maju.

### **3. Rekomendasi Bagi BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat**

- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan salah satu tahap PB oleh karenanya terkait dengan ketangguhan sistem PB sebagai sistem pengaturan yang menyeluruh tentang kelembagaan, penyelenggaraan, tata-kerja dan mekanisme serta pendanaan dalam PB, yang ditetapkan dalam pedoman atau peraturan dan perundangan. Untuk itu rekomendasi kepada BNPB dan BPBD Provinsi untuk menguatkan seluruh komponen sistem penanggulangan bencana meliputi aspek: (1) hukum, peraturan dan perundangan; (2) kelembagaan, (3) perencanaan, (4) penyelenggaraan PB, (5) pendanaan, dan (6) Iptek.
- Penguatan dalam sub sistem kelembagaan terkait optimalisasi kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung-jawab unsur Pengarah dan hubungan dan tata-kerja BNPB dan BPBD.
- Penguatan dalam sub sistem pendanaan diantaranya mekanisme pencairan dana DIPA (APBN/APBD) serta optimalisasi penggalangan dana yang bersumber dari masyarakat.
- Penguatan pada sub sistem penyelenggaraan tahap pasca bencana serta sosialisasi, kerjasama dan koordinasi dengan sektor teknis terkait pelaksanaan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan dan pendanaan.
- Optimalisasi sumberdaya penyelenggara penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang berasal dari Lembaga Usaha, Lembaga Internasional, Lembaga Masyarakat Sipil, Akademisi, dan Media Massa.
- Penguatan komponen pendidikan dan pelatihan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk perluasan sosialisasi dan edukasi kebencanaan dan penanggulangannya kepada berbagai lapisan masyarakat. Demikian pula dalam penyusunan standar modul pelatihan manajemen dan pelatihan manajer dan teknis penanggulangan bencana.
- Mengingat besarnya kerusakan dan kerugian akibat bencana serta sulitnya pemulihan psikososial ekonomi korban bencana, maka perlu pengembangan Iptek terkait penanggulangan bencana, khususnya dalam aspek psikososial ekonomi seperti teknologi pangan untuk bantuan darurat (bergizi, praktis, mudah pendistribusian, dan tahan lama).
- Rekomendasi khusus kepada BPBD Provinsi Jawa Barat untuk: (1) meningkatkan kapasitas SDM BPBD Provinsi dalam penguasaan ruang

lingkup dalam komponen sistem PB, khususnya peraturan dan panduan-panduan dalam PB (2) meningkatkan kapasitas SDM BPBP Provinsi dalam penguasaan keluasan dan kedalaman program yang dimungkinkan dikembangkan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, (3) meningkatkan kapasitas SDM BPBD Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait penguasaan ruang lingkup sistem penanggulangan bencana, (4) menjalin kerjasama yang lebih erat dengan sektor-sektor penyelenggaraan program agar pembinaan lanjutan kepada korban pasca bencana dapat diakomodir dalam program sektor teknis secara regular, (5) bersama-sama dengan BPBD Kabupaten/kota menyiapkan data-data yang menentukan kelancaran pelaksanaan program penanggulangan bencana, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, (6) menjalin kerjasama yang lebih erat dengan stakeholder PB lainnya seperti Perguruan Tinggi, media, LSM, dan swasta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

- Rekomendasi khusus kepada BPBD Kabupaten untuk: (1) meningkatkan kapasitas SDM terkait ruang lingkup PB, khususnya ruang lingkup program pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, (2) penguasaan dan penyediaan data dan informasi wilayah kerjanya, khususnya mengenai wilayah rawan bencana, karakteristik sosial ekonomi masyarakat, dan potensi kelembagaan sosial dan potensi ekonomi lokal, (3) berkomunikasi, berkolaborasi, berkoordinasi, dan bekerjasama dengan berbagai sektor terkait dalam penyelenggaraan program PB, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

#### **4. Rekomendasi Bagi Stakeholder Penanggulangan Bencana non Pemerintah**

Mengingat luas dan beragamnya aksi dan komponen sistem penanggulangan bencana, maka diharapkan stakeholder penanggulangan bencana lainnya seperti Perguruan Tinggi, LSM, Media, dan Swasta dapat turut serta dalam rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak, khususnya dalam aspek psikososial ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Anonim. 2008. Peraturan Kepala BNPB No 11 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Anonim. 2008. Peraturan Pemerintah No 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Barker, Justin. 2004. Importance of Entrepreneurship. <http://www.yeabiz.com>. [8 April 2011]
- Benson ,Twigg J, Rossetto T. 2007. Tools for Mainstreaming DRR: Guidance Notes for Development Organizations. Provention Consortium. Geneva-Switzerland
- International Recovery Platform. 2005. Intervention Strategy for Sustainable Livelihood Recovery and Selected Case Studies. Knowledge for Recovery Series Info Kit Livelihoods 4.
- Prahalad, C.K. 2005. The Fortune at The Bottom of The Pyramid. New Jersey: Warthon School Publishing.
- Re ´gnier, P. 2007. From emergency relief to livelihood recovery Lessons learned from post-tsunami experiences in Indonesia and India. Disaster Prevention and Management 17, 3, 410-429.
- Resosudarmo, BP. Sugiyant, C. Kuncoro, A.2008.Livelihood Recovery after Natural Disasters and the Role of Aid: The Case of the 2006 Yogyakarta Earthquake. The Arndt-Corden Division of Economics Research School of Pacific and Asian Studies ANU College of Asia and the Pacific.
- Sunarti, E. 2010. Program Pemberdayaan dan Konseling Keluarga. dalam Sulaeman, Sumarti, Diah K.P. (editor). Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga: Bekal Mahasiswa Kuliah Kerja Profesi. Bogor. IPB Press.
- Sunarti, E. dkk. 2010. Penilaian Kerusakan dan Kerugian serta Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat.
- Sunarti, E. dkk. 2010. Laporan Pendampingan Psikososial Ekonomi Pasca Bencana Gema Bumi 2 September 2009 di Provinsi Jawa Barat. Bogor. Pusat Studi Bencana. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Institut Pertanian Bogor.
- Thorburn, Craig. 2009. Livelihood recovery in the wake of the tsunami in Aceh. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 45: 1, 85 – 105.
- Twigg J. 2007. Characteristics of a Disaster-Resilient Community. A Guidance note for the DFID Disaster Risk Reduction.
- USAID & Mercy Corps Southern Somalia Livelihoods Recovery Program. 2009. USAID & Mercy Corps Southern Somalia Livelihoods Recovery Program (SSLRP) Final Program Report. USAID from The American People and Mercy Corps.
- Zeng, M. 2010. The Livelihood Recovery Project in Sichuan, China Employment situation in Qingping after the mudslide of 13 August 2010. ILO.